



MW

35.000

UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW – FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT



PT PLN (Persero)
Electricity for a Better Life

LAPORAN KEBERLANJUTAN 2015 SUSTAINABILITY REPORT





35.000

**UNTUK PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN**

35.000 MW - FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Program Pembangkit 35.000 MW, dengan area pembangunan tersebar di seluruh wilayah Nusantara, merupakan wujud tekad kami untuk mendukung pembangunan bangsa, mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pendapatan

The 35,000 MW Power Plant Development Program, with construction areas scattered across the entire archipelago, is a manifestation of our determination to support the nation's development, to encourage equitable development and to reduce the income gap.

Kekurangan tenaga listrik, sebagai salah satu infrastruktur dasar, merupakan salah satu prasyarat bagi diperolehnya hasil pembangunan perekonomian bangsa yang optimal. Kekurangan pasokan listrik dan keandalan sistem transmisi dan distribusinya akan membuatnya berperan sebagai pendukung utama peningkatan laju pertumbuhan perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi yang optimal pada akhirnya akan membuat kesejahteraan masyarakat dan harkat bangsa meningkat. Satu kondisi yang akan semakin membuat seluruh komponen bangsa lebih memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar. Mengingat demikian besarnya peran tenaga listrik dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan bangsa, kami bertekad membangun kekurangan pasokan tenaga listrik bagi seluruh warga masyarakat.

Program Pembangkit 35.000 MW, dengan area pembangunan tersebar di seluruh wilayah Nusantara, merupakan wujud tekad kami untuk mendukung pembangunan bangsa, mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Lebih dari itu, meningkatnya penggunaan teknologi ramah lingkungan dan sumber energi terbarukan akan membuat infrastruktur ketenagalistrikan Indonesia mengeluarkan emisi karbon yang semakin rendah untuk setiap kilowatt tenaga listrik yang dihasilkan sehingga semakin ramah lingkungan.

Dengan seluruh benefit yang mengiringi pelaksanaan pembangunannya, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan, kami bertekad mensukseskan Program Pembangkit 35.000 MW – untuk mendukung pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

An adequate supply of electrical power, as a basic infrastructure, is one of the prerequisites to obtaining optimum national economic development. An adequate electrical power and a reliable transmission and distribution system play a major role in supporting accelerated economic growth.

Optimal economic growth will ultimately improve public welfare and the dignity of the nation. This condition will increasingly result in every component of the nation becoming more concerned with environmental sustainability. Given the magnitude of the role of electrical power in public life and the development of the nation, we are determined to develop a sufficient supply of electricity for all of society.

The 35,000 MW Power Plant Development Program, with construction areas scattered across the entire archipelago, is a manifestation of our determination to support the development of the nation, to encourage equitable development and to reduce the income gap. Moreover, the increased use of environmentally friendly technologies and renewable energy sources will cause Indonesia's electricity infrastructure to emit lower carbon emissions for each kilowatt of electricity produced, thus becoming more environmentally friendly.

With all the benefits that accompany the implementation of this development program from the economic, social and environment aspects, we are determined to succeed with The 35,000 MW Power Plant Development Program – to support sustainable national development.

BIDANG EKONOMI

ECONOMY ASPECT



MENJADI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

- ↳ Mendukung penguatan daya saing nasional melalui kecukupan ketenagalistrikan.
- ↳ Meningkatkan tingkat keandalan listrik untuk mendorong dan menunjang proses kegiatan ekonomi masyarakat.
- ↳ Penyebaran proyek 35.000 MW. merefleksikan pemerataan pembangunan ekonomi.
- ↳ Mendorong pengembangan industri ketenagalistrikan nasional melalui kandungan produk lokal.
- ↳ Menekan biaya pokok penyediaan dan menekan alokasi subsidi listrik.
- ↳ Kontribusi Langsung berupa pembayaran deviden dan pajak ke pemerintah.

BEING THE LOCOMOTIVE FOR ECONOMIC GROWTH

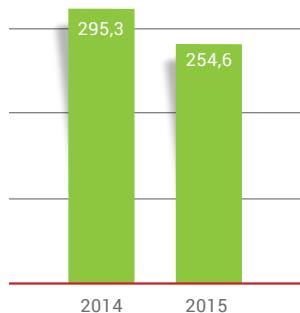
- ↳ Strengthening national competitiveness by providing sufficient electricity.
- ↳ Improving electricity reliability to drive and support the process of local community economic activity.
- ↳ The distribution of 35,000 MW related projects reflects equitable economic development.
- ↳ Encouraging the national electrical power industry through local product content.
- ↳ Reducing the basic cost of production and the electricity subsidy allocation.
- ↳ Contributing directly to the government with tax and dividend payments.

MENDISTRIBUSIKAN NILAI PEROLEHAN DAN MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI

DISTRIBUTING OBTAINED ECONOMIC VALUE AND SUPPORTING ECONOMIC GROWTH

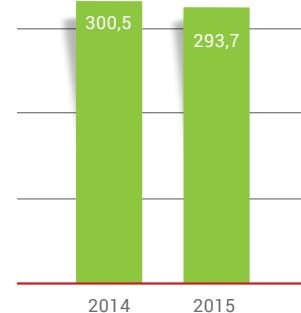
Perolehan Nilai Ekonomi (Rp triliun)

Obtained Economic Value
(Rp trillion)



Pendistribusian Nilai Ekonomi (Rp triliun)

Total Distribution of Economic Value (Rp trillion)



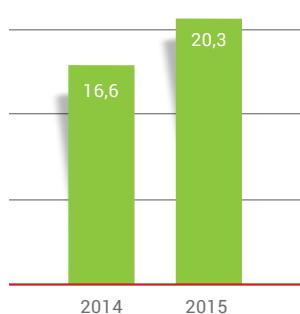
Distribusi Nilai Ekonomi untuk Pemasok (Rp triliun)

Economic Value Distributed to Suppliers (Rp trillion)



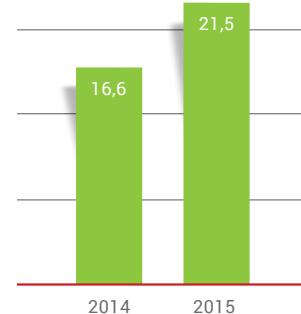
Distribusi Nilai Ekonomi untuk Karyawan (Rp triliun)

Economic Value Distributed to Employees (Rp trillion)



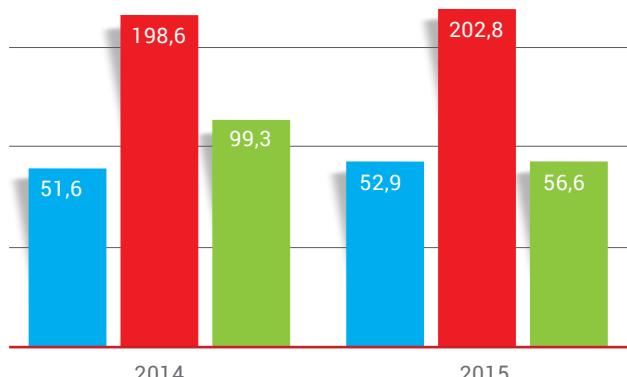
Bunga Pinjaman Penyandang Dana (Rp triliun)

Interest Paid to Funders (Rp trillion)



MENINGKATKAN KAPASITAS DAN VOLUME PENJUALAN LISTRIK, MENURUNKAN SUBSIDI LISTRIK IMPROVING POWER CAPACITY AND SALES VOLUME, DECREASING ELECTRICITY SUBSIDY

Kapasitas, Volume Penjualan Listrik dan Nilai Subsidi
Electrical Power Capacity, Sales Volume and Subsidy Value



- Penambahan jumlah pelanggan 6,4% sehingga tingkat rasio elektrifikasi menjadi 88,3%.

- Peningkatan perekonomian daerah melalui perluasan kerjasama dengan mitra kerja lokal.

- Mendukung pertumbuhan industri kelistrikan melalui penerapan ketentuan konten lokal.

- Customer numbers increased 6.4% leading to an electrification ratio of 88.3%.

- Local economies improved through the expansion of cooperation with local business partners.

- Supporting growth in the electrical power industry by imposing provisions requiring local content.

- Kapasitas Terpasang (TW) National Installed Capacity (TW)
- Volume Penjualan (ribu GWH) Sales Volume (thousands GWH)
- Nilai Subsidi Subsidy Value (Rp trillion)

BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

SOCIAL AND COMMUNITY ASPECT



Rp36,85 miliar
billion

Total Dana Program Pengembangan Masyarakat
Total Community Development Program

AKTIF MENINGKATKAN KUALITAS
KEHIDUPAN MASYARAKAT DALAM BIDANG
LINGKUNGAN, KESEHATAN, SPIRITAL, DAN
PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM SOSIAL
KEMASYARAKATAN.

ACTIVELY IMPROVING THE QUALITY
OF PEOPLE'S LIVES THROUGH
SOCIAL PROGRAMS RELATED TO THE
ENVIRONMENT, HEALTH, SPIRITUALITY AND
EDUCATION.

↳ **Menyalurkan Dana Program**

Pengembangan Masyarakat melalui Bina Lingkungan yang mencakup 7 bidang, total dana Rp36,85 miliar, yakni:

- ↳ **Bencana Alam**, total dana Rp341,50 juta.
- ↳ **Bantuan Pendidikan dan Pelatihan**, total dana Rp15,89 miliar.
- ↳ **Bantuan Kesehatan**, total dana Rp2,67 miliar.
- ↳ **Bantuan Sarana Ibadah**, total dana Rp2,62 miliar.
- ↳ **Bantuan Pelestarian Alam**, total dana Rp1,07 miliar.
- ↳ **Bantuan Sarana dan Prasarana Umum**, total dana Rp5,65 miliar.
- ↳ **Bantuan Pengentasan Kemiskinan**, total dana Rp8,62 miliar.

↳ Funds were disbursed for the Community Development Program through Community Stewardship, encompassing 7 aspects, totaling Rp36.85 billion, for:

- ↳ Natural Disasters, total funding Rp341.50 million.
- ↳ Education and Training, total funding Rp15.89 billion.
- ↳ Health, total funding Rp2.67 billion.
- ↳ Worship Facilities, total funding Rp2.62 billion.
- ↳ Environmental Conservation, total funding Rp1.07 billion.
- ↳ Public Facilities and Infrastructure, total funding Rp5.65 billion.
- ↳ Poverty Alleviation, total funding Rp8.62 billion.



BIDANG KETENAGAKERJAAN

EMPLOYMENT ASPECT



**KEGIATAN PERUSAHAAN MAMPU
MENYERAP TENAGA KERJA DI SELURUH
DAERAH OPERASIONAL PERUSAHAAN**

- ↳ Mendorong Peningkatan Lapangan Kerja
Realisasi pembangunan proyek
35.000 MW mampu menyerap tenaga kerja
lokal langsung minimal 650.000 pekerja
dan menyediakan kesempatan kerja tidak
langsung hingga 3 juta orang pekerja.

**THE COMPANY'S ACTIVITIES PROVIDE
EMPLOYMENT IN ALL ITS OPERATIONAL
AREAS**

- ↳ Boosting employment Realization of the
35,000 MW program will provide direct
employment for local labor totaling at
least 650,000 people and provide indirect
employment opportunities for up to 3
million people.

**PERUSAHAAN MENERAPKAN PRAKTIK
PENGELOLAAN TENAGA KERJA MODERN**

- ↳ Mengembangkan dan mengintensifkan *Knowledge Management*.
- ↳ Melakukan peninjauan kinerja terhadap seluruh karyawan.
- ↳ Melaksanakan perbaikan dan penyesuaian paket remunerasi.

**THE COMPANY APPLIES MODERN
EMPLOYMENT PRACTICES**

- ↳ Developing and intensifying Knowledge Management.
- ↳ Reviewing the performance of all employees.
- ↳ Improving and adjusting remuneration packages.



BIDANG TATA KELOLA

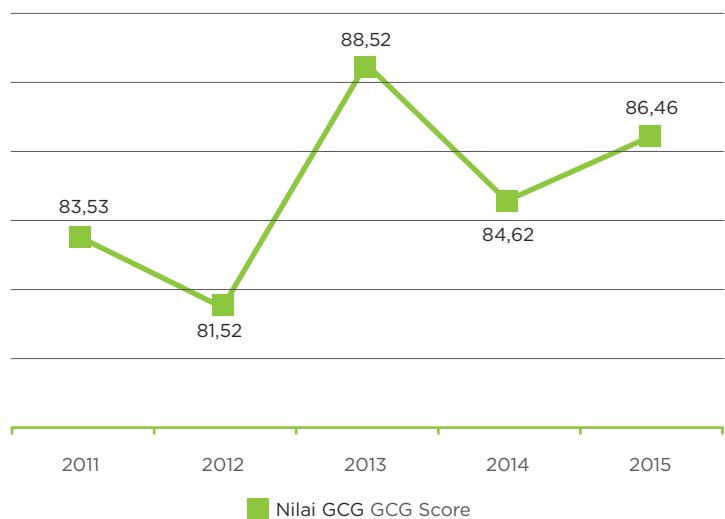
GOVERNANCE ASPECT



KONSISTENSI DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS
PENERAPAN TATA KELOLA
MEMBUAT NILAI ASESMEN KUALITAS
PENERAPAN GCG KEMBALI
MEMBAIK.

CONSISTENCY IN IMPROVING
QUALITY OF GOVERNANCE MADE
THE ASSESSMENT VALUE OF GCG
IMPLEMENTATION TO BE BETTER.

Nilai Asesmen GCG
GCG Assessment Score



PROGRAM “PLN BERSIH, NO SUAP” SEMAKIN DIAKUI DAN DIAPRESIASI KALANGAN INDEPENDEN.

PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI IMPLEMENTASI SISTEM WHISTLEBLOWING DI SELURUH JAJARAN PLN DALAM MENCEGAH TINDAKAN FRAUD DAN KORUPSI.

MULAI MENGINISIASI PENERAPAN KONSEP RISK BASED AUDIT DALAM PENGELOLAAN DAN MITIGASI RISIKO UTAMA PERUSAHAAN.

THE “PLN BERSIH, NO SUAP” (CLEAN PLN, NO BRIBERY) PROGRAM IS INCREASINGLY RECOGNIZED AND APPRECIATED BY INDEPENDENT PARTIES.

INCREASINGLY EFFECTIVE AND EFFICIENT IMPLEMENTATION OF THE WHISTLE BLOWING SYSTEM BY ALL OF PLN’S EMPLOYEES IS PREVENTING ACTS OF FRAUD AND CORRUPTION.

IMPLEMENTATION OF THE RISK BASED AUDIT CONCEPT HAS COMMENCED FOR THE MANAGEMENT AND MITIGATION OF THE COMPANY’S MAIN RISKS.



TANGGUNG JAWAB PRODUK

PRODUCT RESPONSIBILITY



88,11%

Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap kualitas layanan PLN sesuai survei mencapai rata-rata 88,11%, bahkan mencapai 95,58% di beberapa daerah.

The Customer Satisfaction Index for the quality of service in PLN, according to surveys, was recorded at an average of 88.11%, even reaching 95.58% in some areas.

PENAMBAHAN JUMLAH PELANGGAN
6,4% SEHINGGA RASIO ELEKTRIFIKASI
MENINGKAT MENJADI 88,3%.

MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN
DENGAN PENERAPAN KONSEP “LAYANAN
TANPA SEKAT” DENGAN DUKUNGAN SISTEM
TEKNOLOGI INFORMASI.

CUSTOMER NUMBERS INCREASED
6.4% LEADING TO AN IMPROVED
ELECTRIFICATION RATIO OF 88.3%.

IMPROVING SERVICE QUALITY THROUGH
THE “SERVICE WITHOUT BARRIERS”
CONCEPT WITH THE SUPPORT OF THE
LATEST INFORMATION TECHNOLOGY
SYSTEMS.



BIDANG LINGKUNGAN

ENVIRONMENT ASPECT



✓ MENYERTAKAN PROGRAM PENILAIAN
PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
(PROPER) UNTUK PEMBANGKIT
KELOLAAN PLN

PROPER Hijau 2 pembangkit
PROPER Biru 47 pembangkit

✓ PARTICIPATING IN THE
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE
RATING PROGRAM (PROPER) FOR
POWER PLANTS MANAGED BY PLN

Green PROPER 2 power plants
Blue PROPER 47 power plants



- ↳ Meningkatkan volume penggunaan sumber energi terbarukan, meliputi Panas Bumi (PLTP), Bayu (PLTB), Surya (PLTS) dan Air (PLTA).
- ↳ Berpartisipasi aktif pada skema *Clean Development Mechanism* (CDM) dan *Verified Carbon Standard* (VCS), dan berhasil mendapatkan *Carbon Credit* untuk tiga pembangkit yang menggunakan sumber energi air (PLTA).
- ↳ Peningkatan volume penggunaan gas sebagai sumber energi yang lebih ramah lingkungan.
- ↳ Mulai merintis pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) berkapasitas hingga 50 MW dan meningkatkan intensitas pembangunan pembangkit menggunakan sumber energi terbarukan (EBT).
- ↳ Increasing the volume of renewable energy sources being used, including Geothermal Power Plant, Wind Power Plant, Solar Cell Power Plant and Hydro Power Plant.
- ↳ Actively participating in the Clean Development Mechanism (CDM) and the Verified Carbon Standard (VCS) schemes, and successfully obtaining Carbon Credits for three hydro power plants.
- ↳ Increasing the volume of gas used as it is a more environmentally friendly energy source.
- ↳ Initiating the development of wind power plants generating up to 50 MW and increasing the construction intensity of power plants driven by renewable energy sources.

RANGKAIAN PERISTIWA PENTING 2015

2015 EVENT HIGHLIGHTS

9 JANUARI JANUARY 2015**PLN dan PT LEN Industri (Persero) menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Surya Kupang**

PT PLN (Persero) and PT LEN Industri (Persero) signed the Power Purchase Agreement (PPA) of Kupang Solar Cell Power Plant with a capacity of 5 Megawatt peak (MWp). The project is located at Oelpuan Village, Central Kupang District, Kupang Regency, East Nusa Tenggara Province.

PLN and PT LEN Industry (Persero) signed the Power Purchase Agreement of the Kupang Solar Cell Power Plant

PT PLN (Persero) and PT LEN Industry (Persero) signed the Power Purchase Agreement (PPA) of Kupang Solar Cell Power Plant with a capacity of 5 Megawatt peak (MWp). The project is located at Oelpuan Village, Central Kupang District, Kupang Regency, East Nusa Tenggara Province.

13 FEBRUARI FEBRUARY 2015**PLN Bekerja sama dengan Kejaksaan Tangani Masalah Hukum Perdata**

PT PLN (Persero) and the Attorney General signed an agreement to settle civil law and state administration issues.

PLN and the Attorney General cooperation includes legal aids, considerations, and other actions which will be provided by the Attorney in order to recover and save PLN's money/property/assets and other issues of civil law and state administration sectors encountered by PLN.

4 MEI MAY 2015**Peluncuran "Program 35.000 MW Untuk Indonesia"**

President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo launched "A 35,000 MW Program for Indonesia" in Samas Beach, Bantul Regency, Daerah Istimewa Yogyakarta.

The President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo launched "A 35,000 MW Program for Indonesia" in Samas Beach, Bantul Regency, Daerah Istimewa Yogyakarta Province.

9 JULI JULY 2015

PLTS Daruba bekerja secara hybrida bersama PLTD Daruba memperkuat kelistrikan di Pulau Morotai, mampu memproduksi listrik rata-rata sebesar 200 kWp. Lokasi Pulau Morotai yang sangat strategis karena berdekatan dan perbatasan dengan Negara Filipina, maka Pulau Morotai akan mendapat bantuan program dari pemerintah dalam rangka Program Kelistrikan Kawasan Pulau Terluar dan Perbatasan berupa penambahan mesin pembangkit dengan kapasitas sebesar 2 MW.

Daruba Solar Cell Power Plant and Daruba Diesel Power Plant collaborated through a hybrid system to strengthen the power grid in Morotai Island which can produce energy at 200 kWp on average. The location of Morotai Island is very strategic because it is adjacent to the Philippines. For this reason, the Government supports this island by adding a generator machine with 2 MW capacity, as part of the Electricity System in Outermost Islands and Border Areas program.

7 AGUSTUS AUGUST 2015

Nota Kesepahaman Mengenai Panas Bumi

PLN melakukan penandatanganan nota kesepahaman mengenai panas bumi bersama dengan 5 pihak, yaitu: Pertamina Geothermal Energy (PGE), Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado dan Universitas Negeri Manado (Unima).

Dalam MoU yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun ini, masing-masing pihak sepakat untuk melakukan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang lain yang disepakati para pihak dalam rangka pengembangan sumber daya panas bumi di Sulawesi Utara.

PLN signed a Memorandum of Understanding (MoU) on geothermal energy along with five other parties, namely Pertamina Geothermal Energy (PGE), North Sulawesi Provincial Government, Universitas Gadjah Mada (UGM) in Yogyakarta, Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado and Universitas Negeri Manado (Unima).

Each party agreed to cooperate in the fields of education, research, community services and other fields agreed upon in order to develop geothermal resources in North Sulawesi under the MoU for the next three years.

19 AGUSTUS AUGUST 2015

PT PLN (Persero) menyepakati pembelian tenaga listrik dari pembangkit jenis Energi Baru dan Terbarukan/EBT dengan sejumlah *Independent Power Producer*/IPP dengan kapasitas total mencapai sebesar 622 MW. Hal ini menunjukkan kesungguhan PT PLN (Persero) dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam pengembangan energi baru dan terbarukan.

Adapun pembangkit EBT yang disepakati pembelian tenaga listriknya, adalah :

1. PLTA Batang Toru kapasitas 510 MW di Sumatera Utara;
2. PLTA Hasang kapasitas 3 X 13 MW di Sumatera Utara;
3. PLTB Sidrap kapasitas 70 MW di Sulawesi Selatan;
4. PLTS Gorontalo kapasitas 2 MWp;
5. PLTS Sumba Timur kapasitas 1 Mega Watt peak (MWp) di Nusa Tenggara Timur;

PT PLN (Persero) agreed to purchase New and Renewable Energy (EBT) power generators with a number of Independent Power Producers/ IPPs with a total capacity of 622 MW. This shows our serious dedication to support government policy to develop new and renewable energy.

The agreed purchase of EBT power generators are as follows:

- Batang Toru Hydro Power Plant with a capacity of 510 MW in North Sumatra;
- Hasang Hydro Power Plant with a capacity of 3 X 13 MW in North Sumatra;
- Sidrap Wind Power Plant with a capacity of 70 MW in North Sumatra;
- Gorontalo Solar Power Plant with a capacity of 2 MWp;
- East Sumba Solar Power Plant with a capacity of 1 MWp in East Nusa Tenggara;

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW – for Sustainable Development

28 AGUSTUS AUGUST 2015

Presiden Jokowi meresmikan Construction Kick-off Pembangunan PLTU Batang Jawa Tengah 2 x 1.000 MW dan Program Elektrifikasi 50 Lokasi di Pulau Terdepan dan Daerah Perbatasan.

Jokowi, President of Indonesia, inaugurated a Kick-off Construction of the Batang Steam Power Plant in Central Java with a capacity of 2 x 1,000 MW and Electrification Program in 50 locations in both larger islands and borderline areas.

4 SEPTEMBER 2015



Dukungan Penegak Hukum Bagi Proyek 35 Ribu MW

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Kepolisian RI Badrodin Haiti, dan Jaksa Agung HM Prasetyo, dengan tegas menyatakan akan mengawal PLN dalam mensukseskan Program 35.000 MW.

Luhut Binsar Panjaitan, Coordinating Minister for Political, Legal and Human Rights, Badrodin Haiti, National Police Chief, and HM Prasetyo, the Attorney General, firmly stated to oversee the progress and success of PLN 35,000 MW Program.

15 SEPTEMBER 2015



Penandatanganan Head of Agreement (HoA) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 500 MW

Perusahaan Energi Qatar, Nebras Power, menandatangani Head of Agreement (HoA) dengan Anak Perusahaan PLN, PT PJB, untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 500 MW. Penandatanganan yang diwakili oleh berlangsung di Qatar. Dalam acara tersebut hadir pula Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Direktur PLN Amin Subekti.

Nebras Power, a Qatari energy company, signed a Head of Agreement (HoA) with PLN Subsidiary Unit, PT PJB, to construct a 500 MW Fossil-fuel Power Plant. The signing of HoA took place in Qatar. President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo and PLN Director, Amin Subekti also attended the event.

7 OKTOBER OCTOBER 2015



PLN menggelar acara KNIFE 2015 (Knowledge, Norm, Innovation, Festival and Exhibition) dengan tema : Meningkatkan Semangat Berpikir Kreatif dan Inovatif untuk Mensukseskan Program 35.000 MW.

PLN held an event titled KNIFE 2015 (Knowledge, Norm, Innovation, Festival and Exhibition) with a theme: Enhancing Creative Thinking and Innovative Spirit to Ensure the Success of the 35,000 MW Program.

15 OKTOBER OCTOBER 2015

Direktur Bisnis Regional Jawa Barat, Nasri Sebayang didampingi Plt Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Muljo Adji, dan General Manager Unit Pembangkitan (UP) Cirata Wisrawan meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Cirata dengan kapasitas sebesar 1 MW di Purwakarta, Jawa Barat.

Regional Business Director for West Java, Nasri Sebayang, accompanied by the Acting President Director of PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Muljo Adji, and General Manager of Cirata Power Unit (UP), Wisrawan, inaugurated the Cirata Solar Power Plant (PLTS) with a capacity of 1 MW in Purwakarta, West Java.

29 OKTOBER OCTOBER 2015

Salah satu program Corporate Social Responsibility (CSR) PT PLN (Persero) yaitu Employee Volunteer Program (EVP), digelar secara nasional oleh semua unit PLN di Indonesia.

Sesuai dengan judul program, pegawai-pegawai PLN yang tergabung dalam Duta Muda Bersinar terjun langsung dalam menjalankan program EVP mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan. Hal ini dimaksudkan agar terjalin kedekatan antara pegawai PLN dengan sasaran program serta meningkatkan kepedulian dan rasa tanggung jawab yang besar kepada lingkungan.

Saat ini, Duta Muda Bersinar masih berfokus pada renovasi sekolah.

One of the Corporate Social Responsibility (CSR) programs of PT PLN (Persero) is the Employee Volunteer Program (EVP), which is run nationally for all PLN units in Indonesia.

In accordance with the program's title, PLN employees who are members of the Shining Young Ambassadors program were directly involved in running the EVP program from planning to implementation. This resulted in the PLN employees being an integral part, woven into the program objectives, as well as raising awareness and a sense of great responsibility for the environment.

Currently, the Shining Young Ambassadors are still focusing on school renovations.

30 OKTOBER OCTOBER 2015**PLN Beraksi : Aksi Sosial untuk Warga Rusun Marunda**

PLN memberikan bantuan kepada anak-anak yatim, siswa-siswi TPA/TPQ, dan nasabah aktif bank sampah yang berada di 11 Tower Rumah Susun Marunda melalui kegiatan bina lingkungan bertajuk PLN Beraksi (Bersih, Aktif, Sinergis)

Kegiatan PLN Beraksi terdiri dari beberapa aktivitas, yaitu sosialisasi dari Masyarakat Peduli Ciliwung (Matpeci) mengenai pengelolaan sampah rumah tangga kepada warga Rusun Marunda, sosialisasi bahaya korsleting listrik dari PLN Area Marunda, dan edukasi pemilahan sampah organik dan non-organik kepada anak-anak.

PLN provides assistance to orphans, TPA / TPQ students and customers of trash banks located in the 11 Apartment Towers of Marunda through community development activities titled PLN ACTS (Clean, Active, Synergistic).

PLN Acts consists of several activities, namely information dissemination from Ciliwung Community Care (Matpeci) regarding the management of household waste to the residents of Marunda apartments, disseminating information on the dangers of electrical short circuits from PLN Marunda, and providing education on sorting organic and non-organic trash to children.

30 OKTOBER OCTOBER 2015**Pengangkatan Anggota Direksi Baru PLN**

Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero) telah menyerahkan surat keputusan yang mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Direksi PT PLN (Persero) :

1. Muhamad Ali
2. Djoko Rahardjo Abu Manan
3. Machnizon
4. Haryanto W.S.

Appointment of New Directors to the PLN Board of Directors

The SOE Minister in his role as the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT PLN (Persero) has submitted a decree appointing the people named below as members of the PT PLN (Persero) Board of Directors:

1. Muhamad Ali
2. Djoko Rahardjo Abu Manan
3. Machnizon
4. Haryanto W.S.

27 NOVEMBER 2015**Bersama Berbagi 1000 Keceriaan Dengan Anak Yatim**

Sedikitnya 1.000 anak yatim dan dhuafa berkumpul di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta untuk menikmati beragam wahana wisata dan edukasi.

Mereka berasal dari 25 yayasan dan organisasi pengasuh anak yatim dan dhuafa se-Jabodetabek yang secara khusus diundang oleh PT PLN (Persero) untuk berbagi keceriaan dalam program bertajuk "Bersama Berbagi 1000 Keceriaan Dengan Anak Yatim", sebagai bagian dari rangkaian acara Hari Listrik Nasional (HLN) ke-70 tahun 2015. Melalui acara ini, Direksi PLN secara simbolis memberikan bantuan dana pendidikan kepada masing-masing anak yatim dan dhuafa dengan total nilai mencapai 500 juta rupiah.

Sharing 1,000 Joys With Orphans

At least 1,000 orphans gathered at Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta to enjoy a variety of tourism and educational rides.

The orphans were from 25 orphanages and organizations caring for orphans across Jabodetabek and were especially invited by PT PLN (Persero) to share the happiness in the program titled "Sharing 1,000 Joys With Orphans", as part of a series of celebrations for the 70th National Electricity Day in 2015. Through this event, the PLN Directors symbolically provided the orphans with educational scholarships totaling 500 million rupiah.

8 DESEMBER DECEMBER 2015

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, melepas langsung keberangkatan Kapal Marine Vessel Power Plant (MVPP) "Karadeniz Powership Zeynep Sultan" berkapasitas 120 MW dari Pelabuhan Nusantara Tanjung Priok menuju Amurang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.

Program ini merupakan salah satu upaya PLN untuk memperkuat pasokan listrik di beberapa lokasi di Indonesia, salah satunya di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo yang terhubung dalam sistem interkoneksi kelistrikan 150 kilo Volt (kV) Sulawesi Utara - Gorontalo (Sulutgo).

President of the Republic of Indonesia Joko Widodo was accompanied by PT PLN (Persero) President Director Sofyan Basir to visit the Marine Vessel Power Plant (MVPP) "Karadeniz Powership Zeynep Sultan", which has a 120 MW capacity, leaving from Tanjung Priok Nusantara Port to Amurang, South Minahasa, North Sulawesi.

This program is part of PLN's efforts to strengthen the power supply in several locations in Indonesia, including in North Sulawesi and Gorontalo, which are connected to the 150 kilo Volt (kV) North Sulawesi - Gorontalo (Sulutgo) electrical interconnection system.

22 DESEMBER DECEMBER 2015

PLN berhasil menyelesaikan penandatanganan kontrak-kontrak perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dan kontrak pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dengan jumlah 17.336 MW yang terdiri dari PPA sebesar 14.454 MW dan kontrak EPC sebesar 2.883 MW.

PLN successfully completed the signing of Power Purchase Agreements/PPAs and contracts for power plant construction in the 35,000 MW program for a total of 17,336 MW, comprised of PPAs for 14,454 MW and EPC contracts for 2,883 MW.

12 DESEMBER DECEMBER 2015

Dalam rangka memperingati Hari Nusantara, Corporate Social Responsibility (CSR) PT PLN (Persero) menggelar serangkaian kegiatan sosial, yaitu :

1. Festival Bandeng Mangrove di Desa Gununganyar Tambak, Surabaya.
2. Acara pesta rakyat sekaligus mengembangkan potensi "Wisata Berburu Madu Hutan Liar" di Sumbawa Besar, NTB. Hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan desa binaan.
3. Rumah Gemilang Indonesia (RGI) di Aceh, yang merupakan balai latihan kerja bagi mereka yang tidak mampu. Hal ini dilakukan untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Commemorating National Archipelago Day

In commemoration of Archipelago Day, the PT PLN (Persero) Corporate Social Responsibility (CSR) program held a series of social events, namely:

1. Bandeng Mangrove Festival in Gununganyar Tambak village, Surabaya.
2. Public party and development potential under "Hunting for Wild Forest Honey Tourism" in Sumbawa Besar, NTB. This was organized to develop a fostered village.
3. Construction of Rumah Gemilang Indonesia (RGI) in Aceh, a work training hall for marginalized people. This was organized to reduce unemployment and poverty.

PENGHARGAAN & SERTIFIKASI

AWARDS & CERTIFICATIONS



INDONESIA
GREEN
AWARDS
2015

PENGHARGAAN

Pada tahun 2015 PLN menerima berbagai penghargaan baik secara langsung maupun melalui unit bisnis, anak usaha maupun pejabat strategis dari berbagai lembaga independen.

Penghargaan yang diperoleh mencakup:

AWARDS

In 2015 PLN received numerous awards, both directly and indirectly through business units, subsidiaries and key officials from various independent institutions.

Awards received include:

No.	Penghargaan Awards	Acara Event	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1.	<ul style="list-style-type: none"> “Silver Winner” untuk kategori performa CSR dalam sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi PLN. “Silver Award Winner” in the CECT CSR AWARD 2015 in CSR Performance category (Infrastructure, Utility and Transportation). “Special Achievement” untuk kategori CSR Social Aspect of Society – Social Enterprise PLN. “Special Achievement” Award in the category of CSR Social Aspect of Society – Social Enterprise. 	CECT CSR AWARD 2015	17 Maret March 2015	Center for Entrepreneurship, Change and Third Sector (CECT) Trisakti University
2.	Atap Tanpa Sambungan Terpanjang The Longest Roof Without Connection	Penghargaan Nasional dan Dunia National and International Awards	26 Maret March 2015	Museum Rekor Indonesia (MURI) Guinness Book of Record
3.	Marketer of The Year 2015 sector infrastructure & utilities	Jakarta Marketing Week 2015	12 Mei May 2015	Raja Marketing Hermawan Kertajaya
4.	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Keanekaragaman Hayati Biodiversity Development Penyelamatan Sumber Daya Air Water Conservation Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan New and Renewable Energy Development The Best Indonesia Green Awards 2015 	Indonesia Green Awards 2015	04 Juni June 2015	LA TOFI School of CSR
5.	<ul style="list-style-type: none"> Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral 2015 2015 Dharma Karya Energy and Mineral Resources 	Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 70 Mining and Energy Resources 70-th Anniversary	29 September 2015	Menteri ESDM Ministry of Energy and Mineral
6.	<ul style="list-style-type: none"> Peringkat ketiga untuk kategori BUMN Ranked third in the category of public State Owned Enterprises (SOEs) 	Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Public Information Disclosure	15 Desember December 2015	Pemerintah Government

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW - for Sustainable Development

SERTIFIKASI [G4-15]

Sejak 2004, secara intensif PLN melaksanakan program sertifikasi Bidang Pembangkitan dan Pelayanan Pelanggan meliputi:

1. ISO 9001 tentang Pelayanan Pelanggan,
2. ISO 14001 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan,
3. SMK3,
4. Kelaikan Operasi,
5. Sertifikasi Kompetensi Operasi dan Pemeliharaan.
6. OHSAS untuk Keselamatan dan Kesehatan pegawai, dan
7. Sertifikasi dari Pihak Independen Lainnya.

Realisasi Kebijakan Sertifikasi tersebut membuat hampir seluruh Unit Bisnis (46 Unit Bisnis) dan Anak Usaha (10 anak usaha) telah memiliki sertifikasi standar dimaksud, dengan rekapitulasi sertifikasi untuk tahun 2015 sebagai berikut.

CERTIFICATIONS [G4-15]

Since 2004, PLN has intensively implemented a Power Plant and Customer Service Evaluation certification program including:

1. ISO 9001 about on Customer Services,
2. ISO 14001 about Management and Supervisory Environment,
3. SMK3,
4. Operation Eligibility Criteria,
5. Professional Certificate of Competency in Operation and Maintenance,
6. OHSAS(Occupational Safety and Health Administration), and,
7. Other Third Party Certifications.

The realization of Certification Policy made almost all Business Units (46 Business Units) and Subsidiaries (10 Subsidiaries) with a recapitulation of the 2015 as follows:

Jenis Sertifikasi Certifications	Keterangan Descriptions	2014	2015
ISO 14001:2004	Sertifikasi Manajemen Management Certificate	37	40
ISO 14001:2005	Sertifikasi Manajemen Management Certificate	2	2
ISO 9001 : 2000	Sertifikasi Manajemen Management Certificate	3	0
ISO 9001 : 2008	Sertifikasi Manajemen Management Certificate	100	161
ISO 31000		1	1
SNI 19-14001:2005	Sertifikasi Manajemen Management Certificate	2	2
OHSAS 16001 : 2007	Sertifikasi Manajemen Management Certificate	1	1
SMK3 & Zero Accident	Sertifikat Keselamatan Kerja dan Keamanan Lingkungan Occupational Safety and Environment Management Certificate	119	139
ISO 28000:2007 /SNI ISO 28000 : 2009	Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasokan Supply-Chain Security Management System	15	2
Sertifikat Pemeliharaan		5	
SLO	Sertifikat Laik Operasi Operational Adequacy Certificate	42	45
OHSAS 18001 : 2007	Sertifikasi Keselamatan Kerja dan Keamanan Lingkungan Occupational Safety and Environment Certificate	2	2
ISO / IEC 17021 : 2006	Sertifikasi Sistem Mutu Quality System Certificate	0	0
BSN 401-2000	Sertifikasi Produk Product Certificate	0	0
SNI/ISO /IEC 17201 :2008	Sertifikasi Manajemen Lingkungan Environmental Management Certificate	0	0
Jumlah Total		329	395



DAFTAR ISI

CONTENTS

2 IKHTISAR KEBERLANJUTAN SUSTAINABILITY HIGHLIGHT	64 PROFIL PLN PLN PROFILE	98 RESPON KAMI UNTUK MEMENUHI LISTRIK BERKELANJUTAN OUR RESPONSE TO MEETING DEMAND FOR SUSTAINABLE ELECTRICITY
2 Bidang Ekonomi Economy Aspect	66 Nama & Alamat Name & Address	102 Komitmen untuk Memenuhi Kebutuhan Listrik Seluruh Masyarakat Commitment to Meet The Entire Nation's Demand for Electricity
4 Bidang Sosial Kemasyarakatan Social and Community Aspect	68 Bidang Usaha Line of Business	105 Program Pembangkit 35.000 MW 35.000 MW Generation Program
6 Bidang Ketenagakerjaan Employment Aspect	70 Tonggak Sejarah Milestone	105 Distribusi Pelanggan Customer Distribution
8 Bidang Tata Kelola Governance Aspect	Visi, Misi, Moto dan Nilai Perusahaan	107 Keandalan dan Ketersediaan Reliability and Availability
10 Bidang Tanggung Jawab Produk Tanggung Jawab Produk	72 Vision, Mission, Motto and Values of The Company	109 Pengendalian Mutu dan Keamanan Produk Quality Control and Product Safety
12 Bidang Lingkungan Environment Aspect	74 Strategi Utama Perusahaan	109 Demand Side Management (DSM)
14 Rangkaian Peristiwa Penting 2015 Event Highlights	Major Corporate Strategies	110 Supply Side Management (SSM)
19 Penghargaan & Sertifikasi Awards & Certifications	76 Segmen Operasi Regional Regional Operating Segments	110 Program Peningkatan Kualitas Layanan Service Quality Improvement Program
24 SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA REPORT FROM THE BOARD OF COMMISSIONER	80 Skala Ekonomi Economic Scale	111 Optimalisasi Layanan Melalui Contact Centre PLN 123 dan Media Sosial Optimizing Service Through PLN 123 Contact Center and Social Media
32 SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS	81 Anak Perusahaan dan Asosiasi PLN's Subsidiaries and Associated Entities	111 Penanganan Keluhan Pelanggan Handling Customer Complaints
46 TENTANG LAPORAN INI ABOUT THIS REPORT	84 Struktur Grup Perusahaan Organizational Structure	113 Kampanye Hemat Energi Bagi Pelanggan Customer Energy Saving Campaign
48 Pedoman dan Standar Laporan Report Guidelines and Standards	86 Struktur Organisasi Structure of Organization	114 Survei Tingkat Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Survey
49 Ruang Lingkup dan Batasan Scope and Boundaries	88 MENINGKATKAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI INCREASING ECONOMIC GROWTH	115 Penelitian dan Pengembangan Listrik Indonesia Yang Berkelanjutan Research and Development for Sustainable Electricity In Indonesia
50 Proses Penetapan Aspek Material dan Isi Laporan	90 Kondisi dan Prospek Perekonomian	116 Tantangan Ke Depan Looking Ahead
50 Material Aspects and Report Content Determination Process	Economic Conditions and Prospects	
51 Hubungi Kami Contact Us	91 Kinerja Ekonomi PLN	
52 STRATEGI KEBERLANJUTAN SUSTAINABILITY STRATEGY	PLN's Economic Performance	
54 Pengelolaan Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan	91 Distribusi Nilai Ekonomi	
54 Managing Stakeholder Relations	Distribution of Economic Value Generated	
60 Analisa Materialitas Materiality Analysis	93 Kontribusi Pada Negara	
60 Pilar Strategi Keberlanjutan PLN 2015	Contributed to the State	
63 PLN's Sustainability Strategy Pillars In 2015	94 Subsidi Listrik Pemerintah	
	Government Electricity Subsidy	
	Mendorong Pertumbuhan	
	Perekonomian Daerah	
	Encouraging Regional Economic	
	Growth	
	Mendukung Pengembangan	
	Industri Ketenagalistrikan	
	Nasional	
	Supporting Development of The	
	National Electrical Power Industry	
	Mendukung Pengembangan	
	Kompetensi Ekonomi Nasional	
	Supporting The Development of	
	National Economic Competence	

121	MENDUKUNG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MASYARAKAT SUPPORTING COMPETENCY DEVELOPMENT IN LOCAL COMMUNITIES	156	MENGEMBANGKAN DAN MENGELOLA KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DEVELOPING AND MANAGING HUMAN RESOURCE COMPETENCY	184	Kesehatan Kerja Occupational Health
125	Dasar Hukum dan Kebijakan Pelaksanaan Program CSR - PKBL Basic Law and Policy Implementation for CSR - PKBL	158	Rencana Strategis Pengelolaan SDM Strategic Plan for HR Management	184	Penghargaan dan Sertifikasi OHS Awards and Certification
125	Alokasi Anggaran Budget Allocation	159	Road Map Pengelolaan Sumber Daya Manusia Human Resource Management Road Map	186	TATA KELOLA KEBERLANJUTAN YANG BERKUALITAS SUSTAINABLE GOVERNANCE
126	Program dan Pelaksanaan Program Programs and Program Implementation	161	Human Capital Management System	191	Asesmen Kualitas Penerapan GCG GCG Implementation Quality Assessment
126	Program Kemitraan Partnership Program	162	Program Pengembangan Kompetensi dan Karir Competency and Career Development Program	193	Pedoman, Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Governance Guidelines, Structure and Mechanism
127	Program Bina Lingkungan Community Stewardship Program	165	Pengembangan Knowledge Management Knowledge Management Development	194	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders
134	MEMBANGUN DENGAN MELESTARIKAN LINGKUNGAN BUILDING THROUGH ENVIRONMENTAL CONSERVATION	166	Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Human Resource Management Policy	195	Dewan Komisaris Board of Commissioners
136	Komitmen Terhadap Kelestarian Lingkungan Commitment to Environmental Sustainability	169	Paket Kesejahteraan Welfare Package	196	Direksi Board of Directors
137	Kebijakan Lingkungan Environmental Policy	172	Profil dan Distribusi Insan PLN PLN Workforce Profile and Distribution	197	Komite Dewan Komisaris Board of Commissioners' Committees
138	Program Pengelolaan Lingkungan Environmental Management Program	175	Peningkatan Budaya Unggul Improving A Culture of Excellence	198	Komite Direksi Board of Directors' Committees
143	Pengelolaan Sumber Energi Managing Energy Sources	176	KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY	199	Mekanisme Penyampaian Pendapat Kepada Direksi Mechanism to Submit an Opinion to The Board Of Directors
145	Pengendalian Emisi GRK Controlling GHG Emission	178	Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Health and Safety Policies	199	Kebijakan-Kebijakan Pokok Tata Kelola PLN PLN's Governance Policies
147	Pengelolaan dan Pengolahan Limbah Waste Management and Treatment	179	Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Health and Safety Committee	203	Mendukung Asosiasi Industri Ketenagalistrikan Supporting Electrical Power Industry
149	Partisipasi dalam Kegiatan Penghijauan dan Rehabilitasi Lingkungan Participation in Regreening and Rehabilitation of The Environment	180	Penerapan Kebijakan K3 OHS Policy Implementation	204	Kode Etik Berperilaku Code of Ethical Behavior
150	Operasional Ramah Lingkungan Environmentally Friendly Operations	181	Program K3 2015 2015 OHS Program	204	Budaya Perusahaan Corporate Culture
155	Biaya untuk Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Environmental Management and Conservation Expenses	181	Kinerja Keselamatan Kerja Occupational Safety Performance	206	REFERENSI INDEKS GRI G4 CORE & INDEKS EUSS GRI G4 REFERENCE INDEX CORE & EUSS INDEX
				211	LEMBAR TANGGAPAN ATAS LAPORAN KEBERLANJUTAN PLN 2015 RESPONSE SHEET ON PLN SUSTAINABILITY REPORT 2015

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW – for Sustainable Development



Hasan Bisri

Pelaksana Tugas Komisaris Utama
Acting President Commissioner

SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA

REPORT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

Kami meyakini keberlanjutan usaha tidak bergantung pada kinerja sesaat, melainkan pada kualitas hubungan timbal balik Perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan serta komitmennya dalam menyeimbangkan kinerja bidang ekonomi dengan kinerja di bidang sosial dan lingkungan. Oleh karenanya, sekalipun menghadapi kondisi usaha yang semakin penuh tantangan, tetap berkomitmen mendistribusikan sebagian perolehan ekonomi dalam rangka memenuhi harapan para pemangku kepentingan dan merealisasikan berbagai program tanggung jawab untuk memastikan pencapaian tujuan keberlanjutan.

We believe that business sustainability does not depend on the performance of a moment, but on the quality of the Company's mutual relationship with all stakeholders, as well as its commitment to balancing economic performance with performance in the social and environmental fields. Therefore, even in the face of increasingly challenging business conditions, we remain committed to distributing most of our economic gains to meet stakeholder expectations and realize various responsibility programs to ensure the achievement of sustainability goals.

Para Pemangku Kepentingan Yang Terhormat,

Mengawali sambutan ini, perkenankan kami, mewakili jajaran Dewan Komisaris menyampaikan Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa serta salam sejahtera untuk kita semua karena atas karuniaNya PT PLN (Persero) berhasil melalui tahun 2015 yang penuh tantangan dengan tetap mampu menjalankan kewajibannya untuk berupaya semaksimal mungkin memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan, dan menjalankan tugas negara yaitu melistriki seluruh wilayah Indonesia.

Respected Stakeholders,

Opening this message, please allow me, representing the Board of Commissioners, to render thanks for the Presence of God Almighty and to greet us all because, thanks to His blessings on PT PLN (Persero), we have managed to pass the challenging times of 2015 and remain capable of carrying out our obligation to do everything possible to meet the expectations of our stakeholders, and to carry out our national duty to provide electricity to the whole of Indonesia.

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW - for Sustainable Development

Sebagaimana diketahui bersama, kondisi usaha di tahun 2015 telah menjelma sebagai suatu periode penuh tantangan yang membuatnya dipandang sebagai tahun ujian bagi seluruh pelaku usaha, tidak terkecuali PLN. Namun belum seluruh pelaku usaha maupun pemangku kepentingan PLN menyadari, bahwa tahun 2015 juga merupakan tahun terakhir dari implementasi konsep *Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah diimplementasikan sejak tahun 2000. Sebelum konsep MDGs resmi berakhiri, hampir seluruh negara yang bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui konsep pembangunan berkelanjutan sebagai pengganti/penerus MDGs. Konsep pembangunan tersebut dinamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Berbeda dengan MDG yang awalnya hanya digagas oleh negara-negara dalam kelompok OECD (*The Organisation for Economic Co-operation and Development*) yang terdiri dari 34 negara maju dari kawasan Amerika, Eropa dan Australia serta beberapa negara Asia, SDGs digagas oleh hampir seluruh negara-negara anggota PBB. Selain itu, MDG hanya merumuskan 8 tujuan pembangunan berkelanjutan, sedangkan SDGs merumuskan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan skala global. Indonesia telah mengambil sikap tegas untuk mendukung dan mengimplementasikan berbagai program yang dapat dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan kondisi yang dihadapi dan kemampuan yang tersedia.

MAKNA KEBERLANJUTAN BAGI PLN

Dalam kaitan pembangunan berkelanjutan, mewakili Dewan Komisaris, Kami menyambut baik penyusunan Laporan Keberlanjutan PLN yang telah diterbitkan secara periodik sejak beberapa tahun lalu. Dalam pandangan Kami, PLN dapat menyampaikan berbagai program yang telah dilakukan dan dicapai dalam menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan, selain menyampaikan kinerja di bidang operasional dan finansial yang disampaikan secara mendetail dalam Laporan Tahunan yang wajib dibuat secara periodik pada akhir periode operasional.

Dengan area operasional yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, PLN memiliki kesempatan luas untuk berpartisipasi secara optimal dan dapat menunjukkan model pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari seluruh rakyat Indonesia, sebagai pelanggan, serta Pemerintah sebagai pemilik saham sekaligus regulator, dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam SDGs tersebut. Mempertimbangkan kondisi tersebut Dewan Komisaris perlu mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa, bagi PLN, keberlanjutan usaha tidak bergantung pada kinerja sesaat, melainkan

As we know, 2015 was a challenging period for business, making it a testing time for every company, not excluding PLN. However, not all businesses or PLN's stakeholders realized that 2015 was also the last year for the implementation of the Millennium Development Goals (MDGs) concept that had been implemented since 2000. Prior to the official end of the MDG concept, almost all member countries of the United Nations had agreed on the concept of sustainable development as a replacement / successor to the MDGs. This development concept was named Sustainable Development Goals (SDGs).

Unlike the MDGs, which were originally initiated only by the group of countries in the OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), which consists of 34 developed countries within the Americas, Europe and Australia, as well as some Asian countries, the SDGs were initiated by almost all the member states of the UN. In addition, the MDGs had only 8 sustainable development goals, while the SDGs comprise 17 sustainable development goals on a global scale. Indonesia has taken a firm stance to support and implement programs that can be undertaken to achieve sustainable development in accordance with the conditions it faces and the capabilities it has available.

THE MEANING OF SUSTAINABILITY TO PLN

In relation to sustainable development, representing the Board of Commissioners, We welcome the preparation of the PLN Sustainability Report, which has been regularly published for the last few years. In our view, PLN delivers a variety of programs that have been carried out and achieved to implement the concept of sustainable development, in addition to delivering the operational and financial performance presented in detail in the Annual Report, which must be periodically prepared at the end of operational periods.

With an operational area that covers the entire territory of Indonesia, PLN has had ample opportunity to participate optimally and can demonstrate a model of sustainable development that involves all its stakeholders, which comprise all the people of Indonesia as customers, and the Government as the shareholder as well as the regulator, to achieve the sustainable development objectives defined in the SDGs. Considering this condition, the Board of Commissioners needs to remind all of PLN's personnel that, for PLN, business sustainability does not depend on

pada kualitas hubungan timbal balik Perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan dan pada komitmennya dalam menyeimbangkan kinerja bidang ekonomi dengan kinerja di bidang sosial dan lingkungan.

KOMITMEN UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Pada bidang ekonomi, PLN telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui berbagai raihan utama.

Pertama, mempersiapkan dengan seksama dan mulai merealisasikan Program Pembangkit 35.000 MW untuk mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan listrik di masa mendatang, agar rasio elektrifikasi nasional meningkat. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan listrik di tahun 2015 telah diproduksi penjualan listrik sebesar 202.846 GWh, meningkat 2,1% dari tahun sebelumnya, serta menerapkan program efisiensi operasional secara optimal sehingga dapat menurunkan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik per kilo Watt hour (kWh) sebesar 8,48%, yang pada akhirnya mampu menurunkan kebutuhan subsidi Pemerintah dari sebesar Rp99,3 triliun di tahun 2014 menjadi sebesar Rp56,6 triliun di tahun 2015.

Kedua, PLN mampu menambah pelanggan sebesar 3,7 juta pelanggan, sehingga total pelanggan menjadi sebesar 61,2 juta pelanggan, dan mencatatkan angka rasio elektrifikasi nasional menjadi 88,3%. Lebih dari itu, PLN berhasil memperbaiki kualitas layanan, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil survei kepuasan pelanggan dengan nilai Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) nasional rata-rata sebesar 88,11%. Kondisi ini membuat PLN dapat menerapkan kebijakan pengurangan subsidi listrik melalui skema penyesuaian tarif listrik secara berkala tanpa ada gejolak yang berarti, yang memberi andil terhadap penurunan subsidi listrik dari Pemerintah.

Ketiga, PLN membukukan peningkatan pendapatan penjualan tenaga listrik sebesar 12,4% menjadi Rp209,8 triliun dari tahun 2014 yang sebesar Rp186,6 triliun, dan pada akhirnya mencatatkan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp15,6 triliun, naik 11,29% dari Rp14,0 triliun di tahun 2014 (setelah disajikan kembali). Selain itu, mencatatkan total laba komprehensif tahun berjalan hingga sebesar Rp658,3 triliun, serta meningkatkan ekuitas menjadi sebesar Rp848,22 triliun.

Keempat, PLN mampu mendistribusikan perolehan nilai ekonomi kepada pemasok hingga sebesar Rp225,7 triliun, kepada pegawai sebesar Rp20,3 triliun, kepada penyandang dana sebesar Rp16,6 triliun dan lain-lain sehingga seluruhnya berjumlah Rp293,7 triliun.

the performance of a moment, but on the quality of the Company's mutual relationships with all its stakeholders and its commitment to balance its economic performance with social and environmental performance.

COMMITMENT TO SUPPORT NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

In the economic field, PLN has demonstrated its commitment to supporting national economic development through various major achievements.

Firstly, the careful preparation and commencement of The 35,000 MW Power Plant Development Program to anticipate and meet the future demand for electricity, so that the national electrification ratio increases. Furthermore, to meet the demand for electricity in 2015, we produced 202,846 GWh of electricity sales, an increase of 2.1% from the previous year, and applied optimal operational efficiency programs that could reduce the Basic Cost of Power Production per kilowatt hour (kWh) by 8.48%, which in turn ultimately reduced the need for a government subsidy from Rp99.3 trillion in 2014 to Rp56.6 trillion in 2015.

Secondly, PLN was able to increase its customer numbers on the previous year by 3.7 million customers, bringing total customers to 61.2 million subscribers, and recorded a national electrification ratio of 88.3%. Moreover, PLN successfully improved service quality, as demonstrated by the results of a customer satisfaction survey that scored a national average on the Customer Satisfaction Index (CSI) of 88.11%. These conditions have resulted in PLN being able to implement the electricity subsidy reduction policy by adjusting electricity tariffs on a regular basis without any significant shocks, contributing to a decrease in the electricity subsidy provided by the Government.

Third, PLN recorded increased electricity sales revenue of 12.4%, up to Rp209.8 trillion from 2014's Rp186.6 trillion, and ultimately recorded a net profit for the year of Rp15.6 trillion, up 11.29% from Rp14.0 trillion in 2014 (after restatement). In addition, total comprehensive income recorded for the current year amounted to Rp658.3 trillion, while equity increased to Rp848,22 trillion.

Fourth, PLN was able to distribute economic value to suppliers of up to Rp225.7 trillion, to its employees of Rp20.3 trillion, Rp21.5 trillion to its funders and others, totaling Rp293.7 trillion.

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW - for Sustainable Development

Suatu angka yang cukup besar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan para pemangku kepentingan terkait dan mendorong tingkat perekonomian di sekitar wilayah pemangku kepentingan.

Kami menilai seluruh raihan di bidang ekonomi telah sejalan dengan beberapa tujuan global dalam konsep SDGs, yaitu : Tujuan ke-9 "Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Tujuan Ke 11 "Keberlanjutan Kota dan Komunitas; serta Tujuan Ke-8 "Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak". Oleh karenanya, Kami, Dewan Komisaris akan terus mengawal dan memastikan realisasi pembangunan Proyek Pembangkit 35.000 MW dapat selesai sesuai jadwal mengingat besarnya manfaat yang dapat diberikan, baik terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, maupun terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kami juga akan terus memastikan agar seluruh jajaran PLN dapat meningkatkan kualitas inovasinya, sehingga Perusahaan dapat beroperasi dengan semakin efisien dan pada akhirnya meningkatkan kinerja ekonominya di masa mendatang.

KOMITMEN BAGI KARYAWAN DAN MASYARAKAT SEKITAR

Kami memandang Manajemen PLN telah memahami harapan karyawan akan terciptanya kenyamanan dalam bekerja dan terjalinnya hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar, melalui realisasi berbagai program peningkatan kompetensi, menerapkan manajemen kinerja dan karir secara transparan. Manajemen PLN bahkan dengan seksama melakukan perundingan dengan wakil karyawan dalam Serikat Pekerja - PLN untuk menuangkan kesepakatan kerja timbal balik sebagai landasan pelaksanaan hubungan industrial yang saling menghormati dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB), menggantikan PKB periode tahun sebelumnya. Kami juga mengamati dengan seksama implementasi standar K-3 sesuai sertifikasi menurut OHSAS 18001:2007 dan Standar Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) untuk memastikan pelaksanaan tugas operasional yang aman dari risiko kecelakaan kerja dan pelaksanaan standar kesehatan yang mampu membuat kinerja karyawan PLN optimal, tanpa terganggu oleh masalah kesehatan.

Kami juga mengapresiasi upaya yang dilakukan jajaran Manajemen dalam memajukan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan mendapatkan akses penyambungan saluran listrik untuk berusaha, selain pelaksanaan berbagai program pengembangan masyarakat melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan fokus di bidang peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pendidikan.

This figure is significant enough to support the improved welfare of company stakeholders and to drive economic growth levels around stakeholder areas.

We evaluate that all these achievements in the economic field are aligned with several global objectives in the SDG concept, namely: the 9th objective "Industry, Innovation and Infrastructure; the 11th objective "Sustainability of Towns and Communities; and the 8th objective "Economic Growth and Decent Work". Therefore, we, the Board of Commissioners will continue to lead and ensure the realization of the 35,000 MW Power Plant Development Program can be completed on schedule given the enormous benefits that it can provide from the aspect of national economic growth, as well as to the welfare of surrounding communities.

We will also continue to ensure that all of PLN's personnel can improve the quality of innovation, so that the Company can operate more efficiently and ultimately improve economic performance in the future.

COMMITMENT TO EMPLOYEES AND LOCAL COMMUNITIES

We believe that the PLN management understands employee expectations for the creation of comfort at work and the establishment of harmonious relationships with surrounding communities through the realization of various programs to increase competencies and to implement performance and career management in a transparent manner. PLN's management carefully conducts negotiations with employee representatives from the PLN Labor Union to make reciprocal employment agreements the cornerstone of mutually respectful industrial relations, taking the form of a Collective Labor Agreement (CLA) that replaced the CLA for the previous period. We are also closely watching the implementation of OHS standards in accordance with certification under OHSAS 18001: 2007 and Occupational Health and Safety Management Standards to ensure that operational duties are implemented in a manner that is safe from the risk of workplace accidents and implements health standards for optimal employee performance at PLN, without the distraction of health issues.

We also appreciate the efforts made by the Management in advancing public welfare by easing access to power connections for business, in addition to the implementation of various community development programs through the Partnership and Community Stewardship Program with a focus on improving entrepreneurial competence and education.

Kami memandang seluruh program tersebut juga telah sesuai dengan beberapa rumusan tujuan global dalam SDGs, seperti: Tujuan Ke-1 "Tanpa Kemiskinan"; Tujuan Ke-3 "Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan"; Tujuan ke-4 "Pendidikan berkualitas" dan Tujuan ke-10 "Mengurangi Kesenjangan". Namun demikian Kami memandang sudah saatnya PLN, dengan jangkauan operasional yang meliputi seluruh wilayah Nusantara dan jumlah aset kelolaan yang telah menembus nilai lebih dari Rp1.200 triliun, memberi tempat bagi kaum penyandang disabilitas untuk turut berkarja sebagai karyawan PLN, pada bidang-bidang pekerjaan yang dapat dilakukan, seperti pada bagian administrasi dan layanan keluhan pelanggan. Kami memandang implementasi kebijakan tersebut akan lebih memperkuat komitmen PLN untuk terlibat dalam mencapai tujuan global dalam SDGs tersebut, khususnya dalam menerapkan pencapaian tujuan kesetaraan dan menghilangkan kemiskinan.

KOMITMEN PADA KELESTARIAN LINGKUNGAN

Pada aspek lingkungan, Kami memandang langkah Manajemen dalam menunjukkan komitmen mitigasi dampak lingkungan dari emisi CO₂ (Gas Rumah Kaca/GRK) dengan mengedepankan perbaikan kualitas bauran energi dalam proses pembangkitan listrik merupakan langkah yang tepat untuk dilakukan pada kondisi Indonesia saat ini. Dalam kaitan dengan hal tersebut, Kami akan mengawal dengan seksama realisasi rencana peningkatan proporsi penggunaan energi baru terbarukan, terutama PLTP dan PLTA dalam komposisi seluruh pembangkit listrik kelolaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN Tahun 2015-2024, yang menargetkan pencapaian minimal 15% di tahun 2024 mendatang, agar selaras dengan pencapaian tujuan global dalam SDGs (Tujuan Ke-7 "Energi bersih dan Terjangkau"). Kami yakin jika proporsi pembangunan pembangkit dengan sumber energi terbarukan tercapai maka intensitas emisi gas rumah kaca dari setiap kWh listrik yang dihasilkan akan berkurang dengan signifikan.

Sebagai bagian dari realisasi rencana tersebut, Kami mendukung penuh inisiatif manajemen untuk menyertakan hasil pengelolaan PLTP dan PLTA yang telah operasional ke dalam skema mekanisme pembangunan bersih (*Clean Development Mechanism/CDM*) maupun *Verified Carbon Standard (VCS)*. Hasil penjualan sertifikat *Carbon Emission Reduction (CERS)* dari skema tersebut, pada hemat Kami dapat digunakan sebagai komponen pengurang Biaya Pokok Penyediaan tenaga listrik, sehingga beban yang harus ditanggung konsumen untuk mendapatkan energi listrik yang bersih dan ramah lingkungan menjadi berkurang.

We consider that the entire program is also in line with several of the global SDG objectives, such as: the 1st objective "Without Poverty"; the 3rd objective "Good Health and Prosperity"; the 4th objective "Quality Education" and the 10th objective "Reducing Discrepancies". However, we also consider that it is time for PLN, with its operational reach that covers the entire archipelago and an amount of assets under management that already exceeds Rp1,200 trillion, to provide a place for people with disabilities to find employment as PLN employees, where possible, such as in administration and customer service. We view the implementation of this policy would further strengthen PLN's commitment to engage in achieving the global objectives of the SDGs, particularly in achieving the objectives of equality and eliminating poverty.

COMMITMENT TO ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

On the environmental aspect, we consider that the management's effort to demonstrate commitment to mitigating the environmental impact of CO₂ emissions (Greenhouse Gases/GHG) by promoting improvements to the energy mix quality in the power generation process are the right step to be carried out in Indonesia today. In connection with this, We will carefully lead realization of plans to increase the proportion of renewable energy, particularly Geothermal Power Plant and Hydro Power Plant, in the composition of all power plants under PLN's management as stated in the 2015-2024 PLN Electricity Supply Business Plan (RUPTL), which targets a minimum achievement of 15% in 2024 to align with achievements related to the global objectives in the SDGs (the 7th objective "Clean and Affordable Energy"). We believe that if the proportion of power plants being constructed utilizing renewable energy sources is achieved, then the intensity of greenhouse gas emissions per kWh of electricity generated will be reduced significantly.

As part of this plan realization, we fully support management initiatives to include the management of geothermal and hydropower plants that are operational in the Clean Development Mechanism (CDM) scheme and the Verified Carbon Standard (VCS) scheme. Proceeds from sales of Carbon Emission Reduction certificates (CERs) from these schemes from our savings can be used as a component to reduce the basic cost of energy production, so that the burden on consumers to obtain clean and environmentally friendly electrical energy can be reduced.

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW - for Sustainable Development

Selain itu, Dewan Komisaris mendukung penuh penyertaan setiap unit pengelola pembangkit disertakan dalam program PROPER secara berkala yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, mengingat dalam penilaian tersebut, program pengelolaan limbah dan peneraan kegiatan operasional ramah lingkungan menjadi salah satu butir penilaian utama. Kedua hal tersebut, yakni skema CDM/VCS dan program PROPER menurut Kami sudah sejalan dengan pencapaian Tujuan Global Ke-13 "Aksi Terhadap Iklim".

Kami juga mengamanatkan dan akan mengawasi dengan seksama agar dalam pembangunan dan pengoperasian pembangkit, digunakan teknologi terkini yang semakin ramah lingkungan sehingga PLN dapat turut berperan serta menjaga ekosistem di darat tidak tercemar oleh limbah abu pembakaran batubara dari PLTU skala menengah-besar yang tengah giat dilaksanakan.

PENUTUP

Kami meyakini bahwa komitmen PLN dalam menerapkan prinsip keberlanjutan didukung penuh oleh seluruh jajaran insan PLN, keluarga serta komunitas sekitar. Lebih dari itu, Kami juga meyakini bahwa dalam proses perancangan, pembangunan dan pengelolaan infrastruktur ketenegalistrikan tersebut, Manajemen beserta seluruh jajaran memegang teguh prinsip-prinsip pengelolaan yang baik sebagaimana ditekankan dalam lima prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Dua konsep yaitu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai SDGs dan implementasi praktik terbaik GCG, menurut Kami sejatinya akan memberi hasil yang saling melengkapi, yakni keberlanjutan usaha dan keberlanjutan bumi beserta isinya.

PLN sebagai pelaksana pembangunan ketenegalistrikan sejatinya selama ini telah menerapkan konsep MDGs yang juga diratifikasi oleh Pemerintah dan telah mencatatkan berbagai keberhasilan sebagaimana digariskan dalam MDGs dimaksud. Oleh karenanya, seiring dengan berakhirnya konsep MDGs dan dimulainya SDGs, PLN juga bertekad melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai dan mempertajam raihan kinerja untuk mencapai tujuan baru sebagaimana diuraikan dalam SDGs.

Dalam kaitan ini, Dewan Komisaris mengajak seluruh jajaran Manajemen beserta karyawan PLN dan juga seluruh pemangku kepentingan, untuk bekerja sama, menjalin komunikasi dan menyatukan upaya agar kita semua dapat menjalankan program pembangunan ketenegalistrikan khususnya dan pembangunan nasional, selaras dengan

In addition, the Board of Commissioners fully supports the inclusion of each power plant in the PROPER program that is regularly conducted by the Environment Ministry, given that through this assessment, waste management programs and environmentally friendly operational calibration activities are one of the main assessment items. Both of these, namely the CDM / VCS scheme and PROPER program are, in our opinion, in line with the achievements of the 13th Global Objective "Action for Climate".

We also mandate and will carefully oversee to ensure that the construction and operation of power plants uses the most up to date technology, which is more environmentally friendly, so that PLN can contribute and maintain land ecosystems that are not polluted by flue ash waste from the coal combustion process in medium-large scale power plants that are actively in operation.

CLOSING

We believe that PLN's commitment to applying the principle of sustainability is fully supported by all levels of PLN personnel, their families and the local communities. Moreover, we also believe that in the process of designing, building and managing the electrical power infrastructure, the management and all personnel uphold the principles of good governance as highlighted in the five principles of Good Corporate Governance (GCG).

Two concepts, namely the achievement of the sustainable development objectives in accordance with the SDGs and the implementation of good corporate governance best practices, in our opinion, will bring about complementary results, namely business continuity and the sustainability of the Earth and all its contents.

PLN, as the developer of electrical power, actually has been applying the MDG concepts, which were also ratified by the Government, and has recorded many successes outlined in the MDGs. Therefore, with the end of the MDG concept and the commencement of the SDGs, PLN remains determined to continue the successes that have been achieved and to sharpen performance achievements to achieve the new goals outlined in the SDGs.

In this regard, the Board of Commissioners invites the entire Management and all PLN's employees, as well as all the stakeholders, to work together, communicate and unite their efforts so that we all can implement electrical power development programs specifically and national

kaidah-kaidah tujuan pembangunan berkelanjutan yang tercakup dalam SDGs. Seperti telah disampaikan, SDGs adalah produk pemikiran seluruh negara anggota PBB, dan oleh karenanya sudah selayaknya kita dukung bersama. Perlu Kami ingatkan bahwa seluruh tujuan pembangunan skala global dalam SDGs hanya akan tercapai jika seluruh warga dunia menjalin kerja sama erat sebagaimana tercantum dalam Tujuan Global Ke 17 "Kemitraan untuk Mencapai Tujuan".

Akhir kata, atas kerja keras, dedikasi dan partisipasinya dalam mewujudkan komitmen dan kinerja keberlanjutan, Dewan Komisaris menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam dan penghargaan yang tinggi. Kami juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada para pemangku kepentingan lainnya, yang telah berpartisipasi dalam meningkatkan kinerja keberlanjutan PLN selama ini.

Memasuki tahun 2016 yang lebih memberi harapan akan adanya perbaikan kondisi usaha yang fundamental, Dewan Komisaris mengajak seluruh jajaran untuk bekerja lebih keras lagi dengan cara-cara yang cerdas, menjunjung tinggi integritas, sikap profesional serta berlaku bijaksana guna menangkap peluang pertumbuhan dengan berbekal lebih kuatnya kondisi fundamental Perseroan agar meraih kinerja yang semakin baik di masa mendatang.

Kami berharap kerja sama yang harmonis, yang juga melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dapat terus kita tingkatkan di masa mendatang, sehingga PLN dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada masyarakat Indonesia, kepada pembangunan negara dan bangsa agar sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya.

Jakarta, Mei 2016

development in harmony with the principles of the sustainable development objectives included in the SDGs. As noted, the SDGs are the brainchild of all the UN member states, and therefore it is proper that we stand together. We remind everyone that all the global-scale development objectives of the SDGs will only be achieved if all the citizens of the world work closely together, as noted in the 17th Global objective "Partnership to Achieve Goals".

Finally, for the hard work, dedication and participation in realizing sustainable commitment and performance, the Board of Commissioners expresses its deep gratitude and high appreciation. We also give our appreciation to the other stakeholders, who have participated in improving PLN's sustainability performance during this time.

As we enter 2016, which offers more hope for improved fundamental business conditions, the Board of Commissioners invites all PLN personnel to work harder in ways that are smart and uphold integrity, to have a professional attitude that is wisely applied in order to capture the growth opportunities that are buoyed by stronger fundamental corporate conditions to achieve a better performance in the future.

We hope that harmonious cooperation and the involvement of the community as the main stakeholder can continue to increase in the future so that PLN can provide an optimal contribution to the Indonesian people, to the development of the country and to the nation to align with other developed nations.

Jakarta, May 2016

Atas nama Dewan Komisaris PT PLN (Persero)
On behalf of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero)

**PELAKSANA TUGAS KOMISARIS UTAMA
ACTING PRESIDENT COMMISSIONER**



Hasan Bisri

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW – for Sustainable Development



Sofyan Basir
Direktur Utama President Director

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA

REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

Bagi PLN, keberlanjutan usaha akan semakin bermakna jika segala upaya yang telah dilakukan dalam menjalankan tugas pemenuhan kebutuhan listrik bagi seluruh lapisan masyarakat memberi dampak optimal bagi bertumbuhnya perekonomian nasional yang berkualitas, meningkatnya kesejahteraan dan terjaganya kualitas lingkungan di seluruh wilayah operasional, sesuai dengan standar yang berlaku secara global.

For PLN, business sustainability will be more meaningful if all the efforts that have been made to carry out the task of meeting the electricity demand for the whole of society can give optimal improvement for high quality national economic growth, increase prosperity and maintain the quality of the environment in all operational areas, in accordance with globally applied standards.

Para Pemangku Kepentingan Yang Terhormat,

Kembali Kami menyajikan Laporan Keberlanjutan untuk memberikan gambaran upaya yang telah dijalankan dan kinerja PLN dalam mendukung keberlanjutan bumi beserta isinya di tahun 2015. Kami membuat Laporan Keberlanjutan dengan mengacu pada sistem pelaporan GRI G4 dan EUSS Final Version.

Sebagaimana diketahui, bahwa kegiatan operasional Kami meliputi pembangunan dan pengoperasian pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik dari instalasi pembangkit ke instalasi pelanggan.

Respected Stakeholders,

Once again, We present our Sustainability Report to illustrate the efforts we have undertaken and PLN's performance in supporting the sustainability of the Earth and all its contents in 2015. This Sustainability Report has been prepared with reference to the GRI G4 reporting system and EUSS Final Version.

As it is known, our operational activities encompass the construction and operation of facilities for the generation, transmission and distribution of electricity from power plants to our customers.

Sebagai salah satu warga dunia yang juga berupaya menjalankan kaidah keberlanjutan dengan baik, Kami senantiasa berupaya mengimbangi upaya peningkatan kinerja bidang ekonomi dalam bentuk pemenuhan kebutuhan listrik melalui realisasi investasi berkelanjutan, dengan berbagai realisasi program kemasyarakatan dan pelaksanaan kegiatan operasional yang ramah lingkungan, sebagaimana kami jelaskan pada uraian berikut.

MENGATASI TANTANGAN PEMENUHAN KEBUTUHAN LISTRIK INDONESIA

[G4-1], [G4-2]

Agar dapat menyediakan tenaga listrik dengan harga yang terjangkau, maka setiap tahun Pemerintah mengalokasikan subsidi untuk menutupi selisih dari beban pokok penyediaan tenaga listrik (BPP) plus margin tertentu, dengan harga jual listrik yang harus dibayarkan oleh masyarakat, untuk setiap daya listrik yang dikonsumsi. Pemerintah berkepentingan untuk mengeluarkan subsidi ini seminimal mungkin. Oleh sebab itu, Kami senantiasa berupaya menjalankan kegiatan operasional pembangkitan dan penyaluran listrik se-effisien dan se-efektif mungkin agar mampu mengelola BPP pada tingkat yang paling optimal sehingga dapat mengurangi jumlah subsidi yang disediakan Pemerintah.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik tersebut, Kami membangun pembangkit listrik dengan menggunakan dua kelompok sumber energi, yaitu : (i) pembangkit yang menggunakan sumber energi fosil yang tidak dapat diperbaharui, yakni batubara, bahan bakar minyak dan gas alam dalam bentuk Pusat Listrik Tenaga Uap atau Gas Uap (PLTU/PLTGU); (ii) pembangkit yang menggunakan sumber energi yang dapat diperbaharui, yaitu air dalam bentuk Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA), panas bumi (Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi / PLTP), biodiesel (PLTU), surya (Pusat Listrik Tenaga Surya/PLTS) dan bayu (Pusat Listrik Tenaga Bayu/PLTB). Saat ini mayoritas pembangkit listrik milik Kami menggunakan energi fosil dengan persentase penggunaan batubara yang dominan, disusul minyak bumi (minyak diesel) dan gas alam.

Kami menyadari bahwa penggunaan 3 (tiga) jenis sumber energi fosil tidak terbarukan yakni gas alam, bahan bakar minyak dan batubara membuat bidang ketenagalistrikan yang dijalankan menjadi salah satu kontributor emisi gas CO₂ (salah satu komponen utama gas rumah kaca). Oleh karenanya kini dan kedepan, secara intens Kami membangun pembangkit yang menggunakan sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan, seperti panas bumi, air, bayu dan surya. Selain meningkatkan penggunaan teknologi pembangkit *supercritical* hingga *ultra supercritical* dan mengintensifkan penggunaan gas alam yang lebih ramah

As a citizen of the world that is also attempting to implement the rules of sustainability well, we constantly strive to balance our efforts to improve economic performance by fulfilling the demand for electricity through the realization of sustainable investment, various community programs and environmentally friendly operational activities, as we explain in the following information.

OVERCOMING THE CHALLENGES OF MEETING INDONESIA'S NEED FOR ELECTRICITY

[G4-1], [G4-2]

In order to provide electricity at affordable prices, every year the government allocates subsidies to cover the difference between the cost of production (BPP), plus a certain margin, and the price of electricity paid by the public for the electrical power consumed. The government must reduce this subsidy to the minimum. Therefore, we constantly strive to run our electrical power generation and distribution operations as efficiently and cost effectively as possible in order to manage the cost of production at the most optimal level and reduce the amount of subsidy provided by the Government.

To fulfill the demand for electricity, we build power plants using two energy source groups: (i) non-renewable fossil fuels, namely coal, oil and natural gas, for steam or gas-steam driven power plants (PLTU/PLTGU); (ii) renewable energy sources, such as water for hydropower plants (PLTA), geothermal energy (PLTP), biodiesel (PLTU), solar power (PLTS) and wind farms (PLTB). Currently, the majority of our power plants use fossil fuels, with a dominant percentage using coal, followed by oil (diesel oil) and natural gas.

We understand that the use of these 3 (three) types of non-renewable fossil energy, namely natural gas, fuel oil and coal, cause the electricity sector to be one of the major contributors to CO₂ emissions (a major component of greenhouse gases). Therefore, now and into the future, we are intensively constructing plants using renewable, more environmentally friendly, energy sources, such as geothermal power, water, wind and solar power. In addition, we are increasing the use of supercritical to ultra-supercritical power generation technology and intensifying the use of more environmentally friendly natural gas as part

lingkungan sebagai wujud partisipasi PLN dalam memitigasi dampak emisi gas rumah kaca terhadap kondisi cuaca ekstrim, dan sebagai wujud komitmen dalam mendukung implementasi konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs), menggantikan konsep *Millenium Development Goals* yang telah berakhir di tahun 2015.

Kami menyadari bahwa pengurangan emisi CO₂ dari pembangkit yang saat ini beroperasi maupun tengah dikembangkan dalam jangka pendek, akan berarti tambahan beban bagi negara dan masyarakat, mengingat pemanfaatan potensi panas bumi yang melimpah, pemanfaatan energi bayu dan surya serta dan pembangunan PLTA untuk memanfaatkan energi air, membutuhkan dana investasi yang besar. Namun demikian, sebagai wujud partisipasi terhadap upaya mitigasi perubahan iklim dan wujud partisipasi penerapan konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) tersebut, Kami telah memiliki cetak biru pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan dengan jumlah total mencapai 15% di tahun 2024 dari posisi 11% saat ini.

Porsi tersebut diproyeksikan akan terus meningkat di masa mendatang, seiring naiknya kemampuan masyarakat Indonesia dalam menggunakan listrik dari sumber energi terbarukan yang relatif lebih mahal.

PROGRAM 35.000 MW, SALAH SATU JALAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN LISTRIK INDONESIA

Sesuai perhitungan yang dirangkum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN untuk tahun 2015-2024, proyeksi jumlah daya listrik yang dibutuhkan Indonesia di tahun 2024 mendatang adalah sekitar 464 TWh, atau tumbuh rata-rata dari tahun 2015-2024 sebesar 8,7% per tahun. Sebagian besar dari kebutuhan listrik tersebut, sekitar 70%, berasal dari daerah Jawa - Bali.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat, maka Kami membangun infrastruktur ketenagalistrikan yang meliputi: instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, serta instalasi gardu induk/gardu distribusi secara bertahap.

Pada tahun 2015, bersama Pemerintah, Kami menginisiasi pelaksanaan Program Pembangkit 35.000 MW yang akan dituntaskan dalam periode 2015-2019. Sebagaimana diketahui, program ini sejatinya terdiri dari pembangunan 35.000 MW pembangkit baru dan 7.000 MW pembangkit yang telah dan sedang berjalan di tahun sebelumnya. Selain pembangkit dengan jumlah total 402 unit pembangkit dan tersebar di 210 titik lokasi di seluruh Indonesia, Kami juga membangun jaringan transmisi / distribusi sepanjang

of PLN's participation in mitigating the impact of greenhouse gas emissions on extreme weather conditions, and as part of our commitment to support the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) concept, which replaces the Millennium Development Goals concept that expired in 2015.

We are aware that the reduction of CO₂ emissions from power plants currently in operation or under construction, would, in the short term, mean an additional burden on the state and society, bearing in mind the large amount of investment funds that would be required to utilize the abundant sources of geothermal energy, or to harness the energy of the wind, sun or water. Nevertheless, to participate in efforts to mitigate climate change and implement the concepts contained within the Sustainable Development Goals (SDGs), we already have a blueprint for the development of renewable energy-driven power plants to reach 15% in total by 2024, up from 11% at this time.

This portion is projected to continue increasing in the future, along with the rising ability of the Indonesian public to use electricity derived from renewable energy sources, which are relatively more expensive.

THE 35,000 MW PROGRAM, ONE WAY TO FULFILL THE DEMAND FOR ELECTRICITY IN INDONESIA

In accordance with calculations summarized in the 2015-2024 PLN Electrical Power Supply Business Plan (RUPTL), the projected amount of electrical power needed by Indonesia in 2024 will be approximately 464 TWh, or an average growth between 2015 and 2024 of 8.7% per year. Most of the demand for electricity, some 70%, will come from Java - Bali.

To meet the continually increasing demand for electricity, we are gradually building an electrical power infrastructure that includes: power plants, transmission and distribution networks, as well as substations / distribution substations.

In 2015, alongside the Government, we initiated implementation of The 35,000 MW Power Plant Development Program, which will be completed in the 2015-2019 period. As is known, this program actually consists of new construction totaling 35,000 MW as well as 7,000 MW from power plants that were being run or in the process of being implemented last year. In addition to the 402 power plants spread across 210 locations throughout Indonesia, we are also building a transmission / distribution network extending for 46,597 km and 1,382 substations /

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW - for Sustainable Development

46.597 kms dan 1.382 unit gardu induk/gardu penyulang dengan kapasitas mencapai 108.789 MVA, serta target rasio elektrifikasi sebesar 97,4% di akhir tahun 2019, yaitu saat selesainya seluruh tahapan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dalam kerangka Program 35.000 MW.

Sampai akhir tahun 2015 Indonesia masih kekurangan tenaga listrik, hal ini ditunjukkan oleh angka rasio elektrifikasi yang relatif lebih rendah daripada negara kawasan, yaitu sebesar 88,3% - sementara negara kawasan telah mencapai angka rasio elektrifikasi diatas 99%. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, PLN bersama Pemerintah berupaya mengatasi seluruh kendala yang menghambat upaya pemenuhan kebutuhan listrik, memanfaatkan peluang pengembangan usaha di bidang ketenagalistrikan sekaligus mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan jumlah penduduk yang mencapai 252,2 juta (BPS: 2014) serta laju ekonomi yang terus tumbuh dengan kisaran 5-7% per tahun, maka peluang usaha di bidang ketenagalistrikan di Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang sangat besar, dan akan terus tumbuh seiring pertumbuhan ekonomi.

TANTANGAN DAN SOLUSI

Tantangan yang dihadapi PLN dalam melakukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan guna memenuhi kebutuhan listrik Indonesia sebenarnya serupa dengan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur dasar lain, yang meliputi: pembebasan lahan, birokrasi perizinan, pendanaan dan kontraktor yang berkualitas/bertanggung jawab. Untuk mengatasi masalah mendasar tersebut, Kami telah melakukan berbagai hal yang dapat mengurai dan mengatasi hambatan yang dihadapi.

Sebagaimana diketahui, bahwa beberapa tahun sebelumnya, PLN bersama Pemerintah mengagas dan menjalankan program pembangunan ketenagalistrikan skala besar dengan tagline Program Percepatan 10.000 MW tahap I dan 10.000 MW tahap II. Namun dalam implementasinya, kedua program tersebut tidak dapat terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan, karena adanya kendala proses perizinan yang memakan waktu yang lama serta sulitnya proses pembebasan lahan.

Kendala yang dihadapi tersebut, telah disampaikan kepada Pemerintah selaku pemegang saham dan sekaligus regulator yang berwenang mengurai permasalahan yang dihadapi, serta dalam waktu bersamaan, Kami tetap berupaya mengatasi kendala-kendala internal dengan melakukan berbagai perbaikan.

substation feeders with a capacity of 108,789 MVA, as well as targeting an electrification ratio of 97.4% by the end of 2019, when every stage of the development infrastructure within the 35,000 MW Power Plant Development Program framework will have been completed.

As of the end of 2015, Indonesia still had insufficient electricity, as demonstrated by the electrification ratio of 88.3%, which is relatively lower than other countries in the region, some of which have achieved an electrification ratio above 99%. To catch up, PLN and the Government seek to address all the obstacles that have been hindering efforts to fulfill the demand for electricity, taking advantage of business development opportunities in the electricity sector while supporting improved national economic growth.

With a total population of 252.2 million (BPS: 2014), as well as economic growth that continues in the range of 5-7% per year, business opportunities in Indonesia's electricity sector in the short and long term are substantial and will continue to grow as the economy grows.

CHALLENGES AND SOLUTIONS

The challenges that PLN is facing to develop the electrical power infrastructure required to meet the demand for electricity in Indonesia are similar to the problems faced in the development of other basic infrastructures, including: land acquisition, licensing bureaucracy, funding and qualified/responsible contractors. To solve these fundamental problems, we have taken various measures to break down and overcome the barriers we face.

As is known, over the last few years, PLN and the Government have initiated and implemented a large-scale electrical power development program with the tagline 10,000 MW Acceleration Program phase I and 10,000 MW phase II. However, in their implementation, these two programs have not been on schedule due to constraints in the long presidential decree and the arduous process of land acquisition.

These constraints were submitted to the Government, as shareholder and regulatory authority with the power to unravel the problems being faced, while at the same time, we have continued trying to overcome internal obstacles by making various improvements.



Sesuai kewenangan yang dimiliki, maka Kami telah melakukan pemberahan internal untuk memastikan program pembangunan ketenagalistrikan yang dijalankan akan berjalan semakin baik, yakni: (i) perubahan struktur organisasi hingga level Direktorat, sehingga mulai dari proses perencanaan, pengawasan, pengelolaan dan pemeliharaan instalasi pembangkit listrik berada dibawah koordinasi 1 (satu) orang Direktur; (ii) pengembangan program aplikasi Project Management Office (PMO) untuk memantau perkembangan proyek, dari proses perizinan, pembebasan lahan, hingga tahap konstruksi, yang tengah dijalankan di seluruh wilayah Indonesia; (iii) menjalin kerjasama dengan Instansi maupun Lembaga Negara di bidang penegakan hukum, keamanan wilayah maupun teritorial terkait untuk mengamankan seluruh rangkaian proses pembangunan fisik yang akan dan tengah dijalankan.

Di sisi lain, Pemerintah dengan kewenangannya, telah dan terus berupaya memperbaiki iklim usaha di bidang infrastruktur dasar khususnya (termasuk ketenagalistrikan) dan investasi pada umumnya. Selain mengeluarkan Peraturan Menteri, sebagai acuan peraturan teknis, membuka layanan perizinan Program Satu Pintu di BKPM, Pemerintah bahkan telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016 tertanggal 16 Januari 2016 tentang "Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK)". Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah juga telah mengeluarkan serangkaian paket kebijakan deregulasi, yang ditujukan untuk mempermudah realisasi investasi langsung.

In accordance with the authority we possess, we have implemented internal restructuring to ensure the better running of electrical power development programs, namely: (i) making changes to the organizational structure up to the Directorate level, so that starting from the planning process, to monitoring, managing and maintaining power plants, everything is located under the coordination of one (1) Director; (ii) the development of the Project Management Office (PMO) application program to monitor project development, from the presidential decree, to land acquisition and through the construction phase, which is taking place across all regions of Indonesia; (iii) establishing cooperation with the institutions and State Agencies engaged in law enforcement, security and territorial regions to safeguard and secure the whole series of physical development processes that are underway and that will take place.

In the meantime, the Government, with its authority, has been and continues to work to improve the business climate, especially for basic infrastructure (including electricity) and investment in general. In addition to issuing ministerial regulations to serve as references for technical regulations and opening a One Door Program for licensing services at BKPM, the Government issued Presidential Regulation No. 4 of 2016 dated 16 January 2016 on "Accelerating the Development of the Electrical Power Infrastructure (PIK)". In follow up, the Government has also issued a series of deregulatory policy packages intended to facilitate the realization of direct investment.

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW - for Sustainable Development

Beragam program aksi yang telah PLN lakukan dan juga dilaksanakan oleh Pemerintah, maka diyakini akan mejadikan realisasi program 35.000 MW dapat berjalan lebih baik dan selesai tepat waktu serta tepat kualitas. Dengan terealisasinya program tersebut tepat waktu, maka dipastikan bahwa kebutuhan listrik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan dengan keyakinan Kami bahwa dengan makin memadainya pasokan listrik, maka kehidupan di Indonesia akan menjadi lebih baik, dan sesuai dengan moto PLN yaitu "Listrik Untuk Kehidupan yang Lebih Baik".

KINERJA DAN DISTRIBUSI EKONOMI

Tahun 2015 yang telah dilalui bersama sejatinya akan dikenang sebagai salah satu tahun yang berat, karena berbagai tantangan yang mengiringi perjalanan seluruh pelaku usaha, termasuk PLN. Pelemahan pertumbuhan perekonomian nasional sebagai imbas dari belum kondusifnya kondisi perekonomian global yang berdampak pada berkurangnya pendapatan usaha, serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar yang berdampak pada mahalnya berbagai komponen bahan baku dan barang modal, merupakan bentuk tantangan nyata yang harus diatasi seluruh pelaku usaha.

Namun demikian, Kami tetap berhasil mencatatkan berbagai kinerja operasional dan ekonomi yang membesarkan hati.

Pada aspek operasional, Kami telah melakukan persiapan dan implementasi Program 35.000 MW yaitu (i) penandatanganan *Power Purchase Agreement* bersama pengembang listrik swasta dengan total daya 14.454 MW; (ii) penandatanganan pekerjaan *engineering, procurement and construction (EPC)* dengan total daya sebesar 2.883 MW, sehingga total capaian proyek yang sudah PPA dan EPC sebesar 17.336 MW; (iii) menggalang kerja sama dengan berbagai lembaga tinggi negara, seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Badan Intelijen Negara dan Tentara Nasional Indonesia untuk bersama-sama mengawal implementasi Program 35.000 MW agar senantiasa berada dalam koridor hukum.

Selain itu, di tahun 2015 Kami juga berhasil menambah kapasitas pembangkit sebesar 2.053 MW untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik nasional.

With the variety of action programs undertaken by PLN and implemented by the Government, we believe that realization of the 35,000 MW program will run better, finish on time and be of the right quality. With the timely realization of this program, we have ascertained that the demand for electricity to support quality economic growth can be achieved. This is consistent with our belief that an increasingly adequate power supply will lead to a better quality of life in Indonesia, which is in accordance with the PLN motto "Power For A Better Life".

ECONOMIC PERFORMANCE AND DISTRIBUTION

The year 2015 will be remembered as a tough year due to the challenges that accompanied the journeys of every business, including PLN. The weakening of national economic growth resulting from the unfavorable global economic conditions led to a reduction in operating revenues, while the weakening of the rupiah against the US dollar resulted in various raw material and capital goods components becoming more expensive, both of which were real challenges that had to be addressed by all businesses.

Nevertheless, we still managed to record a variety of encouraging economic and operational performances.

From the operational aspect, we made preparations and started implementing the 35,000 MW Program, namely (i) signing Power Purchase Agreements with private power developers for total power of 14,454 MW; (ii) signing engineering, procurement and construction (EPC) agreements for total capacity of 2,883 MW, bringing total project achievement for PPAs and EPCs to 17,336 MW; (iii) working with various government agencies, such as the Attorney General, the Supreme Court, the Corruption Eradication Commission, the Police, the National Intelligence Agency and the Indonesian Armed Forces to jointly oversee the implementation of the 35,000 MW program so that it is always implemented within the law.

In addition, in 2015, we also successfully added 2,053 MW to support the fulfillment of the national demand for electricity.

Pada aspek pemasaran, penjualan tenaga listrik tahun 2015 meningkat 2,1% menjadi sebesar 202.846 GWh dan pelanggan listrik bertambah sebesar 3,6 juta pelanggan baru, sehingga total jumlah pelanggan listrik mencapai 61,2 juta pelanggan.

Selain itu, General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya & Tangerang mendapatkan Penghargaan Best Marketer dari pihak independen atas inovasi di bidang layanan yang diterapkan bagi pelanggan korporasi.

Sesuai hasil survei kepuasan pelanggan yang diselenggarakan oleh pihak independen, diperoleh gambaran bahwa PLN telah mampu memenuhi harapan pelanggan, sebagaimana ditunjukkan jumlah responden dengan jawaban “puas” atas layanan PLN dengan Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) rata-rata sebesar 88,11%, di beberapa wilayah bahkan mencapai IKP 95,58%. Naiknya kualitas layanan membuat Kami berhasil menerapkan program pengurangan subsidi melalui penyesuaian tarif listrik secara berkala tanpa ada gejolak yang berarti.

Di bidang produksi, terjadi peningkatan produksi listrik sebesar 2,4% atau mencapai 233.982 GWh, selaras dengan penambahan jumlah pelanggan. Kami juga berhasil mengelola berbagai komponen biaya melalui beragam program efisiensi, sehingga secara keseluruhan telah berhasil menurunkan Biaya Pokok Penyediaan tenaga listrik (BPP) per kWh listrik sebesar 8,48% menjadi Rp1.300,5/kWh dari Rp1.419,7/kWh di tahun sebelumnya.

Dengan keberhasilan implementasi penyesuaian tarif listrik secara berkala dan pengelolaan BPP, menjadikan Kami dapat mengurangi jumlah subsidi yang disediakan Pemerintah secara substansial, dari Rp99,3 triliun di tahun 2014 menjadi Rp56,6 triliun, berkurang hingga sebesar 43,1%. Pengurangan jumlah subsidi berarti, Negara akan memiliki dana yang lebih memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang lebih produktif.

Berbagai pencapaian di bidang operasional membuat Kami berhasil meningkatkan nilai penjualan tenaga listrik sebesar 12,4% menjadi Rp. 209,8 triliun dari tahun 2014 yang sebesar Rp. 186,6 triliun. Setelah memperhitungkan pendapatan subsidi, Kami mencatatkan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp15,6 triliun, naik 11,29% dari Rp. 14,0 triliun di tahun 2014 (setelah disajikan kembali). Selain itu, sebagai hasil realisasi program revitalisasi aset yang dimiliki, pada akhirnya, Kami mencatatkan total laba komprehensif tahun berjalan hingga sebesar Rp658,3 triliun, naik 63,6 kali dari Rp10,3 triliun di tahun sebelumnya. Dengan laba komprehensif yang naik substansial tersebut, ekuitas PLN juga meningkat tajam 353,2% menjadi sebesar Rp848,2 triliun dari sebesar Rp187,2 triliun (setelah

From the marketing aspect, electricity sales in 2015 increased 2.1% to 202,846 GWh, while electricity customers increased by 3.6 million new customers, bringing the total number of customers to 61.2 million.

In addition, the General Manager of PT PLN (Persero) Distribution Jakarta Raya and Tangerang received the Best Marketer Award from independent parties for his innovations in service applications for corporate customers.

According to the results of a customer satisfaction survey conducted by an independent party, it has been illustrated that PLN has been able to meet customer expectations, as demonstrated by the number of respondents answering “satisfied” with PLN’s service and an average Customer Satisfaction Index (CSI) of 88.11%, which in some areas even reached 95.58%. The rise in service quality has led to us successfully implementing our program to reduce subsidies through regular electricity tariff adjustments without any significant shocks.

In the field of production, electricity production has increased by 2.4% to reach 233,982 GWh, in line with the increase in number of customers. We also successfully managed various cost components through a variety of program efficiencies that overall managed to reduce the Basic Cost of Production (BPP) per kWh of electricity by 8.48% to Rp1.300,5/kWh from Rp1,419.7/kWh in the previous year.

With the successful implementation of periodic electricity tariff adjustments and management of the BPP, We have been able to substantially reduce the amount of the subsidy provided by the Government from Rp99.3 trillion in 2014 to Rp56.6 trillion, a reduction of 43.1%. A reduction in the size of the subsidy means that the State will have more adequate funding to support the implementation of more productive activities.

Achievements in the operational field have seen an increase in the value of electricity sales by 12.4% to Rp209.8 trillion from 2014's Rp186.6 trillion. After taking into account subsidy revenue, we recorded net profit for the year of Rp15.6 trillion, up 11.29% from Rp14.0 trillion in 2014 (after restatement). In addition, as a result of the asset revitalization realization program, ultimately, we recorded total comprehensive income for the current year of 658.3 trillion, up 63.6 times from Rp10.3 trillion in the previous year. With this substantial increase in comprehensive profit, PLN's equity also rose sharply by 353.2% to Rp848.2 trillion, up from Rp187.2 trillion (after restatement) in 2014. The

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW - for Sustainable Development

penyajian kembali) di tahun 2014. Peningkatan ekuitas yang signifikan tersebut membuat Kami memiliki potensi penggalangan dana yang lebih baik untuk mendukung kegiatan pembangunan ketenagalistrikan.

Dengan keberhasilan di bidang keuangan, maka Kami mampu mendistribusikan perolehan nilai ekonomi kepada para pemasok hingga sebesar Rp225,7 triliun, turun 8,1% dari Rp. 248,7 triliun di tahun 2014, selaras dengan penurunan harga minyak bumi dan batubara. Kami mendistribusikan nilai ekonomi kepada pegawai hingga sebesar Rp. 20,3 triliun, meningkat 22,3% dari Rp16,6 triliun, membayar dividen sebesar Rp3,9 triliun dan membayar bunga pinjaman kepada penyandang dana sebesar Rp17,5 triliun, naik 5,4% dari Rp. 16,6 triliun di tahun sebelumnya. Kami juga mendistribusikan nilai perolehan ekonomi kepada Pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak sebesar Rp. 4,7 triliun, naik 154,2% dari Rp1,8 triliun di tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, di tahun 2015 Kami mendistribusikan nilai perolehan ekonomi hingga sebesar Rp293,7 triliun, turun 2,2% dari sebesar Rp300,5 triliun di tahun sebelumnya.

Nilai distribusi ekonomi tersebut belum memperhitungkan penyaluran dana program Bina Lingkungan dan setoran pajak penghasilan perseorangan yang dikoordinir oleh PLN sebagai pengumpul pajak terkait dari gaji dan remunerasi karyawan maupun manajemen.

Mengingat kebutuhan listrik nasional yang akan terus meningkat seiring dengan tumbuhnya perekonomian negara dan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka distribusi nilai perolehan ekonomi yang akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan di tahun-tahun mendatang diharapkan akan terus meningkat.

KOMITMEN MENDUKUNG PELESTARIAN LINGKUNGAN

Sebagai wujud komitmen PLN dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan dan memitigasi dampak lingkungan dari emisi gas rumah kaca, maka Kami semakin intens memperbaiki kualitas bauran energi dalam proses pembangkitan listrik. Hingga saat ini PLN masih mengandalkan sumber energi tak terbarukan sebagai bahan bakar pembangkit yang dimiliki, namun demikian Kami terus berupaya secara maksimal untuk memanfaatkan bahan bakar terbarukan seperti panas bumi, air, matahari, dan bayu sehingga prosentase bauran energi semakin optimal.

significant increase in equity has given us the potential for improved fundraising to support electrical power development.

With these financial successes, we were able to distribute gains in economic value to suppliers of up to Rp225.7 trillion, down 8.1% from Rp248.7 billion in 2014, in line with the fall in prices for petroleum and coal. We distributed economic value to employees of up to Rp20.3 trillion, up 22.3% from Rp16.6 trillion, we paid dividends of Rp3.9 trillion and interest payments to funders of Rp17.5 trillion, up 5.4% from Rp16.6 trillion in the previous year. We also distributed economic value to the Government in the form of tax payments of Rp4.7 trillion, up 154.2% from Rp1.8 trillion in the previous year. Overall, in 2015, we distributed economic value of up to Rp293.7 trillion, up 2.2% from Rp300.5 trillion the previous year.

The economic value distributed does not include the funds disbursed for Community Development programs and personal income tax payments coordinated by PLN as the tax collector for the salaries and remuneration of employees and management.

Given the national demand for electricity will continue to rise along with the growth of the national economy and rising incomes, the distribution of economic value presented to stakeholders in the coming years is also expected to continue to rise.

COMMITMENT TO SUPPORT ENVIRONMENTAL CONSERVATION

As manifestation of PLN's commitment to supporting environmental conservation and mitigating the environmental impact of greenhouse gas emissions, we are increasingly intensifying improvements to the energy mix quality in the electricity generation process. Until now, PLN still relies on non-renewable fuel sources for our power plants, nevertheless, We continue to make every effort to utilize renewable fuels, such as geothermal, hydro, solar and wind power to optimize the energy mix percentages.



Pada tahun pelaporan, penggunaan batubara dan gas meningkat, menggantikan penggunaan bahan bakar minyak, demikian juga penggunaan panas bumi dan air yang diupayakan beroperasi pada kapasitas maksimum serta penggunaan tenaga surya dan bayu yang semakin bertambah.

Secara keseluruhan, dari total produksi listrik PLN tahun 2015 yang sebesar 233.982 GWh, bauran energi yang digunakan adalah: Batubara (55,8%), BBM (8,2%), Gas alam (25,3%), Panas Bumi (4,3%), Air (5,9%), Olein/Biodiesel (0,02%) serta Surya dan Bayu (0,02%).

Dengan kombinasi bauran energi tersebut, sesuai perhitungan berdasarkan standar EIA (*US Energy Information Administration*), perkiraan emisi GRK yang dikeluarkan dari pengoperasian seluruh pembangkit berbahan bakar fosil selama satu tahun adalah sebesar 144.914.606 ekivalen ton CO₂, naik dari perkiraan angka sebesar 140.331.295 eq ton CO₂ di tahun 2014. Dengan mempertimbangkan besarnya emisi dari penggunaan bahan bakar fosil, maka diupayakan untuk meningkatkan penggunaan sumber energi gas dan memanfaatkan secara optimal panas bumi. Tingkat emisi bahan bakar fosil yang paling rendah menjadikan gas menjadi salah satu pilihan mengingat sumber daya gas di Indonesia cukup memadai disamping pemanfaatan energi terbarukan.

In the reporting year, the use of coal and gas has increased, replacing the use of oil, as has the use of geothermal and water power, which we are striving to operate at maximum capacity, while the use of solar and wind power is also growing.

Overall, of the total 233,982 GWh of electricity produced by PLN in 2015, the energy mix was: coal (55.8%), fuel oil (8.2%), natural gas (25.3%), geothermal (4.3%), water (5.9%), Olein / Biodiesel (0.02%) and Solar and Wind power (0.02%).

With this energy mix combination, according to calculations based on EIA (*US Energy Information Administration*) standards, it is estimated that GHG emissions emitted by the operation of all fossil fuel power plants during the year amounted to 144,914,606 equivalent tons CO₂, up from the estimated figure of 140,331,295 eq tons CO₂ in 2014. Taking into account the magnitude of emissions from fossil fuel use, we are working to increase the use of gas energy resources and optimizing use of geothermal power. With the lowest level of emissions from a fossil fuel, gas is one of our options, given that gas resources in Indonesia are adequate, alongside the utilization of renewable energy.

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW - for Sustainable Development

Kami memiliki rencana untuk memaksimalkan potensi panas bumi Indonesia yang menurut perhitungan para ahli dapat membangkitkan tenaga listrik dengan kapasitas mencapai 27.000 MW. Pada tahun pelaporan kapasitas pembangkit panas bumi milik PLN dan swasta, masih berkisar pada angka sebesar 1.400 MW, dimana 570 MW diantaranya milik PLN.

Selain PLTP, maka dilakukan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan air sebagai sumber energi untuk pembangkit. Pengembangan dan pengelolaan PLTP dan PLTA memberikan insentif lain, yakni disertakan pada mekanisme pembangunan bersih (*Clean Development Mechanism/ CDM*) maupun *Verified Carbon Standard (VCS)*. Melalui mekanisme tersebut dimungkinkan perolehan benefit finansial dari penjualan sertifikat *Carbon Emission Reduction (CERS)*. Untuk proyek CDM telah dikembangkan melalui PLTP Kamojang IV dan PLTP Lahendong II. Selain melalui mekanisme CDM, Kami juga memanfaatkan mekanisme *Verified Carbon Standard (VCS)* untuk mendapatkan insentif dari hasil penjualan kredit karbon pembangkit energi terbarukan. Sementara pembangkit listrik ramah lingkungan dengan sumber energi terbarukan yang sedang dikembangkan sebagai proyek VCS adalah PLTA Renun, PLTA Sipansihaporas dan PLTA Musi.

Dalam persentase yang masih terbatas dan sesuai dengan ketersediaan sumber daya, maka telah dibangun dan digunakan sumber energi terbarukan dari produk hasil perkebunan seperti biodiesel dan olein, yang dikembangkan di daerah-daerah dengan areal perkebunan yang luas, seperti di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Selain pengendalian emisi dan pengelolaan sumber energi, Kami juga menargetkan seluruh unit pengelola pembangkit untuk mendapatkan penilaian Proper dengan minimal kategori biru sebagai wujud komitmen PLN terhadap upaya penjagaan dan perbaikan kelestarian lingkungan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Beberapa pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang telah dilakukan, adalah :

1. Membuka akses ketersediaan listrik melalui peningkatan layanan dan penyediaan listrik
2. Merealisasikan berbagai program peningkatan kehidupan masyarakat secara langsung melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dalam bentuk realisasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

We plan to maximize geothermal potential in Indonesia which, according to expert calculations, can generate 27,000 MW of electricity. In the reporting year, the capacity of geothermal power plants owned by PLN and private operators was still approximately 1,400 MW, of which 570 MW was generated by PLN.

In addition to geothermal power plants, efforts are being made to improve the use of water as a source of energy for power plants. The development and management of geothermal and hydropower power plants provide other incentives, namely inclusion in the Clean Development Mechanism (CDM) and the Verified Carbon Standard (VCS) schemes. These mechanisms allow for financial benefit from the sale of Carbon Emission Reduction certificates (CERs). For the CDM scheme, PLTP Kamojang IV and PLTP Lahendong II have been developed. In addition to the CDM mechanism, we also utilize the Verified Carbon Standard (VCS) mechanism to get incentives from the sale of carbon credits from renewable energy power generation. Meanwhile, environmentally friendly power generation using renewable energy sources being developed as VCS projects are Renun hydropower plant, Sipansihaporas hydropower plant and Musi hydropower plant.

While the percentage is still limited and subject to the availability of resources, renewable energy sources are being built and used that utilize agricultural products, such as biodiesel and olein, in areas with extensive plantations, such as in Sumatra, Kalimantan and Sulawesi.

In addition to emission control and the management of energy resources, we are also targeting that every power plant management unit will obtain Proper ranking of at least blue category, demonstrating PLN's commitment to efforts to secure and repair the environment.

SOCIAL RESPONSIBILITY FOR COMMUNITY WELFARE

Several approaches to improve community welfare have been implemented, namely:

1. Providing access to electricity through improved service and supply of electricity
2. Realizing various programs to directly improve people's lives through the implementation of Social Responsibility programs under the Partnership and Community Stewardship Program (PKBL).

3. Meningkatkan kerjasama dengan mitra lokal dan mengingkatkan konten lokal untuk memasok kebutuhan operasional dan investasi pembangunan ketenagalistrikan.

Pada pendekatan pertama, dilakukan dengan cara membuka layanan yang mudah diakses dan ditindak lanjuti dengan dukungan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi yang didesain khusus yaitu akses pelayanan yang bersifat *virtual service* dan tanpa sekat (*borderless*), melalui: akun facebook PLN 123 dan akun twitter pln_123, yang memungkinkan seluruh pelanggan berinteraksi dengan petugas PLN sepanjang waktu. Kami juga menawarkan beragam produk layanan pengadaan tenaga listrik agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Pada pendekatan kedua, telah direalisasikan berbagai program bantuan fisik, program pelatihan maupun finansial untuk menumbuh kembangkan kemampuan perekonomian masyarakat sekitar kegiatan operasional di daerah-daerah marginal melalui realisasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pada tahun 2015, telah direalisasikan pengeluaran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebesar Rp36,9 miliar, dimana keseluruhan dana tersebut diperuntukkan bagi kegiatan program Bina Lingkungan. Adapun prioritas penyaluran dana Program Bina Lingkungan adalah dalam bentuk Bantuan Pendidikan dan Pelatihan hingga sebesar Rp15,9 miliar atau sekitar 43% dari total dana yang disalurkan.

Pada pendekatan ketiga, Kami berupaya meningkatkan kehidupan perekonomian setempat melalui jalinan kerjasama dengan pemasok lokal di area sekitar operasional sebagai mitra kerja potensial. Kami juga menerapkan ketentuan penggunaan komponen lokal bagi kegiatan investasi pembangunan pembangkit listrik maupun saluran transmisi dan distribusi, dengan harapan hal tersebut akan mampu mendukung tumbuhnya industri kelistrikan di dalam negeri yang mampu menyerap tenaga kerja.

MENGHORMATI & MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kami meyakini bahwa SDM dalam konteks keberlanjutan memiliki kedudukan sentral sebagai pemangku kepentingan yang harus dipenuhi hak-haknya serta dijamin tingkat kesejahteraannya. Oleh karenanya Kami menempatkan SDM sebagai mitra, dan merealisasikan hubungan industrial saling menghargai melalui kesepakatan timbal balik yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Bersama (PKB). PLN bersama Serikat Pekerja PLN melakukan peninjauan butir-butir kesepakatan dalam PKB secara berkala.

3. Increasing cooperation with local partners and increasing local content to supply operational and investment needs for the development of electrical power.

The first approach was implemented by providing services that facilitate access and follow up with the support of specifically designed information technology-based application systems, namely access to virtual and borderless services, through: the PLN 123 Facebook account and twitter account pln_123, which allow all customers to interact with PLN officials at any time. We also offer a variety of products supplying electricity services to suit customer needs.

The second approach has seen the realization of various physical assistance programs, training and financial programs to cultivate community economic abilities in the communities surrounding operational activities in marginal areas, achieved through the realization of the Partnership and Community Stewardship Program (PKBL). In 2015, funds were disbursed through the Partnership and Community Stewardship Program totaling Rp36.9 billion, of which all the funds were earmarked for Community Development programs. The priority for fund disbursement through the Community Development programs was education and training, which received up to Rp15.9 billion, or about 43% of the total funds disbursed.

The third approach sought to improve the life of the local economy through cooperation with local suppliers as potential partners in areas in the vicinity of operations. We also applied a provision requiring the use of local components for investors in the construction of power plants, as well as transmission and distribution networks, in the hope that it would be able to support the growth of an electrical power industry in the country, which in turn would be able to absorb labor.

RESPECTING & DEVELOPING HUMAN RESOURCES

We believe that in the context of sustainability human resources have a central position as stakeholders that must have their rights met, as well as a guaranteed level of welfare. Therefore, We place human resources as a partner, and realize mutually respectful industrial relations through joint agreements outlined in the Collective Labor Agreement (CLA). PLN and the PLN Labor Union together review the points of the CLA on a regular basis.

Sesuai ketetapan dalam PKB, Kami berkomitmen penuh untuk mematuhi dan memenuhi hak-hak asasi pegawai dan menjamin kesejahteraannya, namun dalam waktu bersamaan PLN juga berupaya meningkatkan kompetensi pegawai agar mampu bekerja dengan efektif dan efisien, serta menerapkan mekanisme penilaian kinerja agar seluruh pegawai menjalankan tugasnya dengan segenap kemampuan terbaiknya dalam mencapai tujuan bersama. Untuk itu, Kami telah menerapkan sistem penilaian kinerja dan penetapan jenjang karir yang terukur dan transparan.

Adapun standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang maksimum sesuai Standar Manajemen K3 (SMK3), serta sistem standar K3 dari OHSAS 18001:2007 yang terakreditasi telah dijalankan dengan konsisten demi mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang fatal dan menjaga kesehatan para pekerja.

KOMITMEN PADA PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN PRAKTIK TATA KELOLA BERKELANJUTAN

Kami berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik, dengan tujuan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan yang pada akhirnya akan menjamin pertumbuhan usaha secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut di tahun 2015 Kami melaksanakan berbagai program terkait, yaitu :

1. Mengkaji butir-butir isi pedoman tata laksana kerja Direksi dan Dewan Komisaris berupa pedoman GCG dan *Board Manual*.
2. Menyelesaikan draft pedoman tata laksana kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diperbarui berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan kondisi terkini dan telah dibahas dengan komite dewan komisaris.
3. Melanjutkan kerjasama dengan Transparansi Internasional Indonesia untuk meningkatkan keterbukaan penyampaian penyelenggaraan bisnis PLN.
4. Melanjutkan kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan responsibilitas penyelenggaraan kegiatan operasional dan pengelolaan keuangan perusahaan.
5. Kampanye budaya integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional.
6. Kampanye PLN sebagai wilayah Bebas Korupsi dan Gratifikasi terhadap seluruh pemangku kepentingan.

In accordance with the provisions of the CLA, we are fully committed to complying with and fulfilling employee rights and ensuring their wellbeing, while at the same time PLN is also working to improve employee competencies so they are able to work more effectively and efficiently, as well as implementing performance appraisal mechanisms so that all employees can carry out their duties to the best of their ability to achieve the common goals. To that end, we have implemented a measurable and transparent system for performance appraisal and to determine career paths.

Occupational Health and Safety (OHS) standards are optimum and accredited, corresponding with OHS Management Standards (SMK3), as well as OHS standards in OHSAS 18001:2007, and are run consistently to prevent fatal workplace accidents and to safeguard the health of employees.

COMMITMENT TO IMPROVING THE IMPLEMENTATION QUALITY OF SUSTAINABLE GOVERNANCE PRACTICES

We are committed to continuously improving the quality of good corporate governance practices with the aim of increasing the confidence of stakeholders and ultimately ensuring sustainable business growth in the long term. To achieve these objectives, in 2015, We implemented various related programs, namely:

1. Assessing the contents of the references for the Board of Directors and the Board of Commissioners in the Good Corporate Governance guidelines and the *Board Manual*.
2. Completed the draft work guidelines for the Board of Directors and the Board of Commissioners, which have been updated based on applicable legislation and current conditions and discussed by the Board of Commissioners' committee.
3. Continued cooperation with Transparency International Indonesia to improve PLN's transparency in conducting business.
4. Continued cooperation with the Supreme Audit Agency (BPK) and the Corruption Eradication Commission (KPK) to increase accountability and responsibility in the implementation of operations and financial management in the company.
5. Run a campaign for a culture of integrity in the execution of operational tasks.
6. Run a campaign for PLN as a Corruption and Bribery-Free area for all stakeholders.

Selain itu, Kami juga mulai merintis pelaksanaan pengawasan pembangunan pembangkit dan kegiatan operasional serta pengelolaan risiko secara terintegrasi dengan menerapkan metode *risk based audit*. Dengan metode ini diharapkan dapat menghindarkan PLN dari beragam risiko, melalui deteksi dini terhadap adanya masalah mulai dari tahapan perencanaan sampai pembangunan, hingga pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

PENUTUP

Kami meyakini bahwa upaya pemenuhan harapan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki secara optimal, seperti yang telah Kami lakukan, akan lebih menjamin keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Kami juga meyakini pemenuhan harapan tersebut yang dilakukan dengan menerapkan keseimbangan kinerja bidang ekonomi, sosial dan lingkungan juga akan mampu menjaga keberlanjutan bumi beserta isinya dan menjaga kualitas kehidupan generasi mendatang. Oleh karenanya, Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa bekerja bersama-sama dan saling memberi masukan konstruktif agar PLN dapat meningkatkan kinerjanya dalam memenuhi harapan sekaligus mendukung upaya penerapan konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk kebaikan bumi beserta isinya di masa mendatang.

Akhir kata, atas nama Direksi, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dan pemegang saham atas dukungan dan sumbangsih yang diberikan serta keterlibatannya pada upaya kami menyeimbangkan kinerja bidang ekonomi, lingkungan maupun sosial untuk menciptakan pertumbuhan dan perkembangan PLN yang berkesinambungan.

Kami mengharapkan sumbang saran, masukan maupun kritik konstruktif bagi penyempurnaan Laporan Keberlanjutan PLN selanjutnya.

Jakarta, Mei 2016

In addition, we also initiated supervision of power plant construction and operations, as well as integrated risk management by applying risk based audit methods. In this way, we expect PLN can avoid a variety of risks through the early detection of problems, ranging from the planning stage to construction, while power plant operations and maintenance can be done more effectively and efficiently.

CLOSING

We believe that efforts to optimally fulfill stakeholder expectations in accordance with available resources, as we have been doing, will ensure the long term sustainability of the business. We also believe that the fulfillment of these expectations is achieved by applying a balance between economic, social and environment performance, which will also be able to maintain the sustainability of the Earth and all its contents and maintain the quality of life for future generations. Therefore, we invite all stakeholders to continue to work together and provide constructive feedback so that PLN can improve its performance in meeting expectations, while supporting efforts to implement the Sustainable Development Goals (SDGs) concept for the good of the Earth and all its contents in the future.

Finally, on behalf of the Board of Directors, I express my gratitude to all our stakeholders and shareholders for their support and contributions, as well as their involvement in our efforts to balance economic, environment and social performance to create sustainable growth and development for PLN.

We look forward to receiving advice, feedback and constructive criticism for the improvement of future PLN Sustainability Reports.

Jakarta, May 2016

Atas nama Direksi PT PLN (Persero)
On behalf of the Board of Directors of PT PLN (Persero)

DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR



SOFYAN BASIR

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW – for Sustainable Development



TENTANG LAPORANINI

ABOUT THIS REPORT

halaman page 46 - 51



Kami menyampaikan Laporan Keberlanjutan untuk memberi gambaran mengenai upaya yang telah dilakukan Perseroan dalam memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan dan bagaimana Kami berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembangunan kemampuan pemasokan tenaga listrik yang dilakukan secara berkelanjutan, termasuk pelaksanaan Program 35.000 MW yang sejalan dengan rencana strategis jangka panjang PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik bagi seluruh pemangku kepentingan.

We present this Sustainability Report to provide an illustration of the efforts being made by the Company to fulfill the expectations of all our stakeholders and to provide an illustration of how We are striving to support national economic growth by developing the ability to sustainably supply electrical power, including by implementing the 35,000 MW Program, a program that is in line with PLN's long-term strategic plan to meet the demand for electricity of all our stakeholders

Laporan Keberlanjutan PT PLN (Persero) Tahun 2015, atau disebut "Laporan" atau "Kami" ini disampaikan untuk menunjukkan kepada para pemangku kepentingan kinerja keberlanjutan PLN dalam bidang ekonomi, lingkungan dan sosial selama tahun 2015.

Sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 ayat 2c, yang mewajibkan penyampaian laporan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL") dalam Laporan Tahunan, maka Kami telah menerbitkan Laporan Keberlanjutan secara terpisah sejak tahun 2008. Tahun ini adalah Laporan Keberlanjutan PLN kedelapan yang merupakan kelanjutan dari Laporan Keberlanjutan PLN Tahun 2014 yang dipublikasikan pada bulan Mei 2015.

Laporan ini menunjukkan komitmen Kami dalam berperan serta membangun ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan. Melalui Laporan ini, Kami ingin mengajak para pemangku kepentingan dan para pembaca untuk mengetahui secara menyeluruh upaya-upaya yang kami jalankan untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan usaha.

[G4-28][G4-29][G4-30]

Laporan Keberlanjutan PLN Tahun 2015 dan periode sebelumnya dapat diakses online melalui website www.pln.go.id.

PEDOMAN DAN STANDAR LAPORAN

Pada laporan kali ini kami menggunakan prinsip materialitas dalam menuliskan isu-isu keberlanjutan yang dinilai penting bagi pemangku kepentingan dan usaha kami, serta menyesuaikannya dengan Pedoman Penyusunan Laporan Keberlanjutan Global Reporting Initiatives (GRI) G4 "CORE", sebagaimana Laporan tahun sebelumnya, sehingga tidak terdapat perubahan yang signifikan pada perbandingan data dengan laporan tahun lalu. Kami juga melengkapi laporan ini dengan pedoman *Electric Utilities Sector Supplement* (GRI-EUSS), serta disampaikan juga bahwa tidak ada penyajian ulang data tahun lalu yang berdampak signifikan terhadap isi laporan tahun ini.

[G4-18][G4-22][G4-23]

Kami mencantumkan indeks GRI dalam tanda kurung "[]" dengan warna merah pada setiap halaman yang relevan untuk memudahkan para pembaca menemukan relevansi indikator GRI dengan isi laporan. Indeks ini dapat ditemukan pada halaman 206. [G4-32]

This 2015 PT PLN (Persero) Sustainability Report, also referred to as the "Report" or "We/Us/Our", is presented to demonstrate to our stakeholders PLN's economic, environmental and social sustainability performance during 2015.

In compliance with Law Num. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Article 66 paragraph 2c, which requires the submission of a Social and Environmental Report, or Corporate Social Responsibility ("CSR") report within the Annual Report, We have issued a separate Sustainability Report since 2008. This year is our eighth Sustainability Report and is a follow up to the 2014 PLN Sustainability Report published in May 2015.

This report demonstrates Our commitment and participative role in developing the economy in a sustainable manner to improve both the environment and the population's quality of life. With this Report, We wish to invite our stakeholders and readers to be aware of all the efforts that we have taken to fulfill stakeholder expectations and ensure business continuity. [G4-28][G4-29][G4-30]

The 2015 PLN Sustainability Report and those of previous years may be accessed online through our website: www.pln.go.id.

REPORT GUIDELINES AND STANDARDS

In our report this time, we are using the principle of materiality to discuss sustainability issues that are considered important to our stakeholders and our business, as well as being compliant with the Sustainability Reporting Preparation Guidelines of Global Reporting Initiatives (GRI) G4 "CORE", as in the Reports of previous years. Thus, there are no significant differences for data comparison with previous reports. We have also compiled this report with reference to the Electric Utilities Sector Supplement (GRI-EUSS) guidelines. No data presented this year is restated from last year and there is no significant impact on the content of this year's report. [G4-18][G4-22][G4-23]

We have noted the GRI index within brackets "[]" in red on each relevant page to facilitate the reader in identifying the relevant GRI indicator in this report. The GRI index as a whole can be found on page 206. [G4-32]



Dalam penulisan Laporan Keberlanjutan Tahun 2015, Kami belum menggunakan jasa penjamin (assurance), namun demikian untuk menjamin kredibilitas dan kualitas informasi yang tercantum dalam laporan ini, seluruh isi dan data telah melalui tahap verifikasi internal. [G4-33]

In compiling this 2015 Sustainability Report, We have not used an assurance service, however, to guarantee the credibility and quality of the information contained herein, all the contents and data have undergone internal verification. [G4-33]

RUANG LINGKUP DAN BATASAN

Laporan Keberlanjutan ini adalah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015. Data mengenai kinerja keberlanjutan mencakup data PLN sebagai perusahaan Induk, tidak termasuk data keberlanjutan yang dikelola masing-masing entitas anak, sebagaimana digambarkan dalam bagan di halaman 52, pada uraian "Strategi Keberlanjutan", sedangkan data keuangan merupakan hasil konsolidasi dengan entitas anak berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, laporan ini juga mencakup kebijakan Perusahaan terkait hak-hak karyawan dan hak asasi manusia.

[G4-17][G4-18][G4-28]

Dalam melaporkan data finansial, Kami menggunakan teknik berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") Indonesia. Sedangkan untuk data keberlanjutan, Perseroan menggunakan teknik pengukuran data yang berlaku secara internasional. Data kuantitatif dalam laporan ini, disajikan dengan menggunakan prinsip daya banding (comparability) dalam dua tahun. Informasi dan data yang disajikan mencakup data keuangan konsolidasi Perseroan dengan anak perusahaan yang dicatat berdasarkan metode ekuitas. [G4-18]

SCOPE AND BOUNDARIES

This Sustainability Report covers the period 1 January to 31 December 2015. Sustainability performance data comprises PLN data as a Holding Company, and does not encompass any sustainability data managed by any of the company's subsidiaries, as shown in the flowchart on page 52 in "Sustainability Strategy". Meanwhile, the financial data presented is consolidated with our subsidiaries based on applicable financial accounting standards in Indonesia. Furthermore, this report also covers the Company's policies with regard to employee rights and human rights.

[G4-17][G4-18][G4-28]

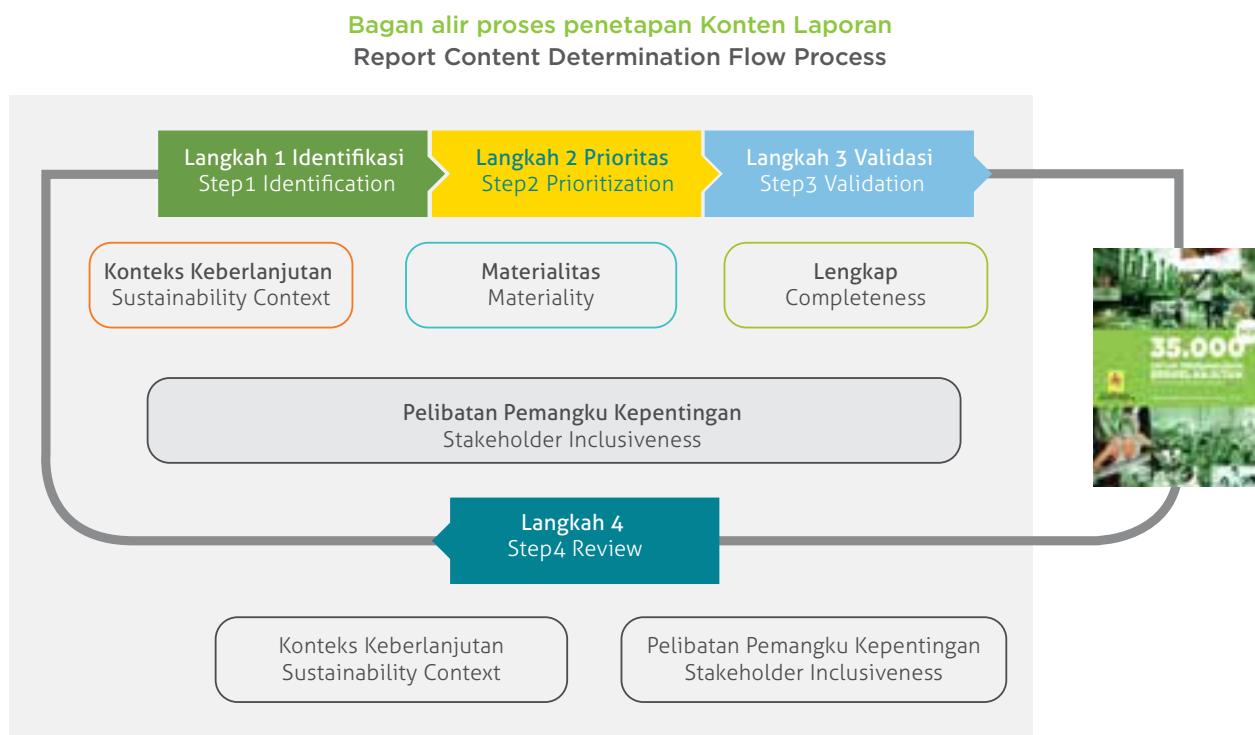
To report our financial data, We have used methods based on the Indonesian Financial Accounting Standards ("PSAK"). Meanwhile, for sustainability data, the Company has used internationally applied data measurement methods. The quantitative data presented in this report use the comparability principle over the last two years. The information and data presented encompasses the consolidated financial data of the Company and its subsidiaries recorded based on the equity method. [G4-18]

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW - for Sustainable Development

Kami menetapkan konten Laporan ini sesuai pendekatan yang dikemukakan dalam Pedoman GRI G-4, yang meliputi empat tahapan, yakni: Identifikasi, Prioritas, Validasi dan Review, dengan gambaran proses sebagai berikut.

We have determined this Report's contents using the approach found in the GRI G4 Guidelines, which has four stages, namely: Identification, Prioritization, Validation and Review, as illustrated in the flowchart below.



Dalam kegiatan operasional sehari-hari, Kami dibantu oleh para pemasok, baik pemasok barang maupun jasa (*outsourcing*). Menyadari bahwa kinerja mereka turut mempengaruhi reputasi dan nama baik Perseroan, maka laporan keberlanjutan ini turut mencakup berbagai kebijakan dan kriteria seleksi serta evaluasi pemasok barang dan jasa yang signifikan bagi operasional dan kegiatan usaha PLN. Kebijakan dan kriteria evaluasi pemasok tersebut mencakup aspek ketenagakerjaan, perlindungan hak-hak pegawai dan penghormatan pada hak asasi manusia. [G4-21]

In our day-to-day operations, We are assisted by suppliers of goods and services (outsourcing). Realizing that their performance can also impact on the Company's good name and reputation, this sustainability report also includes various policies and selection criteria, as well as evaluation, relevant to our suppliers of goods and services of significance to our operations and business activities. These policies, criteria and evaluations incorporate aspects of employment, employee protection and respect for human rights. [G4-21]

PROSES PENETAPAN ASPEK MATERIAL DAN ISI LAPORAN

Dalam setiap siklus pelaporan, Kami mengkaji konten laporan untuk menentukan relevansi terhadap bisnis kami, sekaligus memastikan bahwa laporan telah memuat isu-isu mutakhir terkait keberlanjutan dan kepentingan para pemangku kepentingan. Laporan ini memuat tiga aspek utama, yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial secara berimbang. [G4-18]

MATERIAL ASPECTS AND REPORT CONTENT DETERMINATION PROCESS

For each reporting cycle, We study the report contents to determine their relevance to our business, while ensuring that the report contains the most up to date issues related to sustainability and the interests of our stakeholders. This report contains three balanced aspects, namely economic, environmental and social. [G4-18]

Penentuan konten laporan Kami dasarkan pada empat prinsip GRI G4, yaitu:

1. Keterlibatan Pemangku Kepentingan - Prinsip ini mengharuskan pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses pelaporan, mulai dari penentuan konten laporan, hingga pemberian masukan terhadap laporan yang telah dipublikasikan;
2. Materialitas - Prinsip ini mengharuskan laporan berisi isu-isu atau aspek material yang diperlukan oleh pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan;
3. Konteks Keberlanjutan - prinsip ini mengharuskan laporan meliputi seluruh isu-isu keberlanjutan yang relevan bagi PLN;
4. Kelengkapan - Prinsip ini mengharuskan laporan dibuat dengan cakupan dan periode pelaporan tertentu serta didukung data yang lengkap untuk cakupan dan periode pelaporan.

Tahun ini Kami kembali menyelenggarakan workshop internal yang melibatkan berbagai unit kerja di PLN dan Stakeholder Group Survey. Pada kedua sesi diskusi tersebut, para pemangku kepentingan membantu Perseroan dalam menetapkan isu-isu material serta penyajian berbagai data dan informasi yang ingin mereka ketahui. Melalui kedua sesi tersebut, Kami berupaya untuk terus memperbaiki kualitas laporan keberlanjutan serta mengembangkan berbagai kebijakan dan target-target yang relevan dengan indikator kinerja utama GRI G4.

Sesuai Pedoman GRI G4, informasi mengenai pendekatan yang dilakukan untuk masing-masing aspek material yang telah ditetapkan Kami sampaikan lebih lanjut pada satu bab khusus dalam laporan ini, yakni bab Strategi Keberlanjutan PLN pada halaman 52. [\[G4-18\]](#)[\[G4-19\]](#)[\[G4-20\]](#)[\[G4-21\]](#)

HUBUNGI KAMI

Kami berkomitmen penuh untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus atas kualitas Laporan Keberlanjutan. Oleh karenanya Kami akan sangat berterima kasih jika ada masukan ataupun saran dari para pembaca maupun pemangku kepentingan yang disampaikan untuk memperbaiki kualitas Laporan Keberlanjutan PLN ini. Untuk permintaan, pertanyaan, masukan atau komentar atas laporan ini, dapat menghubungi: [\[G4-31\]](#)

The contents of this report are determined based on the four GRI G4 principles, namely:

1. Stakeholder Involvement - This principle requires the involvement of stakeholders in the reporting process, starting from determining the report contents to providing input on reports that have previously been published;
2. Materiality - This principle requires the report to contain issues or material aspects that are required by stakeholders for the decision making process;
3. Sustainability context - This principle requires the report to contain all the sustainability issues that are relevant to PLN;
4. Completeness - This principle requires the report to cover a certain reporting scope and period and to be supported by complete data for that reporting scope and period.

This year, we have once again organized internal workshops involving various work units from within PLN and conducted a Stakeholder Group Survey. In these two discussion sessions, our stakeholders helped the Company to determine the material issues, as well as the presentation of data and information that they wished to know. Through these two sessions, We worked to continue the improvement of our sustainability reporting and to develop various policies and targets relevant to the primary GRI G4 performance indicators.

In accordance with the GRI G4 Guidelines, information on the approach taken for each material aspect is presented in more detail in a specific section of this report, namely PLN's Sustainability Strategy on page 52.

[\[G4-18\]](#)[\[G4-19\]](#)[\[G4-20\]](#)[\[G4-21\]](#)

CONTACT US

We are fully committed to improve the quality of our Sustainability Report. Therefore, We greatly appreciate any input or advice from our readers and stakeholders that can help us improve the quality of this PLN Sustainability Report. For any requests, questions, input or comments on this report, please contact: [\[G4-31\]](#)

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

PT PLN (Persero)

 +62 21 725 1234 ext 4000
 +62 21 722 2328
 @ pln123@pln.co.id

 Jl. Trunojoyo Blok M-I / 135
Kebayoran Baru, Jakarta 12160,
Indonesia

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW – for Sustainable Development



STRATEGI KEBERLANJUTAN

SUSTAINABILITY STRATEGY

halaman page 52 - 63



Keberlanjutan usaha dalam jangka panjang sangat erat kaitannya dengan kemampuan manajemen beserta segenap jajarannya dalam berinteraksi dan menyelenggarakan hubungan positif yang memberi *mutual benefit* dengan para pemangku kepentingan. Untuk itu, Kami berupaya memenuhi harapan para pemangku kepentingan dengan menggunakan sumber daya yang ada seefisien mungkin dan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

The long-term sustainability of a business is closely related to the ability of its management and all its employees to interact and establish mutually beneficial, positive relationships with all stakeholders. To this end, We strive to fulfill the expectations of our stakeholders by utilizing the resources that we have in the most efficient and accountable manner possible.

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW - for Sustainable Development

Bagi Perseroan, interaksi positif berarti memahami dan berupaya memenuhi harapan para pemangku kepentingan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, keberlanjutan juga dipengaruhi oleh adanya pengertian dan kepercayaan dari pemangku kepentingan, bahwa Perusahaan telah memahami dan berupaya memenuhi harapannya melalui penyelenggaraan kegiatan operasional dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk memberikan hasil yang optimal.

Kami berupaya mempertemukan dua kepentingan tersebut melalui penyelenggaraan manajemen pemangku kepentingan sebagai bagian dari pelaksanaan strategi keberlanjutan. Untuk maksud tersebut, Kami telah mengidentifikasi dengan seksama grup pemangku kepentingan utama yang memiliki pengaruh dominan terhadap keberlangsungan usaha, yang terdiri atas pemegang obligasi, pegawai, Pemerintah/Regulator (sebagai pemegang saham maupun sebagai regulator-melalui OJK), legislator (DPR), mitra kerja/pemasok (vendor), pelanggan, kreditor, masyarakat sekitar dan media massa.

Kami menyelenggarakan komunikasi intensif dan mengelola keterlibatan pemangku kepentingan sesuai dengan karakteristik harapan yang melekat pada masing-masing kelompok pemangku kepentingan. Beberapa mekanisme yang dilakukan meliputi pelaksanaan hubungan dengan komunitas, pelaksanaan RUPS, forum Bipartit dan Tripartit dan penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkualitas baik melalui Program Pemberdayaan Lingkungan maupun Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

[G4-24] [G4-25] [G4-26] [G4-27]

Uraian ringkas mengenai interaksi dan pengelolaan pelibatan kepentingan yang dilakukan dalam menjaga keberlanjutan usaha Perseroan adalah:

1. Pemegang Saham

Kami secara rutin mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) minimal dua kali dalam setahun untuk melaporkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, termasuk kinerja tanggung jawab sosial perusahaan serta mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan. Dari pembahasan pokok-pokok agenda rapat, pemegang saham (RUPS) menetapkan arah perkembangan dan kebijakan strategis Perseroan. Di luar forum RUPS, Perseroan aktif terlibat dalam berbagai pembahasan dengan Pemerintah, melalui Kementerian ESDM yaitu merancang dan menyusun program pemenuhan listrik di seluruh wilayah Indonesia guna mendukung percepatan pertumbuhan perekonomian.

For the Company, positive interaction means understanding and striving to meet the expectations of our stakeholders by using the available resources efficiently and accountably. On the other hand, sustainability is also influenced by stakeholder understanding and trust that the Company has understood and is striving to fulfill their expectations by handling operational activities and managing resources effectively and efficiently to provide the optimum result.

We work to bring about these two interests by managing our stakeholders as part of our sustainability strategy. To this end, We have carefully identified the stakeholder groups that have a dominant influence on business continuity, namely bond holders, employees, the Government/Regulator (as shareholder and as regulator through the FSA), legislators (DPR), work partners / suppliers (vendors), customers, creditors, local communities and the mass media.

We communicate intensively and manage stakeholder involvement in accordance with the expectation characteristics of each group. Various mechanisms are utilized, including community relations, General Meetings of Shareholders, Bipartite and Tripartite forums and high quality corporate social responsibility programs implemented through the Environmental Empowerment Program and Partnership and Community Stewardship Program.

MANAGING STAKEHOLDER RELATIONS

[G4-24] [G4-25] [G4-26] [G4-27]

A brief description of our interaction and management of stakeholder involvement to maintain the Company's sustainability is as follows:

1. Shareholders

We routinely held a General Meeting of Shareholders (GMS) at least twice a year to report on the company's overall performance, including our corporate social responsibility performance and to ratify the company's work and budget plan. Through discussion of the points on the meeting agenda, the shareholders (GMS) can determine the Company's development direction and strategic policies. Outside the GMS forum, the Company is actively involved in several discussions with the Government through the Energy and Mineral Resources (ESDM) Ministry, to design and compile programs that satisfy the demand for electricity across all areas of Indonesia to support accelerated economic growth.

Kami juga bertemu secara rutin dengan perwakilan pemerintah melalui forum BUMN maupun forum khusus untuk membahas dan merencanakan pembangunan daerah, khususnya di bidang kelistrikan maupun melaksanakan pertemuan konsultatif guna merancang dan melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan di sekitar wilayah operasi yang dapat dilakukan agar mendapatkan hasil yang optimal.

2. Regulator

Sebagai salah satu perusahaan yang mengandalkan pendanaan bagi kegiatan pengembangan usaha dari pasar modal, melalui penerbitan obligasi nasional/internasional, Kami menjalin komunikasi intens dengan OJK (dahulu Batepam-LK) sebagai regulator di pasar modal Indonesia. Komunikasi intens dilakukan melalui forum pertemuan khusus, komunikasi tertulis maupun pemenuhan segala ketentuan yang berlaku di pasar modal termasuk penerbitan laporan tahunan, laporan triwulanan dan laporan lain yang dipersyaratkan.

3. Legislator

Komunikasi intens dengan legislator/ DPR dilakukan baik pada saat adanya agenda pembahasan mengenai aturan-aturan baru dibidang ketenagalistrikan, maupun pembahasan besaran subsidi listrik yang harus ditetapkan sebagai bagian dari anggaran belanja Pemerintah dan harus disetujui oleh DPR.

Rapat yang dilakukan dengan DPR biasanya juga dihadiri oleh berbagai pihak terkait, terutama Kementerian Keuangan, ESDM, Pekerjaan Umum, Kehutanan dan wakil Pemerintah lain yang terkait. Rapat dengan legislator ini tidak hanya berlangsung di DPR, namun juga berlangsung dengan DPRD. Intensitas komunikasi dan pelaksanaan rapat dengan kalangan Regulator dan Legislator ini cukup tinggi.

4. Pegawai

Kami secara rutin mengadakan pertemuan antara pihak perusahaan dengan SP-PLN (Serikat Pekerja PLN) dan perwakilan SPSI (Serikat Pegawai Seluruh Indonesia), sebagai wakil dari pihak pegawai. Melalui forum Bipartite ini seluruh persoalan menyangkut hubungan kerja dan permasalahan kepegawaian dibahas dan dicarikan penyelesaiannya untuk kepentingan bersama.

Guna menjaga dan meningkatkan hubungan dengan pegawai, PLN bersama SP-PLN menuangkan hak dan kewajiban masing-masing dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai pedoman kedua belah pihak dalam berinteraksi.

We also routinely meet with government representatives in the SOE forum, as well as in special forums to discuss and plan regional development specifically related to electrical power and for consultative meetings to design and implement corporate social responsibility programs in the vicinity of the company's operations for optimum results.

2. Regulator

As a company that relies on raising funds for development from the capital market through the issue of national / international bonds, We communicate intensely with the FSA (previously Batepam-LK) as the regulator for the Indonesian capital market. This intense communication occurs through special meeting forums, written communication and through compliance with all applicable capital market regulations, including the issuance of annual reports, quarterly reports and other reports as required.

3. Legislators

Intense communication with the legislators / DPR runs well through discussions on new regulations related to electrical power, as well as discussions on the amount of the electricity subsidy, which is set as part of the Government budget and has to be approved by the DPR.

Meetings with the DPR are usually attended by the relevant parties, in particular the Ministries of Finance, Energy and Mineral Resources, Public Works, Forestry and other relevant Government representatives. Meetings with legislators take place not only at the DPR, but also at the DPRD (regional government). The intensity of communications and meetings with the Regulator and Legislators is relatively high.

4. Employees

We routinely held meetings between the company and, acting as representatives of our employees, SP-PLN (the PLN Labor Union) and representatives of SPSI (All Indonesia Labor Union). Through this bipartite forum, all matters related to the work relationship and employment are discussed and solutions sought for mutual benefit.

To maintain and improve employee relations, PLN and SP-PLN have compiled the Collective Labor Agreement (CLA), which contains all the rights and obligations of both parties, as a guideline for interaction between both parties.

Selain penyusunan dan penerapan butir-butir PKB secara konsisten, Kami juga merealisasikan berbagai langkah strategis dalam pengelolaan SDM, guna meningkatkan kompetensi pegawai sekaligus menjamin peningkatan kinerja perusahaan, meliputi: pelaksanaan program pelatihan rutin baik di bidang operasional, manajemen maupun pelatihan kepemimpinan; penyelenggaraan pertemuan forum *Knowledge Management*, dan lain-lain.

5. Mitra Kerja / Supplier (Vendor) dan Asosiasi Industri Sejenis (4.13)

Kami memiliki pedoman kerja dan etika dalam melaksanakan kerja sama dengan semua mitra kerja untuk kepentingan bersama. Setiap permasalahan kerja sama senantiasa didiskusikan dan dikonsultasikan dengan berpedoman pada pedoman etika. Kesepakatan yang tercapai kemudian dituangkan dalam perjanjian kontraktual yang saling menghormati dan dijalankan untuk mengatur hubungan operasional yang baik dan saling menguntungkan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hubungan kerja dengan mitra kerja dan sebagai bagian dari peningkatan kualitas penerapan tata kelola, Kami melibatkan mitra kerja dalam deklarasi "PLN Bersih", disertai dengan himbauan agar mitra kerja dapat menjaga dan mendukung manajemen PLN dalam menerapkan seluruh butir-butir deklarasi tersebut. Kami juga menerapkan berbagai persyaratan yang mencakup standar mutu, sistem manajemen dan keselamatan kerja (SMIK3), serta sistem manajemen lingkungan (SML).

6. Kreditor

Kami memiliki eksposur pinjaman yang substansial, baik dalam bentuk kredit pinjaman langsung, kredit pinjaman penerusan dari kreditor bank swasta maupun bank pemerintah dan lembaga pemerintah di luar negeri serta eksposur pinjaman dalam bentuk surat hutang (obligasi) nasional maupun internasional. Untuk menjaga, meningkatkan dan mengantisipasi relasi di masa mendatang, Kami menyelenggarakan berbagai event dengan para kreditor maupun calon kreditor potensial sebagaimana biasa dilakukan oleh perusahaan terbuka.

7. Masyarakat Sekitar

Kami melaksanakan program kemitraan sesuai dengan potensi dan situasi wilayah, mengingat kondisi pada masing-masing daerah operasional berbeda, serta merancang program kemitraan yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya potensi masyarakat dan wilayah sekitar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, sekaligus menjaga keamanan aset Perseroan di wilayah terpencil maupun padat penduduk.

In addition to preparing and consistently implementing the points of the CLA, We have also implemented various strategic steps in Human Resource management to improve the competency of our employees, while ensuring improved performance for the company. These include routine training programs in operational, management and leadership skills; Knowledge Management forum meetings and others.

5. Suppliers (Vendors) and Similar Industry Associations (4.13)

We have work guidelines and ethics that require all cooperation with business partners to be for mutual benefit. All work cooperation issues are discussed and consulted with reference to our guidelines and code of conduct. The agreement reached is then placed into a mutually respectful contractual agreement and implemented to regulate good operational relations that are mutually beneficial.

In the interest of improving the quality of our work relationships with our business partners and as part of our efforts to improve and quality of our governance, We involve our business partners in the "Clean PLN" declaration, along with an appeal that our business partners help support PLN's management in applying the points of this declaration. We also apply various conditions encompassing quality standards, management systems and occupational health and safety (OHS), as well as environmental management systems (EMS).

6. Creditors

We have exposure to substantial loans, be they direct loans, two-step loans from private or state banks and overseas government institutions, as well as exposure to loans in the form of national and international bonds.

To safeguard, improve and anticipate future relations, We hold a range of events for creditors and potential creditors, as are normal for publicly listed companies.

7. Local Communities

We implement our partnership program in accordance with the local potential and situation, bearing in mind that conditions in the each of the operational areas may be different; we also design partnership programs that allow growth and development of potential in local communities and the local vicinity to improve welfare, while concurrently safeguarding the Company's assets in remote or densely populated areas.

Dalam merencanakan program dimaksud, Kami melibatkan tokoh masyarakat dan Pemda untuk menggali dan mengembangkan program-program yang dapat dilaksanakan. Kami juga membina hubungan baik dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berperan sebagai mitra, badan pengontrol dan penghubung antara pihak perusahaan, pemerintah dan masyarakat dengan melihat kondisi sebelum maupun setelah pelaksanaan. Selain itu, Kami juga bekerja sama dengan akademisi dan konsultan sebagai tenaga ahli yang dapat memberikan saran demi optimalisasi keberhasilan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan.

8. Konsumen

Untuk menjaga kepercayaan konsumen, Kami menyelenggarakan berbagai kegiatan di antaranya: temu pelanggan, layanan pengaduan pelanggan dan menjaga kualitas jasa pelayanan. Di samping itu, Kami juga melakukan evaluasi dan survei kepuasan pelanggan terhadap kualitas dan layanan PLN yang dilaksanakan oleh pihak independen.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hubungan dengan para pelanggan, Kami merealisasikan berbagai program peningkatan kualitas layanan pelanggan, meliputi: penyediaan layanan on-line PLN-123, Call-center 123, perbaikan layanan PPOB dengan menerapkan P2APST dan P2AT, percepatan layanan sambungan listrik dalam daftar tunggu, dan sebagainya.

9. Media Massa

Untuk mengkomunikasikan kinerja perusahaan kepada publik dan pada seluruh pemangku kepentingan, Kami melakukan berbagai program yaitu, jumpa pers media *gathering* untuk menjaga kepercayaan dan hubungan dengan media. Selain itu, PLN juga aktif mengelola beberapa media internal untuk mengkomunikasikan berbagai rencana perusahaan, keberhasilan dan hambatan yang dihadapi agar mendapatkan umpan balik yang positif. Perseroan menyelenggarakan beberapa event tertentu yang berhubungan dengan media massa, seperti: *press release*, *press conference*, *press briefing* dan *press tour* (kunjungan proyek bersama-sama awak media) yang diselenggarakan sesuai kebutuhan.

Adapun rekapitulasi pengelolaan hubungan dengan para pemangku kepentingan disampaikan dalam bentuk ringkas sebagai berikut.

During the design of these programs, We engage local community figures and the local government to explore and develop programs that can be implemented. We also maintain good relations with various NGOs, which play a role as partners, controllers and facilitator for the company, government and community, while noting conditions both pre and post program implementation. In addition, we also work with academics and consultants, who serve as experts and can provide advice to optimize the successful implementation of our corporate social responsibility programs.

8. Customers

To maintain customer trust, We conduct a variety of activities, including: meeting our customers, providing a customer complaints service and maintaining the quality of our service. In addition, we assess and survey customer satisfaction with regard to PLN's quality and service, which is implemented by an independent party.

To improve the quality of customer relations, We implement various programs, such as: the online service PLN-123, 123 Call Center, improvements to the bank payment point service (PPOB) by applying P2APST and P2AT, acceleration of electricity connections from the waiting list, etc.

9. Mass Media

To communicate the company's performance to the public and all our stakeholders, We hold a variety of meet the press events, or media gatherings, to maintain the trust of and relationships with the press. In addition, to obtain positive feedback PLN actively manages internal media to communicate the company's plans, successes and obstacles it is facing. The Company holds various events related to the mass media, including: press releases, press conferences, press briefings and press tours (project site visits with media crews), which are organized as required.

Following is a summary of our stakeholder management, presented as an overview.

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW – for Sustainable Development

[G4-24] [G4-25] [G4-26] [G4-27]

Jenis Pemangku Kepentingan Stakeholder Type	Basis Penetapan Appointed Basis	Metode Engagement Method of Engagement	Frekuensi Frequency	Ekspektasi Pemangku Kepentingan Stakeholder Expectation
Pelanggan	1. Pengaruh 2. Ketergantungan	1. Survei kepuasan pelanggan (CSI) • Layanan pengaduan 2. Pusat pelayanan pelanggan • Temu pelanggan • Program layanan khusus	• Disesuaikan • Disesuaikan	1. Mutu sambungan listrik dan kecukupan daya yang terjaga. 2. Bebas pemadaman bergilir dan drop daya 3. Kemudahan penambahan daya dan penyelesaian keluhan 4. Pelayanan yang melebihi harapan. 1. Maintaining the quality of electrical power connections and providing sufficient power. 2. Freedom from rolling blackouts and reductions in power supplied 3. Ease of obtaining additional power and complaint settlement 4. Service exceeding expectations
Customers	1. Influence 2. Dependence	1. Customer Satisfaction Survey (CSI) • Complaint service 2. Customer Service Centers • Customer meetings • Special Service Programs	• As required • As required	
Pemegang saham dan Investor	Tanggung Jawab	1. RUPS 2. <i>Investor road shows</i> 3. Analyst Update & Conference Calls 4. <i>Plant visit</i> 5. RUPO(Rapat Umum Pemegang Obligasi)	• 2 kali (minimal) • 1 kali • Disesuaikan • Disesuaikan • Disesuaikan	1. Menjaga dan meningkatkan nilai investasi melalui peningkatan kinerja Perseroan. 2. Terpenuhinya hak-hak pemegang obligasi. 3. Keterbukaan informasi terhadap hal-hal yang substantial dan kejelasan arah pengembangan usaha 4. Menghormati hak-hak pemegang saham sesuai UU, Peraturan, AD/ART. 1. Maintaining and increasing investor value by improving the Company's performance. 2. Fulfilling the rights of bond holders 3. Disclosure of information on substantial matters and clear direction of business development 4. Respecting shareholder rights as per legislation, regulations and the company's articles of association
Shareholders and Investors	Responsibility	1. GMS 2. <i>Investor road shows</i> 3. Analyst Updates & Conference Calls 4. Plant visits 5. Bond Holder Meetings	• 2 time (minimum) • 1 time • 10 times • As required • As required	
Pegawai	Tanggung Jawab	1. Melalui SP-PLN 2. <i>Allignment organisasi SDM</i> 3. <i>Training/hearing rutin</i>	• Minimal 1 kali setahun atau sesuai kebutuhan	1. Kejelasan hak dan kewajiban. 2. Kejelasan atas penilaian kompetensi, jenjang karir dan keseimbangan remunerasi dengan kinerja. 3. Kesetaraan dalam jenjang karir dan remunerasi. 4. Tidak ada praktik diskriminasi. 5. Terjaminnya keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. 6. Terjadinya kenyamanan lingkungan kerja 1. Clarity of rights and obligations 2. Clarification of competency assessment, career path and remuneration appropriate to performance. 3. Equality in career path and remuneration. 4. No discrimination. 5. Guaranteed occupational security, health and safety. 6. Maintenance of workplace comfort
Employees	Responsibility	1. Through SP-PLN 2. HR Organization Alignment 3. Training/ routine hearings	• At least 1 time a year, or as required	

Jenis Pemangku Kepentingan Stakeholder Type	Basis Penetapan Appointed Basis	Metode Engagement Method of Engagement	Frekuensi Frequency	Ekspektasi Pemangku Kepentingan Stakeholder Expectation
Pemerintah / Pembuat peraturan Government / Regulator	1. Perwakilan 2. Pengaruh 1. Representative 2. Influence	1. Pertemuan Bipartit 2. Dengar Pendapat DPR 3. Kunjungan Kerja ke Lapangan 1. Bipartite Meetings 2. House of Representative hearings 3. Working Site Visits	1. Disesuaikan 2. Disesuaikan 3. Disesuaikan 1. As required 2. As required 3. As required	1. Terjalinnya hubungan yang harmonis dan konstruktif atas dasar kejujuran dengan regulator. 2. PLN dan segenap karyawannya tunduk dan mematuhi hukum, perundangan dan peraturan 3. PLN berkontribusi positif terhadap masyarakat sekitar. 4. Penurunan jumlah subsidi dari anggaran negara 1. Harmonious and constructive relations based on honesty with the regulator. 2. PLN and its workforce obey and comply with the law, legislation and regulations. 3. PLN contributes positively to local communities. 4. A reduction in subsidy from the state budget
Mitra Kerja (vendor, supplier, agen, reseller, installer) Business Partners (vendors, suppliers, agents, resellers, installers)	1. Pengaruh 2. Ketergantungan 1. Influence 2. Dependence	1. Training khusus untuk operator tertentu 2. Kontrak lelang dan pengadaan 3. Penilaian kinerja supplier 4. Manajemen Vendor 5. Seleksi supplier 6. Penerapan e-Procurement 1. Special training for certain operators 2. Tender and procurement contracts 3. Supplier performance assessment 4. Vendor management 5. Supplier selection 6. e-Procurement implementation	1. Minimal 1 kali setahun 2. Disesuaikan 3. Minimal 1 thn sekali 4. Disesuaikan 5. Minimal 1 thn sekali 6. Disesuaikan 1. At least 1 time a year 2. As required 3. At least 1 time a year 4. As required 5. At least 1 time a year 6. As required	1. Proses pengadaan secara fair dan transparan 2. Seleksi dan evaluasi secara obyektif dalam pemilihan mitra. 3. Prosedur administrasi pengadaan yang akurat namun simple 4. Penyelesaian pembayaran produk dan jasa yang tepat waktu. 5. Hubungan saling menguntungkan . 1. Fair and transparent procurement process 2. Objective selection and assessment of business partners 3. An accurate and simple administrative procedure for procurements 4. Timely settlement of product and service payments 5. Mutually beneficial growth.
Kreditor Creditors	Ketergantungan Dependence	1. Plant visit 2. Conference call 3. Club deal 4. Presentasi Rencana Aksi Korporasi 1. Plant visit 2. Conference call 3. Club deal 4. Planned Corporate Action Presentation	1. Disesuaikan 2. Disesuaikan 3. Disesuaikan 4. Disesuaikan 1. As required 2. As required 3. As required 4. As required	1. Kejelasan rencana pengembangan. 2. Pembayaran kewajiban tepat waktu. 3. Transparansi kondisi operasional. 4. Update informasi mengenai kondisi operasional dan finansial terakhir. 1. Clarity on development plans 2. Timely payment of obligations 3. Operational transparency 4. Updated operational information and up to date financial information.
Media massa Mass Media	Perwakilan Representative	1. Press release 2. Media gathering 3. Press conference 4. Press briefing 5. Press Tour 1. Press releases 2. Media gatherings 3. Press conferences 4. Press briefings 5. Press Tours	1. Disesuaikan 2. Disesuaikan 3. Disesuaikan 4. Disesuaikan 5. Disesuaikan 1. As required 2. As required 3. As required 4. As required 5. As required	1. Akurasi objek pemberitaan. 2. Informasi terkini. 3. Penyampaian berita tepat waktu. 4. Transparansi kondisi operasional dan finansial. 1. Accurate news 2. Up to date information. 3. Timely delivery of news 4. Operational and financial transparency

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW – for Sustainable Development

Jenis Pemangku Kepentingan Stakeholder Type	Basis Penetapan Appointed Basis	Metode Engagement Method of Engagement	Frekuensi Frequency	Ekspektasi Pemangku Kepentingan Stakeholder Expectation
Masyarakat Communities	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perwakilan 2. Kedekatan 1. Representative 2. Proximity 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Musyawarah dalam perencanaan. 2. Pengawasan realisasi program bersama-sama <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan filantropis 1. Consensus during planning 2. Joint overseeing of program realization <ul style="list-style-type: none"> • Philanthropic activities 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Disesuaikan 2. Disesuaikan 3. Disesuaikan 1. As required 2. As required 3. As required 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terjalinnya hubungan yang serasi dan harmonis. 2. Meminimalisir dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan. 3. Turut serta dalam kegiatan pelestarian lingkungan. 4. Melaksanakan program revegetasi dan reboisasi. 5. Kontribusi positif terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat sekitar. 1. Harmonious relationships 2. Minimizing environmental impact from company operations 3. Participation in environmental preservation 4. Revegetation and reforestation programs 5. Positive contribution to the economic, social and environmental life of local communities
Legislator	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perwakilan 2. Pengaruh 1. Representative 2. Influence 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dengar pendapat 2. Sidang Komisi 3. Pertemuan Tripartit 1. Hearings 2. Commission meetings 3. Tripartite meetings 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Disesuaikan 2. Disesuaikan 3. Disesuaikan 1. As required 2. As required 3. As required 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terjalinnya hubungan yang harmonis dan konstruktif atas dasar kejujuran dengan legislator. 2. PLN beroperasi semakin efisien dan transparan 3. PLN berkontribusi positif terhadap masyarakat sekitar. 4. Penurunan jumlah subsidi dari anggaran negara. 1. Harmonious and constructive relationships based on honesty with legislators. 2. PLN operates more efficiently and transparently 3. PLN's contribute positively to local communities 4. A reduction in subsidy from the state budget

ANALISA MATERIALITAS

Dari interaksi dengan para pemangku kepentingan tersebut, Kami menentukan prioritas atas isu-isu keberlanjutan sebagai dasar penetapan aspek materialitas yang disampaikan sebagai pokok bahasan Laporan Keberlanjutan. Identifikasi materialitas dari isu-isu keberlanjutan tersebut dilakukan sesuai dengan pedoman Global Reporting Initiatives Reporting Guidelines (GRI) G4. Adapun tujuan dari proses identifikasi materialitas adalah menyelaraskan strategi pengembangan perusahaan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan para pemangku kepentingan.

MATERIALITY ANALYSIS

Based on interaction with our stakeholders, We determine the priority of sustainability issues as a basis for the determination of the materiality aspects to be presented for discussion in our Sustainability Report. We identify the materiality of these sustainability matters in accordance with the Global Reporting Initiatives GRI G4 Reporting Guidelines. The purpose of the materiality identification process is to align the company's development strategy to fulfill the needs of all our stakeholders.



Untuk itu, pada Laporan Keberlanjutan 2015 ini Kami mengelompokkan aspek material tersebut ke dalam matriks berdasarkan kriteria sebagai berikut: [G4-18]

To this end, in our 2015 Sustainability Report, we have grouped these material aspects in a matrix based on the following criteria: [G4-18]

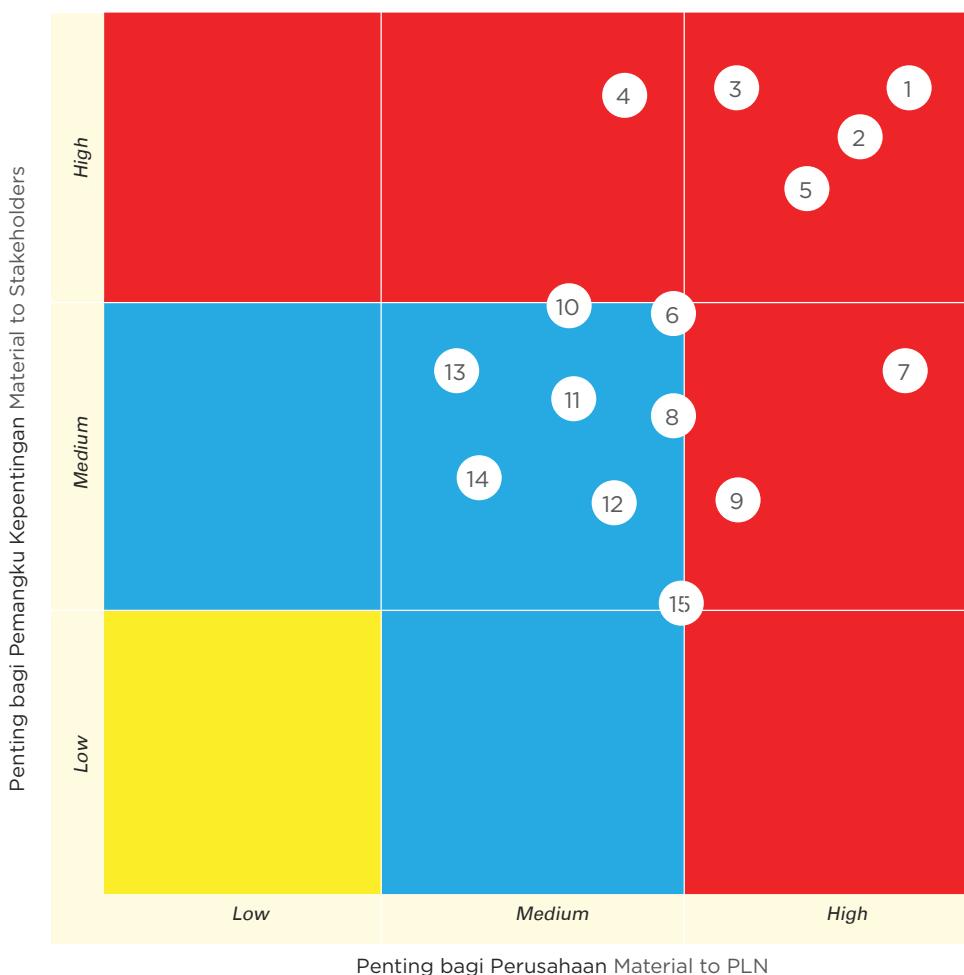
Tinggi High	Isu-isu yang paling relevan dan memiliki dampak yang besar terhadap usaha kami dan para pemangku kepentingan. The most relevant issues with the greatest impact on our business and our stakeholders.
Sedang Medium	Isu-isu yang termasuk kategori ini akan dilaporkan tetapi tidak selalu didukung dengan indikator kualitatif. Beberapa isu hanya memiliki dampak terbatas terhadap usaha PLN dan para pemangku kepentingan kami. Issues in this category are reported but are not always supported by qualitative indicators. Some of these issues only have a limited impact on PLN's business and our stakeholders.
Rendah Low	Isu-isu ini memiliki nilai materialitas yang rendah dan tidak akan dibahas lebih lanjut dalam laporan keberlanjutan ini. These issues have a low materiality value and are not discussed further in this sustainability report.

Sementara hasil analisa terhadap beberapa topik material bagi Pemangku Kepentingan maupun bagi Perusahaan, di gambarkan dalam Grafik Materialitas sebagai berikut.

[G4-18]

Meanwhile, the result of this analysis of various topics material to our stakeholders and the company are illustrated in the following Materiality Graph. [G4-18]

Grafik Materialitas Graphic Materiality



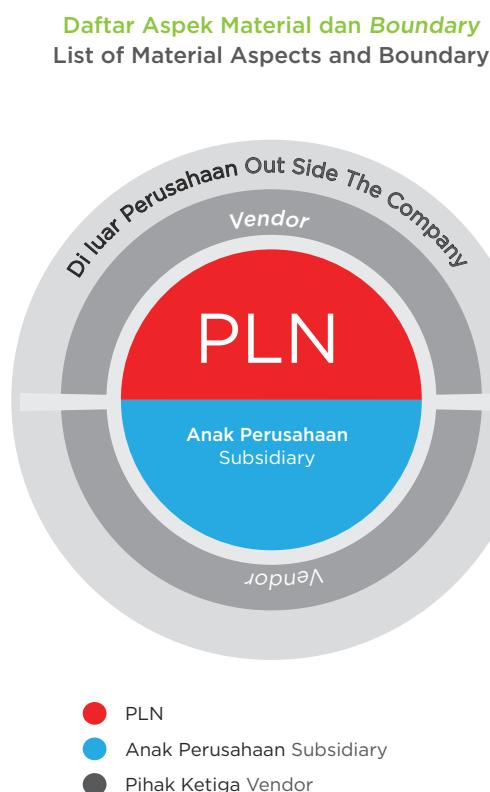
1. Kapasitas dan distribusi jaringan listrik ke seluruh wilayah Indonesia
2. Ketersediaan dan keandalan listrik
3. Keamanan pelanggan
4. Keamanan pegawai
5. Layanan pelanggan yang baik
6. Investasi pengembangan jaringan dan sumber energi masa depan
7. Efisiensi pengelolaan sumber energi
8. Praktik ketenagakerjaan
9. Tata kelola perusahaan
10. Program pemberdayaan masyarakat
11. Penetapan tarif listrik yang berkeadilan
12. Kepatuhan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
13. Pelestarian lingkungan
14. Jejak lingkungan operasional
15. Profitabilitas

1. Power capacity and distribution network to all areas in Indonesia
2. Power availability and reliability
3. Customer safety
4. Employee safety
5. Excellent customer service
6. Investment in network expansion and future energy sources
7. Efficient resource management
8. Labor practices
9. Corporate governance
10. Community development programs
11. Determination of fair electricity tariffs
12. Compliance with prevailing rules and regulations
13. Environmental conservation
14. Operational footprint on the environment
15. Profitability

PILAR STRATEGI KEBERLANJUTAN PLN 2015

Hasil analisa terhadap aspek materialitas tersebut dijadikan dasar dalam mengembangkan kebijakan keberlanjutan PLN di tahun 2015. Prioritas pelaksanaan program keberlanjutan ini selanjutnya diinterpretasikan menjadi pilar strategi keberlanjutan PLN. Melalui pilar, ini diharapkan PLN mampu memenuhi seluruh harapan para pemangku kepentingan dan menjadi acuan bagi insan PLN dalam menjalankan roda usaha untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan. [G4-19]

Sesuai hasil identifikasi aspek material, Kami menyusun Laporan Keberlanjutan dengan menyajikan uraian, data dan keterangan dengan batasan-batasan sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut.



PLN's SUSTAINABILITY STRATEGY PILLARS IN 2015

The results of this materiality aspect analysis were formed the basis of PLN's sustainability policy development in 2015. We then interpreted the priority implementation of this sustainability program as PLN's sustainability strategy pillars. By referring to these pillars, PLN is hoped to fulfill all stakeholder expectations and use them as a reference for PLN's workforce in driving the wheels of business to achieve the Company's Vision and Mission. [G4-19]

In accordance with the identification of these material aspects, We have compiled this Sustainability Report with the presentation of descriptions, data and information with the boundaries illustrated in the chart below.

Aspek Material Material Aspect		
Lingkungan Environmental	●	●
Ketenagakerjaan Labor Practice	●	●
Anti Korupsi Anti Corruption	●	●
Kepatuhan Compliance	●	●
Hak Asasi Human Rights	●	●
Dampak Ekonomi tidak Langsung Indirect Economic Impacts	●	●
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Health and Safety	●	●
Pelatihan dan Pendidikan Training & Education	●	●
Keragaman dan Kesempatan Diversity & Equal Opportunity	●	●
Material Materials	●	●
Energi Energy	●	●
Emisi Emissions	●	●
Produk dan Jasa Product & Services	●	●
Dana Lingkungan Environment Expenditures	●	●
Masyarakat Lokal Local Community	●	●

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW – for Sustainable Development



PROFIL PLN

PLN PROFILE

halaman page 54 - 86



Kami bergerak dibidang usaha pendistribusian tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit listrik yang bertenaga air, diesel, uap, tenaga angin maupun tenaga surya, dengan bahan bakar minyak, batubara, gas dan panas bumi ke pengguna akhir yaitu kawasan industri, komersial, pemukiman maupun sarana publik. Seiring dengan derap pembangunan yang terus berjalan, kini kami tengah menyelesaikan proyek pembangunan ketenagalistrikan dengan nama Program Pembangkit 35.000 MW hingga tahun 2019 mendatang untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di seluruh Indonesia.

We are engaged in the business of electricity distribution from hydro, diesel, steam, wind and solar power plants, using various fuels such as oil, coal, gas and geothermal, to end users consisting of industrial estates, commercial areas, housing areas, and public facilities. In line with the pace of development, we are currently completing the 35,000 MW Power Plant Development Program, which will be carried out until 2019 to fulfill the demand of the Indonesian population.

NAMA & ALAMAT

NAME & ADDRESS

Mengemban tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, PT PLN (Persero) didirikan sebagai suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan dan pendistribusian tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit listrik yang bertenaga air, diesel, uap, tenaga angin maupun tenaga surya, dengan bahan bakar minyak, batubara, gas dan panas bumi ke pengguna akhir yaitu kawasan industri, komersial, pemukiman maupun sarana publik. [G4-8]

Assuming responsibility for the management of resources that affect many lives, PT PLN (Persero) was established as a company engaged in the supply and distribution of electrical power from power plants fired by water, diesel, steam, wind and solar power, fuel oil, coal, gas and geothermal energy, to end users, namely industrial areas, commercial, residential and public facilities. [G4-8]

[G4-3] [G4-4] [G4-5] [G4-7] [G4-9] [G4-10] [G4-13]

Nama Name	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Bidang Usaha Line of Business	Pembangkitan, Distribusi, Transmisi dan Jasa lain terkait kelistrikan Generation, distribution, transmission and other services related to electricity
Kepemilikan Ownership	100% Pemerintah Indonesia The Government of Indonesia 100%
Alamat Address	<p>Kantor Pusat Head Office PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Jl. Trunojoyo Blok M-I No.135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia Tel.+62 21 7251234, 7250550, 7261122 Fax.+62 21 7221330 Email: pln123@pln.co.id Website: www.pln.co.id.</p> <p>Alamat Kontak Contact Center Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Tel. +62 21 725 1234 ext 4000 Fax. +62 21 722 2328 Email: pln123@pln.co.id Jl. Trunojoyo Blok M-I No.135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia</p>
Tanggal Pendirian Date of Establishment	<p>1 Januari 1961, dengan nama Jawatan Listrik dan Gas dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. 1 January 1961, with the name of Jawatan Listrik and Gas under the Ministry of Public Works and Energy.</p>
Dasar Hukum Pendirian	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah No 1 s/d tanggal 27 Oktober 1945 berdiri sebagai Jawatan Listrik dan Gas. Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1961, diganti sebagai Perusahaan Negara, disebut sebagai Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965, dibentuk sebagai Perusahaan Listrik Negara. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972, tanggal 3 Juni 1972, ditegaskan menjadi Perum Perusahaan Listrik Negara. Akta 169, 30 Juli 1994 dari Sutjipto, Notaris, Perum PLN dirubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT PLN (Persero). <ol style="list-style-type: none"> Government Regulation Num. 1 until dated 27 October 1945, established as Jawatan Listrik and Gas. Government Regulation Num. 67/1961, changed to State Company (Perusahaan Negara), and called Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara. Government Regulation Num. 19/1965, established as Perusahaan Listrik Negara. Government Regulation Num. 18/1972, dated 3 June 1972, affirmed as Perum Perusahaan Listrik Negara. Act Num. 169, 30 July 1994 from Sutjipto, Notary, Perum PLN was changed to a Limited Liability Company under the name of PT PLN (Persero).
Modal Dasar Authorized Capital	Rp63 triliun trillion.
Modal ditempatkan dan disetor penuh Issued and Fully Paid Capital	Rp46,2 triliun trillion.
Jumlah Tenaga Kerja per 2015 Total Number of Employees	47.594 orang



Kantor Pusat Head Office

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

- 🏡 Jl. Trunojoyo Blok M - I No. 135
Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
- 📞 Tel.+62 21 7251234, 7250550, 7261122
- 📠 Fax.+62 21 7221330
- 🌐 Website: www.pln.co.id

Alamat Kontak Contact Center

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

- 📞 Tel.: +62 21 725 1234 ext 4000
- 📠 Fax.: +62 21 722 2328
- ✉ Email: pln123@pln.co.id
- Jl. Trunojoyo Blok M - I No. 135
- 🏡 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia

BIDANG USAHA

LINE OF BUSINESS

KEGIATAN USAHA

Sesuai Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan serta Anggaran Dasar Perusahaan, bidang usaha PLN adalah : Menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Sesuai Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan serta Anggaran Dasar Perusahaan, bidang usaha PLN, adalah:

1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup:
 - Pembangkitan tenaga listrik,
 - Penyaluran tenaga listrik,
 - Distribusi tenaga listrik,
 - Perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik,
 - Pengembangan penyediaan tenaga listrik,
 - Penjualan tenaga listrik.
2. Menjalankan usaha penunjang tenaga listrik yang mencakup:
 - Konsultansi ketenagalistrikan,
 - Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan,
 - Pemeriksaan dan pengujian peralatan ketenagalistrikan,
 - Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan,
 - Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik,
 - Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
 - Sertifikasi kompetensi tenaga teknik, ketenagalistrikan.
3. Kegiatan-kegiatan lainnya mencakup:
 - Pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan sumber energi lainnya untuk tenaga listrik,
 - Jasa operasi dan pengaturan (*dispatcher*) pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik,
 - Industri perangkat keras, lunak dan lainnya di bidang ketenagalistrikan,
 - Kerja sama dengan pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi terkait dengan ketenagalistrikan,
 - Usaha jasa ketenagalistrikan.

Lebih lanjut lagi, bidang usaha PLN mencakup juga:

1. Kegiatan perencanaan pengembangan fasilitas tenaga listrik (pembangkitan, transmisi dan distribusi umum) dan penunjang, rencana pendanaan, pengembangan usaha, pengembangan organisasi, dan SDM.

BUSINESS ACTIVITIES

In accordance with Law Num. 30 of 2009 regarding Electricity and the Company's Articles of Association, the Company's lines of business are: Providing electricity for the public interest.

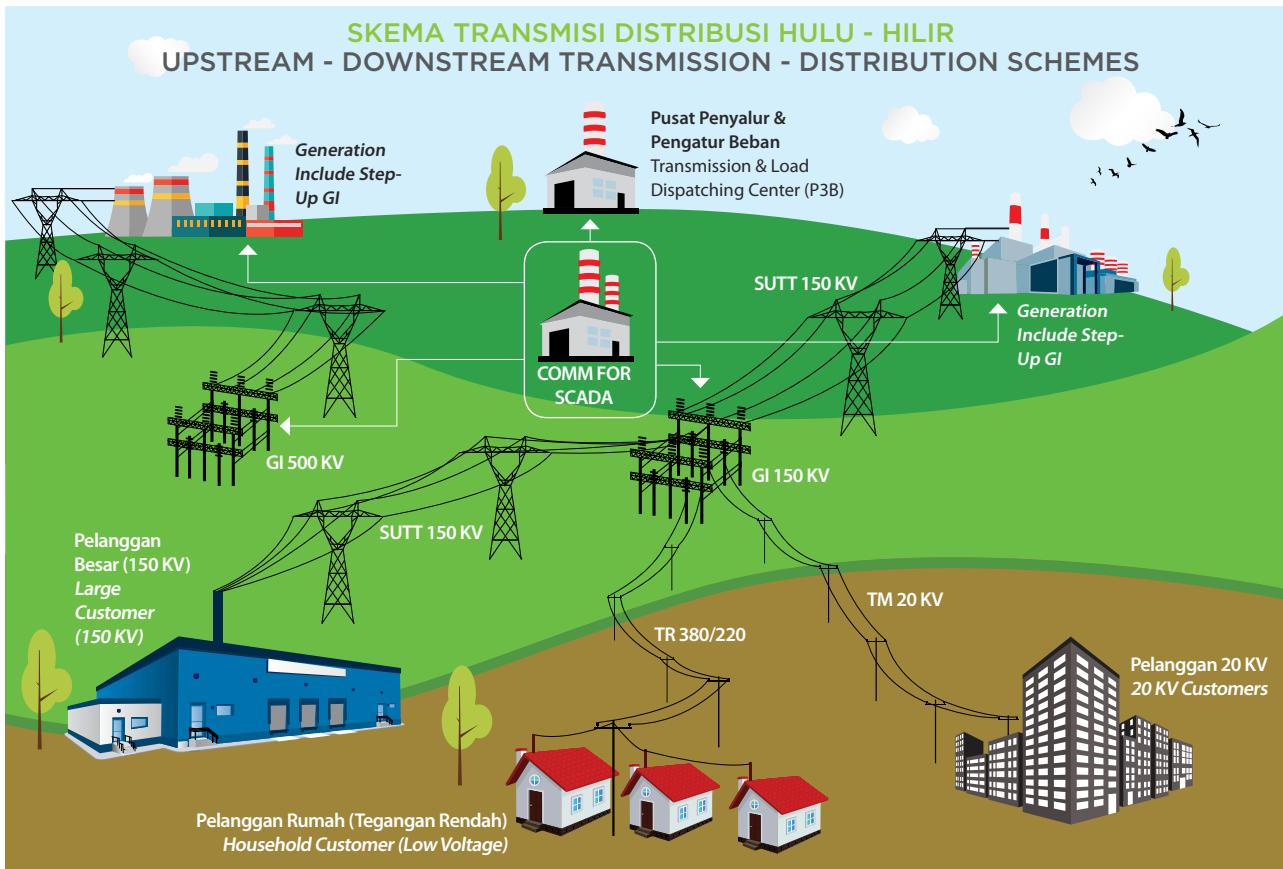
The Company's lines of business

In accordance with Law Num. 30 of 2009 regarding Electricity and in the Company's Articles of Association, the Company's lines of business are:

1. Provision of electrical power includes:
 - Generation of electricity,
 - Transmission of electricity,
 - Distribution of electricity,
 - Planning and constructing facilities to supply electrical power,
 - Development of electricity supply,
 - Sales of electricity.
2. Provision of services' business unit to support electricity services includes:
 - Electricity consultation,
 - Construction and installation of electrical power equipment,
 - Assessment and testing of electrical power equipment,
 - Operation and maintenance of electrical power equipment,
 - Laboratory of electrical power equipment and consumer testing,
 - Certification of electrical power equipment and consumer,
 - Certification of competence for electricity technician.
3. Other activities include:
 - Management and utilization of natural resources and other energy sources in the interests of electrical power,
 - Operating and dispatching services for generation, transmission, distribution and retail sales of electricity,
 - Building the industry of hardware, software and equipment related to industry of electricity power,
 - Cooperation with other parties and institutions related industry to electrical power in the fields of development, operations, telecommunications and other information related to electrical power,
 - Electricity services business.

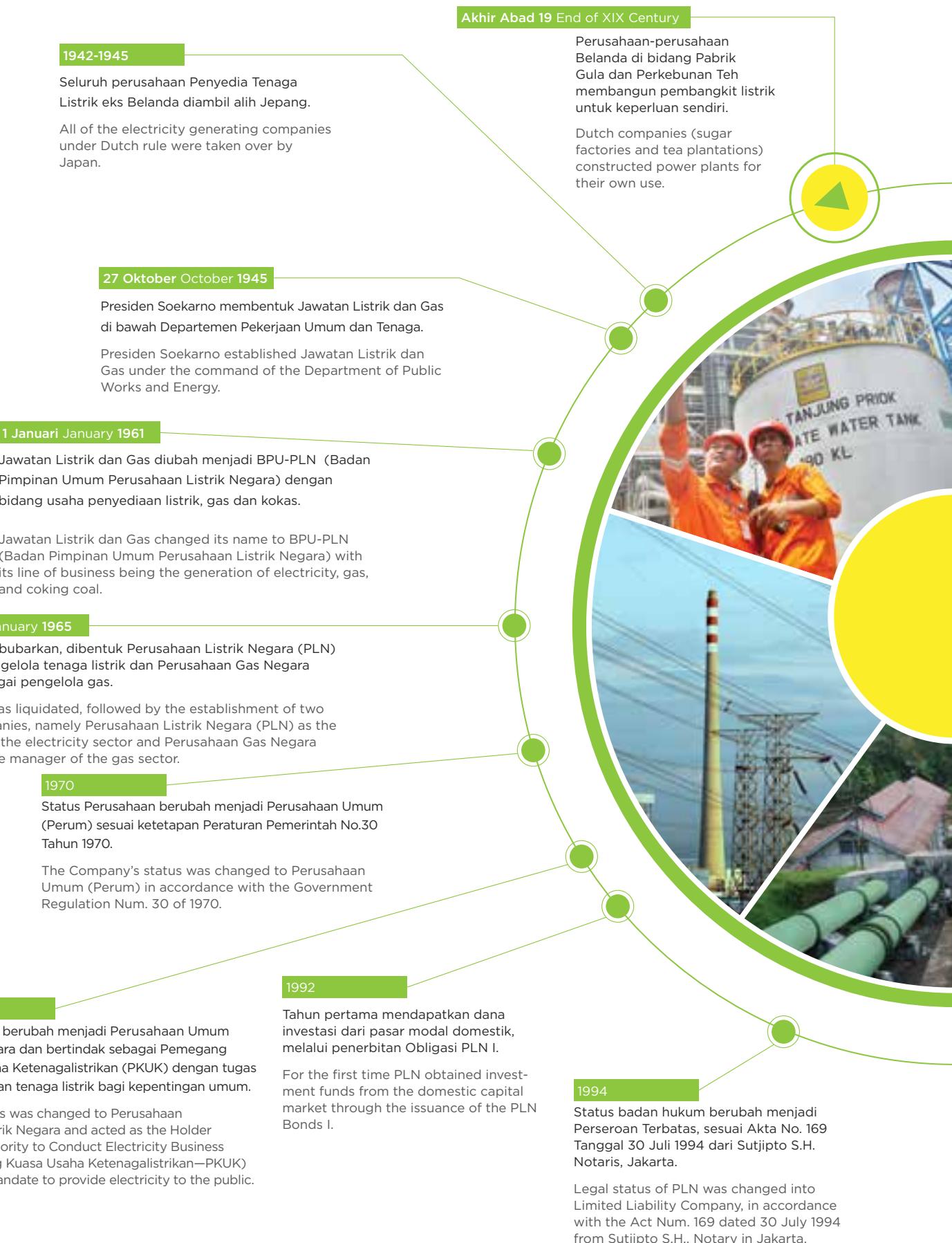
PLN's business also focuses on other services related to electricity as follows:

1. Planning and development activities of electric power facilities (generation, transmission and distribution) and supporting activities of budgeting, business development, organization development and human resources.



2. Kegiatan pembangunan konstruksi sarana penyediaan tenaga listrik pembangkitan, transmisi dan gardu induk.
 3. Kegiatan pengusahaan/operasi pusat-pusat pembangkit tenaga listrik yang terdiri dari: Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG-gas turbine); Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). PLN juga menjalankan kegiatan sewa pembangkit dan pembelian tenaga listrik yang diproduksi oleh pusat-pusat pembangkit tenaga listrik swasta.
 4. Kegiatan riset dan penunjang berkaitan dengan bidang kelistrikan.
Produk dan jasa yang dihasilkan:
 - a. Jasa layanan dan penyediaan tenaga listrik,
 - b. Jasa sertifikasi peralatan dan instalasi ketenagalistrikan,
 - c. Jasa konsultasi ketenagalistrikan,
 - d. Jasa pembangunan, pemeliharaan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan,
 - e. Jasa pengembangan ketenagalistrikan (riset dan penunjang),
 - f. Jasa lainnya di bidang ketenagalistrikan.
- Jasa-jasa yang disebutkan di atas dilaksanakan oleh PLN melalui 15 Unit Wilayah, 7 Unit Distribusi, 3 Unit Pembangkitan, 3 Unit Transmisi, 2 Unit Pusat Penyaluran, 16 Unit Induk Pembangunan dan 6 Unit Pusat / Jasa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
2. Construction of electricity infrastructures, including construction of power generating facilities, transmission and substations (transformer facility station).
 3. Utilization and commercialization activities of power plants, which consist of steam power plants, hydro power plants, gas turbine power plants, geothermal power plants, diesel power plants, solar cell power plants and wind power plants. PLN also purchases electrical power produced by private power plants and rents other public power plants to be utilized.
 4. Research and development, activities and other related to electricity.
Products and Services:
 - a. Service provision and the provision of electricity,
 - b. Equipment certification and electrical power installation,
 - c. Electrical power consultation,
 - d. Building, maintaining and installing equipment to produce electrical power,
 - e. Electrical power development services (research and support),
 - f. Other services related to electrical power.
- The services mentioned above are conducted by PLN through its 15 Regional Units, 7 Distribution Units, 3 Generation Units, 3 Transmission Units, 2 Dispatcher Centre and Transmission Units, 16 Core Development Units and 6 Central/Service Units which spread across the entire region of Indonesia.

TONGGAK SEJARAH MILESTONE





VISI, MISI, MOTO & NILAI-NILAI PERUSAHAAN

VISION, MISSION, MOTTO AND VALUES OF THE COMPANY



Visi

DIAKUI SEBAGAI PERUSAHAAN KELAS DUNIA YANG BERTUMBUH KEMBANG, UNGGUL DAN TERPERCAYA DENGAN BERTUMPU PADA POTENSI INSANI.

Misi

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Keterangan:

Pernyataan visi dan misi telah disepakati oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2002 dan telah dideklarasikan pada saat Hari Listrik Nasional 27 Oktober 2002.

Vision

TO BE ACKNOWLEDGED AS A GROWING, SUPERIOR AND TRUSTED WORLD-CLASS COMPANY, SUPPORTED BY ITS COMPETENT HUMAN RESOURCES.

Mission

1. Running an electricity business and other related sectors, oriented to customer satisfaction companies members and shareholders.
2. Making electricity as a medium to improve quality of life of the public.
3. Making every effort for electricity as an economic booster.
4. Operating an environmentally friendly business.

Note:

The statement of vision and mission has been approved by the Board of Directors and Commissioners in 2002 and declared on the National Electricity Day on October 27, 2002.

BUDAYA PERUSAHAAN

CORPORATE CULTURE

Motto

Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik
Electricity For Better Life

- **SALING PERCAYA** Suasana saling menghargai dan terbuka diantara sesama anggota perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan akan integritas, itikad baik, dan kompetensi dari pihak-pihak yang saling berhubungan dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang bersih dan etis.
- **INTEGRITAS** Wujud dari sikap anggota perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kejujuran, keselarasan antara perkataan dan perbuatan, dan rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan dan pemanfaatan kekayaan perusahaan untuk kepentingan baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta rasa tanggung jawab terhadap semua pihak yang berkepentingan.
- **PEDULI** Cerminan dari suatu niat untuk menjaga dan memelihara kualitas kehidupan kerja yang dirasakan anggota perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka bertumbuh kembang bersama, dengan dijiwai kepekaan setiap permasalahan yang dihadapi Perusahaan serta mencari solusi yang tepat.
- **PEMBELAJAR** Sikap anggota perusahaan untuk selalu berani mempertanyakan kembali sistem dan praktik pembangunan, manajemen dan operasi, serta berusaha menguasai perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir demi pembaharuan Perusahaan secara berkelanjutan.

- **MUTUAL TRUST** An atmosphere of mutual trust and openness between fellow members of the company based on a belief in integrity, good faith and competence from parties connected in the implementation of clean and ethical business practice.
- **INTEGRITY** The manifestation of an attitude shown by members of the company in which they consistently show honesty, harmony between words and deeds, and a sense of responsibility toward company management and use of corporate property short and long-term benefit, as well as a sense of responsibilities toward all stakeholders.
- **CARE** A reflection of the intention to protect and care for the worklife quality felt by company members and stakeholders growing together imbued with sensitivity toward problems faced by the Company and the desire to find the right solution.
- **LEARNING** The attitude of company members who always have the courage to question the system and practices of development, management and operations, as well as mastering cutting-edge science and technology for the renewal and sustainability of the Company.

STRATEGI UTAMA PERUSAHAAN

MAJOR CORPORATE STRATEGIES

Dalam rangka mencapai tujuan strategis Perusahaan, PLN telah menetapkan 8 strategi utama perusahaan; 5 strategi berkaitan dengan fungsi bisnis inti dan 2 strategi sebagai *enabler*, dan strategi sebagai ultimate result dari strategi lainnya. Delapan strategi utama adalah sebagai berikut:

In order to achieve the Company's strategic objectives, PLN has determined eight main corporate strategies; 5 strategies are related to the core business functions while 2 are enablers; the final strategy is the ultimate result of the other strategies. These eight main strategies are as follows:



MENGOPTIMALKAN EKSPANSI KAPASITAS DAN PEMBIAYAAN

Tujuan strategis dimensi kapasitas dan pembiayaan adalah untuk optimalisasi ekspansi kegiatan berikut : Bauran bahan bakar dengan biaya terendah dan meningkatkan peluang untuk memperoleh sumber dana yang dibutuhkan.

OPTIMIZING CAPACITY EXPANSION AND FINANCING.

The strategic objective of the capacity and financing dimension is to optimize expansion of the following activities: the energy mix with the lowest cost and increased opportunity to obtain the necessary funds.



MENGOPTIMALKAN BIAYA ENERGI PRIMER

- Memastikan memperoleh harga energi primer terendah atau sesuai keekonomiannya tanpa mengabaikan kualitasnya
- Mengamankan kecukupan pasokan energi.

OPTIMIZING THE COST OF PRIMARY ENERGY:

- Ensuring the lowest price for primary energy, or as economically appropriate, without neglecting quality
- Securing an adequate energy supply



MELANJUTKAN OPERATIONAL EXCELLENCE

Dengan tujuan: mendorong pelaksanaan operasional menuju pada tingkat layanan kelas dunia melalui maksimalisasi nilai tambah aset baik dari aspek efektivitas biaya, operasi dan pemeliharaan, tingkat layanan dan ketersediaan kapasitas.

CONTINUING OPERATIONAL EXCELLENCE

with the objective: to encourage operational implementation towards world-class service through maximization of added value from assets from the aspect of cost effectiveness, operations and maintenance, service levels and capacity availability.



MELANJUTKAN PROCUREMENT AND CONSTRUCTION EXCELLENCE

Dengan tujuan meminimalkan *total cost of ownership* (TCO), menurunkan dan mengoptimalkan biaya barang dan jasa serta memastikan pelaksanaan konstruksi yang tepat waktu dan memenuhi kualitas.

CONTINUING PROCUREMENT AND CONSTRUCTION EXCELLENCE

with the aim of minimizing the total cost of ownership (TCO), reducing and optimizing the costs of goods and services and ensuring implementation of on time construction that meets quality requirements.



MELANJUTKAN COMMERCIAL EXCELLENCE,

dengan tujuan mengembangkan pilihan tingkat layanan untuk meningkatkan keandalan.

CONTINUING COMMERCIAL EXCELLENCE

with the aim of developing choices of service levels to improve reliability.



MENINGKATKAN MANAJEMEN STAKEHOLDERS DAN REGULATORY,

yang bertujuan untuk bersama-sama membentuk industri kelistrikan nasional.

IMPROVING STAKEHOLDER AND REGULATORY MANAGEMENT

with the aim of jointly forming a national electricity industry.



MELANJUTKAN BUDAYA KINERJA TINGGI DAN KEPEMIMPINAN YANG KUAT

yang bertujuan untuk:

- (i) Menjalankan visi korporat;
- (ii) Membangun budaya kinerja unggul;
- (iii) Mengembangkan generasi untuk masa depan;
- (iv) Mengimplementasikan *Enterprise Risk Management* (ERM);
- (v) Kepemimpinan yang kuat dalam eksekusi.

CONTINUING A HIGH PERFORMANCE CULTURE WITH STRONG LEADERSHIP, WHICH AIMS TO:

- (i) Implement the corporate vision;
- (ii) Build a culture of superior performance;
- (iii) Develop for future generations;
- (iv) Implement Enterprise Risk Management (ERM);
- (v) Show strong leadership in execution.



MENINGKATKAN PEMBENTUKAN CITRA YANG POSITIF

tujuannya adalah untuk menjalin hubungan dan komunikasi yang baik antara perusahaan dengan stakeholders.

IMPROVE THE ESTABLISHMENT OF A POSITIVE IMAGE

with the goal of building relationships and good communication between the company and stakeholders.

Lima strategi utama pertama diharapkan akan memberikan hasil yang terukur dan berdampak langsung pada kinerja keuangan perusahaan, sedangkan keberhasilan strategi enabler dan infrastruktur pendukung lainnya meskipun tidak berdampak langsung pada kinerja keuangan PLN, namun kesuksesannya akan sangat penting untuk memastikan keberhasilan 5 (lima) strategi utama.

The first five key strategies are expected to provide measurable results and to have a direct impact on the financial performance of the company, while the success of the enabler strategy and supporting infrastructure, although they have no direct impact on PLN's financial performance, will be crucial to ensuring the success of the five (5) main strategies.

SEGMENT OPERASI REGIONAL

REGIONAL OPERATING SEGMENTS

Segmen operasi regional sampai dengan akhir Agustus 2015 terbagi atas 3 segmen yang terdiri atas Segmen Operasi Regional Sumatera, Segmen Operasi Regional Jawa Bali, dan Segmen Operasi Regional Indonesia Timur.

Pada laporan tahunan ini yang disajikan adalah berdasarkan 3 segmen operasi regional.

Segmentasi Operasi Regional, jumlah pelanggan, daya tersambung, energi terjual dan kapasitas daya terpasang yang dikelola untuk masing-masing wilayah operasional, adalah sebagai berikut:



* Termasuk pembangkit IPP dan pembangkit sewa

* Including IPP power plant & rent power plant

Regional operating segments until the end of August 2015 consist of three segments, namely Sumatra regional segment, Jawa Bali regional segment, and East Indonesia regional segment.

This annual report presents information based on the three regional operating segments.

Regional operating segments, number of customers, connected power, energy sold, and installed capacity managed by each of the operational areas are as follows:

Indonesia Timur	East Indonesia
Jumlah Pelanggan	9.568.669 Total Customers
Daya Tersambung	12.384 MVA Connected Capacity
Energi Terjual	20,74 TWh Electric Power Sold
Kapasitas Terpasang*	6.219 MW Installed Capacity*



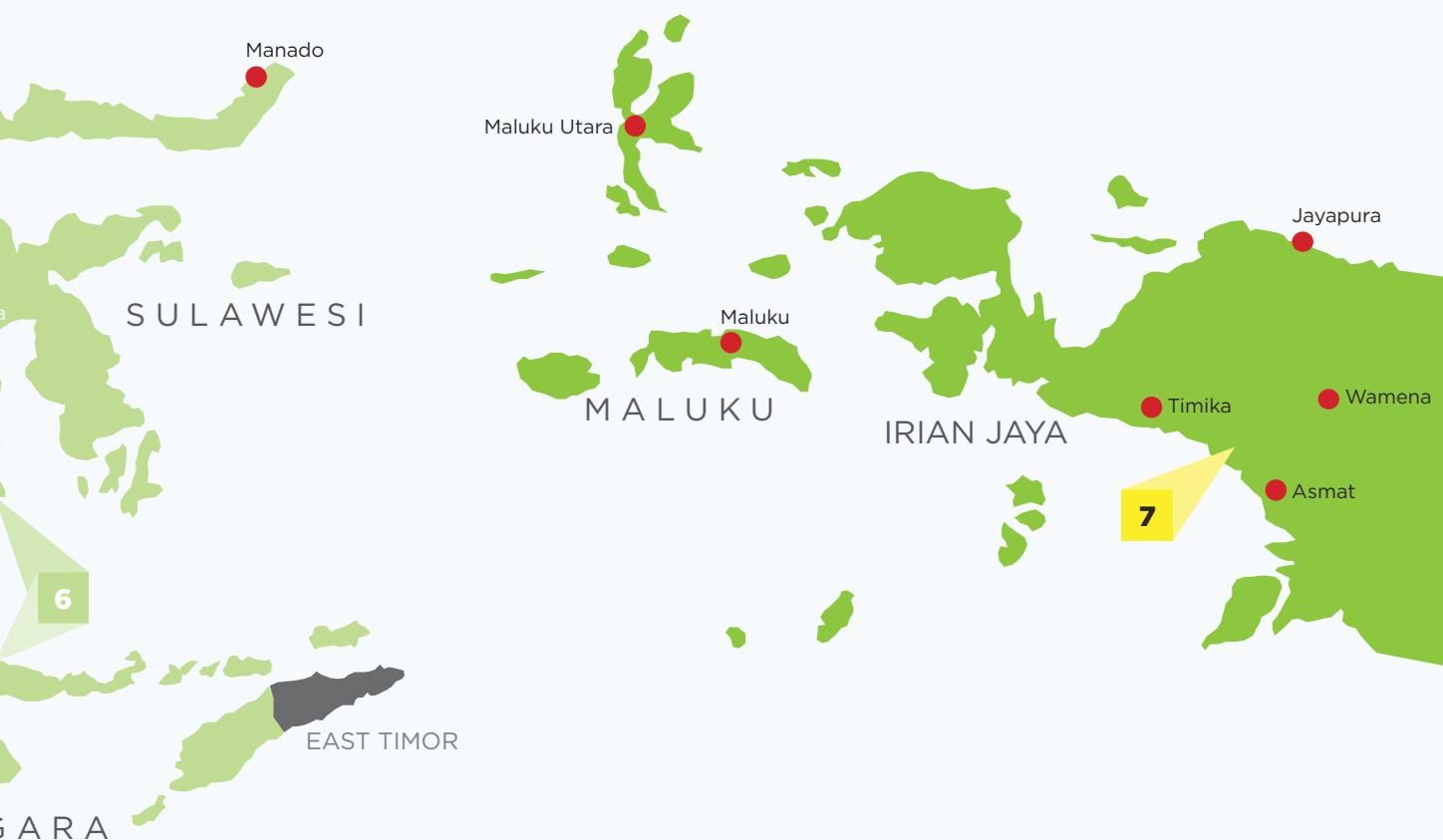
35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW – for Sustainable Development

Untuk kepentingan perencanaan strategis mulai September 2015 PLN mulai membagi area operasi PLN dan entitas anak kedalam 7 segmen Operasi Regional menurut kondisi geografis, yakni: Operasi Regional Sumatera, Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Timur dan Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua.



For the strategic planning interest, on September 2015, PLN began to divide its operational area and subsidiaries into 7 regional operating segments based on the geographical situation, such as Sumatra, West Java, Central Java, East Java & Bali, Kalimantan, Sulawesi & Nusa Tenggara, and Maluku & Papua regional segment.



SKALA EKONOMI

ECONOMIC SCALE

Kami bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan listrik seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang terus berkembang. Untuk mewujudkannya, di tahun 2015, PLN didukung oleh 40.450 pekerja dan 7.144 pegawai entitas anak. Selain menyalurkan kebutuhan listrik nasional, Kami secara terbatas juga melakukan pembelian maupun penyaluran tenaga listrik dengan negara tetangga yang berbatasan yaitu Malaysia. Pada akhir tahun 2015, PLN memiliki modal sebesar Rp848.219 miliar dengan nilai pendapatan sebesar Rp273.899 miliar. Skala ekonomi PLN per akhir tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

[G4-9] [G4-EC1] [G4-DMA]

We are responsible for serving the continually growing electricity needs of the Indonesian people from Sabang to Merauke. To that end, in 2015, PLN was supported by 40,450 employees and 7,144 employees in our subsidiaries. In addition to distributing the required electricity nationally, in a limited manner We also purchased and distributed electricity to our neighboring border country, Malaysia. At the end of 2015, PLN had capital of Rp848,219 billion with revenue of Rp273,899 billion. PLN's economy of scale per the end of 2015 can be seen in the following table.

[G4-9] [G4-EC1] [G4-DMA]

Keterangan	PERIODE PERIOD			Description
	2013	2014	2015	
Jumlah karyawan	48.886	48.068	47.594	Number of employee
Total pendapatan, termasuk Subsidi (miliar Rp)	261.847	292.721	273.899	Total revenue (billion Rp)
Total kapitalisasi (miliar Rp) :				Total capitalization (billion Rp)
- Liabilitas (*)	349.427	352.348	379.136	- Liabilities (*)
- Ekuitas	174.225	187.174	848.219	- Equity
Kuantitas listrik terjual (GWH)	187.541	198.602	202.846	Quantity of electricity sales
Total aset (miliar Rp)	523.652	539.521	1.227.356	Total assets (billion Rp)
Biaya Kepegawaian (miliar Rp)	15.555	16.646	20.321	Employee Cost (million Rp)
Total Realisasi Dana Sosial Masyarakat (CSR & PKBL) (miliar Rp)	51,32	41,50	36,85	Total Realization CSR and Partnerships Programs (million Rp)

ANAK PERUSAHAAN DAN ASOSIASI

SUBSIDIARIES AND ASSOCIATE ENTITIES

Sampai dengan akhir tahun 2015, kami memiliki 11 Anak Perusahaan dan sembilan usaha asosiasi dengan kepemilikan minoritas. Anak perusahaan dan asosiasi yang dimiliki bergerak dalam sektor industri yang bervariasi, namun tetap bersinergi untuk mencapai tujuan perusahaan dalam melayani rakyat Indonesia. Bidang usaha anak-anak perusahaan PLN, antara lain: pembangkit listrik, bidang keuangan, rancang bangun, pasokan batubara dan konstruksi.

Daftar Anak Perusahaan PT PLN (Persero) dan Kepemilikan Saham: [G4-17]

As of the end of 2015, we had 11 subsidiaries and nine associate businesses with minority ownership. Our subsidiaries and associates are engaged in varied industrial sectors, but still work together to achieve the company's goal of serving the people of Indonesia. The business sectors of PLN's subsidiaries, among other things, included: power generation, financial services, engineering, coal supplies and construction.

PT PLN (Persero) Subsidiaries and Shareholdings:
[G4-17]

Nama Perusahaan Company Name	Bidang Usaha Line of Business	Kepemilikan Ownership	Status Operasional Operational Status
PT Indonesia Power	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation	99,99%	Beroperasi Operating
PT Pembangkitan Jawa Bali	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation	99,99%	Beroperasi Operating
PT Indonesia Comnets Plus	Jasa Penyedia Jaringan Telekomunikasi Telecommunication Provider	99,99%	Beroperasi Operating
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	Penyedia Tenaga Listrik Electricity Utility	99,99%	Beroperasi Operating
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring	Jasa Enjiniring, Pengadaan dan Konstruksi Engineering, Procurement and Construction	99,90%	Beroperasi Operating
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan	Penyedia Tenaga Listrik Electricity Utility	99,97%	Beroperasi Operating
PT PLN Batubara	Perdagangan Batubara Coal Trading	99,99%	Beroperasi Operating
PT PLN Geothermal	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation	99,99%	Tidak Beroperasi Not Operating
Majapahit Holding BV	Lembaga Keuangan Financial Institution	100%	Beroperasi Operating
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	Pelayaran Shipping	99,99%	Beroperasi Operating
PT Haleyora Power	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation	99,99%	Beroperasi Operating

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW – for Sustainable Development

Daftar Asosiasi dan Ventura Bersama PT PLN (Persero) beserta Kepemilikan Saham.

Below are the associated entities and joint ventures of PT PLN (Persero) along with PLN's share ownership in these entities.

Nama Perusahaan Company Name	Bidang Usaha Line of Business	Kepemilikan Ownership		Status Operasional Operational Status
		Langsung Direct	Tidak Langsung Indirect	
Perusahaan Asosiasi Associated Entities				
PT Geo Dipa Energi (PT GDE)	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation	8,19%		Beroperasi Operating
PT Mitra Energi Batam	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation		30,00% / PT PLN Batam	Beroperasi Operating
PT Sumber Segara Primadaya	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation		49,00% / PT PJB	Beroperasi Operating
PT Dalle Energy Batam	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation		20,00% / PTPLN Batam	Beroperasi Operating
PT Tanjung Kasam Power	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation		10,00% / PT PLN Batam	Beroperasi Operating
PT Energi Pelabuhan Indonesia	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation		45,00% / PT Haleyora Power	Beroperasi Operating
Ventura Bersama Joint Ventures				
PT Unelec Indonesia	Penunjang Penyedia Tenaga Listrik Power Generation Support	32,35%		Beroperasi Operating
PT Rajamandala Electric Power	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation		51,00% / PT IP	Beroperasi Operating
PT Bajradaya Sentranusa	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation		38,54% / PT PJB	Beroperasi Operating
PT Bukit Pembangkit Innovative	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation		37,25% / PT PJB	Beroperasi Operating
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	Operasi & Pemeliharaan Operations & Maintenance		49,00% / PT PJB	Beroperasi Operating
PT Perta Daya Gas	Transportasi dan penyimpanan LNG LNG Transport and Storage		35,00% / PT IP	Beroperasi Operating
PT Indo Pusaka Berau	Perdagangan Batubara Coal Trading		46,80% / PT IP	Beroperasi Operating
PT Crompton Power Switchgear Indonesia	Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik Control Equipment and Power Distribution		49,00% / PT PLNE	Beroperasi Operating

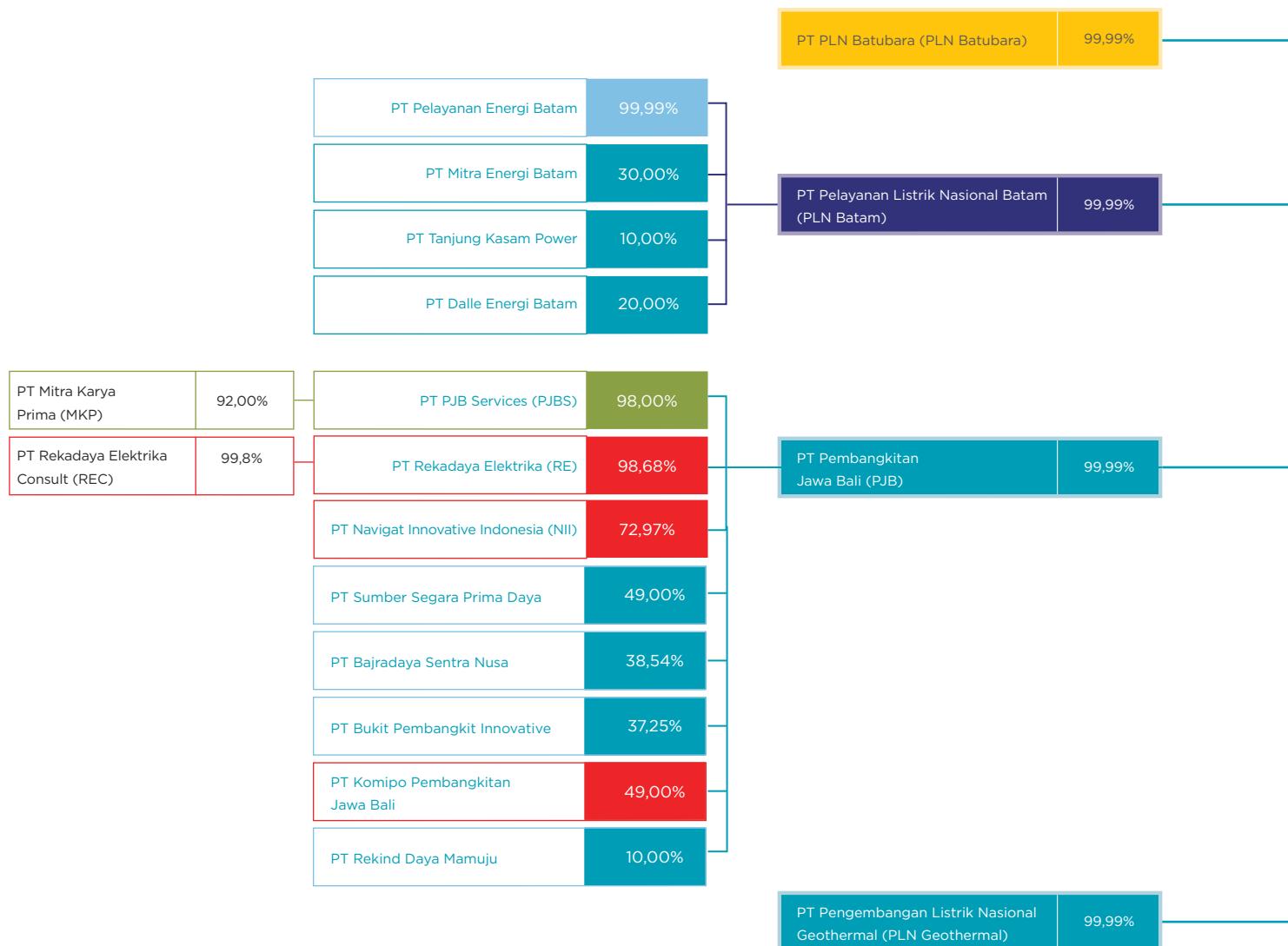


STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

PLN mengusahakan produk dan jasanya melalui entitas anak, entitas asosiasi, *joint venture*, dan *special purpose vehicle* (SPV).

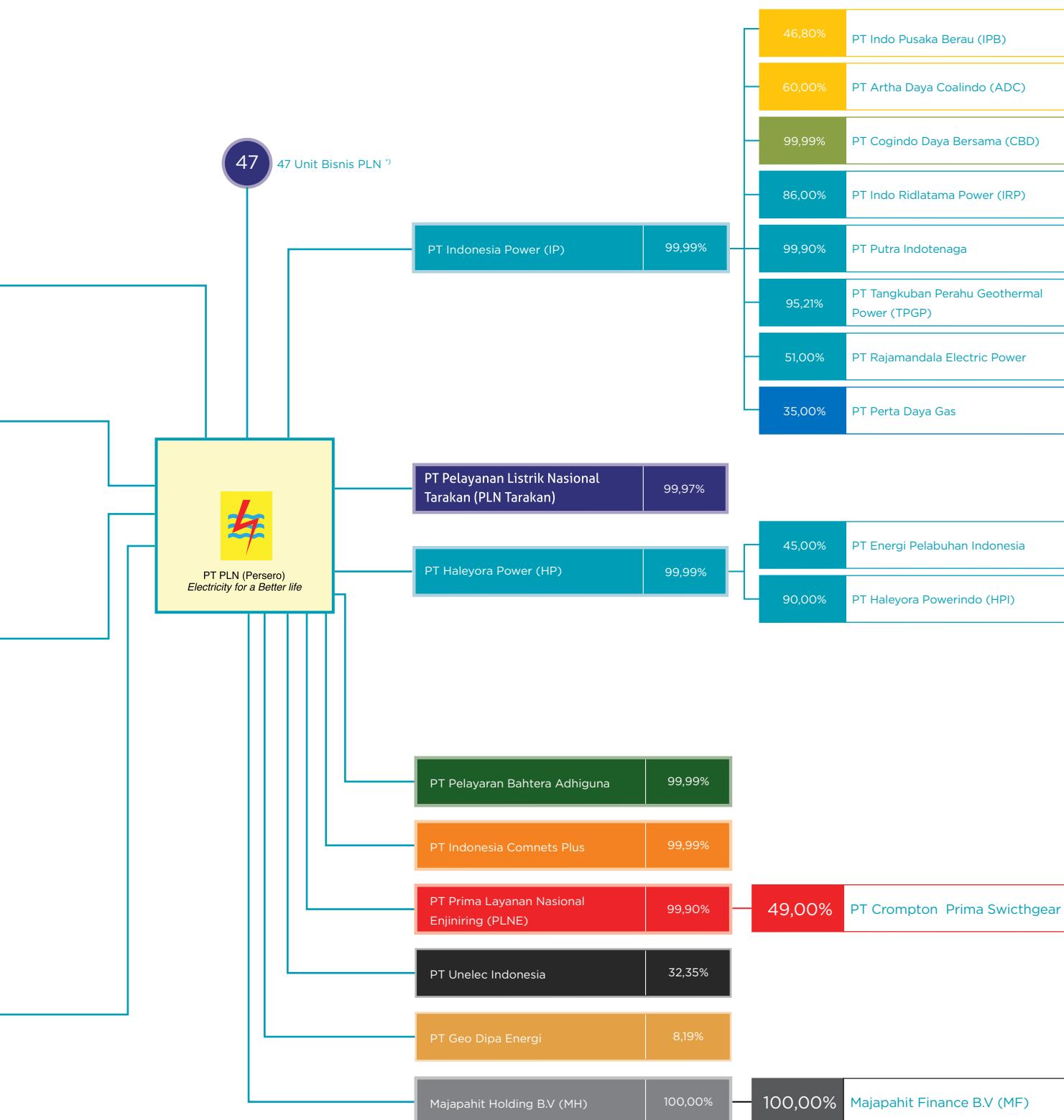
PLN seeks to provide its products and services through the business units, subsidiaries, associated company, joint venture, and special purpose vehicle (SPV).



- Keuangan
Finance
- Pembangkit Listrik
Electricity Power Plant
- Listrik Terintegrasi
Integrated Electricity
- Angkutan Laut
Shipping
- Telekomunikasi
Telecommunication

- Jasa Enjiniring & konstruksi kelistrikan
Electricity Engineering and Construction
- Transportasi dan Penyimpanan LNG
LNG Transportation and Storage
- Penunjang Penyedia Tenaga Listrik
Electrical Support
- Pembangkit Geothermal
Geothermal Power Plant
- Operasi dan Pemeliharaan
Operational & Maintenance

- Pembangunan Pipa Gas dan Energi lainnya
Construction of Gas Pipeline and Other Energy Services
- Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik
Electricity Controller and Distribution
- Pemeliharaan Pembangkit
Power Plant Maintenance
- Perdagangan Batubara
Coal Trading



Catatan:

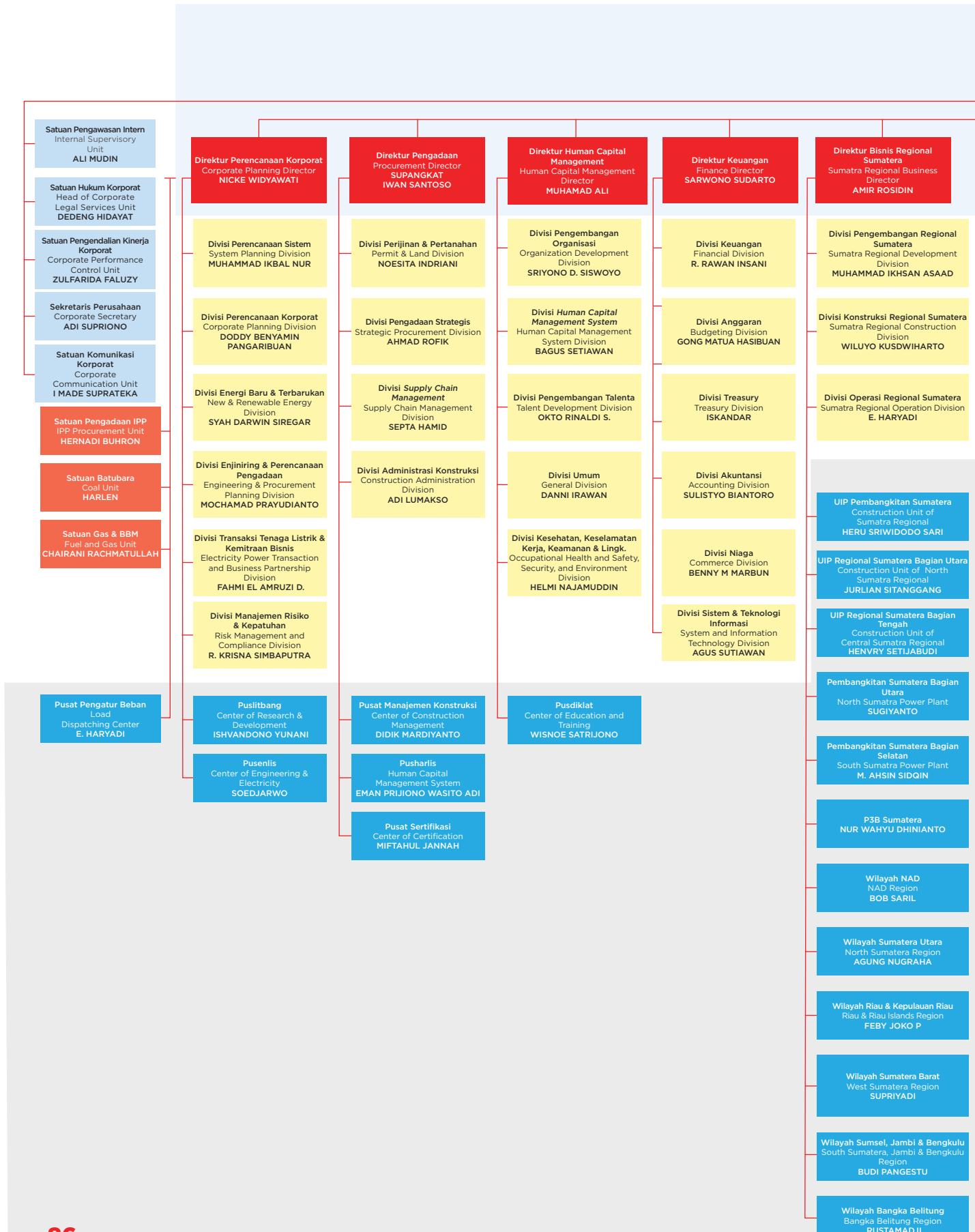
(*) "Unit bisnis" adalah Unit Operasional dari PLN yang menjalankan fungsi usaha tertentu. Daftar unit bisnis ini beserta bidang kegiatannya dapat dilihat pada Lampiran "Data Perusahaan" per 31 Desember 2015.

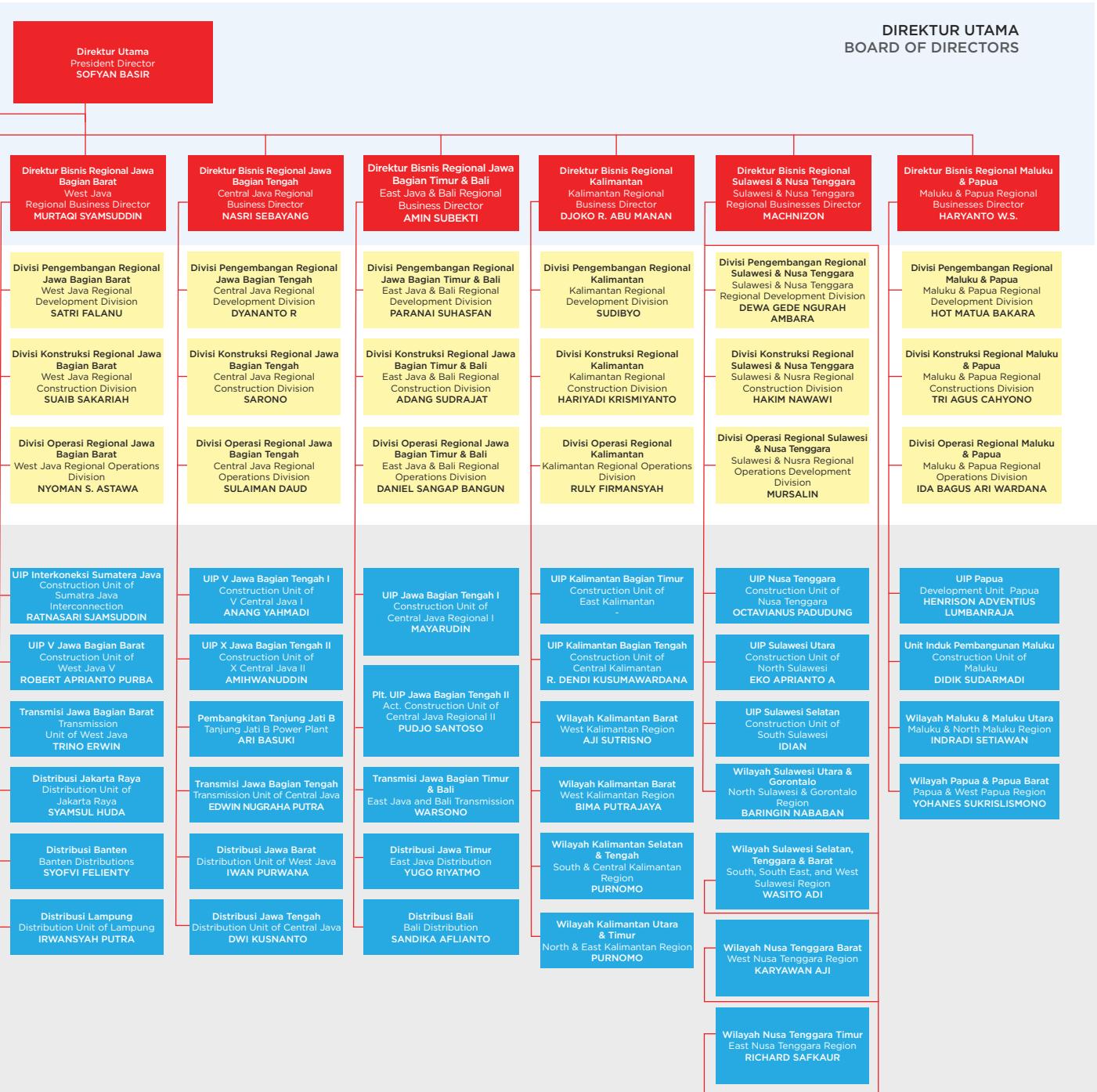
Note:

(*) "Business Unit" is defined as an Operational Unit of PLN that performs certain business functions. The list of business units and their lines of business are available on the Appendix titled "Corporate Data" as at 31 December 2015.

STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATIONAL STRUCTURE





35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW – for Sustainable Development



MENINGKATKAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

INCREASING ECONOMIC GROWTH

halaman page 88 - 99



Bagi PLN, keberlanjutan juga bermakna kemampuan perusahaan dalam mencatatkan kinerja ekonomi melalui distribusi nilai ekonomi yang berkelanjutan sekaligus kemampuan dalam mendukung perkembangan ekonomi secara nasional. Oleh karenanya, Kami bertekad meningkatkan kinerja ekonomi Perseroan melalui penerapan beragam inisiatif efisiensi operasional, meningkatkan peran pemasok lokal melalui kenaikan level Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), mendukung peningkatan kompetensi wirausaha skala mikro dan secara konsisten berupaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang semakin terjangkau, memadai dan handal untuk masyarakat di seluruh wilayah nusantara.

For PLN, sustainability also means the company's ability to record economic performance through the distribution of sustainable economic value as well as the ability to support the development of the national economy. Therefore, We are determined to improve the Company's economic performance through the implementation of various operational efficiency initiatives, enhance the role of local suppliers through higher Domestic Content Levels (TKDN), support the improvement of micro entrepreneurial competence and consistently seek to meet the demand of communities across the archipelago for more affordable, adequate, and reliable electricity.

KONDISI DAN PROSPEK PEREKONOMIAN

Kondisi perekonomian global yang masih belum kondusif, yang mempengaruhi harga komoditas primer sebagai andalan produk ekspor, membuat ekonomi Indonesia di tahun 2015 hanya tumbuh sekitar 4,79%, sedikit lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2014 yang sebesar 5,02%. Pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah, selain hasil ekspor komoditas primer. Porsi belanja pemerintah membaik selaras dengan realisasi beragam proyek infrastruktur dasar yang mulai meningkat sejak pertengahan tahun.

Perkembangan positifnya adalah tekanan defisit neraca perdagangan mulai berkurang, tingkat inflasi terjaga pada level 3,35% dan tingkat suku bunga rujukan BI menjadi 7,50%, turun dari 7,75% pada tahun 2014. Sedangkan nilai tukar rupiah masih kurang kondusif, melemah 11% menjadi sebesar Rp13.795/US\$ dari Rp12.440/US\$ pada tahun sebelumnya.

Sebagai hasil dari pengalihan alokasi subsidi BBM dan tarif listrik, Pemerintah mulai merealisasikan berbagai proyek pembangunan infrastruktur dasar, meliputi ketenagalistrikan, perhubungan dan telekomunikasi. Realisasi berbagai proyek infrastruktur dasar tersebut diyakini akan menaikkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi langsung dan akan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang. Bank Indonesia maupun pakar ekonomi meyakini perekonomian Indonesia akan tumbuh lebih baik di tahun 2016, untuk selanjutnya akan terus bertumbuh dengan kisaran kenaikan 5,5-7,0%.

Kondisi tersebut diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga Indonesia diyakini akan terus tumbuh menjadi kelompok negara berpendapatan menengah-tinggi, dari saat ini yang masih berada pada kelompok negara berpendapatan sedang-menengah.

Naiknya GDP per kapita ke dalam kelompok negara berpendapatan tinggi mensyaratkan pemenuhan berbagai infrastruktur dasar, termasuk ketenagalistrikan. Studi empiris menunjukkan beberapa negara kawasan dengan tingkat pendapatan lebih baik dari Indonesia telah didukung dengan rasio elektifikasi yang lebih tinggi, sekitar 99% (Malaysia, Thailand dan Vietnam), bahkan 100% (Singapura dan Brunei).

Kekayaan sumber daya alam yang cukup berlimpah, kesuburan tanah dan bonus demografi dalam beberapa tahun mendatang membuat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang dan meningkatkan statusnya menjadi negara berpendapatan menengah – tinggi di masa mendatang.

ECONOMIC CONDITIONS AND PROSPECTS

Global economic conditions remained unfavorable, affecting the price of primary commodities the country's main export product, resulting in the Indonesian economy in 2015 growing only around 4.79%, slightly lower than growth in 2014 of 5.02%. This growth was mainly supported by domestic consumption and government spending, in addition to the export of primary commodities. The portion of government spending improved in line with the realization of a variety of basic infrastructure projects, which started to increase mid-year.

A positive development from this was that pressure on the trade deficit started to decrease, the inflation rate was maintained at a level of 3.35% and the BI reference rate was 7.50%, down from 7.75% in 2014. Meanwhile, the exchange rate remained unfavorable, weakening 11% to Rp13,795 / USD from Rp12,440 / USD in the previous year.

As a result of the transfer of the fuel and electricity subsidy allocation, the government began to implement development projects for basic infrastructure, including electricity, transportation and telecommunications. It is believed that the realization of various basic infrastructure projects will increase Indonesia's competitiveness in attracting foreign direct investment and will have a positive impact on national economic growth in the future. Bank Indonesia and economists believe Indonesia's economy will grow better in 2016 and in future continue to grow at an estimated range of 5.5 to 7.0%.

These conditions are expected to increase public income, so that Indonesia, it is believed, will continue to grow to become one of a group of middle-high income countries, from its current status as a middle-income country.

The rise in GDP per capita to become part of the group of high-income countries requires basic infrastructure to be available, including electricity. Empirical studies suggest that several countries in the region with a better income level than Indonesia are supported by higher electrification ratios, at approximately 99% (Malaysia, Thailand and Vietnam), and even 100% (Singapore and Brunei).

The relatively abundant wealth of natural resources, fertile soil and demographic bonus in the next few years give Indonesia huge potential to continue to grow and improve its status to a middle-high income country in the foreseeable future.

Pemerintah berupaya merealisasikan potensi tersebut dengan membangun infrastruktur dasar, meliputi jalan, pelabuhan, bandar udara, sarana telekomunikasi dan ketenagalistrikan yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang semakin optimal. Lebih dari itu, Pemerintah juga telah meluncurkan serangkaian kebijakan deregulasi untuk mendorong peningkatan investasi langsung di sektor riil, baik berasal dari investor asing maupun domestik, sehingga sasaran pertumbuhan ekonomi hingga sebesar 7% dapat dicapai pada tahun-tahun mendatang.

KINERJA EKONOMI PLN

Komitmen tinggi untuk memberikan hasil terbaik melalui realisasi beragam program pengembangan, peningkatan efisiensi operasional dan perbaikan layanan membuat Perseroan mencatatkan penambahan daya, peningkatan jumlah pelanggan, perbaikan kinerja operasional sekaligus perbaikan pendapatan. Penambahan daya dan jumlah pelanggan berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi dari 84,3% menjadi 88,3% di tahun 2015.

Kami juga berhasil meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar pembangkit, sehingga komposisi bauran energi membaik, dengan tingkat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) turun menjadi sebesar 8,22% dari angka tahun sebelumnya yang sebesar 11,37%. Sebaliknya persentasi penggunaan sumber energi non-bbm terutama batu-barra dan gas meningkat. Hal ini berpengaruh positif pada upaya penurunan biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP).

Di sisi lain, penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (TTL) sebagai wujud dari kebijakan pengurangan subsidi membuat pendapatan penjualan listrik meningkat, sehingga tercatat kenaikan pendapatan usaha. Sekalipun menghadapi tekanan dari sisi beban keuangan akibat pelemahan rupiah, Perseroan tetap berhasil membukukan kenaikan laba bersih sebesar 11,29% menjadi sebesar Rp15,6 triliun. Lebih dari itu, sesuai hasil revaluasi aset, Perseroan mencatatkan penghasilan komprehensif 63,6 kali dari tahun 2014 yang mencapai nilai sebesar Rp658,3 triliun.

Distribusi Perolehan Nilai Ekonomi [G4-EC1]

Pertumbuhan laba bersih tersebut membuat total nilai ekonomis yang Kami distribusikan kepada para pemangku kepentingan meningkat, seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Sementara kenaikan penghasilan komprehensif yang membuat ekuitas Perseroan meningkat, membuat kompetensi penggalangan dana di tahun-tahun mendatang diharapkan semakin membaik.

The Government seeks to realize this potential by building basic infrastructure, including roads, ports, airports, telecommunications facilities and the electrical power needed to support more optimal economic growth. Moreover, the Government has also launched a series of deregulatory policies to promote direct investment in the real sector, both derived from foreign and domestic investors, so that the target of up to 7% economic growth can be achieved in the coming years.

PLN's ECONOMIC PERFORMANCE

The high commitment to deliver the best results through the realization of a variety of development programs, improved operational efficiency and improved service has caused the company to record additional power capacity, an increasing number of customers, operational performance improvement, as well as revenue improvement. The increase in power and number of customers managed to raise the electrification ratio from 84.3% to 88.3% in 2015.

We also increased fuel use efficiency in power plants, improving the composition of the energy mix with use of fuel oil (BBM) falling to 8.22% from the previous year's 11.37%. In contrast, the percentage use of non-fuel energy sources, especially coal and gas, increased. This had a positive effect on efforts to reduce the cost of production.

On the other hand, subsidy reduction policies led to the adjustment of Electricity Tariffs (TTL) creating increased revenue from electricity sales and recording an increase in operating revenues. Even in the face of pressure from the financial burden caused by the weakening of the rupiah, the Company still recorded increased net profit of 11.29%, or Rp15.6 trillion. Moreover, thanks to asset revaluation, the Company posted a comprehensive income 63.6 times from 2014 at Rp658.3 trillion.

Distribution of Economic Value Generated [G4-EC1]

The growth in net profit made total economic value to stakeholders increasing, as shown in the following table. Meanwhile, the increase in comprehensive income caused the Company's equity to rise, which is expected to further improve its ability to fund raise in the coming years.

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW – for Sustainable Development

Adapun gambaran distribusi perolehan nilai ekonomi Perseroan dalam dua tahun terakhir adalah:

A description of the Company's economic value obtained in the last two years is as follows:

Kinerja Ekonomi	2015 (Rp miliar million)	2014 (Rp miliar million)	Perubahan Change	Economic Performance
Perolehan Nilai Ekonomi				Economic Value Generated
Pendapatan Penjualan Listrik	209.845	186.634	12,4%	Revenue
Subsidi Listrik dari Pemerintah	56.553	99.303	(43,1%)	Government's Electricity Subsidy
Pendapatan Bunga Bank dan Deposito	627	584	7,4%	Interest Income from Bank and Deposits
Laba dari Entitas Anak / Asosiasi	689	488	41,2%	Income from Subsidiaries/ Associates
Pendapatan/ (Pengeluaran) Selisih Kurs	(16.230)	3.436	(572,3%)	Gain (Loss) on Foreign Exchange
Pendapatan Lain-lain, termasuk penyambungan	9.251	10.453	(11,5%)	Other Incomes, Other Incomes, including connection
Jumlah Nilai Ekonomi Diperoleh	260.734	300.898	(13,3%)	Total Economic Value Generated
Pendistribusian Nilai Ekonomi				Economic Value Distributed
Biaya Operasional (Tidak Termasuk Biaya Pegawai dan Penyusutan))	204.523	228.754	(10,6%)	Operating Costs (Excluding Employee Cost and Depreciation)
Gaji Karyawan dan Benefit Lainnya	20.321	16.646	22,1%	Total Employee's Salary and Other Benefit
Pembayaran kepada Penyandang Dana				Payment for Funds Provider
• Pemegang Saham (Dividen)	3.962	-	-	• Shareholders (Dividend)
• Bank (Bunga Pinjaman)	17.536	16.640	5,4%	• Creditors (Interest)
Jumlah Pembayaran kepada Penyandang Dana:	21.499	16.640	29,2%	Total Payment for Funding
Pengeluaran untuk Pemerintah (Pajak, Royalty, dsb)	4.677	1.840	154,2%	Expenses fo Government (Tax, Royalties, etc)
Pengeluaran untuk Masyarakat	37	40	(6,8%)	Expenditures for Public
Jumlah Nilai Ekonomi Yang Didistribusikan	293.724	300.470	(2,2%)	Total Economic Value Distributed
Nilai Ekonomi yang Ditahan Sebelum Dividen	(11.821)	20.340	(158,1%)	Economic Value Retained Before Dividend Paid
Nilai Ekonomi yang Ditahan	(7.858)	20.340	(138,6%)	Economic Value Retained

Di tahun 2015, Kami mencatatkan kenaikan pendapatan listrik sebesar 12,4% menjadi Rp209,8 triliun dari sebelumnya Rp186,6 triliun. Namun karena penurunan jumlah subsidi yang diterima dan oleh adanya beban lain-lain dalam jumlah substansial sebagai akibat pelemahan nilai tukar rupiah, maka tercatat penurunan total nilai perolehan ekonomi menjadi sebesar Rp260,7 triliun atau turun 13,3% dari tahun sebelumnya, sebesaR Rp300,1 triliun.

In 2015, we recorded increased revenue from electricity of 12.4%, or Rp209.8 trillion, up from the previous Rp186.6 trillion. However, due to the decrease in the amount of subsidy received and other substantial expenses as a result of a weak exchange rate, total economic value obtained was recorded down 13.8% from the previous year to Rp260.7 trillion from Rp300.1 trillion.



Kami kemudian mendistribusikan kembali perolehan nilai ekonomi 2015 hingga mencapai Rp272,6 Triliun kepada para pemangku kepentingan, turun 2,9% dari nilai tahun sebelumnya, sebesar Rp280,6 triliun. Bagian terbesar nilai perolehan digunakan untuk biaya operasional, mencapai Rp204,5 triliun, biaya kepegawaian sebesar Rp20,3 triliun, dan distribusi kepada penyandang dana (dividen untuk pemerintah dan bunga pinjaman bank) sebesar Rp21,5 triliun. Sisanya digunakan untuk membayar pajak, royalti, dan pengeluaran untuk masyarakat. Dengan demikian, seluruh perolehan nilai ekonomi tahun 2015 habis didistribusikan. Hal ini memberikan gambaran bahwa kinerja Perseroan memiliki pengaruh positif kepada para pemangku kepentingan lainnya.

KONTRIBUSI PADA NEGARA

Selain menjalankan tugas penyediaan listrik dengan optimal, setiap tahun Kami memberikan berbagai jenis kontribusi kepada negara, yakni dalam bentuk pajak, dividen (saat mencatatkan laba), retribusi, iuran tetap dan bea masuk.

Total pajak (badan) yang dibayarkan kepada negara pada tahun 2015 adalah sebesar Rp4.677 miliar atau naik 154,2% dari pajak tahun 2014 yang sebesar Rp1.840,0 miliar. Adapun dividen yang dibayarkan kepada negara dengan jumlah sesuai ketetapan RUPS, yakni sebesar Rp3,9 triliun untuk tahun buku 2014.

We then distributed acquired economic value in 2015 to our stakeholders of Rp272.6 trillion, down 2.9% from the previous year's Rp280.6 trillion. The largest part of obtained value was used for operational costs at Rp204.5 trillion, employee costs of Rp20.3 trillion, and distribution to financers (dividends to the government and interest on bank loans) of Rp21.5 trillion. The remainder was used to pay taxes, royalties, and expenses for communities. Thus, the entire economic value obtained in 2015 was distributed. This illustrates that the Company's performance had a positive impact on other stakeholders.

CONTRIBUTION TO THE STATE

In addition our duty to provide an optimal electricity supply, each year we make various kinds of contribution to the state, namely the payment of taxes, dividends (when recording profit), fees, fixed fees and import duties.

Total tax (corporate) paid to the state in 2015 amounted to Rp4,677 billion, up 154.2% from tax in 2014 of Rp1,840.0 billion. Dividends were paid to the state in an amount determined in accordance with the provisions of the GMS, which amounted to Rp3.9 trillion for fiscal year 2014.

SUBSIDI LISTRIK PEMERINTAH [G4-EC4]

Sebagai perusahaan BUMN yang menjalankan tugas untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi kepentingan umum (*public service obligation/PSO*), Kami menerima bantuan finansial dalam bentuk subsidi selisih tarif penjualan kepada pelanggan dari Pemerintah.

Subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif; dikurangi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif; dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif. BPP tenaga listrik dihitung berdasarkan formula, termasuk tingkat susut jaringan transmisi dan distribusi, yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Kelistrikan

Besarnya subsidi listrik dalam satu tahun anggaran secara final ditetapkan berdasarkan hasil audit atas ketataan penggunaan subsidi listrik yang dilakukan oleh auditor yang ditunjuk Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.

Besaran subsidi menjadi salah satu butir penilaian kinerja manajemen PLN. Semakin rendah subsidi yang harus diberikan oleh Pemerintah, maka kinerja manajemen semakin dinilai positif, sepanjang parameter operasional lain yakni kebutuhan listrik terpenuhi, keandalan meningkat dan Perseroan mencatatkan laba sesuai atau lebih besar dari ditentukan.

Untuk tahun 2015, jumlah penerimaan subsidi menjadi sebesar Rp56,6 triliun berkurang 43,1% dari nilai subsidi tahun sebelumnya, sebesar Rp99,3 triliun. Kami meyakini penurunan subsidi membuat Pemerintah memiliki dana lebih besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar lain yang lebih bermanfaat untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi barang/jasa secara nasional, termasuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Dalam rangka mengurangi besaran subsidi yang dialokasikan oleh Pemerintah, Kami berupaya keras meningkatkan kinerja operasional, meningkatkan efisiensi untuk menekan beban pengeluaran agar kinerja pembangkitan dan penyaluran distribusi tenaga listrik semakin optimal. Beberapa parameter yang dijadikan rujukan perbaikan kinerja, mencakup diantaranya: perbaikan rasio bauran, penurunan susut jaringan/distribusi, ketepatan COD, tercapainya indeks EAF yang optimal. Pencapaian parameter tersebut membuat BPP menurun, sehingga jumlah subsidi dapat dikurangi.

GOVERNMENT ELECTRICITY SUBSIDY [G4-EC4]

As a state-owned company that has the task of meeting the demand for electricity for the public interest (public service obligation / PSO), We have received financial assistance in the form of a Government subsidy based on the price of customers sales.

Electricity subsidies are calculated from the negative difference between the average selling price for electricity (Rp/kWh) for each tariff class; less the cost of production for electrical power (Rp/kWh) for each tariff class; multiplied by the volume of sales (kWh) for each tariff class. The Cost of Production for electrical power is calculated based on a formula that includes the loss rate for the transmission and distribution network and is established by the Minister of Energy and Mineral Resources through the Directorate General of Electricity.

The final amount of the electricity subsidy in one budget year is set based on the results of audits on compliance with the use of electricity subsidies carried out by auditors appointed by the Minister of Finance through the Directorate General of Budgeting.

The amount of the subsidy is one point of the PLN management performance assessments. The lower subsidy is provided from the government, the more positive management's performance is considered. As long as operational parameter which is the electricity needs fulfilled, reliability increasing and the Company recorded profits based on or bigger than determined.

For 2015, the total subsidy received amounted to Rp56.6 trillion, 43.1% less than the previous year's subsidy of Rp99.3 trillion. We believe that this reduction in subsidy has resulted in the government having more money to support the construction of basic infrastructure that is more useful to support increased national production capacity for goods / services, including the development of electrical power infrastructure.

In order to reduce the amount of subsidy allocated by the Government, we worked hard to increase operational performance, improve efficiency to reduce the burden of spending for improved power generation performance and more optimal power distribution. Several parameters served as benchmarks for improved performance, include among others: improved mix ratio, decreased network / distribution losses, COD accuracy, achieving optimal EAF index. The achievement of these parameters has resulted in the cost of production decreasing, thus the size of the subsidy could be reduced.



MENDORONG PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DAERAH

Selain kontribusi langsung kepada negara, Perusahaan juga memberi kontribusi tak langsung dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal di daerah operasional Perseroan. Semakin banyak tenaga kerja lokal yang terserap, maka kegiatan perekonomian di areal seputar operasional Perseroan makin meningkat, sehingga taraf hidup masyarakat sekitar pun turut meningkat.

Kami mempertimbangkan besaran penyerapan tenaga kerja lokal dalam memilih mitra pemasok maupun mitra kerja kontraktor pembangunan dan pemeliharaan pembangkit dengan dilandasi kesadaran akan pentingnya penyerapan tenaga kerja lokal. Selain melalui penyerapan tenaga kerja langsung maupun melalui mitra pemasok, Perseroan berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian daerah melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor atas seluruh armada kendaraan operasional yang beroperasi di daerah, sehingga turut menyumbang pada komponen pendapatan asli daerah (PAD).

Meyakini besarnya manfaat ekonomi dari pelaksanaan proyek ketenagalistrikan, maka dalam rancangan Program Pembangkit 35.000 MW yang kini tengah direalisasikan, PLN bersama Pemerintah menetapkan sebaran lokasi pembangunan proyek di seluruh kawasan, disesuaikan dengan potensi daya dukung alamnya.

ENCOURAGING REGIONAL ECONOMIC GROWTH

In addition to direct contributions to the state, the Company also contributes indirectly in terms of providing local employment in areas where the Company operates. The more local labor that is absorbed, the better the economic activity in areas surrounding the Company's operations, thus raising the living standard of local communities.

We consider the amount of local employment in selecting partner suppliers and partner contractors for the construction and maintenance of power plants based on an awareness of the importance of local employment. In addition to absorbing labor directly and through supplier partners, the Company contributes to regional economic growth through the payment of motor vehicle tax on its entire fleet of operational vehicles in each area, thus contributing to the components of locally derived revenue.

Believing in the economic benefits of implementing electricity projects, in designing The 35,000 MW Power Plant Development Program, which is currently being realized, PLN and the Government determined that project construction should be distributed across the country, tailored to natural carrying capacity potential.

Melalui realisasi pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan, termasuk Program Pembangkit 35.000 MW, Kami memberikan kontribusi lain kepada perekonomian daerah maupun nasional berupa peningkatan keandalan pasokan listrik, sehingga kegiatan perekonomian terutama aktivitas produksi dapat berlangsung setiap hari. Selain kegiatan produksi, aktivitas perdagangan maupun kegiatan masyarakat lain juga dapat dilakukan dengan lebih baik, akibat meningkatnya kualitas distribusi listrik yang semakin akuntabel.

MENDUKUNG PENGEMBANGAN INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN NASIONAL

Realisasi proyek ketenagalistrikan selain memberi dampak ekonomi tidak langsung, berupa tumbuhnya aktivitas ekonomi di seluruh area yang telah mendapatkan pasokan listrik memadai, juga memberi dampak langsung berupa tumbuh dan berkembangnya industri-industri yang berhubungan dengan kegiatan pembangkitan maupun transmisi dan distribusi tenaga listrik.

Meningkatkan Hubungan dengan Mitra Kerja

Dengan area operasional yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, Kami menyadari makna penting interaksi positif dengan para pemasok dan mitra kerja. Interaksi tersebut akan berdampak positif pula pada kinerja perusahaan, dan penciptaan lapangan kerja, yang pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional.

Jumlah mitra kerja yang terlibat dalam interaksi dengan operasional Perseroan cukup besar bergantung pada besaran unit bisnis dan kompleksitas pekerjaan di wilayah regional masing-masing. Hubungan Perseroan dengan para mitra berdasarkan pada azas profesionalisme, dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan yang mencakup standar mutu, sistem manajemen dan keselamatan kerja (SMK3), serta sistem manajemen lingkungan (SML). Azas profesionalisme mencakup juga pemenuhan ketentuan harga yang bersaing, kredibilitas, akuntabilitas, dan ketepatan atas pasokan barang maupun jasa dari para mitra kerja. Pada beberapa proyek pembangunan dan operasional pembangkit skala besar, disyaratkan pula pemenuhan aspek HAM dalam pelaksanaan pembangunan pembangkit, saluran transmisi dan distribusi maupun kegiatan pemasokan oleh para mitra kerja.

Untuk memastikan dipenuhinya berbagai kriteria tersebut serta kualitas kerja, maka dijalankan program evaluasi kinerja para mitra kerja dan pemasok secara berkala. Evaluasi dilakukan baik dalam tahapan proses kerja hingga akhir kontrak kerja, sebagai dasar penilaian untuk

Through the realization of these electrical power development projects, including The 35,000 MW Power Plant Development Program, We have provided another contribution to the regional and national economy in the form of increasingly reliable power supply, so that economic activity, especially production, can take place every day. In addition to production, trading and other community activities can also be better implemented due to improved electricity quality and more accountable electricity distribution.

SUPPORTING DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ELECTRICAL POWER INDUSTRY

The realization of electrical power projects, besides providing indirect economic impact, such as growth in economic activity in all areas receiving an adequate supply of electricity, also has a direct impact through the growth and development of industries related to electricity generation, and transmission and distribution.

Improving Relationships with Business Partners

With an operational area that covers Indonesia in its entirety, we realize the significance of positive interaction with suppliers and partners. Such interactions will also have a positive impact on company performance and job creation, which in turn will spur economic growth locally and nationally.

The number of business partners involved in interaction with the Company's operations is quite large, depending on the size of business units and the complexity of work in each region. The Company's relationship with its partners is based on the principle of professionalism, taking into account various requirements that include quality standards, occupational health and safety management systems (SMK3), as well as the environmental management system (EMS). The principle of professionalism includes compliance with provisions for competitive prices, credibility, accountability and accuracy in the supply of goods and services from business partners. In some large-scale development projects and large power plant operations, the fulfillment of the human rights aspect is also required for construction, transmission and distribution and the supply activities of our business partners.

To ensure compliance with these criteria, as well as work quality, a periodic performance evaluation program is run on business partners and suppliers on a regular basis. Evaluation is performed during the work process up to the end of the contract and serves as a basis for assessment

proses seleksi dalam rangka menetapkan daftar rekanan kerja, yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Untuk menjamin kualitas dan kontinuitas proses evaluasi, digunakan kebijakan “Prosedur dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa”, yang melibatkan mekanisme pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal dan menggunakan prosedur e-procurement untuk mendapatkan efisiensi penawaran.

Perusahaan juga memberikan kesempatan kepada usaha kecil dan koperasi setempat yang memiliki kompetensi untuk berperan serta dengan mengerjakan beberapa jasa tertentu sebagai bagian pemberdayaan ekonomi setempat.

Mengutamakan Produk Lokal Untuk Mendukung Pertumbuhan Industri Kelistrikan Nasional

Pembangunan dan pemeliharaan sistem ketenagalistrikan yang meliputi pembangkit listrik, jaringan transmisi, distribusi lengkap dengan gardu induk dan gardu distribusi, membutuhkan dukungan industri dan melibatkan investasi dalam jumlah yang besar. Dalam catatan Kami, untuk tahun 2015 saja, realisasi capex Perseroan mencapai Rp45.279,10 triliun. Namun demikian dari angka pengeluaran itu, ternyata hanya sebagian kecil yang dinikmati oleh pemasok dalam negeri. Sebagian besar capex PLN selama ini mengalir keluar negeri, karena adanya dominasi produk impor.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan industri kelistrikan di dalam negeri dan menciptakan “multiplier effect” terhadap kemajuan perekonomian Indonesia, maka diterapkan pendekatan baru dalam memenuhi kebutuhan peralatan ketenagalistrikan, baik dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan pembangkit, maupun dalam rangka membangun dan memelihara jaringan transmisi-distribusi (termasuk sarana gardu induk maupun gardu pendukung distribusi). Penggunaan komponen produksi lokal/dalam negeri juga diterapkan secara optimal pada proses pengadaan dalam rangkaian pembangunan Proyek Pembangkit 35.000 MW yang mulai berjalan.

Kami menargetkan produk-produk alat listrik yang telah diproduksi di dalam negeri, digunakan secara optimal. Sementara produk-produk inti dalam pembangkit listrik, seperti generator dan sejenisnya belum dapat dimasukan sebagai suatu persyaratan dalam proses lelang proyek pembangkit karena keterbatasan kemampuan industri di dalam negeri.

in the selection process in order to establish a list of work partners in a transparent and accountable manner. To ensure the quality and continuity of the evaluation process, the “Procedures and Procurement Methods for Goods and Services” policy is used, which involves a monitoring mechanism implemented by the Internal Audit Unit and the use of e-procurement procedures to gain efficient deals.

The Company provides the opportunity for competent local small businesses and cooperatives to participate by working on various specific services in the interest of local economic empowerment.

Prioritizing Local Products to Support the Growth of the National Electricity Industry

The construction and maintenance of the electrical power system, which encompasses electricity generation, transmission networks and distribution, complete with substations and distribution substations, requires industrial support and involves large amounts of investment. In our records, for 2015 alone, realization of the Company's capital expenditure reached Rp45,279.10 trillion. However, from the expenditure figures, it was demonstrated that only a fraction of this benefited domestic suppliers. Most of PLN's capex has been flowing out of the country due to the dominance of imported products.

In order to support the growth of the domestic electrical power industry and create a “multiplier effect” for the progress of the Indonesian economy, a new approach is being implemented to fulfill the need for electrical power equipment, both for the construction and maintenance of power plants, and to build and maintain the transmission-distribution network (including supporting substations and distribution substations). The use of locally produced components is also applied optimally in the procurement process for the series of construction projects in the 35,000 MW Generation Project, which has now started.

We are targeting the optimum use of domestically produced electrical power. Meanwhile, the core products for power generation, such as generators and the like, cannot yet be included as a requirement of the generation project tender process due to the limited ability of the domestic industry.

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW - for Sustainable Development

Namun demikian, Kami juga menerapkan sistem *nurture*, yaitu mendorong terciptanya suatu pabrikan peralatan listrik tertentu yang selama ini belum ada di dalam negeri, sebagai contohnya, pabrik switchgear untuk tegangan tinggi. Pada industri ini, PLN justru turut terlibat langsung melalui kepemilikan sebagian saham, yang dilakukan oleh salah satu anak usaha, untuk menjamin pemenuhan kualitas produk dan ketepatan pengiriman.

Perusahaan juga memberlakukan pengadaan dengan sistem *open book*, yaitu sistem pengadaan barang dengan cara membedah *structure cost* secara transparan pada pabrikan yang keberadaannya di dalam negeri masih sangat terbatas, sebagai salah satu cara untuk memacu pemasok luar negeri agar bekerja sama dengan pemasok dalam negeri. Tujuannya adalah struktur biaya yang makin ekonomis bagi PLN, sekaligus memfasilitasi transfer pengetahuan.

Terobosan lain yang dilakukan adalah mengganti suku cadang dengan memprioritaskan produksi dalam negeri, disertai penerapan sistem asesmen terhadap bengkel-bengkel atau workshop di dalam negeri yang mampu membuat suku cadang, sekaligus memeriksa kualitas dan sistem produksinya.

Selanjutnya dilakukan implementasi atas kewajiban penggunaan produk dalam negeri pada pembangkit listrik swasta (*independent power producer/IPP*), antara lain: mewajibkan kepada bidder pada tahap lelang untuk mencantumkan secara eksplisit peralatan apa saja yang akan dipasok dari dalam negeri.

Seluruh upaya tersebut ditujukan untuk mendukung perkembangan industri ketenagalistrikan dalam negeri, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional PLN dalam jangka panjang. Upaya yang juga sebagai implementasi Permenperind No.54/2012 tentang TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) Ketenagalistrikan dalam negeri tersebut diyakini mampu mendukung pengembangan industri kelistrikan, pertumbuhan pembukaan lapangan kerja dan pada akhirnya mendukung perkembangan perekonomian nasional.

However, we have also introduced a nurture system, which has encouraged the establishment of manufacturers of specific electrical equipment that was not previously available in the country, for example, a high voltage switchgear factory. In this industry, implemented by one of its subsidiaries, PLN is directly involved through partial share ownership, thus ensuring compliance with product quality and timely delivery.

The company has also imposed procurement utilizing an open book system, namely a procurement system for goods that transparently dissects the cost structure of manufacturers, whose presence in the country is still very limited, as a way of encouraging foreign suppliers to cooperate with domestic suppliers. The objective is to attain a more economical cost structure for PLN, as well as to facilitate knowledge transfer.

Another breakthrough that has been implemented is prioritizing domestic production to replace spare parts, as well as implementing an assessment system on garages or workshops in the country capable of making parts, as well as checking the quality and production systems.

Furthermore, privately owned power plants (independent power producers / IPP) are required to use domestic products, including requiring that bidders at the auction stage state explicitly what equipment will be supplied from within the country.

All of these steps have been taken to support the development of the electrical power industry in Indonesia, while increasing the long term operational efficiency of PLN. These efforts are also part of the implementation of Permenperind Decree Num. 54/2012 on Electrical Power DCL (Domestic Component Level) in the country, which is believed will support the development of the electrical power industry, growth in employment opportunities and support the development of the national economy.

MENDUKUNG PENGEMBANGAN KOMPETENSI EKONOMI NASIONAL

Mendukung Tumbuhnya Sentra-sentra Ekonomi Baru

Studi empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional 1% memerlukan tambahan pasokan listrik sebesar 1,5%. Oleh karena itu, Kami terus merealisasikan pembangunan pembangkit untuk menambah kapasitas daya listrik serta merealisasikan pembangunan jaringan transmisi interkoneksi sebagai back-bone dalam menyalurkan tenaga listrik ke daerah-daerah dengan potensi pertumbuhan permintaan yang tinggi.

Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi serta pembangkit diselaraskan dengan rencana pengembangan sentra-sentra ekonomi baru, agar memberi dampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pendekatan tersebut, Kami kini mengarahkan realisasi pembangunan jaringan transmisi ke kawasan-kawasan industri yang sedang atau akan dibangun, selain ke daerah-daerah tertentu yang tengah mengembangkan prasarana dasar, seperti pelabuhan dan bandar udara.

Mendukung Pengembangan Kompetensi Ekonomi Komunitas Sekitar

Pengembangan kompetensi ekonomi dari komunitas masyarakat di sekitar areal operasional dilakukan melalui realisasi Program Kemitraan, sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bagi BUMN. Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

Penyaluran dana dalam rangka Program Kemitraan dilakukan dalam bentuk:

1. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan
2. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan
3. Beban Pembinaan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktifitas mitra binaan serta untuk pengkajian / penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;

Penjelasan lebih lanjut mengenai upaya yang dilakukan Perseroan dalam mendukung peningkatan kompetensi di bidang ekonomi bagi masyarakat sekitar dapat dilihat pada Uraian pada Bab "Pengembangan Kompetensi Masyarakat Sekitar"

SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMIC COMPETENCE

Supporting the Growth of New Economic Centers

Empirical studies show that 1% of national economic growth requires an additional 1.5% supply of electricity. Therefore, we continue to realize the construction of power plants to increase electrical power capacity and are constructing transmission network interconnection as the back-bone to deliver electricity to areas with high growth potential.

The development of the transmission and distribution networks and power plants is aligned with development plans for new economic centers to provide the optimum impact on national economic growth. Through this approach, we are now directing construction of transmission lines to industrial areas which have been or will be built, in addition to specific areas that are developing basic infrastructure, such as ports and airports.

Supporting Competence Development for Local Community Economies

The development of economic competence in communities in the vicinity of the company's operations is implemented through realization of the Partnership Program, which is part of the corporate social responsibility through the Partnership and Community Stewardship Program for SOEs. The Partnership Program is designed to enhance the ability of small businesses to be strong and independent.

The distribution of funds for the Partnership Program was done in the form of:

1. Loans to finance working capital and/or the purchase of fixed assets to increase production and sales
2. Special loans to finance funding requirements for the business activities of fostered business partners in the form of additional short-term loans and to fulfill orders from other fostered business partners
3. Financing Expenses to pay for education, training, apprenticeship, marketing, promotion and other matters concerning the improved productivity of the fostered business partners, as well as for studies / research related to the Partnership Program;

Further explanation of the Company's efforts to support improvements to the economic competence of surrounding communities can be seen in the Chapter "Competence Development in Local Communities".

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW – for Sustainable Development



RESPON KAMI UNTUK MEMENUHI LISTRIK BERKELANJUTAN

**OUR RESPONSE TO MEETING DEMAND
FOR SUSTAINABLE ELECTRICITY**

halaman page 100 - 121



Keberlanjutan usaha dalam jangka panjang sangat erat kaitannya dengan kemampuan manajemen beserta segenap jajarannya dalam berinteraksi dan menyelenggarakan hubungan positif yang memberi *mutual benefit* dengan para pemangku kepentingan. Untuk itu, Kami berupaya memenuhi harapan para pemangku kepentingan dengan menggunakan sumber daya yang ada seefisien mungkin dan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

In order to demonstrate PLN's commitment to meeting the whole nation's demand for electricity, we have prepared integrated investment plans for electricity development that include the construction of power plants, transmission and distribution networks, an improved customer administration system and improved service quality. In 2015, we started construction of The 35,000 MW Power Plant Development Program. We believe these efforts will have a meaningful impact on the supply of electricity nationally to support sustainable and developing welfare for the Indonesian people.

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW - for Sustainable Development

Energi listrik memainkan peranan penting dalam mengerakkan roda perekonomian suatu negara serta untuk menopang kehidupan masyarakatnya dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. PLN merupakan Perusahaan dengan status Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas, kepercayaan dan tanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan listrik kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Tugas dan tanggung jawab inilah yang memacu semangat insan PLN untuk terus berkarya demi memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, masyarakat dan bangsa. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, kami bekerja dengan cepat dan tepat, menyusun program kerja dan merealisasikannya guna memenuhi harapan khususnya bagi para pelanggan dan pemangku kepentingan pada umumnya.

Dalam rangka memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik seluruh masyarakat di Indonesia, PLN memiliki kebijakan tanggung jawab kepada konsumen untuk menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam upaya memperbaiki kualitas layanan, serta melaksanakan tugas penyediaan tenaga listrik yang memadai bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami berupaya memenuhi kebijakan dimaksud, yang menegaskan bahwa PLN:

1. Menjamin ketersediaan listrik yang berkualitas bebas dari pemandaman dan gangguan penyaluran.
2. Menjamin akurasi pencatatan meter pemakaian dan perhitungan tagihan
3. Memberikan pelayanan pelanggan dan menyelesaikan keluhan pelanggan dengan cepat.
4. Mengoptimalkan upaya perbaikan citra perusahaan dan pembangunan *corporate brand*.
5. Peningkatan keandalan pembangkit, transmisi dan distribusi untuk meminimalkan pemandaman
6. Pemantauan terhadap angka penyambungan secara rutin.
7. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi guna mendukung *Customer Relationship Management System*, perbaikan proses bisnis pelayanan pelanggan serta layanan korporat lainnya secara terpusat.

KOMITMEN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN LISTRIK SELURUH MASYARAKAT

Guna meningkatkan kemampuan pasokan daya listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia, maka Kami siapkan dan menjalankan rencana pengembangan jangka panjang, melakukan program ekspansi terencana untuk menambah kapasitas pembangkit jaringan transmisi dan distribusi untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di seluruh wilayah Indonesia. [EU6]

Electrical energy plays an important role in driving the economic wheels of a country, as well as sustaining communities looking to achieve a better life. PLN is a State-Owned Enterprise given the task, trust and responsibility to manage and distribute electricity to every person in Indonesia.

It is these duties and responsibilities that have spurred PLN's personnel to continue striving to provide the best service for customers, communities and the nation. To fulfill these responsibilities, we work quickly and accurately, develop work programs and realize them to meet expectations, especially those of our customers and stakeholders in general.

To ensure we fulfill the electricity needs of the entire Indonesian nation, PLN has a policy delineating its responsibility to its consumers to demonstrate a high level of commitment in improving service quality, as well as carrying out the duty of providing sufficient electrical power for all Indonesian citizens. We are working hard to fulfill this policy, which states that PLN:

1. Guarantees the availability of high quality electricity, free from blackouts and transmission interruptions.
 2. Guarantees the accuracy of its electricity meters and billing.
 3. Provides rapid customer service and complaint settlement.
 4. Optimizes efforts to improve the company's image and develop its corporate brand.
 5. Improves generation, transmission and distribution reliability to minimize blackouts.
 6. Routinely monitors connection numbers.
-
7. Optimizes the use of information technology to support the Customer Relationship Management System, improve customer service business processes and other corporate services in a centralized format.

COMMITMENT TO MEET THE ENTIRE NATION'S DEMAND FOR ELECTRICITY

In order to improve the power supply and fulfill the demand for electricity in Indonesia, we have prepared and are carrying out long-term development plans, conducting a planned expansion program to increase the capacity for generation as well as the transmission and distribution networks, thus increasing the electrification ratio across the whole of Indonesia. [EU6]

Kami memiliki target jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas terpasang nasional menjadi sebesar 123.289 MW di tahun 2024 guna memenuhi kebutuhan listrik dengan beban puncak sebesar 74.536 MW dan memenuhi rasio elektrifikasi sebesar 99,4%. Untuk mencapai target tersebut Kami merealisasikan program pembangunan ketenagalistrikan secara bertahap.

Hingga akhir tahun 2015 kapasitas pembangkit nasional telah mencapai 52.889 MW, yang terdiri dari 40.295 MW milik PLN, 3.629 MW pembangkit sewa dan 8.9654 MW milik swasta. Jumlah ini meningkat sebesar 2,5% dari total kapasitas terpasang tahun lalu yang mencapai 51.621 GWh dengan rasio elektrifikasi per akhir 2015, sebesar 88,3%. Peningkatan kapasitas terpasang nasional tahun 2015 berhasil dicapai melalui realisasi berbagai program kerja strategis sebagaimana diilustrasikan berikut: [EU6]

We have a long-term target to increase the national installed capacity to 123,289 MW in 2024 to meet a demand for electricity that has a peak load of 74,536 MW and achieves an electrification ratio of 99.4%. To achieve these targets, we are gradually implementing an electrical power development program.

By the end of 2015, the national generation capacity had reached 52,889 MW, consisting of 40,295 MW owned by PLN, 3,629 MW from leased power plants and 8,9654 MW from privately generated power. This figure demonstrates a 2.5% increase from the total installed capacity the previous year, which had reached 51,621 GWh with an electrification ratio by the end of 2015 of 88.3%. This increase in national installed capacity in 2015 was achieved through the realization of various strategic work programs, as illustrated below: [EU6]

Penyelesaian PLTU dan jaringan transmisi Completion of Power Plants and transmission network	Mengoptimalkan bauran energi Energy Mix Optimization	Meningkatkan efisiensi operasi Operational Efficiency Improvements	Menjaga kecukupan pasokan listrik Maintaining Electricity Supply Sufficiency
<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian pembangkit PLTU dan proyek jaringan transmisi sesuai jadwal Peningkatan availability factor pembangkit Perbaikan manajemen coal handling Completing power plant and transmission network projects on time Improving the power plant availability factor Improving coal handling management 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi produksi listrik dari pembangkit berbahan bakar murah Memaksimalkan pembangkit berbahan bakar gas Meningkatkan kapasitas energi listrik yang dapat ditransfer melalui kabel laut Optimizing electricity production from plants using cheap fuel Maximizing gas fired power generation Improving the capacity for electricity transfer by submarine cable 	<ul style="list-style-type: none"> Efisiensi biaya energi dan pembangkit serta performa pembangkit Penurunan biaya non-fuel per kWh jual Implementasi perbaikan berkelanjutan (OPI) Penurunan susut jaringan Energy and power plant cost efficiencies and generating performance efficiencies Reduced non-fuel costs per kWh sold Implementing sustainable improvements Reducing network losses 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi aset dan pembelian excess power Mengembangkan pembangkit Peaker Mengembangkan energi baru dan terbarukan Konservasi energi melalui partisipasi pelanggan (penghematan listrik) Optimizing assets and purchases of excess power Developing Peaker generation Developing new and renewable energies Conserving energy through customer participation (saving electricity)

Pada tahun 2015, total produksi tenaga listrik PLN mencapai 233.982 GWh dengan total penjualan tenaga listrik mencapai 202.846 GWh. Realisasi produksi dan penjualan tenaga listrik tahun 2015 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun ringkasan pencapaian kinerja operasional sebagai berikut:

In 2015, PLN's total electrical power production amounted to 233,982 GWh with total sales of 202,846 GWh. These electrical power production and sales figures for 2015 exceeded those of previous years. A summary of operational performance realization follows:

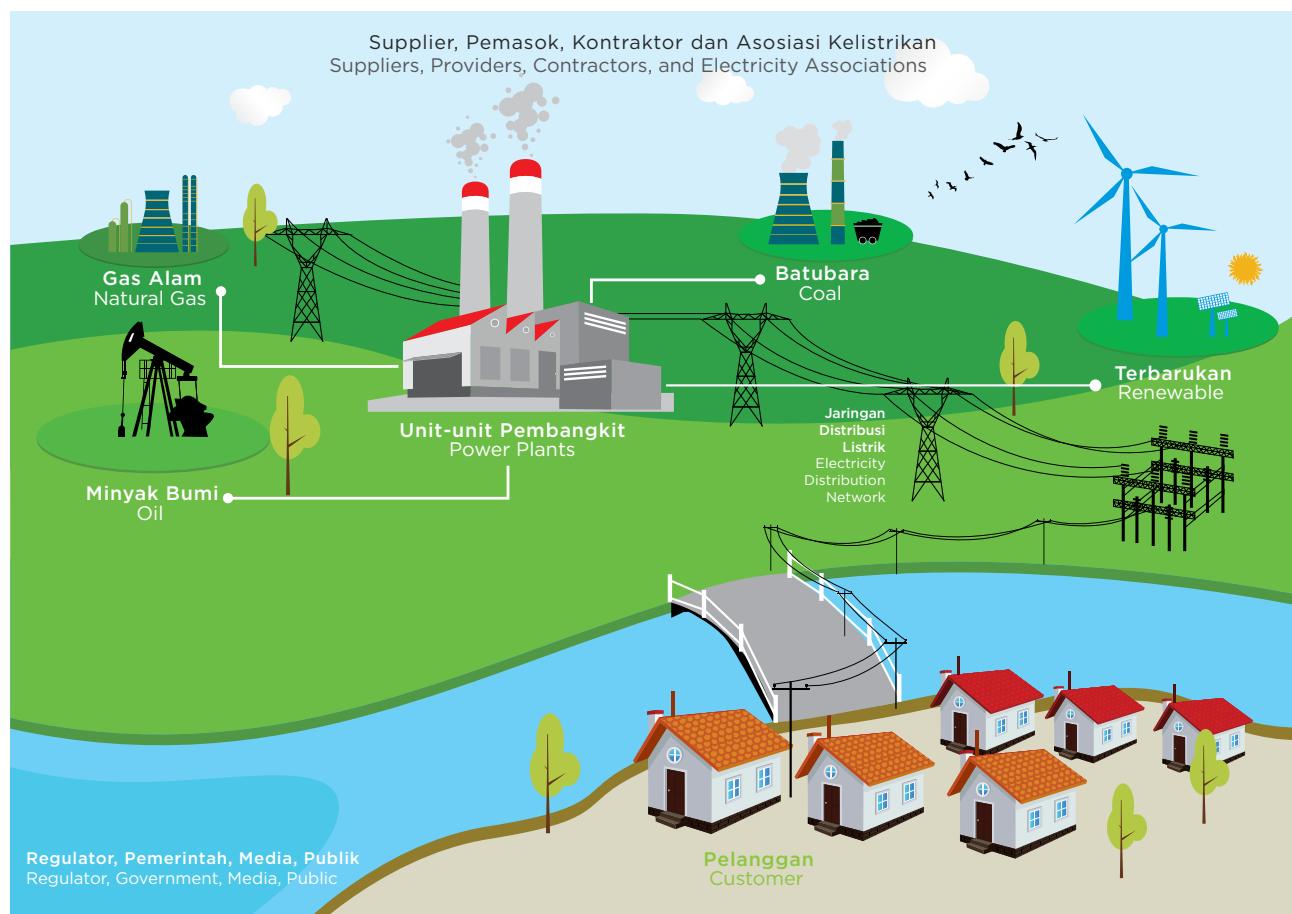
35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW – for Sustainable Development

Total Kapasitas Terpasang Rasio Elektrifikasi Panjang, Jaringan Distribusi dan Panjang Jaringan Transmisi [EU1][EU4] Total Installed Capacity and Electrification Ratio [EU1][EU4]

Keterangan	2014	2015	Description
Kapasitas Terpasang Nasional (GW)	51,62	52,89	National installed capacity (GW)
Rasio Elektrifikasi (%)	84,3	88,3	Electrification Ratio (%)
Total Panjang Jaringan Transmisi (kms)	39.910	41.683	Total length of Transmission Network (kms)
Total Panjang Jaringan Menengah (kms)	331.239	346.979	Total length of Medium Voltage Transmission Network (kms)
Total Panjang Jaringan Rendah (kms)	509.985	543.121	Total length of Low Voltage Transmission Network (kms)

Bagaimana Listrik Sampai ke Rumah Anda [G4-12] How Electricity Reaches Your Home [G4-12]



Pada masa mendatang, Kami akan berupaya meningkatkan kolaborasi yang dijalankan, dengan melibatkan peran aktif dari pihak swasta dalam membangun infrastruktur listrik bagi masyarakat Indonesia. [EU6]

In the future, we will work to increase ongoing collaboration by actively involving the private sector in the construction of electrical power infrastructure for the Indonesian people. [EU6]

PROGRAM PEMBANGKIT 35.000 MW

Pada tahun 2015, secara resmi telah dimulai program Pembangunan Pembangkit 35.000 MW lengkap dengan infrastruktur pendukungnya, yakni jaringan transmisi, distribusi dan gardu induk. Adapun total kapasitas yang akan dibangun menjadi sebesar 42.000 MW, yaitu termasuk tambahan pembangunan pembangkit reguler dan pembangkit Program Percepatan Tahap I - 10.000 MW yang sedang masa konstruksi. Jangka waktu pelaksanaan Program Pembangkit 35.000 MW adalah lima tahun, dan direncanakan selesai pada akhir tahun 2019.

Kami telah mempelajari dengan seksama berbagai kelemahan dan kendala yang membuat realisasi Program Percepatan Pembangkit 10.000 MW Tahap I dan Tahap II, tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Dengan dukungan penuh Pemerintah, kami berupaya mengatasi dua kendala utama, yakni: lamanya proses perizinan dan penyediaan lahan. Selain itu secara internal, telah dilakukan juga berbagai langkah perbaikan fundamental, meliputi: perbaikan struktur organisasi, perbaikan manajemen pengawasan proyek, perbaikan sistem pendukung pengawasan proyek, dan sebagainya.

Berbagai langkah perbaikan internal yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan perbaikan iklim investasi dan penyederhanaan mekanisme pembebasan lahan yang membuat kepastian penyediaan lahan meningkat, diyakini akan memberi kontribusi signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan program pembangunan pembangkit tenaga listrik skala besar tersebut.

Kami meyakini keberhasilan realisasi Program Pembangkit 35.000 MW akan memberi banyak manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan lokasi program pembangunan pembangkit yang menyebar di seluruh area nusantara, maka akan terpenuhi kebutuhan listrik secara nasional disamping itu akan tercipta pemerataan pembangunan yang mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

DISTRIBUSI PELANGGAN

Di akhir tahun 2015, PLN telah memiliki lebih dari 61,2 juta orang pelanggan di seluruh Indonesia yang terdiri dari segmen pelanggan rumah tangga, bisnis dan industri. Angka ini dipastikan akan terus tumbuh seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan listrik nasional yang mencapai 5,9% pada tahun 2015, dengan rasio elektrifikasi mencapai 88,3%. Kami terus berupaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dengan membangun infrastruktur jaringan listrik baru, meremajakan jaringan listrik yang sudah ada, serta diiringi upaya perbaikan kualitas layanan

35.000 MW Generation Program

In 2015, the 35,000 MW Generation development program officially started, complete with supporting infrastructure, namely the transmission and distribution networks and substations. The total capacity to be built amounts to 42,000 MW, which includes additional regular power plant construction as well as plants in the Phase I - 10,000 MW Acceleration Program, which is still in its construction period. The time frame for the 35,000 MW Generating Program is five years, with completion by the end of 2019.

We have carefully studied the various weaknesses and obstacles that have delayed the realization of Phase I and Phase II of the 10,000 MW Acceleration Program, which could not be completed in a timely manner. With the full support of the Government, we are trying to overcome two major obstacles, namely: the length of the permit process and land provision. Additionally, internally we have taken various measures to achieve fundamental improvements, including: improving the organizational structure, improving project supervision management, improving project supervision support systems, and so on.

Various internal corrective measures have been carried out simultaneously with implementation of an improved investment climate and the simplification of the land acquisition mechanism, which has increased certainty as to the availability of land, that we believe will contribute significantly to the successful implementation of this large-scale power generation development program.

We believe the successful realization of The 35,000 MW Power Plant Development Program will provide many benefits to all our stakeholders. With locations for the generation program spread throughout the country, we will be able to fulfill the national demand for electricity, as well as creating equitable development that supports the improvement of national economic growth and improves the welfare of the whole population of Indonesia.

CUSTOMER DISTRIBUTION

As of the end of 2015, PLN had in excess of 61.2 million customers across Indonesia, made up from household, business and industrial segments. This figure will continue to grow with the increasing national demand for electricity, which reached 5.9% in 2015, and an electrification ratio of 88.3%. We will continue our efforts to increase the electrification ratio by building new electrical power networks, renewing the current electrical power networks

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW - for Sustainable Development

pelanggan dengan melaksanakan perbaikan proses bisnis, penyambungan baru dan penyediaan berbagai fasilitas layanan.

and making improvements to the quality of customer service by improving our business processes, establishing new connections and providing various service facilities.

MEMENUHI LISTRIK PULAU TERLUAR & DAERAH TERPENCIL MEETING ELECTRICITY DEMAND IN THE OUTER ISLANDS AND REMOTE AREAS

Untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 257,9 juta jiwa (tahun 2015) dan mendiami seluruh wilayah Nusantara yang terdiri atas sekitar 17.000 pulau besar dan kecil, Kami membangun instalasi ketenagalistrikan dengan memperhitungkan demografi dan sebaran penduduk. Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dengan jumlah penduduk yang dominan, membuat pembangunan ketenagalistrikan di empat pulau utama tersebut juga lebih dominan. Namun demikian, Kami tetap berupaya memenuhi kebutuhan listrik di pulau-pulau terluar dan daerah terpencil dengan membangun instalasi ketenagalistrikan yang sesuai dengan karakter masing-masing wilayah dimaksud.

Tekad ini juga tercermin dari sebaran wilayah lokasi pembangunan Pembangkit 35.000 MW yang meliputi 210 lokasi di seluruh Indonesia, yang terdiri dari: 59 lokasi di Sumatera, 34 lokasi di Pulau Jawa, 49 lokasi di Sulawesi, sementara di Kalimantan 34 lokasi, dan di Indonesia Timur 34 lokasi.

Diluar rencana pembangunan ketenagalistrikan dalam skema 35.000 MW tersebut, Kami juga tetap merealisasikan pembangunan ketenagalistrikan secara reguler, dimana sebagian diantaranya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah pulau-pulau terluar dan daerah terpencil. Kami menekankan pentingnya dilakukan terobosan penyediaan tenaga listrik untuk wilayah-wilayah ini dengan membangun pembangkit berkapasitas kecil hingga sedang dan menggunakan sumber tenaga bervariasi, mulai dari Bahan Bakar Minyak, bahan bakar nabati, tenaga bayu, dan tenaga surya, sesuai dengan kondisi wilayah dan ketersediaan sumber daya.

To meet the electricity needs of the entire population of Indonesia, which amounted to 257.9 million people (2015) and who inhabit the entire archipelago with its approximately 17,000 large and small islands, we build electrical power installations taking into account demographics and population distribution. Java, Sumatra, Kalimantan and Sulawesi, which all have dominant populations, have seen more dominant electricity development on these four main islands than in other areas. However, we keep working to meet the demand for electricity in the outer islands and remote areas by building electricity installations that are relevant to the characteristics of each area.

This commitment is also reflected in the distribution of locations within The 35,000 MW Power Plant Development Program, which covers 210 locations throughout Indonesia and consists of 59 locations in Sumatra, 34 locations in Java, 49 locations in Sulawesi, 34 locations in Kalimantan and 34 locations in eastern Indonesia.

Outside the 35,000 MW development scheme, we are still realizing regular electrical power construction, some of which is to meet the demand for electricity in the outer islands and remote areas. We stress the importance of making electricity supply breakthroughs to these areas by building small to medium capacity plants fired by various power sources, ranging from oil fuel, to bio fuels, wind power and solar power, in accordance with the conditions of the area and the availability of resources.

Untuk tahun 2015, PLN menyambung 3,7 juta sambungan baru sehingga jumlah pelanggan pada akhir tahun 2015 menjadi 61,2 juta pelanggan atau mengalami peningkatan sekitar 6,39 % dari jumlah pelanggan di tahun 2014, yakni sebanyak 57,5 juta pelanggan, sedangkan penambahan daya tersambung mencapai 6.552 MVA.

Pelanggan PLN [EU3]

Jumlah Pelanggan (ribu pelanggan)

Number of Customers (thousands)

Kelompok Pelanggan			Customer Group
	2014	2015	
Rumah Tangga	53.309	56.605	Household
Bisnis	2.626	2.895	Business
Industri	58	63	Industry
Lainnya	1.500	1.604	Others
Jumlah	57.493	61.167	Total

KEANDALAN DAN KETERSEDIAAN

Untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan pasokan listrik, selama 2015 Kami telah melaksanakan beberapa upaya dan strategi perbaikan yaitu: [EU6][EU21][G4-PR1]

Pemeliharaan dan pamantauan berkala terhadap unit-unit pembangkit, transformator dan trafo sehingga risiko kerusakan pada peralatan yang menyebabkan pemadaman listrik dapat dihindari.

1. Pengamanan terhadap berbagai ancaman eksternal seperti bencana alam (banjir, kebakaran, gempa bumi), kesalahan sistem (server rusak, disk rusak, jaringan putus), dan faktor kesengajaan akibat adanya upaya negatif yang dilakukan oleh pihak tertentu melalui implementasi sistem back-up dan *Disaster Recovery Center* (DRC) yang dilengkapi dengan panduan untuk melakukan pemulihan listrik (*disaster recovery plan*).
2. Meningkatkan efisiensi transmisi dan distribusi dengan mengurangi angka persentase energi yang hilang (susut jaringan nasional).
3. Perbaikan dan penggantian peralatan distribusi, gardu penyulang dan sebagainya untuk mencegah terjadinya pemadaman bergilir karena kerusakan peralatan.

Berbagai upaya perbaikan atas kehandalan sistem ketenagalistrikan tersebut, membuat Kami berhasil mengurangi lama gangguan per pelanggan (SAIDI), namun

In 2015, PLN made 3.7 million new connections, bringing the total customer figure to 61.2 million as of the end of 2015, an increase of 6.39 % on 2014, which had 57.5 million customers, while additional installed power rose by 6,552 MVA.

PLN Customers [EU3]

RELIABILITY AND AVAILABILITY

To ensure the reliability and availability of electrical power, during 2015 we carried out various measures and improvement strategies, such as: [EU6][EU21][G4-PR1]

Periodic maintenance and monitoring of generating units and transformers so that the risk of damage to equipment resulting in power outages could be avoided.

1. Safeguarding against various external threats, such as natural disasters (floods, fires, earthquakes), system errors (faulty servers, damaged disks, disrupted networks), and intentional disruption / sabotage caused by certain parties by implementing a back-up system and *Disaster Recovery Center* (DRC) equipped with guidelines for the restoration of electrical power (*disaster recovery plan*).
2. Improving transmission and distribution efficiency by reducing the percentage rate of energy lost (national network losses).
3. Repairing and replacing distribution equipment, substation feeders and so on to prevent rolling blackouts due to equipment damage.

Thanks to the improvements made to the reliability of the electricity system, We have reduced the length of disruptions per customer (SAIDI), but have not been able to reduce the

belum dapat mengurangi frekuensi gangguan pemadaman per pelanggan (SAIFI) dibandingkan tahun sebelumnya, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

SAIDI dan SAIFI [EU28, EU29]

		2014	2015
SAIDI	Jam/pelanggan Hours/customer	5,81	5,31
SAIFI	Kali/pelanggan Times/customer	5,58	5,97

Selain angka SAIDI dan SAIFI, angka susut jaringan ditetapkan juga sebagai indikator lain yang menjadi parameter PLN dalam memantau kehandalan dan ketersediaan tenaga listrik yang diukur dari efisiensi unjuk kerja sistem transmisi dan distribusi listrik dari pembangkit sampai ke konsumen.

Upaya untuk menekan angka susut jaringan terus dilakukan, dengan tujuan agar PLN dapat:

- (i) Menurunkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP),
- (ii) Meningkatkan profitabilitas,
- (iii) Meningkatkan kemampuan ekspansi PLN
- (iv) Menjamin keberlangsungan usaha

Adapun upaya yang dilakukan secara berkesinambungan untuk menurunkan susut jaringan, sebagai berikut:

1. Melakukan penambahan penyulang / jurusan baik untuk jaringan tegangan menengah maupun jaringan tegangan rendah pada beberapa lokasi yang bebannya sudah berat.
2. Melakukan pemasangan gardu sisipan pada jaringan distribusi.
3. Melakukan penggantian konduktor/pemberatan jaringan
4. Penyeimbangan beban trafo
5. Penggantian kWh meter macet
6. Melaksanakan dan mengintensifkan program Revenue Assurance
7. Melaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan program penertiban PJU liar dan P2TL
8. Melakukan perbaikan proses pengadaan material distribusi utama (MDU)
9. Melakukan penyempurnaan sistem Billing Management.
10. Penyelesaian pembangunan pembangkit dan transmisi terkait.

frequency of outages per customer (SAIFI) compared to the previous year, as shown in the following table.

In addition to the SAIDI and SAIFI figures, the network loss figures are also used as other indicators for PLN parameters to monitor the reliability and availability of electrical power measured from the performance efficiency of the transmission and distribution network system from the power plant to the customer.

Efforts are continually made to reduce the network loss figure with the aim that PLN can:

- (i) Reduce the cost of production
- (ii) Improve profitability,
- (iii) Increase PLN's ability to expand
- (iv) Ensure business continuity

Efforts taken concurrently to reduce network losses are as follows:

1. Implement additional feeders for the medium and low voltage networks in several locations that were heavily loaded.
2. Install inserted substations to the distribution network.
3. Replace network conductors
4. Balance transformer loads
5. Replace broken kWh meters
6. Implement and identify the Revenue Assurance program
7. Consistently and sustainably implement the unregulated PJU (street lighting) and P2TL (electrical power usage) program
8. Improve the main distribution material procurement process (MDU)
9. Improve the Billing Management system.
10. Complete construction of power plants and related transmission.

Kinerja Susut Jaringan (%)

Network Loss Performance (%)

	2014	2015	
Susut Transmisi	2,37	2,33	Transmission Losses
Susut Distribusi	7,52	7,64	Distribution Losses
Susut Jaringan	9,71	9,77	Network Losses

PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN PRODUK [G4-PRI]

Untuk memastikan agar mutu layanan memenuhi standar kesehatan, keselamatan dan keamanan baik untuk pelanggan maupun tempat kerja, maka Kami menerapkan sistem LK2 dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang dijabarkan melalui:

1. Keputusan Direksi No. 090.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Instalasi
2. Keputusan Direksi No. 091.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Umum
3. Keputusan Direksi No.092.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Kerja

Selain itu, Perusahaan juga menggunakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER.05/MEN/1996, sebagai rujukan implementasi ketentuan tersebut. Monitoring dan evaluasi implementasinya dilaksanakan setiap semester melalui sistem penilaian tingkat kinerja sesuai Keputusan Direksi No. 031.K/DIR/2010 dan No. 032.K/DIR/2010).

Untuk memastikan keamanan dan keselamatan pengguna tenaga listrik, Kami memberikan tanda-tanda pengingat besaran tegangan/voltase yang mengalir di beberapa titik strategis di dekat maupun pada instalasi penyalur tenaga listrik di area publik dan di area pelanggan. Selain itu, secara berkala juga dibagikan booklet / iklan layanan yang berisi konten cara-cara menggunakan tenaga listrik dengan aman, termasuk saran dan himbauan agar menggunakan peralatan listrik sesuai standar yang ditetapkan dan memasang instalasi listrik dengan menugaskan tenaga lapangan bersertifikasi.

DEMAND SIDE MANAGEMENT (DSM) [EU7]

Dalam rangka menjaga keandalan dan keberlanjutan pasokan listrik ditengah keterbatasan kapasitas pembangkit terutama pada saat beban puncak, maka diterapkan program Demand Side Management (DSM),

QUALITY CONTROL AND PRODUCT SAFETY

[G4-PRI]

To ensure service quality fulfills health, safety and security standards for customers and in the workplace, we apply the LK2 system and environmental management in accordance with Law Num. 1 of 1970 on Occupational Safety, outlined by:

1. Board of Directors' Decree Num. 090.K/DIR/2005 on Guidelines for Installation Safety
2. Board of Directors' Decree Num. 091.K/DIR/2005 on General Safety Guidelines
3. Board of Directors' Decree Num. 092.K/DIR/2005 on Guidelines for Workplace Safety

In addition, the company also uses an Occupational Health and Safety Management System in accordance with Minister of Manpower Decree Num. PER.05/MEN/1996 as the reference for implementation of certain provisions. Monitoring and evaluation implementation are carried out each semester through a performance rating system according to Board of Directors' Decree Num. 031.K/DIR/2010 and Num. 032.K/DIR/2010.

To ensure the security and safety of users of electricity, we place warning signs regarding the amount of voltage flowing through various strategic points near or on electrical power distribution installations in public and customer areas. In addition, we periodically distribute booklets / advertising explaining ways to use electricity safely, including advice and warnings to use electrical appliances in accordance with predetermined standards and to install electrical appliances using certified field personnel.

DEMAND SIDE MANAGEMENT (DSM) [EU7]

In the interest of maintaining the reliability and sustainability of electrical power supplies in the midst of limited generating capacity, particular at peak times, we have

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW - for Sustainable Development

yang dilaksanakan untuk mengurangi atau mengalihkan beban puncak dengan cara :

1. Konservasi energi, yakni dengan mendorong masyarakat untuk melakukan penghematan energi;
2. Mendukung pemakaian produk elektronik yang hemat energi.
3. Mengenakan tarif progresif.
4. Memberikan paket diskon kepada pelanggan industri dan bisnis skala besar yang dapat mengalihkan bebannya dari waktu beban puncak ke waktu luar beban puncak;
5. Pengaturan sambungan baru bagi pelanggan industri dengan mensyaratkan penghindaran penggunaan listrik pada waktu beban puncak (WBP) untuk daerah-daerah yang daya mampu pembangkitnya masih kritis;
6. Kampanye pengurangan beban listrik pada waktu beban puncak.

implemented a Demand Side Management (DSM) program to reduce or transfer peak load usage by the following:

1. Conserving energy, namely by encouraging the public to save energy;
2. Supporting the use of energy saving appliances;
3. Implementing progressive tariffs;
4. Providing discounts to industrial customers and large-scale businesses to transfer their usage from peak load times to non-peak times;
5. Regulating new connections for industrial customers that require they avoid the use of electricity during peak hours (WBP) in areas where power generation is still at a critical level;
6. Campaigning to reduce power usage during peak hours.

SUPPLY SIDE MANAGEMENT [EU7]

Untuk mengatasi masalah kekurangan daya pembangkit yang dikelola sendiri, Kami menerapkan program Supply Side Management (SSM) dengan membeli kelebihan tenaga listrik yang dibangkitkan dari beberapa pembangkit swasta untuk memenuhi kekurangan pasokan tenaga listrik dari pembangkit milik PT PLN (Persero). Upaya ini dilakukan untuk menjaga keandalan pasokan di waktu beban puncak.

SUPPLY SIDE MANAGEMENT [EU7]

To manage the problem of our own power generation shortage, we are implementing a Supply Side Management (SSM) program to purchase excess electrical power generated by several privately owned power plants to manage the shortage of electrical power generated by PT PLN (Persero) power plants. This is being done to safeguard supply reliability during peak times.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas produk, kecepatan layanan dan efisiensi operasional, serta mengurangi peluang bagi terjadinya tindakan *fraud* akibat adanya kontak langsung dengan pelanggan, maka dilakukan perbaikan yang berkesinambungan diberbagai lini operasional. Kami berkomitmen untuk memperbaiki kualitas layanan kepada pelanggan dengan memaksimalkan perkembangan sistem teknologi informasi yang didesain sesuai dengan kebutuhan perkembangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional dan pelanggan.

Kami merealisasikan berbagai program perbaikan layanan, meliputi:

1. Penyediaan *account officer* dan *official account* untuk pelanggan utama maupun pelanggan bisnis dan komersial utama.
2. Pengembangan sistem penagihan dan penyambungan, yakni AP2T dan P2APST.
3. Pengembangan Pelayanan Borderless, meliputi:
 - a. Pembukaan akun twitter @pln_123
 - b. Call center PLN 123, SMS 8123, USSD *8123#, email: pln123@pln.co.id, dan website : www.pln.co.id.

SERVICE QUALITY IMPROVEMENT PROGRAM

In order to improve product quality, speed of service and operational efficiency, while reducing the opportunity for fraud resulting from direct contact with customers, we have made continuous improvements to various operational lines. We are committed to improving the quality of customer service by maximizing information technology system developments designed in accordance with the needs for company development to fulfill the national and customer demand for electricity.

We have realized various customer service improvement programs, covering:

1. The provision of account officers and account officials for key customers and key business and commercial customers.
2. Developing billing and connection systems, namely AP2T and P2APST.
3. Developing Borderless Service, encompassing:
 - a. Opening the twitter account @pln_123
 - b. Call center PLN 123, SMS 8123, USSD *8123#, email: pln123@pln.co.id and the website www.pln.co.id.

4. Pengembangan Aplikasi Pengaduan Keluhan Terpadu (APKT).
5. Pengembangan Share Service Centre (SSC)

Optimalisasi Layanan Melalui Contact Centre PLN 123 dan Media Sosial [EU7][EU23]

Menyadari pentingnya konsep pelayanan terpusat yang memudahkan para pelanggan, oleh sebab itu Kami menghadirkan layanan terpusat Contact Centre PLN 123 yang dapat dijangkau di seluruh Indonesia oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Jajaran PLN di unit layanan tersebut bekerja dengan sepenuh hati untuk dapat memberikan pelayanan publik terbaik. Contact Centre PLN 123 memberi beragam layanan yang meliputi: penyambungan baru (PB), penambahan daya (PD), penyambungan sementara (PS), hingga menyampaikan informasi dan keluhan.

Disamping itu, mempertimbangkan derasnya arus globalisasi dan tingginya peran perangkat digital dan sosial media dalam keseharian masyarakat Indonesia, maka dikembangkan peran sosial media sebagai salah satu channel/platform untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan para pemangku kepentingan. Selain memiliki website resmi yang beralamat di www.pln.co.id, Kami mengembangkan eksistensi PLN melalui akun Facebook (PLN 123) dan Twitter (@pln_123), serta email pln123@pln.co.id.

Dengan mengikuti dan memanfaatkan kemajuan teknologi dan pesatnya perkembangan informasi, Kami kini menggunakan banyak media untuk mendukung hadirnya pelayanan publik yang berkualitas.

Penanganan Keluhan Pelanggan

Kami memonitor penyelesaian keluhan pelanggan secara harian, mingguan, dan bulanan dengan menugaskan supervisor, asisten manajer dan manajer unit pelaksana melalui "call centre 123", website www.pln.co.id, atau melalui loket dinas gangguan dan loket pengaduan.

Untuk menjamin penyelesaian keluhan secara tuntas, maka penanganan keluhan pelanggan dicatat pada jurnal (logbook) pelayanan. Dengan demikian seluruh data keluhan pelanggan akan tercatat dalam database.

Kami telah memasukan kriteria penyelesaian keluhan pelanggan sebagai target kinerja unit untuk memastikan tindak lanjut penanganan keluhan pelanggan. Adapun standar waktu pelayanan per jenis gangguan pada unit pelaksana:

1. Kedatangan petugas : 30 menit.
2. Gangguan trafo : 4 jam.
3. Gangguan JTR : 1,5 jam
4. Gangguan SR : 30 menit.

4. Integrated Complaint Handling Application (APKT) development.
5. Shared Service Center (SSC) development.

Optimizing Service Through PLN 123 Contact Center and Social Media [EU7][EU23]

Realizing the importance of an integrated service that supports customers, We provide a centralized service center through Contact Center PLN 123, which is available across all of Indonesia to anyone, at anytime and anywhere. PLN's personnel at these service units work enthusiastically to provide the best public service. Contact Center PLN 123 provides a range of services, covering: new connections (PB), additional power (PD), temporary connections (PS), and presents information and takes complaints.

In addition, considering the rapid current of globalization and strong role of digital tools and social media in the day to day life of the Indonesian people, we have developed a social media channel / platform to communicate with our customers and stakeholders. We not only have an official website at www.pln.co.id, but have also developed our existence through a Facebook account (PLN 123) and Twitter (@pln_123), as well as an email service on pln123@pln.co.id.

By following and making use of technological advances and rapid information development, We now use many types of media to support our presence and the availability of high quality public service.

Handling Customer Complaints

We monitor the settlement of customer complaints daily, weekly and monthly and assign supervisors, assistant managers and managers to handle the Call Center 123, website www.pln.co.id, as well as service desks that handle reports of service disruption and complaints.

To ensure the complete resolution of complaints, customer complaint handling is recorded in a service journal (log book). In this way, all the customer complaint data is recorded in a database.

We have entered the criteria for customer complaint settlement performance targets to ensure follow up of all customer complaints. Our standard service times for certain types of complaint in implementation units are:

1. Arrival of PLN personnel: 30 minutes.
2. Transformer disturbance: 4 hours.
3. Low Voltage Network disturbance: 1.5 hours
4. Household disturbance: 30 minutes.

MARKETEER OF THE YEAR 2015 – BUKTI KOMITMEN PLN TERHADAP PELANGGAN
MARKETEER OF THE YEAR 2015 – PROOF OF PLN'S COMMITMENT TO ITS CUSTOMERS

Atas berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi harapan pelanggan, PLN Distribusi Jaya & Tangerang – melalui dua punggawa-nya Haryanto WS dan Rahimuddin - sukses meraih gelar sebagai Marketeer of The Year 2015 dalam acara Marketing Week 2015. Penghargaan Marketeer of The Year diberikan oleh pihak independen yang diakui reputasinya di bidang pemasaran, Mark Plus Inc, untuk individu dari institusi yang berhasil membuat perubahan di bidang pemasaran.

Penghargaan diperoleh berkat berbagai terobosan bidang layanan, khususnya untuk pelanggan premium yang melebihi harapan pelanggan, sehingga mampu memperbaiki citra perusahaan, sebagaimana ditunjukkan oleh naiknya indeks kepuasan pelanggan dari 88 pada 2013 menjadi 92 pada 2014. Branding program yang dijalankan oleh Haryanto WS – Mantan GM PLN Distribusi Jaya & Tangerang, meliputi: perang padam, kecepatan layanan pasang baru, peningkatan layanan, dan komunikasi dengan pelanggan.

Sementara Rahimuddin, Manajer Bidang Niaga PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten, Rahimuddin, meraih penghargaan Marketing Of The Year pada sektor *infrastructure and public utilities* berkat penerapan konsep Marketing 3.0. Pada konsep ini PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten menerapkan Aplikasi PCMS untuk melayani pelanggan premium. Aplikasi ini dirancang sebagai tools untuk memberikan pelayanan lebih kepada pelanggan premium.

Dalam Fitur aplikasi ini pelanggan premium mendapatkan fasilitas akses sebagai berikut:

1. Profil, pelanggan dapat melihat data profil dan dapat memberikan data tambahan kepada PLN.
2. Histori, pelanggan dapat melihat histori pemakaian dalam bentuk grafik. Pelanggan juga dapat mendownload invoice tagihan mereka melalui aplikasi ini.
3. Feedback, pelanggan dapat melihat mengirimkan keluhan dan pengaduan melalui feedback pelanggan.
4. Info Terkini, pelanggan mendapatkan info dari PLN melalui aplikasi ini.
5. Contact us, pelanggan mendapatkan info PIC PLN melalui aplikasi ini.

Aplikasi ini dapat diakses melalui <http://pcms.pln-jabar.co.id/users>. Layanan Premium (*Premium Service*) ini merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan PLN untuk pelanggan Industri dan Bisnis golongan tarif I4, I3 dan B3 dengan spesifikasi layanan dan harga tarif di atas layanan reguler.



For efforts undertaken to improve service quality and meet customer expectations, PLN Jakarta and Tangerang Distribution - through two retainers, Haryanto WS and Rahimuddin - won success as Marketeer of the Year 2015 in Marketing Week 2015 event. The Marketeer of The Year awards are bestowed by an independent party with a recognized reputation in marketing, Mark Plus Inc., to individuals from institutions that have successfully made changes in the marketing field.

This award was won thanks to breakthroughs in the service field, especially for premium customers, which exceeded customer expectations and was able to improve the company's image, as indicated by an increase in the customer satisfaction index from 88 in 2013 to 92 in 2014. A branding program run by Haryanto WS - Former GM of PLN Jaya & Tangerang Distribution, included: a war on outages, accelerated new installation services, improved service and communication with customers.

Meanwhile, Rahimuddin, Commercial Manager at PLN West Java and Banten Distribution, won Marketing Of The Year for the infrastructure and public utilities sector thanks to the application of the Marketing 3.0 concept. In this concept, PLN West Java and Banten Distribution applied the PCMs Applications to serve premium customers. This application is designed to provide additional services for premium customers.

Within the features of this application, premium customers have the following access facilities:

1. Profile, customers can see their profile data and provide additional data to PLN.
2. History, customers can see their usage history in graph form. They can also download their billing invoices through this application.
3. Feedback, customers can send complaints and report disturbances through customer feedback.
4. Latest Info, customers can access PLN information through this application.
5. Contact Us, customers can find information on the PLN PIC through this application.

This application can be accessed by <http://pcms.pln-jabar.co.id/users>. This Premium Service is one form of service provided by PLN to its Industrial customers and Business customers on I4, I3 and B3 tariffs with service specifications and tariffs that exceed regular services.

Kami menerapkan pengelolaan keluhan pelanggan untuk mengembalikan dan meningkatkan level kepercayaan pelanggan sekaligus meningkatkan keterikatan pelanggan dengan PLN. Cara yang kami tempuh beragam, meliputi: perbaikan standar pelayanan, penjelasan penyebab gangguan kepada pelanggan serta penyampaian permintaan maaf kepada pelanggan atas terjadinya gangguan.

Sebagai bagian dari upaya menumbuh kembangkan budaya layanan, Kami menerapkan pemberian benefit atas prestasi di bidang layanan, sesuai Kep.Dirjen LPE No.16-12/43/600.3/2003, yang menegaskan bahwa apabila standar pelayanan terlampaui dari yang dijanjikan maka akan diberikan kompensasi sebesar 10% Biaya Beban. Kompensasi ini dilaksanakan di seluruh unit pelaksana pelayanan pelanggan.

KAMPANYE HEMAT ENERGI BAGI PELANGGAN [EU7][EU23]

Seiring dengan semakin terbatasnya sumber energi di Indonesia dan masih terbatasnya kemampuan PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik pada masyarakat, Kami mengajak partisipasi masyarakat untuk melakukan penghematan energi listrik. Beberapa fakta yang menjadi bahan pertimbangan sebagai landasan bagi pelaksanaan kampanye penghematan listrik kepada para pelanggan adalah:

1. Pada beberapa daerah masih terjadi defisit pasokan tenaga listrik yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Untuk mengurangi intensitas dan durasi pemadaman bergilir ini PLN mengajak masyarakat untuk melakukan penghematan penggunaan listrik.
2. Pembangunan fasilitas tenaga listrik membutuhkan waktu yang cukup lama akibat adanya beragam kendala di lapangan. Sebagai contoh, di tahun-tahun lalu, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berkapasitas 2x100 MW, membutuhkan waktu paling cepat tiga tahun, di luar waktu yang dibutuhkan untuk persiapan (seperti penyediaan dan pembebasan lahan). Hal ini memicu terjadinya ketimpangan antara ketersediaan pasokan listrik dengan pertumbuhan konsumsi listrik pelanggan berkembang lebih cepat.

Kondisi seperti ini semakin memperkuat pentingnya langkah pengendalian dan pertumbuhan listrik dari sisi pelanggan. Salah satu yang dapat dijalankan adalah mengajak pelanggan untuk melakukan penghematan pemakaian listrik, agar tercipta keseimbangan antara

We implement customer complaint management to restore and improve the level of customer confidence and increase customer engagement with PLN. The methods that we use are diverse, including: improved service standards, explaining the cause of disruptions to the customer, as well as apologizing to customers for the disruptions.

As part of an effort to cultivate a culture of service, we provide benefits for achievements in the field of service, in accordance with Head of LPE Directorate General Decree Num. 16-12/43/600.3/2003, which states that if service standards exceed the promised levels, a benefit will be paid of 10% of the Cost Liability. This benefit is implemented in all customer service units.

CUSTOMER ENERGY SAVING CAMPAIGN [EU7][EU23]

Along with the increasingly limited sources of energy in Indonesia and PLN's limited ability to meet the electricity demands of society, we have invited public participation to save electricity. Several facts taken into consideration as the basis for the implementation of this customer electricity saving campaign are:

1. Some areas still suffer a deficit in the electricity supply, which results in rolling blackouts. To reduce the intensity and duration of rolling blackouts, PLN invites the public to reduce their electricity use.
2. The construction of electrical power facilities require considerable time due to a variety of obstacles in the field. For example, in previous years, the construction of 2x100 MW Steam Powered Power Plants required at least three years, in addition to the time needed for preparation (such as provisioning and land acquisition). This led to a gap between electricity supply and growing customer demand for electricity, which grew more rapidly than construction.

Conditions such as these reinforce the importance of control measures and electricity growth from the customer side. One method that can be taken is to encourage customers to save electricity to create a

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW - for Sustainable Development

ketersediaan pasokan listrik, dengan pertumbuhan konsumsi listrik masyarakat.

3. Adanya subsidi tarif listrik terhadap sebagian besar pelanggan terutama pelanggan rumah tangga. Faktor-faktor yang berada diluar kendali PLN, seperti kenaikan harga bahan bakar dan fluktuasi nilai kurs Rupiah serta anggaran subsidi yang terbatas, mengharuskan Perusahaan untuk mengendalikan biaya produksi secara optimal atau membatasi jumlah produksi listrik agar tidak melampaui subsidi yang telah disediakan.

Terlampaunya anggaran subsidi akan membuat Pemerintah menambah alokasi subsidi listrik, padahal kebutuhan anggaran lain yang lebih mendesak, seperti anggaran pendidikan, kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur dan lain-lain juga semakin meningkat. Oleh karenanya, Kami melakukan kampanye penghematan agar anggaran pembangunan lain yang penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat juga tetap tersedia.

Beberapa tindakan yang dapat dilakukan pelanggan dalam rangka mendukung kegiatan kampanye hemat energi meliputi: [EU7][EU23]

1. Memasang daya listrik di rumah sesuai dengan kebutuhan,
2. Memilih peralatan rumah tangga yang hemat listrik,
3. Membiasakan diri dan anggota keluarga untuk berhemat dengan cara menyalakan alat-alat listrik hanya pada saat diperlukan,
4. Menggunakan alat listrik secara bergantian,
5. Mengurangi pemakaian lampu di pagi dan siang hari dengan memanfaatkan sinar matahari agar masuk ke ruangan dengan mudah,
6. Mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi (LHE) yang lebih terang dan tahan lama.

SURVEI TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN

[G4-PR5]

Dalam rangka mendapatkan umpan balik dari pelanggan mengenai kualitas layanan bagi penyusunan program perbaikan layanan di masa mendatang, maka dilaksanakan Survei Kepuasan Pelanggan (SKP) secara berkala. Pelaksanaan survei tersebut dilakukan dengan melibatkan pelanggan PLN dari segmen bisnis, industri, rumah tangga, sosial dan pemerintah termasuk didalamnya pelanggan pascabayar maupun prabayar sebagai responden.

Tujuan pelaksanaan survei kepuasan pelanggan adalah untuk:

1. Mengetahui tingkat kualitas pelayanan pelanggan dipandang dari perspektif pelanggan,

balance between electricity supply and the growth of electricity demand by society.

3. The existence of subsidized electricity rates for most customers, especially household customers. Factors that are beyond the control of PLN, such as rising fuel prices and fluctuations in exchange rates, as well as the limited subsidy budget, have required the Company to optimally control production costs or limit the amount of electricity produced in order not to exceed the available subsidies.

Exceeding the subsidy results in the Government increasing the subsidy allocation, meanwhile, there are more pressing budgetary needs, such as education, public health, infrastructure development and others. Therefore, we conduct savings campaigns so that other development budgets that are also important for public welfare development remain available.

Several actions can be taken by our customers to support the energy savings campaign, including: [EU7][EU23]

1. Installing an electrical power supply that is in accordance with actual needs.
2. Choosing energy saving household appliances.
3. Ensuring everyone in the household/business/industry becomes accustomed to saving energy by only using electrical equipment as needed.
4. Taking turns in using electrical appliances.
5. Reducing the use of lights during the daytime and using sunlight in rooms.
6. Replacing incandescent bulbs with energy efficient light bulbs that are brighter and last longer.

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY

[G4-PR5]

In order to get feedback from customers about the quality of services so we can prepare future service improvement programs, we carry out periodic customer satisfaction surveys. The surveys are conducted by involving PLN customers from the business, industrial, household, social and government segments, including postpaid and prepaid customers.

The purpose of these customer satisfaction surveys is:

1. Understanding the level of customer service from the perspective of the customer,

2. Memberikan penilaian terhadap kemampuan unit operasional dalam memelihara kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan,
3. Menjadi masukan bagi perusahaan dalam melakukan perbaikan layanan.

Survei yang dilakukan mencakup pelanggan listrik yang dilayani oleh: 5 PLN Distribusi dan 16 PLN Wilayah, dan dikelompokkan atas 7 produk pelayanan, yaitu:

1. Mutu Listrik
2. Lama Pemadaman
3. Tagihan Biaya Listrik
4. Respon Pengaduan
5. Layanan Lain
6. Layanan PB/PD/PS
7. Layanan Prabayar

Kegiatan survei kepuasan pelanggan terakhir dilakukan pada bulan Desember 2015 dan hasilnya diperoleh di akhir bulan Januari 2016. Hasil survei dikelompokkan kedalam dua bagian besar yakni mendapatkan nilai Indeks Kepuasan pelanggan (IKP) dan Indeks Ketidak Puasan (Iktp).

Untuk Indeks Kepuasan pelanggan (IKP), patokan yang digunakan adalah:

1. Nilai $65,00 < \text{IKP} < 80,00$ adalah wilayah yang perlu menjadi prioritas bagi PLN untuk memperbaiki kinerja pelayanan di wilayah yang masuk ke kategori kisaran nilai IKP tersebut.
2. Nilai $80,00 < \text{IKP} < 88,11$ adalah wilayah yang perlu diperbaiki kinerja pelayanannya.

Untuk pengukuran IKP, hasil survei kepuasan pelanggan pada PLN Distribusi/ Wilayah 2015 secara nasional dikategorikan “puas”, dengan Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) rata-rata sebesar 88,11%.

Berdasarkan hasil tersebut, dari 21 unit PLN Distribusi/ Wilayah se-Indonesia yang disurvei, terdapat 5 unit Distribusi/ Wilayah yang memiliki IKP “diatas” nasional, yakni: Wilayah Kalselteng sebesar 88,32%; Dist. Bali sebesar 91,98%; Dist. Jawa Tengah 92,78%; Dist. Jawa Barat sebesar 95,58%; dan PLN Batam sebesar 89,82%. 5 unit distribusi mendapatkan Nilai $65,00 < \text{IKP} < 80,00$ dan masuk prioritas untuk diperbaiki kualitas layanannya, 14 unit lainnya mendapatkan Nilai $80,00 < \text{IKP} < 88,11$ yakni wilayah yang perlu diperbaiki kinerja pelayanannya.

Sedangkan nilai Indeks Ketidakpuasan Pelanggan (IKtp) secara nasional adalah sebesar 1,46%.

Hasil Survei Kepuasan dan Ketidakpuasan Pelanggan pada PT PLN (Persero) 2015 yang meliputi PLN Wilayah/Distribusi

2. Assessing the ability of operational units to maintain the level of service quality provided to customers,
3. Providing input for the company in its efforts to improve service.

The survey covers PLN customers served by: 5 PLN Distributions and 16 PLN Regions, and is grouped in 7 product services, namely:

1. Electricity Service
2. Length of Blackouts
3. Electricity Billing Costs
4. Complaint Response
5. Other Services
6. New connections, additional power and temporary connection services
7. Postpaid Services

The most recent customer satisfaction survey took place in December 2015 and the results were published at the end of January 2016. The survey results were grouped into two main parts, namely the Customer Satisfaction Index (IKP) and Customer Dissatisfaction Index (Iktp).

The benchmarks used for the Customer Satisfaction Index were:

- $65.00 < \text{IKP} < 80.00$ are prioritized by PLN for service improvement in areas that have scores falling in this range.
- $80.00 < \text{IKP} < 88.11$ are areas that require service improvement.

Measurement of the Customer Satisfaction Index for customers in PLN Distributions / Regions in 2015 resulted in a national category of “satisfied”, with an average Customer Satisfaction Index of 88.11%.

Based on this result, of the 21 PLN Distributions/Regions across Indonesia that were surveyed, 5 had a result “above” national achievement, namely: South and Central Kalimantan at 88.32%; Bali Distribution at 91.98%; Central Java Distribution at 92.78%; West Java Distribution at 95.58%; and PLN Batam at 89.82%. Five Distribution units attained scores of $65.00 < \text{IKP} < 80.00$ and have since been prioritized for quality service improvement, 14 other units attained scores of $80.00 < \text{IKP} < 88.11$ thus are areas that require service performance improvements.

Meanwhile, the national Customer Dissatisfaction Index (IKtp) was 1.46%.

The Customer Satisfaction and Dissatisfaction Survey for PT PLN (Persero) in 2015 included PLN Regions / Distributions

dan Anak Perusahaan, secara Nasional dikategorikan puas karena memiliki Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) rerata diatas sebesar 88.11% serta dengan Indeks Ketidakpuasan Pelanggan (IKtP) sebesar 1,46%.

Kategori pelanggan yang memiliki nilai IKP di bawah IKP nasional, yaitu Pelanggan Bisnis dengan IKP sebesar 85.32% dan Pelanggan Pemerintah dengan IKP sebesar 87.20%.

Berdasarkan nilai IKP nasional, terdapat beberapa region dan Anak Perusahaan yang memiliki IKP di bawah nilai IKP Nasional. Prioritas perbaikan mutu pelayanan PLN region kepada pelanggan adalah PLN Tarakan (IKP 73.91%), Maluku & Maluku Utara dan Papua (IKP 80.78%), Sulawesi dan Nusa Tenggara (IKP 82.56%), Kalimantan (IKP 84.83%), Jawa Bagian Barat (IKP 85.20%), dan Sumatera (IKP 85.20%).

Aspek yang menjadi prioritas peningkatan mutu pelayanan PLN untuk meningkatkan kepuasan pelanggan berdasarkan hasil analisis Diagonal Split adalah: aspek mutu listrik dan respon pengaduan. Atribut layanan pada aspek mutu listrik yang menjadi prioritas perbaikan adalah: listrik tidak sering padam dan cukup cepat menyala kembali setelah padam. Atribut layanan pada aspek respon pengaduan yang menjadi prioritas perbaikan adalah: petugas lapangan cepat mendatangi pelanggan dan petugas lapangan cepat menyelesaikan gangguan.

Hasil survei juga menunjukkan pelanggan yang berada di PLN Tarakan memiliki keterikatan yang sangat rendah terhadap PT PLN, sehingga diperlukan perbaikan mutu layanan dan event-event yang dapat membangun hubungan positif antara pelanggan dengan PLN Tarakan.

Faktor mutu listrik adalah faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan pascabayar dan pelanggan daya besar, sedangkan faktor mutu listrik dan transparansi biaya adalah faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan prabayar.

Rekomendasi

Dari hasil survei tersebut, beberapa rekomendasi yang diberikan untuk ditindak lanjuti adalah:

1. PLN perlu meningkatkan ketersediaan pasokan listrik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan pada aspek mutu listrik.
2. Sosialisasi terkait perhitungan biaya PB/PD/PS dan biaya listrik isi ulang perlu menjadi agenda penting PLN untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan khususnya pelanggan prabayar.

and Subsidiaries, nationally categorized as satisfied due to a Customer Satisfaction Index (IKP) average above 88.11% and the Customer Dissatisfaction Index (IKtP) of 1.46%.

Customer categories with scores below the national IKP were Business Customers with a score of 85.32% and Government Customers with a score of 87.20%.

Based on the national IKP value, there were several regions and subsidiaries that scored below the National level. Regions that have been prioritized for service quality improvement are PLN Tarakan (IKP 73.91%), Maluku and North Maluku and Papua (IKP 80.78%), Sulawesi and Nusa Tenggara (IKP 82.56%), Kalimantan (IKP 84.83%), Western Java (IKP 85.20%) and Sumatra (IKP 85.20%).

Aspects that are prioritized by PLN for service quality improvement to enhance customer satisfaction based on the Diagonal Split analysis are: power quality and complaint response. The service attribute for power quality improvement prioritization is: there are few electricity blackouts and they last for a short time. The service attribute for complaint response improvement prioritization is: field officers quickly attend to customers and quickly resolve the disturbance.

The survey results also show that PLN Tarakan customers have a very low involvement with PT PLN, thus improvements are necessary to improve the quality of services and events to build a positive relationship between customers and PLN Tarakan.

The quality of electrical power is the factor that significantly affects the satisfaction of postpaid customers and large power customers, whereas the quality of electrical power and cost transparency are factors that significantly affect prepaid customer satisfaction.

Recommendations

Based on the results of this survey, several recommendations have been made that require follow up:

1. PLN needs to improve the availability of electrical power to improve customer satisfaction with regard to electricity quality.
2. Disseminating information related to the cost of new connections/additional power/temporary connections and the cost of electricity credit for prepaid customers need to be important agenda items for PLN to improve customer satisfaction and trust, especially that of postpaid customers.

3. PLN perlu melakukan evaluasi internal terhadap kinerja saluran keluhan pelanggan "PLN 123" maupun petugas lapangan dalam menanggapi lapor gangguan maupun pelayanan PB/PD/PS
4. PLN perlu melakukan kajian atau evaluasi terhadap sistem prabayar untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan produk serta solusi untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan terhadap sistem prabayar.
5. Untuk pengukuran indeks kepuasan pelanggan selanjutnya, perlu memasukkan variabel tarif listrik sebagai salah satu atribut mutu pengukuran.
6. PLN perlu meningkatkan ketersediaan pasokan listrik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan mutu listrik.
7. PLN perlu meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah remote.

Selain itu, PLN juga perlu meningkatkan kinerja aspek kemudahan informasi layanan relatif lebih mudah dilakukan dengan mengintensifkan kontak pelanggan melalui berbagai channel / touch point (contact center, front liner, social media, traditional media dll) dalam rangka meningkatkan customer engagement.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK KEBERLANJUTAN LISTRIK INDONESIA

Kami tetap memberi perhatian terhadap pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi ketenagalistrikan yang dilakukan oleh unit-unit internal. Kami meningkatkan intensitas Penelitian dan Pengembangan dengan mengembangkan struktur organisasi Penelitian dan Pengembangan ke dalam empat bidang utama sesuai Keputusan Direksi PLN No. 070.K/DIR/2013 Tentang Organisasi PT PLN (Persero) Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan (*Research Institute*), yaitu:

1. Bidang Penelitian Sistem Pembangkitan dan Energi Primer
2. Bidang Penelitian Sistem Transmisi dan Distribusi
3. Bidang Pengembangan Manajemen Pengetahuan dan Standardisasi
4. Bidang Keuangan, SDM dan Administrasi

Hal tersebut dilaksanakan sebagai salah satu jalan untuk mencapai target *operation excellent* perusahaan sekaligus agar PLN mampu memberikan nilai tambah dan manfaat terbaik dari setiap investasi yang dilakukan.

3. PLN needs to conduct internal assessment on the performance of its customer complaint channel "PLN 123" and its personnel in the field with regard to handling customer complaints and servicing requests for new connections / additional power / temporary connections
4. PLN needs to study or assess the prepaid system to identify the advantages and weaknesses of the product and identify solutions for increased customer comfort and satisfaction with the prepaid system.
5. To measure the customer satisfaction index in future, one of the quality measurement attributes should be variable electricity tariffs.
6. PLN needs to improve electricity supply to improve customer satisfaction with electricity quality.
7. PLN needs to improve the electrification ratio in remote areas.

In addition, PLN also needs to improve its performance with regard to ease of access to information making it relatively easier to intensify customer contact through various channels / touch points (contact center, front liners, social media, traditional media, etc.) to improve customer engagement.

RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR SUSTAINABLE ELECTRICITY IN INDONESIA

We continue to pay attention to conducting research and development into electrical power technology, which is conducted by internal units. We have even increased the intensity of our Research and Development by developing a Research and Development organization structure with four main fields based on PLN Board of Directors' Decree Num. 070.K/DIR/2013 on PT PLN (Persero) Electricity Research and Development Organization (Research Institute), namely:

1. Generation Systems and Primary Energy Research
2. Transmission and Distribution System Research
3. Knowledge Management Development and Standardization
4. Finance, HR and Administration

This is being implemented as a way to achieve targeted operational excellence, while at the same PLN can provide added value and make best use of any investments made.

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW - for Sustainable Development

Pada tahun 2015, terdapat 15 topik penelitian di bidang transmisi dan distribusi, 11 topik penelitian di bidang pembangkitan dan energi primer dan 18 topik penelitian di bidang Manajemen Pengetahuan dan Standardisasi yang diselesaikan. Berikut adalah daftar topik penelitian dan pengembangan serta standardisasi yang berhasil dirampungkan sampai dengan akhir tahun 2015. [EU8]

In 2015, there were 15 research topics in the field of transmission and distribution, 11 research topics in the field of generation and primary energy and 18 research topics in the field of Knowledge Management and Standardization completed. Following is a list of research and development and standardization topics completed by the end of 2015. [EU8]

No	Judul Penelitian Research Title
Bidang Transmisi dan Distribusi Transmission and Distribution	
1	Studi Analisis pengaruh media komunikasi serat optik terhadap Kinerja Relai line Current Differential pada pengujian dinamik RTDS Analysis study of the influence of fiber optic communication media on the Relay Performance of Current Differential lines in a study of RTDS dynamics.
2	Kajian putusnya ground wire pada SUTT unggaran -Bawean Study on the fragility of ground wire in SUTT Unggaran - Bawean
3	Studi Master Plan Pengembangan sistem transmisi Sulawesi dengan mempertimbangkan Project 35.000 MW Master Plan Study for the Development of the Sulawesi Transmission System with reference to the 35,000 MW Project
4	Kajian Penggunaan berbagai tipe klem Peralatan Gardu Induk Study of the Various Types of Clamps Used in Substation Equipment
5	Studi analisis sistem microgrid dengan masuknya pembangkit non diesel Analysis Study of the microgrid system with the input of non-diesel plants
6	Kajian Desain kWh Meter Prabayar Design study of Prepaid kWh Meters
7	Kajian Kerusakan Trafo Distribusi di PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Study of Transformer Damage in PLN Jakarta Raya and Tangerang Distribution
8	Kajian kondisi sistem pembumian IBT 500 Kv di GITET dan GISTET PLN P3B Jawa Bali Study on Earthing Conditions for IBT 500 Kv in GITET and GISTET in PLN P3B Java Bali
9	Studi pengaruh gangguan reaktor terhadap peralatan sistem Tenaga listrik 500 KV Study of the influence of reactor disturbances to system equipment for 500 KV electrical power
10	Kajian Karakteristik LED sebagai sebagai Lampu PJU Study of LED characteristics for Street Lighting
11	Kajian Pengaruh Lampu LED terhadap Pengukuran Meter Elektronik Study of the Influence of LED lighting on Electronic Meter Measurements
11	Kajian Gangguan Meluas akibat Osilasi di sub sistem P3B jawa bali Study of Expanding Disturbances resulting from Oscillations in the P3B Java Bali sub system
12	Kajian Pengaruh Induksi terhadap pengukuran akurasi CT 500 KV Study of Induction Influence on measuring the accuracy of CT 500 KV
13	Kajian Penggunaan Trafo Daya 150/20 kv 100 MVA di Sistem Ketenagalistrikan Study on the use of 150/20 kv 100 MVA transformers in the Electrical Power System
14	Kajian kerusakan material on line tap changer (OLTC) Trafo tenaga Study of material damage to on line tap changer (OLTC) power transformers
15	Implementasi Tuning PSS di pembangkit Sistem Jawa bali PSS Tuning Implementation in the Java Bali Generation System

No	Judul Penelitian Research Title
Bidang Pembangkitan Dan Energi Primer Generation and Primary Energy	
1	Kajian Optimasi Supply Chain Batubara PLTU (Perminataan DIVBAT) Study on the Optimization of the Coal Supply Chain for coal-fired power plants (requested by DIVBAT)
2	Kajian Pemetaan Geologi dan Kerentanan Tanah Sebagai Dasar Informasi / Perencanaan Pondasi Tower Transmisi (SUTET 500kV) Jalur Ungaran - Mandirancan II Geological Mapping and Land Vulnerability Study for Basic Information / Foundation Planning for Tower Transmissions (SUTET 500kV) Ungaran - Mandirancan II
3	Optimasi Operasi Pembangkit Bahan Bakar Cair/Slurry Optimizing Operations of Power Plants fueled by Slurry
4	Kajian Potensi Energi Angin di Sumba Timur Tahap 3 Study of Wind Energy Potential in East Sumba Stage 3
5	Kajian Teknologi dan financial penerapan Carbon Capture & Storage Pada Pembangkit Technology and Financial Study for the application of Carbon Capture & Storage for Power Plants
6	Analisa kegagalan dan kajian perkiraan sisa umur tube superheater PLTU Tanjung Awar Awar unit 2 Analysis of the failure and study of estimated age of superheater tubes for PLTU Tanjung Awar Awar unit 2
7	Pengembangan Teknologi PLTB Skala Kecil dari 500 Wp ke 2kWp di Ciheras Small-scale wind-driven power plant technology development from 500 Wp to 2kWp in Ciheras
8	Kajian Coal Balancing Untuk Pengoptimalan Sistem Pembakaran Pembangkit Berbahan Bakar Batubara Study of Coal Balancing to Optimize the Combustion System of Coal-fired Power Plants
9	Modeling Heat Balance PLTU Labuan dan PLTU Rembang (Perminataan DIVKIT Jawa Bali) Modeling Heat Balance PLTU Labuan and PLTU Rembang (Requested by DIVKIT Java Bali)
10	Asesmen Sistem Kontrol PLTU Asam-asam Unit 1 dan 2 Assessment of PLTU Asam-Asam Unit 1 and 2 Control System
11	Kajian Pemanfaatan Cangkang Sawit (Palm Kernel Shell) Sebagai Sumber Bahan Baku Alternatif PLTU Tanjung Balai Karimun Study on the Use of Palm Kernel Shells as an alternative fuel for PLTU Tanjung Balai Karimun
Bidang Manajemen Pengetahuan dan Standardisasi Knowledge Management and Standardization	
1	Meter Prabayar Two Way- NFC Two Way- NFC Prepaid Meters
2	Meter Prabayar Two Way- Modem Two Way- Modem Prepaid Meters
3	CSMS Transmission Network Tower Foundation Construction
4	Konstruksi Pondasi Tower Jaringan Transmisi Interoperability Protocol DNP 3.0
5	Interoperability Protokol DNP 3.0 Storage of Compressed Natural Gas
6	Storage Compressed Natural Gas
7	PHBTM
8	Konektor Jenis Pres Berinsulasi Rubber Press Insulated Rubber Connector Types
9	Fire Prevention Transformer Gardu Induk Fire Prevention Transformer for Substations
10	Komisioning PLTP (Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi) Commissioning of Geothermal Power Plant (PLTP)
11	Komisioning PLTD Commissioning of Diesel-fired Power Plants
12	Komisioning PLTG Commissioning of Gas-fired power plants
13	Interkoneksi Instalasi PV PV Installation Interconnection
14	Kabel Tanah 150 Kv 150 Kv land cables
15	Isolator Polimer SUTT & SUTET SUTT (high voltage wire cable) & SUTET (extra high voltage wire cable) Polymer Isolators
16	GIS
17	Revisi SPLN T3.001-1 SPLN T3.001-1 Revisions
18	Revisi SPLN T3.001-4 SPLN T3.001-4 Revisions

TANTANGAN KE DEPAN

Perubahan respon pelanggan terhadap kualitas layanan mengiringi naiknya kemampuan ekonomi masyarakat merupakan tantangan utama yang akan dihadapi oleh PLN dalam meningkatkan kualitas layanannya. Seiring dengan naiknya kebutuhan tenaga listrik yang belum dapat diimbangi dengan kemampuan penyediaan tenaga listrik di beberapa daerah tertentu di Indonesia, maka pemandaman bergilir masih menjadi permasalahan utama bagi pencapaian kualitas layanan PLN yang lebih tinggi. Hal tersebut sejalan dengan hasil survei yang menunjukkan tingginya prevalensi pelanggan terhadap kriteria kualitas layanan utama, antara lain:

1. Masih terjadinya pemandaman bergilir.
2. Pemandaman yang tidak dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu.
3. Masih banyak terjadinya kekeliruan pencatatan baca meter.
4. Petugas yang belum profesional

Untuk mengatasi tingginya keluhan pelanggan tersebut, Kami terus berupaya untuk melakukan perbaikan, antara lain melalui:

1. Percepatan penyelesaian pembangunan pembangkit dan jaringan tenaga listrik untuk menanggulangi kekurangan pasokan yang berdampak pada pemandaman bergilir.
2. Pelaksanaan perbaikan manajemen baca meter serta mendorong penggunaan listrik prabayar.
3. Penggunaan fasilitas contact centre 123 sebagai pintu masuk utama pelayanan pelanggan.
4. Peningkatan profesionalitas petugas lapangan PLN dengan sertifikasi keahlian.

Selain mengenai kualitas layanan, tantangan yang dihadapi PLN saat ini adalah menjaga kecukupan pasokan listrik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan angka rasio elektrifikasi yang hingga akhir tahun 2015 adalah sebesar 88,3%. Untuk pencapaian tersebut dalam beberapa tahun mendatang, Kami harus mendapatkan tambahan pelanggan minimal 3 juta pelanggan/tahun. Hal ini berarti PLN harus merealisasikan penyediaan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan konsumsi listrik sebesar 8% - 10% per tahun atau setara dengan penambahan daya listrik sebesar 7.000 MW per tahun.

LOOKING AHEAD

Changes in customer response to the quality of service accompanied by rising economic ability is a major challenge to be faced by PLN in improving the quality of its services. Along with increasing demand for electricity that cannot be offset by electricity supply capacity in certain areas in Indonesia, rolling blackouts are still a major concern in the company's attempts to achieve a higher quality of service. This is consistent with survey results that indicate a high prevalence of subscribers with main service quality criteria that include, among others:

1. Experiencing rolling blackouts.
2. Blackouts take place without prior notice.
3. Excessive meter reading errors.
4. Unprofessional personnel.

To resolve this high level of customer complaints, we continually strive to make improvements, including by:

1. Accelerating construction completion of power plants and the electricity network to overcome shortages that result in rolling blackouts.
2. Implementing improvements to meter reading management and encouraging the use of prepaid electricity.
3. Using Contact Center 123 facilities as the main gateway for customer service.
4. Increasing the professionalism of field personnel with skills certification.

In addition to the quality of service, the challenge now faced by PLN is maintaining electricity supply sufficiency to stimulate economic growth and to improve the electrification ratio, which by the end of 2015 had reached 88.3%. To achieve these targets in the coming years, we must gain at least 3 million additional customers per year. This means that PLN should realize infrastructure provision to support annual growth in electricity consumption of 8%-10% per year, equivalent to an additional 7,000 MW of electrical power per year.



Pembangunan infrastruktur kelistrikan juga harus ditopang dengan pengembangan industri dalam negeri yang mampu menunjang pertumbuhan sektor ketenagalistrikan. Untuk itu Kami mendorong dan mengajak stakeholder yang bergerak di bidang industri kelistrikan untuk terlibat dan berperan serta secara aktif dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Kami juga mengajak lembaga pembiayaan, termasuk perbankan untuk mendukung pendanaan pembangunan sektor ketenagalistrikan. Sinergitas antara seluruh pelaku industri dengan lembaga pembiayaan/perbankan ini, diyakini akan memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. [EU8][EU23]

The electricity infrastructure development must also be supported by domestic industry development capable of supporting the growth of the electricity sector. For this purpose, we encourage and invite stakeholders engaged in the electricity industry to become involved and participate actively in supporting electricity infrastructure development. We also invite financial institutions, including banks, to fund the electricity development sector. We believe that synergy between all the players in the industry and financial institutions / banks will spur increased economic growth in the country. [EU8][EU23]

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW – for Sustainable Development



MENDUKUNG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MASYARAKAT

SUPPORTING COMPETENCY DEVELOPMENT IN LOCAL COMMUNITIES

halaman page **122 - 133**



Keberlanjutan dari sisi sosial berarti berarti tumbuh dan berkembangnya kesejahteraan masyarakat sekitar, baik dalam bidang kehidupan sosial maupun dalam bidang kemampuan ekonomi seiring dengan meningkatnya skala usaha Perusahaan. Oleh karenanya Kami merancang dan merealisasikan berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan dengan menitikberatkan pada berkembangnya taraf kehidupan dan kemandirian ekonomi masyarakat sekitar, sesuai dengan rencana pengembangan usaha kami di seluruh wilayah Nusantara.

Sustainability from the social side means welfare growth and development for the surrounding communities, both in terms of social life as well as economic capacity, in line with the increasing scale of the Company's operations. Therefore, We have designed and realized various corporate social responsibility programs that focus on developing the living standards and economic independence of local communities, in accordance with our planned business expansion across the archipelago.

Misi perusahaan Kami menegaskan bahwa "PLN berkomitmen menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan". Oleh karenanya Kami bertekad menerapkan falsafah *triple bottom lines*, menyelaraskan pengembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan serta menetapkan keberhasilan penerapan ketiga aspek tersebut sebagai salah satu ukuran keberhasilan operasional perusahaan dalam penilaian *key performance indicators*.

Kami berupaya menyeimbangkan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial tersebut yang dilakukan dengan melibatkan *stakeholders*, melaksanakan investasi sosial melalui pendalaman hubungan timbal balik dengan masyarakat sekitar, serta bekerja sama dengan berbagai pihak yaitu Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa dan lain-lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perusahaan menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility - CSR*), yang bertujuan :

1. Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat.
2. Membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan koperasi yang mandiri, tangguh dan berdaya saing dengan pengelolaan yang profesional.
3. Mengembangkan pola pembinaan usaha kecil dan koperasi, dengan mengedepankan aspek pemerataan, kemandirian, profesional, dan etika.
4. Memelihara kelestarian lingkungan hidup, serta membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan di bidang ekonomi.

Kami menyelenggarakan 2 (dua) kegiatan utama sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*), yakni:

1. *CSR* dalam bentuk kegiatan dengan penerima manfaat para pemangku kepentingan sebagai bentuk amanat dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 74, dan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
2. *CSR* dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Pada tahun 2015, kegiatan *CSR* dipusatkan pada pelaksanaan Program PKBL, dengan tujuan: (i) membantu pengembangan kemampuan masyarakat, (ii) meningkatkan pemberdayaan masyarakat, (iii) mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan, (iv) mendorong tersedianya tenaga

Our company's mission states that "PLN is committed to making electricity a medium to improve the quality of people's lives, to work to make electrical power the driver of economic activity and to implement environmentally sound business activities". Therefore, we are determined to apply the triple bottom line philosophy, aligning the development of economic, social and environmental aspects, as well as establishing the successful implementation of these three aspects as a measure of the company's operational success in key performance indicators assessment.

We strive to balance economic, environmental and social performance involving stakeholders to implement social investment through the deepening of mutual relations with the surrounding communities, as well as collaborating with various parties, namely the Government, non-governmental organizations, mass organizations and others.

In connection with this, the company implements its *CSR* (*Corporate Social Responsibility*) program, which aims to:

1. Create a harmonious relationship between the company and the community.
2. Assist with the growth and development of small businesses and cooperatives that are independent, resilient and competitive and have professional management.
3. Develop development patterns for small businesses and cooperatives, prioritizing aspects of equality, independence, professionalism and ethics.
4. Maintain environmental sustainability, as well as help improve the quality of community life, encompassing education, health and economic welfare.

We hold two (2) main activities for the implementation of corporate social responsibility (*CSR*), namely:

1. *CSR* in the form of activities with beneficiary stakeholders as mandated in Law Num. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, article 74, and Government Regulation Num. 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibility for Limited Liability Companies.
2. *CSR* in the form of the Partnership and Community Stewardship Program (PKBL).

In 2015, *CSR* activities were focused on implementation of the PKBL Program, with the aim of: (i) assisting in competency development within local communities, (ii) empowering communities, (iii) improving the intelligence of the community through education, (iv) encouraging

listrik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (v) pengembangan desa mandiri energi, serta (vi) menjaga kesinambungan lingkungan melalui pelestarian alam.

DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM CSR - PKBL

Dalam pelaksanaannya, kegiatan CSR PKBL mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Ketentuan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir dilakukan pada bulan Mei dan Juli tahun 2015, sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/05/2015, tanggal 22 Mei 2015, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dimana Permen ini langsung diimplementasikan menggantikan Permen BUMN sebelumnya perihal yang sama.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, tanggal 03 Juli 2015, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dimana Permen ini langsung diimplementasikan menggantikan Permen BUMN sebelumnya perihal yang sama.

ALOKASI ANGGARAN

Sesuai ketentuan Program Kemitraan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, tanggal 03 Juli 2015 dan sesuai dengan surat Kementerian BUMN No. S-23/D2.MBU/08/2015, tanggal 09 Juli 2015, perihal Perubahan Keputusan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2014, maka pada tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp234,53 miliar untuk program CSR-PKBL. Sementara untuk melaksanakan Program CSR sebagaimana dimaksud oleh pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 yang sumber pembiayaannya berasal dari anggaran Perseroan, maka untuk kegiatan dimaksud tidak dialokasikan anggaran.

Adapun total anggaran CSR-PKBL diperuntukkan mendanai beragam kegiatan tanggung jawab perusahaan dalam bidang : bantuan bencana alam, bantuan pendidikan, kesehatan, sarana fasilitas umum, tempat ibadah, pelestarian alam, pengentasan kemiskinan.

the availability of electricity to improve the quality of life, (v) developing energy independent villages, and (vi) maintaining environmental sustainability through the conservation of nature.

BASIC LAW AND POLICY IMPLEMENTATION FOR CSR - PKBL

In practice, CSR and PKBL activities refer to the SOE Ministerial Decree PER-05/MBU/2007, dated 27 April 2007 regarding the SOE Partnership Program With Small Business and the Community Stewardship Program. Such provisions have been amended several times, with the latest changes made in May and July 2015, as follows:

1. SOE Ministerial Decree PER-07/MBU/05/2015, dated 22 May 2015, regarding the Partnership Program for State Owned Enterprises with Small Business and the Community Stewardship Program, in which this decree comes into immediate effect to replace the previous SOE decree regarding the same matter.
2. SOE Ministerial Decree PER-09/MBU/07/2015, dated 3 July 2015, regarding the Partnership Program for State Owned Enterprises with Small Business and the Community Stewardship Program, in which this decree comes into immediate effect to replace the previous SOE decree regarding the same matter.

BUDGET ALLOCATION

Pursuant to the provisions for the Partnership Program in SOE Ministerial Decree PER-09/MBU/07/2015 dated 3 July 2015 and in accordance with letter of the SOE Minister Num. S23/D2.MBU/08/2015 dated 9 July 2015, concerning the Amendment to the GMS Decision on the Annual Report for Fiscal Year 2014, in 2015, funds were allocated amounting to Rp234.53 billion for CSR-PKBL program. Meanwhile, to carry out the CSR programs as intended by Article 74 of Law Num. 40 of 2007, the funding for which is derived from the Company's budget, no budget was allocated for such activities.

The total budget earmarked for CSR-PKBL was directed to various corporate responsibility activities in the fields of disaster relief, education aid, health, public facilities, places of worship, nature conservation and poverty alleviation.

PROGRAM DAN PELAKSANAAN PROGRAM

Berdasarkan tujuan, visi dan misi perusahaan di bidang CSR serta landasan perundungan dan Peraturan Pemerintah, maka disusun dan dilaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan dan memberikan nilai tambah bagi konsumen, karyawan, mitra bisnis, pemegang saham, komunitas sekitar, bagi bangsa dan lingkungan hidup.

Bagi PLN, pelaksanaan kegiatan CSR tidak hanya berupa kegiatan donasi (*charity*), tetapi mencakup kepedulian berkelanjutan terhadap upaya perbaikan lingkungan hidup, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kewajiban untuk menyediakan tempat yang nyaman dan hubungan kerja yang baik dengan karyawan, mengutamakan terjaganya kesehatan dan keselamatan kerja, dan ikut serta mengembangkan ekonomi dan komunitas lokal. Keyakinan tersebut juga dilandasi kenyataan bahwa, PLN saat ini tengah merealisasikan pembangunan proyek pembangkit, sistem transmisi dan distribusi yang langsung bersinggungan dengan kepentingan masyarakat, dan oleh karenanya Kami mengupayakan agar memberi dampak positif optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku, maka selama tahun 2015 Perusahaan telah merealisasikan 2 (dua) jenis program utama dalam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, yakni Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

PROGRAM KEMITRAAN [G4-EC7] [G4-EC8] [G4-SO1]

Kami menunjukkan empati kepada kesejahteraan masyarakat sekitar dengan berencana merealisasikan beragam program pengembangan kompetensi di bidang usaha ekonomi mikro agar usaha skala kecil masyarakat terus berkembang semakin tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana yang berasal dari bagian laba BUMN dalam skema Program Kemitraan. Sesuai dengan aturan dari Kementerian BUMN, penyaluran dana dilakukan dalam bentuk :

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan
- b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan

Dalam rangka memastikan keberhasilan pengembangan usaha, Kami juga merencanakan penyelenggaraan kegiatan pembinaan langsung maupun tidak langsung kepada para mitra binaan penerima penyaluran dana Program Kemitraan. Anggaran untuk program pembinaan tersebut merupakan

PROGRAMS AND PROGRAM IMPLEMENTATION

Based on the company's purpose, vision and mission in the field of CSR, as well as the legislative and government regulation foundation, the company developed and implemented a corporate social responsibility program that involves and provides added value for customers, employees, business partners, shareholders, surrounding communities, the nation and the environment.

For PLN, CSR implementation not only takes the form of donations (*charity*), but encompasses concern for ongoing sustainability efforts to improve the environment, respect for human rights, the obligation to provide a comfortable place of work and a good working relationship with employees, prioritizing the preservation of health and safety at work, and participating in developing the economy and local communities. This belief is also based on the fact that PLN is currently realizing projects involving the construction of power plants, transmission and distribution systems that are directly connected to public interests, and hence strives to provide optimal positive impact to improving people's welfare. According to applicable conditions and regulations, during 2015 the Company realized two (2) main types of programs to conduct corporate social responsibility, namely the Partnership Program and Community Stewardship.

PARTNERSHIP PROGRAM [G4-EC7] [G4-EC8] [G4-SO1]

We demonstrate our empathy for the welfare of the surrounding communities with plans to realize a variety of competency development program in micro-economic business so that the small-scale community businesses continue to grow more resilient and self-reliant through the use of funds derived from the profits of SOEs through the Partnership Program scheme. In accordance with the rules of the SOE Ministry, funds are disbursed in the form of:

- a. Loans to finance working capital and/or the purchase of fixed assets in order to increase production and sales
- b. Special loans to finance funding requirements for the business activities of fostered business partners in the form of additional short-term loans and to fulfill orders from other fostered business partners

To ensure the success of business development, we have also planned the implementation of direct and indirect development activities to recipient foster partners in the Partnership Program. The budget for the foster program

bagian dari realisasi penyaluran dana yang dicatat dalam pelaporan pelaksanaan program sebagai Beban Pembinaan. Adapun peruntukan Beban Pembinaan digunakan untuk:

1. membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktifitas mitra binaan serta untuk pengkajian / penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
2. beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;

Pada periode tahun 2015, belum direalisasikan penyaluran dana baru untuk meningkatkan kemampuan usaha para mitra binaan,namun demikian realisasi penyaluran dana Program Kemitraan sampai dengan akhir tahun 2015 menjadikan jumlah mitra binaan PLN mencapai 43.872 mitra.

Sebagian usaha mikro dari mitra binaan tersebut kini telah berkembang dengan baik dan memberi dampak positif terhadap keluarga maupun lingkungan sekitarnya yaitu meningkatnya kesejahteraan dan standar kehidupan ekonomi.

is part of the fund distribution recorded in the program implementation reporting as Development Expenses. The purpose of the Development Expenses is for:

1. Financing education, training, apprenticeship, marketing, promotion and other matters concerning the improvement of the foster partners' productivity, as well as for studies / research related to the Partnership Program;
2. The foster program take the form of grants and amounts to a maximum of 20% of the Partnership Program funds disbursed in the ongoing year;

In the 2015 period, new fund disbursement was unrealized to improve the efforts of the fostered business partners, however, actual disbursement of Partnership Program funds as of the end of 2015 brought the number of PLN fostered business partners to 43,872 partners.

Most of the micro businesses of the fostered business partners are now developing well and having a positive impact on families and the surrounding environment through increasing economic prosperity and improved living standards.

PROGRAM BINA LINGKUNGAN

[G4-EC7] [G4-EC8]

Jika Program Kemitraan lebih ditujukan pada upaya meningkatkan kompetensi dan kemandirian masyarakat di bidang ekonomi, maka Program Bina Lingkungan lebih mengutamakan pada upaya peningkatan kesejahteraan di bidang sosial dan kemasyarakatan. Ada 7 item kegiatan yang tercakup di dalamnya, yakni : bantuan bencana alam, pendidikan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, pembangunan sarana ibadah, pelestarian alam dan pengentasan kemiskinan.

Sesuai Surat Menteri BUMN No. S-23/D2.MBU/08/2015, tanggal 09 Juli 2015, perihal Perubahan Keputusan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2014, kami mengalokasikan dana kegiatan Bina Lingkungan hingga sebesar Rp117,3 miliar.

COMMUNITY STEWARDSHIP PROGRAM

[G4-EC7] [G4-EC8]

If the Partnership Program is aimed at improving the economic competence and independence of communities, the Community Stewardship Program places more emphasis on improving welfare from the social and community aspects. There are 7 items that this covers, namely: natural disaster relief, education, health improvement, public infrastructure and/or facility development, construction of places of worship, nature conservation and poverty alleviation.

In accordance with SOE Minister Letter Num. S-23/D2.MBU/08/2015 dated 9 July 2015 concerning Amendment to the GMS Decision on the Annual Report for Fiscal Year 2014, we allocated Rp117.3 billion to Community Stewardship activities.

Adapun realisasi pengeluaran Progam Bina Lingkungan tahun 2015 sebagai berikut :

Expenditure for the Community Stewardship Program in 2015 was as follows:

Kegiatan	Nilai Dana (Rp) Value (Rp)	Activity
Bantuan Korban Bencana Alam	341.500.000	Natural Disaster Relief
Bantuan Pendidikan / Pelatihan	15.878.096.071	Education / Training
Bantuan Peningkatan Kesehatan	2.670.494.250	Health Improvement
Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau sarana Umum	5.647.417.408	Development of Public Facilities / Infrastructure
Bantuan Sarana Ibadah	2.620.246.500	Worship Facilities Assistance
Bantuan Pelestarian alam	1.072.139.000	Nature Conservation
Bantuan Pengentasan Kemiskinan	8.620.496.600	Poverty Alleviation
Biaya Operasional	0	Operational Costs
Total	36.850.389.829	Total

Bantuan yang telah diberikan dalam rangka realisasi Program Bina Lingkungan meliputi :

1. Bantuan Bencana alam sebesar Rp341.500.000,- dipergunakan untuk :
 - a. Bantuan Peduli Asap di Palembang, Sumatera Selatan
 - b. Bantuan Peduli Asap untuk air bersih di Kabupaten OKI Sumatera Selatan
 - c. Pemeriksaan balita akibat Asap di Kabupaten OKI Sumatera Selatan
2. Bantuan Pendidikan / Pelatihan sebesar Rp15.878.096.071,- dipergunakan untuk:
 - a. Bantuan Duta Muda Bersinar (DMB) dimana pegawai PLN turut berpartisipasi mengajar, membersihkan sekolah dan berbagi ilmu di 70 sekolah yang tersebar di seluruh propinsi,
 - b. Bantuan pendidikan kepada Yayasan Annur di Aceh
 - c. Bantuan peralatan komputer Yayasan Anak Yatim di Riau
 - d. Peduli Pulau terdepan, sosialisasi mengenal PLN lebih dekat di Kepulauan Riau
 - e. Bantuan pemberdayaan masyarakat melalui program Lampu Kita di Lampung
 - f. Bantuan beasiswa di PLTU Batang, pelatihan hydroponik, Jawa Tengah dan pengelolaan limbah kotoran kuda Yogyakarta
 - g. Wirausaha bersinar yaitu bantuan pelatihan di 6 unit Bank Sampah, Reog Ponorogo, yang dilaksanakan di Jawa Timur
 - h. Bantuan program pelatihan biogas di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan
 - i. Bantuan unit terpencil dalam bentuk perbaikan sarana olahraga untuk pemersatu pemuda pemudi serta bantuan penerangan belajar di Sumba

Assistance provided to realize the Community Stewardship Program included:

1. Natural Disaster Relief totaling Rp341,500,000 used for:
 - a. Smoke Care Assistance in Palembang, South Sumatra
 - b. Smoke Care Assistance for clean water in OKI Regency, South Sumatra
 - c. Smoke inhalation checkups for toddlers in OKI Regency, South Sumatra
2. Education/Training assistance totaling Rp15,878,096,071 used for:
 - a. Shining Young Ambassadors (DMB) Assistance in which PLN employees participate in teaching, school cleaning and share knowledge in 70 schools across all the country's provinces,
 - b. Educational support for Yayasan Annur in Aceh
 - c. Computer equipment for ORphanages in Riau
 - d. Island Care, information dissemination about PLN closer to Riau Islands
 - e. Community empowerment through the Our Light program in Lampung
 - f. Scholarships at Batang Power Plant, hydroponics training in Central Java and horse manure waste management in Yogyakarta
 - g. Shining entrepreneur, namely training at 6 Trash Banks in Reog Ponorogo, East Java
 - h. Biogas training program in Takalar regency, South Sulawesi
 - i. Assistance for remote units to improve sports facilities to unify youngsters and assistance for study lighting in Sumba

3. Bantuan Peningkatan Kesehatan sebesar Rp2.670.494.250,- dipergunakan untuk:
- Bantuan operasi katarak di kota Palembang
 - Penanggulangan gizi buruk dan pencegahan demam berdarah di Jawa Tengah
 - Pengobatan gratis di Bali, PLTU Jeranjang NTB, dan Gorontalo
 - Program pola hidup bersih dan sehat di Kalimantan Barat
 - Bedah Rumah di Kalimantan Selatan
 - Pembangunan Puskesmas di Manggarai Barat, NTB
4. Bantuan Pengembangan Prasarana dan / atau sarana umum, sebesar Rp5.647.417.408,- yang dipergunakan untuk :
- Bantuan lampu limar di Aceh
 - Bantuan siskampling di Riau
 - Bantuan biogas melalui program PLN Membiru di Lampung
 - Bantuan air bersih di Klaten Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kadatua Buton (Bantuan Unit TeRpencil)
 - Bantuan sarana fasilitas peningkatan Bank Sampah di Malang, Surabaya Jawa Timur, Sulawesi Selatan
 - Bedah Rumah pensiunan di Jawa Timur
 - Bantuan pembangunan rumah singgah tenaga kerja di Balai Karangan Kalimantan Barat
 - Bantuan jembatan di Jawa Tengah dan Sulawesi Utara
5. Bantuan Sarana Ibadah, sebesar Rp2.620.246.500,- dipergunakan untuk bantuan tempat ibadah tersebar di Riau, Bangka Barat, Lampung, Bali, Kalimantan Barat, Gowa Sulawesi Selatan, NTT, Papua dan Papua Barat
6. Bantuan Pelestarian Alam sebesar Rp1.072.139.000,- dipergunakan untuk:
- Bantuan pelestarian Penyu di Bali
 - Bantuan bank sampah di Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Jakarta
7. Bantuan Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp8.620.496.600,- dipergunakan untuk:
- Bantuan sembako pada saat Hari Raya besar Agama yang dilaksanakan di seluruh provinsi
 - Bantuan bedah rumah di Jawa Barat
3. Health Improvement Assistance totaling Rp2,670,494,250 used for:
- Cataract operations in Palembang city
 - Eradication of malnutrition and prevention of dengue in Central Java
 - Free medical treatment in Bali, Jeranjang NTB power plant and Gorontalo
 - Clean and healthy lifestyle program in West Kalimantan
 - House Renovation in South Kalimantan
 - Construction of a health center in West Manggarai, NTB
4. Development of public facilities and/or infrastructure totaling Rp5,647,417,408 used for:
- Limar lighting (independent community lights) in Aceh
 - Security assistance in Riau
 - Biogas assistance through the PLN Membiru program in Lampung
 - Assistance for clean water in Klaten, Central Java, North Sulawesi, Gorontalo, South Sulawesi, Southeast Sulawesi, Kadatua Buton (Remote Unit Support)
 - Trash Bank facility and infrastructure improvement in Malang, Surabaya, East Java, South Sulawesi
 - Renovation of Retirees' Homes in East Java
 - Assistance for drop-in shelter construction for workers in Balai Karangan West Kalimantan
 - Assistance for bridge construction in Central Java and North Sulawesi
5. Assistance for Worship Facilities totaling Rp2,620,246,500 used to help places of worship spread across Riau, West Bangka, Lampung, Bali, West Kalimantan, Gowa, South Sulawesi, East Nusa Tenggara, Papua and West Papua
6. Nature Conservation Assistance totaling Rp1,072,139 billion used to:
- Help turtle preservation in Bali
 - Help with trash banks in West Kalimantan, Central Sulawesi, South Sulawesi, Southeast Sulawesi and Jakarta
7. Poverty Alleviation Relief totaling Rp8,620,496,600 used for:
- Food assistance during major religious festivals held in all provinces
 - House renovation in West Java

DUTA MUDA BERSINAR - UPAYA KAMI MENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS GENERASI MUDA

SHINING YOUNG AMBASSADORS - EFFORTS TO SUPPORT IMPROVEMENT OF THE YOUNGER GENERATION.

Meyakini masa depan bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sangat tergantung pada kualitas generasi muda, PLN menggagas program Duta Muda Bersinar, suatu program terpadu yang menyatukan program pembentukan budaya berintegritas di kalangan insan PLN melalui partisipasi sukarela karyawannya dengan kegiatan CSR untuk membantu pembentukan generasi muda masa depan yang semakin berkualitas. Cara yang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan aktif partisipatif di bidang pendidikan, penyuluhan kesehatan dan lingkungan di sekolah-sekolah yang menjadi peserta program dengan persyaratan dan proses tertentu.

Tujuan program Duta Muda Bersinar adalah:

1. Membentuk siswa memiliki pengetahuan tambahan diluar materi rutin kelas.
2. Menyediakan facilities pendukung pendidikan yang lebih memadai.
3. Menumbuhkan kesadaran dan memupuk perilaku siswa untuk hidup sehat dan benar.
4. Meningkatkan empati, loyalitas & kebanggaan pegawai PLN.
5. Meningkatkan citra perusahaan

Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program Duta Muda Bersinar adalah:

Believing that the future of the nation and improvements to public welfare depend greatly on the quality of the younger generation, PLN initiated the Shining Young Ambassadors program, an integrated unifying program that establishes cultural integrity among PLN personnel through the voluntary participation of employees in CSR activities to help establish a better qualified younger generation for the future. This is done through the implementation of participatory activities in the fields of education, health and environmental education in schools participating in the program and has specific requirements and processes.

The Shining Young Ambassador program objectives are:

1. Giving students greater knowledge beyond that of routine class material.
2. Providing more satisfactory supporting facilities for education
3. Instilling awareness and behavior appropriate for a healthy and good life in students
4. Improving empathy, loyalty and pride in PLN employees
5. Improving the company's image

Various activities undertaken in the framework of the implementation of the Shining Young Ambassadors program were:

AKSI PROGRAM DUTA MUDA BERSINAR

Anggaran Maksimal Rp100 juta Bantuan program 95 juta, Biaya operasional 5 juta
SHINING YOUNG AMBASSADORS ACTION PROGRAM

Maximum budget of Rp100 million program support 95 million, operational costs 5 million

Pendidikan Education	Kesehatan Health	Pelestarian Alam Nature Conservation
EDUKASI KELISTRIKAN <ul style="list-style-type: none"> • Bijak/hemat listrik, dll. • Tidak mencuri listrik PERBAIKAN SARANA PENDUKUNG <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan Kursi Rusak • Perbaikan papan tulis • Pengecatan • Pengecekan instalasi listrik dll. PENINGKATAN KUALITAS EKSTRAKURIKULER <ul style="list-style-type: none"> • Seni Lokal: Tari, Reog, dll. ELECTRICAL POWER EDUCATION <ul style="list-style-type: none"> • Saving electricity / wisdom with electricity • Not stealing electricity, etc. IMPROVEMENTS TO SUPPORTING FACILITIES <ul style="list-style-type: none"> • Repairing damaged chairs • Repairing chalkboards • Painting • Checking electrical installations, etc. IMPROVING EXTRACURRICULAR QUALITY <ul style="list-style-type: none"> • Local arts: reog dance, etc. 	SOSIALISASI KESEHATAN <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi menjaga kesehatan • Sosialisasi pola hidup sehat PeMERIKSAAN GIGI GRATIS PEMERIKSAAN MATA AKSI BERSIH TOILET HEALTH INFORMATION DISSEMINATION <ul style="list-style-type: none"> • Information on maintaining health • Information on a healthy lifestyle FREE DENTAL CHECKUPS EYE CHECKUPS CLEAN TOILET ACTION	PENGHIJAUAN TAMAN EDUCES PENGELOLAAN SAMPAH AKSI BERSIH-BERSIH <ul style="list-style-type: none"> • Pemberanah lingkungan sekolah dan bantuan tong sampah. NATURE CONSERVATION PARK REGREENING WASTE MANAGEMENT EDUCATION CLEANUPS <ul style="list-style-type: none"> • Improving the school environment and providing waste baskets



Sebagai bentuk realisasi program tersebut, dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional (HLN), diselenggarakan Duta Muda Bersinar – PLN Peduli 70 Sekolah. Program ini melibatkan sekitar 2.000 pegawai yang menjadi Change Agent PLN Ber-Integritas. Program dimulai sejak minggu pertama Oktober 2015 sampai dengan akhir November 2015, dengan melakukan pembangunan / rehabilitasi fasilitas sekolah, fasilitas sanitasi (toilet bagi siswa & guru) dan program edukasi kelistrikan.

2000 Change Agent merupakan relawan karyawan PLN yang masuk dalam Employee Volunteer Program (EVP). Program direncanakan bersama antara pihak sekolah dengan relawan PLN yang tersebar di seluruh lokasi, yang pelaksanaan dan monitoring program tersebut dilakukan secara bersama oleh kedua belah pihak.

Program Duta Muda Bersinar merupakan salah satu program berkelanjutan yang diinisiasi dan akan terus dikembangkan baik dari segi kualitas dan luasan cakupannya. Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dan peningkatan kualitas SDM di masa depan.

Kepala sekolah salah satu sekolah penerima program, yakni Risna Abbas dari SDN 78 Kota Gorontalo, menyatakan kesan dan pesannya, "Menjadi kehormatan dan kebanggaan bagi kami, para Dewan Guru, Komite Sekolah serta anak didik kami, karena PLN memilih SDN 78 Kota Gorontalo masuk dalam 70 sekolah yang terpilih, besar harapan kami, ke depannya perhatian-perhatian di bidang pendidikan dapat terus dijaga dan ditingkatkan. Sekolah kami telah berbasis internet, sekiranya kami pada kesempatan berikutnya dapat dibantu fasilitas pendukung, entah itu komputer ataupun pendukung lainnya".

As part of the program realization, to commemorate National Electricity Day, the Shining Young Ambassadors - PLN Cares program was held in 70 Schools. This program involves approximately 2,000 employees who act as Agents of Change for PLN Has Integrity. The program began in the first week of October 2015 and ran until the end of November 2015 and saw actions such as the construction / rehabilitation of school facilities, sanitary facilities (toilets for students and teachers) and educational programs on electricity.

2000 Change Agent is a PLN employee volunteer activity included in the Employee Volunteer Program (EVP). The program was planned jointly between the schools and PLN volunteers scattered across various locations, while the implementation and monitoring of the program was conducted jointly by both parties.

The Shining Young Ambassador program is an ongoing program that will continue to be developed in terms of both quality and coverage extent. The program aims to support improvements to the quality of education in Indonesia, and improve the quality of human resources in the future.

The school principal of one of the schools receiving the program, namely Risna Abbas of SDN 78 Gorontalo, gave his impressions and message: "It is an honor and pride for us, the Teachers Council, School Committee and all our students, that PLN chose SDN 78 Gorontalo as one of the 70 schools selected, and it is our great hope that future attention to the field of education can be maintained and improved. Our school is Internet-based and we hope that on the next occasion we will receive support facilities, whether it is computers or other support."

BANK – SAMPAH, SOLUSI LINGKUNGAN YANG JUGA MEMBERI MANFAAT EKONOMI

TRASH BANKS, ENVIRONMENTAL SOLUTIONS THAT ALSO PROVIDE ECONOMIC BENEFIT

Sejak beberapa tahun terakhir PLN telah mempopulerkan Program Bank Sampah, suatu program yang digagas untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab untuk membantu peningkatan kualitas lingkungan, namun sekaligus mampu memberi manfaat secara ekonomi. Program yang mengajak masyarakat agar dapat bersahabat dengan lingkungan ini merupakan percontohan untuk negara ASEAN dan Asia Pasifik. Hingga kini, sudah lebih dari 29.000 nasabah yang tersebar di 500 titik di beberapa provinsi di Indonesia, dengan induk bank sampah terbesar yakni di Malang yang mampu mengumpulkan hingga 4500 kg sampah/hari.

Program Bank Sampah menghadirkan proses pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga perlahan mengubah perilaku masyarakat secara berangsur-angsur untuk mampu mengelola sampah secara bertanggung jawab agar memberi dampak positif terhadap kualitas lingkungan sekitar dan dapat memberi keuntungan secara ekonomis langsung, maupun tidak langsung. Mengingat besarnya manfaat yang dapat dikembangkan, Tim CSR PLN kemudian terus bergerak untuk mendorong berdirinya bank sampah binaan di beberapa lokasi di Indonesia.

Kota Malang menjadi salah satu kota dengan bank sampah yang dapat dijadikan contoh di Indonesia, selain itu ada pula Bank Sampah Gemah Ripah di Yogyakarta dan Bank Sampah Bina Mandiri Surabaya.

Bank Sampah Malang dikembangkan dalam bentuk koperasi kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dan CSR PLN dan didukung oleh Pemerintah Daerah. Melalui Koperasi Bank Sampah Malang, para anggota dapat mengikuti beragam program edukasi pemberdayaan ekonomi berkaitan dengan pemanfaatan sampah, membuka Tabungan Pendidikan, Tabungan Lebaran, Tabungan Sembako dan Tabungan Kepedulian Sosial, bahkan

Over the last few years, PLN has popularized its Trash Bank Program, a program initiated to encourage community participation in responsible waste management to help improve the quality of the environment, while at the same time providing economic benefit. This program, which encourages people to be more environmentally friendly, is a pilot program for ASEAN and Asia-Pacific countries. Up to now, more than 29,000 customers spread across 500 points in several provinces in Indonesia, with the largest trash bank in Malang, are able to collect up to 4,500 kg of trash / day.

The Trash Bank program presents a learning process that is very useful for communities, slowly changing people's behavior so that gradually they are able to manage waste in a responsible manner and have a positive effect on the quality of the surrounding environment, while receiving direct or indirect economic benefit. Given the magnitude of the benefits that can be developed, the PLN CSR team will continue to encourage the establishment of trash banks in several locations in Indonesia.

Malang became one of the cities with a trash bank that can serve as an example in Indonesia, in addition to the Gemah Ripah Trash Bank in Yogyakarta and the Surabaya Independent Trash Bank.

Malang Waste Bank was developed as a cooperative partnership between the Malang Municipal Government and PLN CSR, supported by local governments. Through the Malang Trash Bank Cooperative, members can join a variety of educational programs related to economic empowerment through the use of waste, open accounts for Educational Savings, Lebaran Savings, Staple Goods Savings and Social Care, and it even allows members to

memungkinkan anggotanya untuk dapat membayar listrik dengan sampah. Dari berbagai kegiatan edukasi ekonomi mikro tersebut, sampah-sampah kering, seperti sedotan air mineral, kantong plastik, bungkus shampo, hingga sabun pun dapat disulap menjadi barang-barang yang menarik, seperti tas kecil, dompet, hingga taplak meja.

Sementara Bank Sampah di Surabaya, mencatatkan perkembangan yang tak kalah menarik. Di Surabaya terdapat tiga Bank Sampah Induk yang menaungi 150 titik (klaster) bank sampah. Ketiganya berlokasi di beberapa tempat, antara lain di pinggir laut seperti kawasan mangrove, di kawasan pemakaman, dan ada pula yang di tengah kota. Lokasi di Surabaya sendiri, harga sampah tersebut dipilah menjadi 52 jenis dengan harga yang berbeda, mulai dari Rp3.000 hingga Rp5.000.

Dalam rangka mendukung pengembangan Bank Sampah tersebut, PLN telah membuka layanan baru, yakni pembayaran rekening listrik dengan sampah, melalui Bank Sampah. Dengan layanan ini, jika pembayaran rekening listrik sebelumnya hanya dapat menggunakan uang, kali ini masyarakat bisa memanfaatkan Bank Sampah untuk dapat membayar tagihan listrik.

Caranya adalah masyarakat setempat yang menjadi nasabah di bank sampah binaan PLN, menabung di Bank Sampah menggunakan beragam produk olahan sampah. Dana hasil penjualan produk-produk daur ulang sampah tersebut kemudian akan dicatatkan pada rekening tabungan nasabah di bank sampah yang telah menyediakan loket pembayaran listrik, untuk kemudian di debet setiap saat jatuh waktu pembayaran rekening listrik.

pay for their electricity with trash. From these various micro-economic educational activities, dry garbage, such as mineral water straws, plastic bags, shampoo packages and soap can be transformed into items of interest, such as small bags, wallets and tablecloths.

Meanwhile, Surabaya Trash Bank recorded growth that is no less interesting. In Surabaya, there are three main Waste Banks encompassing 150 waste bank points (clusters). All three are located in several places, among others on the seafront in mangrove areas, by the cemetery while others are in the city center. For the locations in Surabaya itself, the price of waste is broken down into 52 types each with different prices, ranging from Rp3,000 to Rp5,000.

To support Trash Bank development, PLN has opened a new service, namely paying electricity bills with garbage through the Trash Banks. Through this service, while previously electricity bills could only be paid with money, now the public can take advantage of Trash Banks to pay their electricity bill.

This is achieved by the local people becoming customers of the trash banks fostered by PLN, saving money with the Trash Bank through a variety of waste-processed products. The proceeds raised from selling these recycled products is then recorded in the customer's savings account at the trash bank, the balance for which is available at the electricity payment counter and can be debited when electricity bills fall due.

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW – for Sustainable Development



MEMBANGUN DENGAN MELESTARIKAN LINGKUNGAN

BUILDING THROUGH ENVIRONMENTAL
CONSERVATION

halaman page **134 - 155**



Keberlanjutan dalam perspektif lingkungan adalah upaya yang dilakukan oleh setiap warga dunia, termasuk badan usaha, untuk melindungi ekosistem bumi beserta seluruh isinya bagi kehidupan generasi mendatang. Sebagai wujud partisipasi PLN terhadap upaya menjaga kelestarian lingkungan, Kami memastikan pengelolaan seluruh infrastruktur ketenagalistrikan sesuai ketentuan regulasi di bidang lingkungan, menerapkan konsep 3 R dalam pengelolaan limbah dan memastikan kondisi operasional yang aman bagi lingkungan sekitar.

Sustainability from the environmental perspective is the efforts made by every citizen of the world, including enterprises, to protect the earth's ecosystem and all its contents for the lives of future generations. PLN's participation in efforts to preserve the environment ensures that the management of our entire electrical power infrastructure is compliant with environmental regulations, we apply the concept of 3R for waste management and ensure safe operational conditions for the environment.

Kegiatan pembangkitan listrik sebagai pendukung kegiatan ekonomi dan industri saat ini merupakan salah satu kontributor utama bagi terjadinya pemanasan global karena menggunakan bahan bakar fosil, yakni batubara, minyak bumi dan gas, yang menghasilkan emisi CO₂, komponen utama gas rumah kaca (GRK), dengan jumlah yang cukup massive. Akumulasi gas rumah kaca di atmosfer inilah penyebab utama seringnya terjadi kondisi anomali iklim skala global dan ditunjukkan dengan terjadinya cuaca ekstrem di berbagai belahan dunia. PLN yang tengah gencar membangun instalasi pembangkit sangat menyadari dan memahami keprihatinan masyarakat dunia tersebut.

Untuk menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan dalam aspek lingkungan, Kami merealisasikan berbagai program perbaikan pengelolaan seluruh sarana ketenagalistrikan yang semakin ramah lingkungan, yang dicapai melalui pengendalian emisi gas CO₂, pengelolaan limbah dan pemantauan serta penciptaan kondisi lingkungan yang semakin baik sebagaimana ditunjukkan pada uraian berikut.

KOMITMEN TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN

Menyadari besarnya dampak emisi CO₂ dari penggunaan bahan bakar fosil dalam proses pembangkitan energi listrik, Kami berupaya keras menekan dan mengendalikan jumlah emisi komponen utama gas rumah kaca tersebut. Saat ini, PLN memang masih mengandalkan sumber energi tak terbarukan, seperti batubara dan minyak bumi dalam proses pembangkitan energi listrik. Namun demikian, upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan bahan bakar terbarukan seperti panas bumi, matahari dan air terus dilakukan.

Kami berupaya meningkatkan persentase pemanfaatan energi terbarukan dari seluruh pembangkit yang telah ada, baik milik PLN, IPP maupun sewa, dari kisaran sebesar 11% saat ini, menjadi sebesar 15% di tahun 2024 mendatang. Porsi tersebut diproyeksikan akan terus meningkat di masa-masa mendatang, seiring dengan meningkatnya kemampuan masyarakat Indonesia dalam menggunakan listrik dari sumber energi terbarukan yang relatif lebih mahal.

Tekad PLN untuk selalu memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan sejalan dengan visi perusahaan yaitu "Menjalankan Kegiatan Usaha yang Berwawasan Lingkungan". Hal ini juga tercermin dalam perencanaan pembangunan Proyek Pembangkit 35.000 MW yang juga mengakomodasi pembangunan pembangkit dengan menggunakan sumber energi baru dan terbarukan.

Generating electricity to support current economic and industrial activities is one of the major contributors to global warming due to the use of fossil fuels, namely coal, oil and gas, which emit CO₂, the main component of greenhouse gas (GHG), in massive amounts. The accumulation of greenhouse gases in the atmosphere is the main cause of frequent global-scale climatic anomalies and has been determined as the cause of extreme weather in many parts of the world. PLN, which is currently intensively building power plants, is very aware of and understands global concerns.

To show its commitment to sustainability from the environmental aspect, we realize various programs to improve the management of all electrical power facilities to make them more environmentally friendly, which is achieved through the control of CO₂ emissions, waste management and the monitoring and establishment of improved environmental conditions, as shown in the following narration.

COMMITMENT TO ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

Realizing the magnitude of the impact of CO₂ emissions derived from fossil fuel use in the power generation process, we strive to suppress and control the amount of emissions from the main components of greenhouse gas. Currently, PLN is still relying on non-renewable energy sources, such as coal and oil, in the power generation process. However, efforts to maximize the utilization of renewable energy, such as geothermal, solar and water power, continue to be made.

We are working to increase the percentage of renewable energy at all existing plants, whether they are owned by PLN, IPPs or leased, from 11% today to 15% in 2024. This portion is forecast to continue increasing in the coming years, along with the increasing ability of the Indonesian community to use electricity generated from renewable energy sources, which is relatively more expensive.

PLN's determination to always pay attention to and preserve the environment is in line with the company's vision of "Conducting Environmentally Friendly Business Activities". This is also reflected in the development plan for the 35,000 MW Power Plant Development Program, which also accommodates the construction of power plants using new and renewable energy sources.

Bukti dan komitmen PLN terhadap pelestarian lingkungan ditunjukkan oleh ketataan terhadap seluruh peraturan terkait lingkungan, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 sebagai penjabaran undang-undang dimaksud. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 dipandang sebagai pedoman bagi PLN agar dapat menyelesaikan proses perizinan pembangunan setiap proyek atau kegiatan pembangunan ketenagalistrikan yang semakin ramah lingkungan. Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka pembuatan AMDAL proyek ketenagalistrikan dapat berlangsung lebih cepat, mengingat izin lingkungan diintegrasikan ke dalam proses amdal dan UKL-UPL (Upaya Kelola Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan).

Perkembangan terkini menunjukkan proses perijinan ditargetkan dapat berlangsung lebih cepat dengan telah keluarnya Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016 tertanggal 16 Januari 2016 tentang "Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK)" menegaskan dukungan Pemerintah Pusat kepada PLN dalam bentuk: penjaminan, percepatan Perizinan dan Non perizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, penyediaan tanah, dan penyelesaian hambatan dan permasalahan, serta penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi.

Dengan perkembangan tersebut, dapat dipastikan bahwa setiap instalasi yang dibangun telah dilengkapi dengan dokumen lingkungan yang mendukung pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan yakni meliputi dokumen AMDAL dan UKL-UPL. Setiap aktivitas operasional Perseroan dilakukan sesuai dengan prasyarat dan parameter yang tercantum dalam dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL) dan peraturan lingkungan hidup yang berlaku. Ketataan pada aturan ini menunjukkan komitmen yang tinggi sekaligus upaya sungguh-sungguh dari Perseroan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, yang dilakukan selaras dengan upaya mempertahankan kualitas lingkungan sekaligus memberi manfaat positif optimal bagi masyarakat khususnya dan pembangunan perekonomian bangsa pada umumnya.

KEBIJAKAN LINGKUNGAN

PLN telah menetapkan Kebijakan Lingkungan sebagai berikut:

1. Mencegah pencemaran lingkungan dan degradasi keanekaragaman hayati di sekitar wilayah kerja perusahaan.

Evidence of PLN's commitment to the environment is demonstrated through compliance with all relevant environmental legislation, namely Law Num. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, including Government Regulation Num. 27 of 2012 as an interpretation of the above legislation. Government Regulation Num. 27 of 2012 is seen as a guideline for PLN to complete the presidential decree for the development of all environmentally friendly electrical power projects or development activities. With the implementation of these government regulations, creating AMDAL (EIA) for electricity projects can occur more quickly, given the environmental permit is integrated into the process of acquiring the AMDAL and UKL-UPL (Environmental Management - Environmental Monitoring).

Recent developments indicate that the targeted presidential decree is more rapid since the issuance of Presidential Decree Num. 4 of 2016 dated 16 January 2016 on "Accelerating the Development of Electrical Power Infrastructure", which states the support of the Central Government for PLN in the form of: guarantees, Licensing and Non licensing acceleration, supply of primary energy, spatial planning, land provision, and overcoming obstacles and issues, as well as the settlement of legal issues being faced.

With these developments, it is certain that every installation being constructed will have all the environmental documentation required to support the management, protection and preservation of the environment, including the AMDAL and UKL-UPL documentation. All of the Company's operational activities are carried out in accordance with the terms and parameters contained within the environmental documents (AMDAL and UKL-UPL), as well as the applicable environmental regulations. Adherence to this rule demonstrates a strong commitment, as do the Company's painstaking efforts in favor of sustainable development, to maintaining environmental quality while providing optimum positive benefits for society in particular and national economic development overall.

ENVIRONMENTAL POLICY

PLN has determined its environmental policy as follows:

1. Preventing environmental pollution and biodiversity degradation around the company's working areas.

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW - for Sustainable Development

2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain serta mengendalikan aspek dan dampak penting lingkungan setiap kegiatan, proses dan produk dari berbagai unit kerja dan anak perusahaan.
3. Mendokumentasikan, mengimplementasikan, memelihara dan mengkaji ulang secara periodik kebijakan lingkungan ini sehingga senantiasa relevan, sesuai dan menjadi pedoman dasar bagi manajemen lingkungan, yang diterapkan secara spesifik di setiap unit kerja dan anak perusahaan.
4. Menjadikan kebijakan ini sebagai landasan untuk penetapan dan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran manajemen lingkungan.
5. Mendorong setiap unit kerja dan anak perusahaan terus menerus melakukan perbaikan kinerja sistem manajemen lingkungan.
6. Menyediakan dan memfasilitasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan dan memelihara kebijakan lingkungan ini sehingga setiap unit kerja, anak perusahaan dan para mitra kerja dapat menerapkan kebijakan ini secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi lingkungan setempat.
7. Menjadikan pengelolaan lingkungan hidup sebagai sikap dan perilaku setiap lini manajemen dan individu karyawan perusahaan.
8. Mendorong pengembangan masyarakat di sekitar unit-unit kerja dan anak perusahaan sebagai upaya menjadikan perusahaan sebagai bagian integral dengan masyarakat di sekitarnya.
9. Berpartisipasi dalam program Pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
10. Menjamin kebijakan ini senantiasa tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pihak pendana (*lender*) dan masyarakat luas.
2. Complying with legislation and other provisions, as well as controlling the significant environmental aspects and impacts of each activity, process and product from the various business units and subsidiaries.
3. Documenting, implementing, maintaining and periodically reviewing the environmental policy so that it remains relevant, appropriate and can serve as the basic guideline for environmental management, applied specifically in every business unit and subsidiary.
4. Making this policy the foundation for the determination and assessment of environmental management objectives and targets.
5. Encouraging every work unit and all the subsidiaries to continually improve their environmental management system performance.
6. Providing and facilitating the necessary resources to implement and maintain this environmental policy so that every work unit, subsidiary and partner implements the policy gradually by taking into account the company's ability and the local environmental conditions.
7. Making environmental management an attitude and behavior for every individual line of management and every employee in the company.
8. Encouraging community development around the working units and subsidiary companies in an effort to make the company an integral part of the surrounding community.
9. Participating in Government programs to reduce greenhouse gas emissions.
10. Ensuring that this policy is always available to relevant parties, such as lenders and the wider community.

Kebijakan Lingkungan tersebut merupakan pedoman bagi Kami dalam menjalankan kegiatan operasional yang semakin ramah lingkungan.

PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut, Kami telah menetapkan aspek lingkungan sebagai salah satu unsur penilaian dalam mengevaluasi kinerja unit bisnis PLN di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan bentuk pemenuhan komitmen PLN di bidang lingkungan.

This Environmental Policy is a guideline for Us to conduct our operational activities in a more environmentally friendly manner.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PROGRAM

As the implementation of that policy, we have established the environmental aspect as one element of assessments in evaluating the performance of PLN business units throughout Indonesia. This is one way of fulfilling PLN's commitment to the environment.

Adapun berbagai program pengelolaan lingkungan yang telah dijalankan sebagai berikut:

Pengelolaan Lingkungan Instalasi

Sebagian besar instalasi pengelolaan lingkungan sudah terakreditasi secara internasional menurut standar ISO 14001:2004 dan ISO 14001: 2005. Dengan sistem yang terakreditasi maka efektifitas pengelolaan lingkungan instalasi yang mencakup: sistem manajemen lingkungan, audit lingkungan, evaluasi kinerja lingkungan, kajian daur hidup pokok, dapat meningkat sehingga akan menjaga kredibilitas Perseroan dalam pengelolaan lingkungan.

Kami melaksanakan 6 (enam) kegiatan bidang lingkungan hidup di sekitar instalasi sebagai wujud partisipasi PLN dalam menjaga kelestarian, yakni:

1. Studi Lingkungan (EU22)

PLN selalu membuat studi lingkungan berupa AMDAL dan UKL-UPL sebagai salah satu tahapan perencanaan sebelum memulai pembangunan pembangkit dan jaringan transmisi. Studi dilakukan sebagai rujukan dalam mengidentifikasi dan mengatasi dampak pembangunan instalasi pembangkit maupun jaringan transmisi pada saat pembangunan maupun saat pengoperasiannya.

Selain itu juga dibuat Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) serta Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) bagi kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Surat Edaran KLH No. B-14134/MENLH/KP/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal arahan pelaksanaan Pasal 121 Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mewajibkan seluruh kegiatan yang telah memiliki izin usaha dari Tahun 2009 untuk menyusun dokumen lingkungan (DELH/DPLH) dan memiliki izin lingkungan.

Sampai saat ini, dari 184 unit yang berkewajiban menyusun dokumen lingkungan, 89 unit telah menyelesaikan dan sisanya masih tahap penyusunan.

2. Studi LARAP dan Laporan LARAP oleh IMA

Studi Land Acquisition and Resettlement Plan (LARAP) dan Laporan Evaluasi Implementasi LARAP oleh Independent Monitoring Agency (IMA), merupakan dokumen perencanaan pembebasan tanah sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan pendana proyek. Dokumen Laporan Evaluasi Implementasi LARAP disusun oleh pihak eksternal yang independen dengan tujuan mengevaluasi pelaksanaan

Several environmental management programs have been implemented, as follows:

Environmental Management of Installations

Most of the environmental management of our installations is already internationally accredited according to ISO 14001:2004 and ISO 14001:2005 international standards. By using these accredited systems, the effectiveness of environmental management for installations includes: environmental management systems, environmental auditing, environmental performance assessment, basic life cycle assessment, and can improve, thus safeguarding the Company's credibility in environmental management.

We implement 6 (six) environmental activities around our installations, demonstrating PLN's participation in environmental preservation, namely:

1. Environmental Studies (EU22)

PLN has always conducted environmental studies, such as AMDAL and UKL-UPL, as part of its planning stage before construction starts for power plants and transmission networks. The studies are conducted to serve as a reference in identifying and overcoming the impact of power plants and transmission networks during construction and during operations.

The company has also made Environmental Management and Monitoring Documentation (DPPL) and Environmental Management Documentation (DPLH) for activities that do not have environmental documentation. This is consistent with the provisions of Ministry of Environment Circular Num. B-14134/MENLH/KP/12/2013 dated 27 December 2013 concerning direction for the implementation of Article 121 of Law Num. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, which requires that all activities that have an operating license from 2009 draft environmental documents (DELH/DPLH) and have an environmental permit.

Until now, of the 184 units obliged to prepare environmental documentation, 89 have been completed and the remainder are still being prepared.

2. LARAP Studies and LARAP Reports by IMA

Land Acquisition and Resettlement Plan Studies (LARAP) and LARAP Assessment and Implementation Reports by an Independent Monitoring Agency (IMA) are documents for planned land acquisition in accordance with Indonesian government regulations and the rules of project funders. The LARAP Assessment and Implementation Reports are prepared by an independent external party with the aim of evaluating

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW - for Sustainable Development

pembebasan tanah yang telah dilaksanakan. Hasil studi ini menjadi panduan Perseroan untuk melakukan pembebasan lahan, selain menggunakan pendekatan persuasif, sehingga tidak ada sengketa lahan dengan penduduk asli maupun penduduk setempat pada saat pembangunan fisik maupun tahapan operasional dilaksanakan.

3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Kami secara rutin melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL) pada setiap instalasi. Keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan diukur melalui pemenuhan terhadap serangkaian parameter Baku Mutu Lingkungan (BML) yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah setempat / pemerintah pusat atau standar akreditasi yang digunakan, dan pengukurannya dilaksanakan oleh pihak-pihak independen yang kompeten. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kemudian disampaikan kepada instansi terkait secara berkala.

4. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (G4-15)

Untuk mewujudkan visi PLN menjadi perusahaan kelas dunia, diterapkan standar internasional sistem manajemen lingkungan ISO 14001 khususnya di unit-unit pembangkit. Sampai dengan akhir tahun 2015 mayoritas unit PLN yang tersebar di seluruh Indonesia telah mendapatkan sertifikat ISO 14001:2004 dan/atau ISO 14001: 2005.

5. Partisipasi pada Upaya Mitigasi Perubahan Iklim (EU5)

Kami turut mendukung program Pemerintah dalam upaya mitigasi perubahan iklim dengan membangun pembangkit listrik energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi, tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air dan membangun pembangkit listrik tenaga bayu secara terbatas di daerah yang memiliki potensi angin yang berlimpah.

Beberapa instalasi pembangkit dengan sumber energi baru terbarukan, kemudian disertakan dalam program *Clean Development Mechanism* (CDM) untuk mendapatkan sertifikat *Carbon Emission Reduction* (CERS) dan memperoleh benefit finansial tambahan dari penjualan CERS dimaksud.

the land acquisition that has taken place. The results of these studies serve as a guide for the Company to acquire land, as well as using a persuasive approach so that there are no land disputes with indigenous people or local residents during the physical construction and operational phases.

3. Environmental Management and Monitoring

We regularly carry out environmental management and monitoring in accordance with the environmental documentation (AMDAL and UKL-UPL) at each installation. The success of environmental management programs is measured by the fulfillment of a series of Environmental Quality Standard (BML) parameters determined in accordance with local regulations / central government regulations or accreditation standards used, and measurements carried out, by competent independent parties. Reports on the environmental management and monitoring are then submitted to the relevant agencies on a regular basis.

4. Environmental Management System Implementation (G4-15)

To realize PLN's vision of becoming a world class company, we apply ISO 14001 international environmental management system standards, especially in our power plants. As of the end of 2015, the majority of PLN units scattered throughout Indonesia had received ISO 14001:2004 and/or ISO 14001:2005 certification.

5. Participation in Climate Change Mitigation (EU5)

We also support the Government program to mitigate climate change by building power plants driven by renewable energy, such as geothermal power plants, solar cell power plants and hydroelectric power plants, and have built a limited number of wind farms in areas that have abundant wind potential.

Some of these new and renewable energy-driven power plants are then included in the Clean Development Mechanism (CDM) program to receive Carbon Emission Reduction (CERs) certification and obtain additional financial benefits from the sale of these CERs.

Dalam kaitan ini, Kami telah mengembangkan proyek CDM antara lain PLTP Kamojang IV dan PLTP Lahendong II. Selain melalui mekanisme CDM, PLN juga memanfaatkan mekanisme *Verified Carbon Standard* (VCS) untuk mendapatkan insentif dari hasil penjualan kredit karbon pembangkit energi terbarukan. Sementara pembangkit energi terbarukan yang sedang dikembangkan sebagai proyek VCS adalah PLTA Renun, PLTA Sipansihaporas dan PLTA Musi.

Wujud partisipasi terhadap upaya mitigasi perubahan iklim juga dilakukan melalui pengukuran dan pemantauan indikator utama emisi pada area sekitar instalasi, baik instalasi pusat listrik tenaga diesel (PLTD), pusat listrik tenaga uap (PLTU), pusat listrik tenaga gas (PLTG) dan pusat listrik tenaga gas uap (PLTGU).

Berdasarkan hasil-hasil pemantauan atas kualitas lingkungan sekitar instalasi tersebut, maka telah dijalankan program perbaikan kualitas dan pengelolaan lingkungan melalui berbagai kegiatan, mencakup: kegiatan penanganan limbah B3, perbaikan IPAL, pemasangan *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS) dan kegiatan lain yang mendukung upaya perbaikan kualitas lingkungan sekitar instalasi. Adapun standar parameter yang digunakan telah sesuai dengan ketetapan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mengenai Baku Mutu Lingkungan (BML). Hasil pemantauan menunjukkan seluruh indikator berada di bawah baku mutu yang ditetapkan.

6. Penerapan Program Proper

Sebagai bagian dari proses evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan di masing-masing unit bisnis, 72 unit pembangkit mengikuti Program Proper yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Hasilnya menunjukkan peringkat PROPER Unit PLN berturut-turut dari yang terendah yaitu Merah 23 Unit, Biru 47 Unit, Hijau 2 Unit.

In this regard, we have developed a CDM project between Kamojang IV geothermal power plant and Lahendong II geothermal power plant. In addition to the CDM mechanism, PLN is also utilizing the Verified Carbon Standard (VCS) mechanism to gain incentives from the sale of carbon credits from renewable energy generation. For the meanwhile, the renewable energy generation projects being developed with the VCS mechanism are Renun hydropower plant, Sipansihaporas hydropower plant and Musi hydropower plant.

Participation in the efforts to mitigate climate change also take place through the measurement and monitoring of the main emissions indicators in areas around PLN's installations, be they Diesel Power Plants, Steam Power Plants, Gas Engine Power Plants or Combine Cycle Power Plants.

Based on the results of environmental quality monitoring around these power plants, programs have been implemented to improve environmental quality and management through a variety of activities, including: handling toxic and hazardous (B3) waste, improving WWTP, installing Continuous Emission Monitoring Systems (CEMs) and other activities to support improved environmental quality around PLN installations. The standard parameters used are in accordance with the Central Government and Local Government provisions on Environmental Quality Standards. Monitoring results demonstrate that all indicators fall below the standards set.

6. Implementing the Proper Program

As part of the environmental management performance evaluation process in each business unit, 72 power plant units follow the Proper Program organized by the Ministry of Environment. The results demonstrate 23 PLN units received the lowest PROPER ranking of Red, while, rising in ranking, 47 were ranked as Blue and 2 as Green.

PLTU BATUBARA YANG TIDAK SELALU “HITAM”, NAMUN BISA “HIJAU”

COAL- FIRED POWER PLANTS WHICH ARE NOT ALWAYS “BLACK”, BUT CAN BE “GREEN”

Komitmen yang kuat dan implementasi program ramah lingkungan yang konsisten dapat “menyulap” batubara yang “hitam” menjadi sumber energi pembangkit tenaga listrik yang bersahabat. Hal tersebut sudah dibuktikan PT PLN (Persero) Pembangkit Tanjung Jati B (PLN TJB), sebagai salah satu ujung tombak pemasok energi listrik di Indonesia. Hal ini terungkap saat PLN TJB menerima anugerah proper hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ajang bertajuk Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) 2014.

Pada penyelenggaraan kali ini, PLN TJB memperoleh Proper dengan kategori hijau (Proper Hijau). Perolehan prestasi ini adalah untuk kali kedua secara berturut- turut bagi PLN TJB, setelah tahun sebelumnya menerima penghargaan serupa. Sesuai visinya, melalui program E-Green dan dukungan masyarakat Jepara, PLN TJB bahkan menargetkan untuk dapat meraih Proper Gold pada tahun 2017. Dengan momentum ini PLN TJB juga menyerukan bahwa batubara tidak selalu identik dengan ke-“hitam”-annya, batu bara terbukti dapat menjadi sumber energi ramah lingkungan.

Hasil tersebut dimulai dari tahun 2012, saat masih berpredikat biru, PLN TJB mencanangkan program E-Green yang merupakan program untuk menjadikan PLTU TJB menjadi perusahaan hijau dengan 5E. Yaitu Efficient Process, Excellent Performance, Elegant Atmosphere, Empowering Community, and Establishing High Trust Culture.

Implementasi program E-Green yang konsisten membuat intensitas emisi CO₂ PLTU TJB hanya berada di angka 560 ton/GWh, hampir separuh dari standar internasional yang sebesar 1.116 ton/GWh. Bahkan PLTU TJB masih unggul dibandingkan dengan pembangkit listrik terkemuka di dunia seperti Trans Alta (1.041 ton/GWh), Delta Electricity - Australia (945 ton/GWh), East West Power - Korea (774 ton/GWh), Origin Power - Australia (740 ton/GWh), dan J Power - Jepang (730 ton/GWh).

Prestasi tersebut juga membuat jurnal internasional, Power Magazine, menempatkan PLTU TJB sebagai 10 PLTU terbaik di dunia dalam pengurangan pencemaran udara.

Tidak hanya itu, program pemanfaatan ash menempatkan PLTU TJB menduduki peringkat ketiga di antara perusahaan listrik berbahan bakar batubara terbesar di dunia sebesar 66 persen di bawah J Power - Jepang (97 persen) dan EON - Jerman (88 persen) serta mengungguli perusahaan listrik sebesar Fortum - Finlandia (48 persen), AEP - Australia (36 persen) dan Delta Electric Power (18 persen).

Sedangkan pemanfaatan limbah gypsum PLTU TJB berada di peringkat pertama dunia dengan jumlah limbah termanfaatkan 100 persen. Unggul atas J Power - Jepang (99,9 persen), Fortum - Finlandia (99 persen), East West Power - Korea (98 persen), dan EON - Jerman (97 persen).

Dengan bukti keberhasilan tersebut Kami menargetkan perolehan kinerja lingkungan serupa atau bahkan lebih baik lagi bagi unit usaha PLN lain yang mengandalkan instalasi pembangkit PLTU berbahan bakar batubara dalam proses pembangkitan tenaga listriknya.

A strong commitment and the consistent implementation of an environmentally friendly program can “juggle” coal from being “black” to becoming a friendly energy source for power generation. This has already been proven by PT PLN (Persero) Tanjung Jati B Power Plant (TJB PLN), one of Indonesia’s pioneers in electrical energy supply. This was revealed when PLN TJB was bestowed with Green Proper ranking by the Environment and Forestry Ministry at the event entitled Corporate Performance Rating Assessment Program (PROPER) 2014.

At this event, PLN TJB obtained a Green category for its Proper ranking (Proper Green). This was the second consecutive time that PLN TB achieved this recognition, having received the same award the previous year. In line with its vision, through an E-Green program and with the support of the Jepara community, PLN TJB is targeting an achievement of Proper Gold in 2017. With this momentum, PLN TJB is also advocating that coal is not always synonymous with its “blackness”, and has proven that coal can be an environmentally friendly energy source.

These results started in 2012, at which time it was still ranked blue, PLN TJB launched its E-Green program, which aims to make TJB power plant a green company through 5E, namely, Efficient Process, Excellent Performance, Elegant Atmosphere, Empowering the Community, and Establishing High Trust Culture.

Consistent implementation of the E-Green program has resulted in the intensity of CO₂ emissions at TJP power plant reaching merely 560 ton/GWh, almost half of the international standard of 1,116 ton/GWh. TJP power plant is even superior compared to the leading power plants in the world, such as Trans Alta (1,041 ton/GWh), Delta Electricity - Australia (945 ton/GWh), East West Power - Korea (774 ton/GWh), Origin Power - Australia (740 ton/GWh), and J Power - Japan (730 tons/GWh).

This achievement has also made the international journal Power Magazine place TJB power plant in the 10 best power plants in the world for reduced air pollution.

In addition, the program to utilize ash puts TJB power plant into third place among the coal-fired electrical power companies in the world at 66 percent, below J Power - Japan (97 percent) and EON - Germany (88 percent), and surpassing electrical power companies as large as Fortum - Finland (48 percent), AEP - Australia (36 percent) and Delta Electric Power (18 percent).

Meanwhile, utilizing gypsum waste, TJB power plant is ranked first in the world with 100% waste utilization. This surpasses J Power - Japan (99.9 percent), Fortum - Finland (99 percent), East West Power - Korea (98 percent) and EON - Germany (97 percent).

With evidence of this success, We are targeting environmental performance of similar or even better standards for other PLN business units that rely on coal-fired power plants in the electrical power generation process.

PENGELOLAAN SUMBER ENERGI

[G4-EN3, G4-EN6] [EU 1] [EU 6] [EU10]

Saat ini, sebagian besar listrik yang diproduksi masih bergantung pada sumber energi tak terbarukan, seperti batubara dan minyak bumi. Sebagai wujud partisipasi terhadap kelestarian lingkungan, Kami juga terus berusaha untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan, seperti panas bumi, dan air. Komposisi dan jumlah penggunaan energi langsung sebagai bahan bakar penggerak generator disajikan pada tabel berikut.

Penggunaan Bahan Bakar Pembangkit

Generator Fuel Use

Jenis Bahan Bakar			% Pertumbuhan % Growth	Type of Fuel
	2014	2015		
BBM (kilo liter)	7.431.004	5.478.863	(26.3%)	Oil fuel (kilo liter)
Batubara (ton)	44.604.981	48.995.169	9.8%	Coal (ton)
Gas Alam (MMSCF)	450.190	456.494	1.4%	Natural Gas (MMSCF)

Bahan bakar batubara dan minyak bumi merupakan jenis bahan bakar fosil tidak terbarukan yang kurang ramah lingkungan, mengingat emisi CO₂ yang relatif tinggi dalam proses pembakarannya. Mempertimbangkan penggunaannya yang terus meningkat, Kami telah menjalankan program efisiensi PLTU berbahan bakar batubara melalui pemilihan teknologi PLTU “supercritical” yang lebih hemat bahan bakar sehingga mengurangi jumlah emisi gas CO₂ untuk tiap kWh listrik yang dihasilkan. Selain itu dalam rangka mengurangi intensitas emisi CO₂, Kami terus berupaya meningkatkan porsi penggunaan gas sebagai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

Untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil (terutama BBM) dan batubara yang memberikan emisi gas CO₂ paling besar, maka diterapkan konsep bauran energi yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan BBM agar biaya pembangkitan menurun, PLN juga berupaya untuk meningkatkan porsi penggunaan energi terbarukan dalam komposisi penggunaan sumber energi pembangkit.

Dua sumber energi terbarukan yang akan dikembangkan dengan massive adalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit tenaga listrik panas bumi (PLTP). Beberapa pembangkit dengan sumber energi terbarukan lain juga tetap dikembangkan secara terbatas, sesuai karakteristik daerah, yakni pembangkit tenaga bayu dan tenaga surya. Hasil realisasi pembangunan pembangkit yang lebih ramah lingkungan tersebut dapat dilihat juga pada rasio perbandingan bauran energi dan tabel perbandingan produksi tenaga listrik menurut sumber energi berikut.

MANAGING ENERGY SOURCES

[G4-EN3, G4-EN6] [EU 1] [EU 6] [EU10]

Currently, most of the electricity produced is dependent on non-renewable sources, such as coal and petroleum. As the implementation of environmental sustainability participation, we also continue to strive to maximize utilization of renewable and environmentally friendly energy sources, such as geothermal power and water. The composition and amount of direct energy used as fuel to propel generators is presented in the following table.

Coal and oil are non-renewable fossil fuels that are not environmentally friendly given the relatively high CO₂ emissions generated in the combustion process. Considering that the use of fossil fuels continues to increase, we are running an efficiency program for coal-fired power plants through the selection of more fuel-efficient “supercritical” power plant technology, thereby reducing the amount of CO₂ emissions for each kWh of electricity generated. In addition, to reduce the intensity of CO₂ emissions, we continue to increase the proportion of the gas used, as a more environmentally friendly fuel.

To reduce the use of fossil fuels (especially oil and coal), which emit the largest amounts of CO₂, the energy mix concept is applied with the aim of reducing the use of petroleum so that generating costs decline, meanwhile PLN is also seeking to increase the portion of renewable energy used in the composition of power plant energy sources.

Two renewable energy sources with massive development are hydroelectric power and geothermal power. Several power plants that use other renewable energy sources also continue to be developed on a limited basis, according to the characteristics of each region, namely wind energy and solar power. The result of building more environmentally friendly power plants can be seen also in the energy mix ratio and the following table comparing electrical power production according to energy sources.

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW – for Sustainable Development

Perkembangan Bauran Energi

Energy Mix Development

Jenis Pembangkit	2014	2015	Type of Power Plant
BBM	11,37%	8,22%	Oil Fuel
Non-BBM	88,63%	91,78%	Non Oil Fuel
Gas Alam	24,58%	25,34%	Natural Gas
Batubara	52,59%	55,79%	Coal
Panas Bumi	4,39 %	4,29%	Geothermal
Air	6,63%	5,87 %	Water
Surya dan Bayu	0,02 %	0,02%	Solar and Wind
Biodiesel, Olein, dan Biomass	0,41%	0,47%	Biodiesel, Olein and Biomass

Produksi Listrik Menurut Sumber Energi, 2013-2015

Electricity Production According to Energy Source, 2013-2015

Produksi Tenaga Listrik (GWh)	2014	2015	% Pertumbuhan % Growth 2015	Electricity Production (GWh)
Produksi Sendiri	152.853	156.631	2,47%	Own Production
BBM	9.491	5.783	(39,08%)	Oil Fuel
Non-BBM	143.362	150.848	5,22%	Non Oil Fuel
Batubara	83.373	90.275	8,28%	Coal
Gas Alam	44.398	46.039	3,69%	Natural Gas
Panas Bumi	4.285	4.392	2,48%	Geothermal
Air	11.164	10.004	(10,38%)	Water
Surya dan Bayu	7	5	(22,47%)	Solar and Wind
Biodiesel dan Olein	135	133	(1,48%)	Biodiesel and Olein
Sewa	22.444	19.841	(11,60%)	Rent
Pembelian - IPP dan Proyek	53.258	57.510	7,99%	IPP Purchasing & Project
Total Produksi Listrik	228.555	233.982	2,37%	Total Electricity Production

Dari tabel bauran energi tampak bahwa persentasi penggunaan energi terbarukan semakin meningkat. PLN menargetkan komposisi penggunaan energi terbarukan (terutama panas bumi) pada pembangkit yang dikelola PLN hingga sebesar 15,5 % di tahun 2024 mendatang. Pembangkit berbahan bakar energi terbarukan terdiri dari tenaga air, panas bumi, matahari, bayu, biomass dan lainnya.

Sebagaimana tertuang dalam RUPTL 2015-2024, telah direncanakan tambahan kapasitas pembangkit EBT total sebesar 14.200 MW. Dari rencana tersebut, pembangunan pembangkit yang terbesar dan menjadi prioritas adalah pembangkit hidro dan mini hidro (PLTA/PLTM/ Pumped Storage) dengan total kapasitas sebesar 9.300 MW. Prioritas kedua adalah panas bumi (PLTP) mencapai sebesar 4.815 MW. Sisanya adalah pemanfaatan energi surya, bayu, biomass dan lainnya dengan total sekitar 70 MW.

The energy mix table demonstrates that the percentage use of renewable energy is increasing. PLN is targeting a composition of renewable energy (primarily geothermal) use in power plants managed by PLN of up to 15.5% in 2024. Power plants fueled by renewable energy comprise hydropower, geothermal power, solar power, wind power, biomass and others.

As stated in the 2015-2024 RUPTL, plans have been made for additional renewable energy generating capacity totaling 14,200 MW. Of this plan, the most, and priority, construction is of hydro and mini-hydro power plants (HEPP/micro power/Pumped Storage) with a total capacity of 9,300 MW. The second priority is geothermal energy at 4,815 MW. The remainder will utilize solar energy, wind, biomass and other sources, totaling approximately 70 MW.

Kami akan mencapai target tersebut melalui berbagai upaya, yaitu : (i) mendorong partisipasi pihak swasta dan para investor baik dalam dan luar negeri, (ii) berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan di bidang kelistrikan, dan (iii) melaksanakan program pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan kompetensi insan PLN mengoperasikan berbagai pembangkit berteknologi lebih maju yang lebih ramah lingkungan.

Lebih dari itu, target jangka panjang Kami adalah mengendalikan penggunaan sumber energi dengan cara meningkatkan efisiensi pembangkitan daya listrik pada setiap pembangkit yang dimiliki, sehingga konsumsi energi per kilo watt hour (kWh) listrik yang dihasilkan (intensitas energi) menurun. Kami memulai program dimaksud dengan menjaga unjuk kerja pembangkit yang dikelola melalui program perbaikan dan pemeliharaan rutin. Secara bertahap kami akan menerapkan teknologi pembangkitan listrik yang menerapkan teknologi terkini, sehingga intensitas energi terus menurun secara gradual.

PENGENDALIAN EMISI GRK

(G4-EN15, G4-EN16, E G4- N17)

Emisi gas karbondioksida (CO_2) dari kegiatan operasional kami terutama berasal dari aktivitas pembangkitan listrik berbahan bakar fosil seperti PLTU, PLTG, PLTGU dan PLTD. Selain berasal dari pengoperasian pembangkit listrik, emisi CO_2 dalam jumlah yang jauh lebih kecil, berasal dari kegiatan transportasi dalam rangka pengelolaan unit-unit usaha dan pembangkit yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara.

Berdasarkan data kompilasi penggunaan energi fosil, total emisi dari kegiatan pembangkitan tenaga listrik pada tahun 2015 diperkirakan mencapai volume sebesar 144.914.606 ton CO_2 ekuivalen. PLTU batu bara memberikan kontribusi emisi terbesar yakni 105.448.733 ton CO_2 ekuivalen, sedangkan pembangkit berbahan bakar gas dan BBM memberikan kontribusi berturut-turut sebesar 14.618.154 ton CO_2 ekuivalen dan 24.847.718 ton CO_2 ekuivalen.

Perhitungan Emisi CO_2 dari Pembangkit Berbahan Bakar Fosil, 2015

CO_2 Emissions Calculations from Fossil Fuel-Fired Power Plants, 2015

Jenis Bahan Bakar	Satuan Unit	Total Konsumsi Total Consumption	Konversi Conversion	Emisi CO_2 (ton eq) Emission CO_2 (ton eq)	Type of Fuel
Solar	Juta liter Million Liter	5.478.86	2.6681	14.618.154	Solar
Batubara	Ribu ton Million tone	48.995.17	2.1522	105.448.733	Coal
BBM	Juta liter Million Liter	-	2.3247	-	Gasoline
Gas	MMCFT	456.494.00	0.0544	24.847.718	Gas
Total Emisi				144.914.606	Total Emission

Catatan : Angka konversi emisi CO_2 sesuai EIA (US Energy Information Administration)
Note: CO2 emission conversion figures based on EIA (US Energy Information Administration)

We will achieve these targets through various efforts, namely: (i) encouraging the participation of the private sector and investors both at home and abroad, (ii) collaborating with various parties to develop environmentally friendly technologies in the field of electrical power, and (iii) carrying out educational programs and training to prepare the competence of PLN human resources to operate a variety of more technologically advanced power plants that are more environmentally friendly.

Moreover, our long term target is to control the use of energy sources by increasing the efficiency of power generation at each of our power plants, so that the energy consumption per kilowatt hour (kWh) for electricity generated (energy intensity) decreases. We started this program by maintaining the performance of our power plants through a program of repair and routine maintenance. We will gradually implement the latest power generation technology, so that the energy intensity continues to gradually decline.

CONTROLLING GHG EMISSIONS

(G4-EN15, G4-EN16, E G4- N17)

Carbon dioxide (CO_2) emissions from our operations are primarily from power generation derived from fossil-fueled power plants, such as those using gasoline, coal, gas and diesel. In addition to that originating from power plant operations, much smaller quantities of CO_2 emissions are derived from transportation related to the management of business units and plants spread throughout the archipelago.

Based on data compiled about the use of fossil-fuel energy, total emissions from power generation activities in 2015 were expected to reach a volume of 144,914,606 tons CO_2 equivalent. Coal-fired power plant emissions contributed the most to emissions with 105,448,733 tons CO_2 equivalent, whereas gas-fired and gasoline-fired power plants contributed respectively 14,618,154 tons CO_2 equivalent and 24,847,718 tons CO_2 equivalent.

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW - for Sustainable Development

Selaras dengan penambahan kapasitas daya dan jumlah pembangkit, volume emisi CO₂ dari seluruh pembangkit milik PLN yang berbahan bakar fosil akan terus meningkat di masa mendatang. Dalam rangka mengendalikan bertambahnya emisi CO₂ dari kegiatan pembangkit, maka Kami mengupayakan peningkatan pembangunan pembangkit bersumberkan energi terbarukan panas bumi dan PLTA sebagaimana yang telah tercantum dalam dokumen Program Pembangkit 35.000 MW yang tengah dijalankan PLN.

Untuk menekan volume emisi CO₂ ini, maka telah dilaksanakan beberapa program yaitu :

1. Menambah pembangunan pembangkit dengan sumber energi yang terbarukan, yakni PLTP dan PLTA;
2. Membangun dan mengoperasikan pembangkit tenaga surya (PLTS) dan bayu (PLTB) di berbagai pulau yang dilaksanakan pada tahun 2013-2015 menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang berbahan bakar solar (HSD);
3. Membangun dan mengoperasikan pembangkit tenaga bayu di beberapa daerah dengan intensitas sinar matahari yang tinggi.
4. Merealisasikan Clean Development Mechanism (CDM) dan Verified Carbon Standard (VCS) sesuai mekanisme Protokol Kyoto pada pengembangan dan pembangunan pembangkit dengan energi terbarukan untuk mendapatkan kredit dari upaya penurunan emisi gas rumah kaca.
5. Menerapkan konsep green energy atau E-Green pada pengelolaan beberapa unit pembangkit dalam lingkup unit Bisnis PLN, seperti yang tengah dijalankan di PLTU Tanjung Jati B, Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Dengan menerapkan E-Green, PLTU Tanjung Jati bahkan telah menetapkan target Proper Emas, dengan mengandalkan penerapan teknologi tinggi pengolahan limbah Flue Gas Desulphurization (FGD), yakni pemanfaatan cairan campuran batu kapur untuk menangkap senyawa belerang yang terbawa bersama gas buang.

Sementara itu, untuk mengendalikan kuantitas dan kualitas emisi gas buang dari instalasi pembangkit, dilakukan uji emisi pada setiap pembangkit sebagai bagian dari uji kelayakan operasi pembangkit. Selanjutnya uji emisi dilaksanakan secara rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan rencana pemantauan lingkungan yang tercantum dalam dokumen AMDAL dan UKL-UPL.

Selain upaya mengurangi emisi CO₂, Kami juga berupaya mengurangi emisi debu dari instalasi pembangkit berbahan bakar batu bara, melalui :

In line with the additional power capacity and number of power plants, the volume of CO₂ emissions from all PLN's fossil fuel-fired power plants will continue to increase in the future. In order to control the increase in CO₂ emissions from generating activities, We are striving to increase construction of renewable energy power plants using geothermal and hydropower, as has been stated in The 35,000 MW Power Plant Development Program documentation on the program being undertaken by PLN.

To reduce the volume of CO₂ emissions, several programs have been implemented:

1. Increasing the number of power plants constructed to use renewable energy sources, namely geothermal power and hydropower;
2. Building and operating power plants driving by solar and wind power on various islands, taking place between 2013-2015, to replace diesel-fired and oil-fired power plants;
3. Building and operating wind farms in some areas with highly intense sunshine.
4. Realizing Clean Development Mechanisms (CDM) and Verified Carbon Standards (VCS) in accordance with the Kyoto Protocol mechanisms in the development and construction of power plants driven by renewable energy to obtain credits from our efforts to reduce greenhouse gas emissions.
5. Applying the concept of green energy or E-Green in the management of several generating units within the scope of PLN business units, such as those underway in Tanjung Jati B, Tubanan Village, Kembang District, Jepara Regency. By implementing E-Green, Tanjung Jati power plant has set itself the target of achieving Proper Gold ranking, relying on high-tech application of Flue Gas Desulphurization (FGD) waste treatment, namely the use of a liquid limestone mixture to capture sulfur compounds incorporated in the flue gas.

Meanwhile, to control the quantity and quality of exhaust emissions from power plants, emissions tests are conducted on each power plant as part of a due diligence review of plant operations. Further emissions testing is carried out regularly in accordance with applicable regulations and in accordance with the environmental monitoring plan stated in the AMDAL and UKL-UPL documentation.

In addition to efforts to reduce CO₂ emissions, we are also working to reduce dust emissions from coal-fired power plants, by:

1. Pemasangan electrostatic precipitator;
2. Pembangunan sarana penyimpanan fly ash dan bottom ash;
3. Kerjasama untuk pemanfaatan kembali fly ash dan bottom ash;
4. Menutupi bagian bak belakang kendaraan pengangkut fly ash dan bottom ash;
5. Menyiram area penyimpanan batu bara untuk mengurangi debu.

Kegiatan pemantauan kadar debu di udara kemudian dilaksanakan secara rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan rencana pemantauan lingkungan yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL. Kami juga telah berupaya menerapkan program pengendalian emisi perusak ozon lainnya, seperti CFC (freon) yang banyak digunakan dalam instalasi pendingin ruangan dengan menerapkan kebijakan penggantian refrigerant yang lebih ramah lingkungan.

1. Installation of electrostatic precipitators;
2. The construction of the storage facilities for fly ash and bottom ash;
3. Cooperation for the reuse of fly ash and bottom ash;
4. Covering vehicle tailgates transporting fly ash and bottom ash;
5. Flushing coal storage areas to reduce dust.

Levels of air dust are regularly monitored in accordance with applicable regulations and in accordance with the environmental monitoring plan contained in the AMDAL or UKL-UPL documentation. We have also been working to implement a control program for other ozone-depleting emissions, such as CFCs (Freon) which are widely used in air conditioning, by applying a replacement policy to use more environmentally friendly refrigerants.

PENGELOLAAN DAN PENGOLAHAN LIMBAH

(G4-EN22, EN23)

Proses pembangkitan listrik pada instalasi pembangkit dan jaringan transmisi menghasilkan beberapa limbah spesifik, yakni:

1. Limbah cair, berupa air dari pembangkit PLTU;
2. Limbah cair berupa pelumas bekas yang termasuk B3 (*hazardous waste*);
3. Limbah padat seperti abu batubara, insulator keramik, kabel bekas, aki bekas kendaraan operasional dan tiang-tiang listrik.

Dalam pengelolaan limbah, telah diterapkan prinsip 3 R (*reduce, reuse dan recycle*), dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Limbah Cair

Limbah cair, berupa air dari kegiatan pembangkitan tenaga listrik diolah dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebelum dialirkan ke badan air penerima. Pada beberapa pembangkit, air yang telah diolah dimanfaatkan kembali untuk berbagai keperluan antara lain: pendingin generator dalam saat rangkaian tertutup dan penyiraman tanaman.

2. Limbah Padat dan Cair B3

Pengelolaan limbah padat dan cair B3 seperti abu batubara dan pelumas bekas dilakukan sesuai dengan PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 serta peraturan-peraturan menteri terkait pengelolaan limbah B3. PLN sebagai penghasil limbah B3 tidak melakukan pengolahan secara langsung, namun hanya

WASTE MANAGEMENT AND TREATMENT

(G4-EN22, EN23)

The process of generating electricity at power plants and along transmission lines generates some specific types of waste, namely:

1. Liquid waste, in the form of water from steam-fired power plants;
2. Liquid waste such as used oil, which is a B3 waste (*hazardous waste*);
3. Solid waste such as coal ash, ceramic insulators, scrap cables, used operational vehicle batteries and electricity poles.

To manage our waste we implement the 3R principle (*reduce, reuse and recycle*), with the following clarification:

1. Liquid Waste Management

Liquid waste, namely water from electrical power generation is treated in the Waste Water Treatment Plant (WWTP) before being discharged into receiving water bodies. At some plants, the treated water is reused for various purposes, among others: cooling generators in a closed circuit and for watering plants.

2. Solid Waste and Liquid B3 Waste

The management of solid waste and liquid B3 (*hazardous*) waste, such as coal ash and used lubricant is carried out in accordance with Government Regulation Num. 18 of 1999 on Toxic and Hazardous Waste Management, as well as relevant ministerial regulations related to hazardous waste management. PLN, which produces B3 waste, does not process this



menyimpan sementara limbah B3 tersebut sebelum diserahkan ke pihak lain yang memiliki izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah B3.

Untuk mengurangi volume penggunaan pelumas, PLN berupaya mengaplikasikan hasil penelitian yang memungkinkan diperpanjangnya usia pakai minyak pelumas karena adanya penambahan zat aditif tertentu. PLN juga berupaya menerapkan penggunaan resin untuk memperpanjang masa pakai minyak hidrolik pada turbin-turbin pembangkit.

3. Pengelolaan bahan-bahan bekas selain limbah B3
Bahan-bahan bekas selain limbah B3 dimusnahkan sesuai dengan mekanisme pemusnahan aset yang berlaku di Perseroan.
Limbah-limbah padat seperti bekas turbin, tiang-tiang penyangga, panel-panel bekas, dikelola dan dialihkan kepemilikannya sebagai bagian aset non produktif kepada pihak ketiga yang berkompeten dengan mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Sepanjang tahun 2015 tidak ada kejadian tumpahan limbah B3 yang mencemari lingkungan

directly and only stores the B3 waste temporarily before it is transferred to another party with the appropriate licensing to manage and utilize B3 waste.

To reduce the volume of used lubricants, PLN is working to apply the results of research that allows the extension of lubricating oil lifetime thanks to the addition of certain additives. PLN is also striving to implement the use of resin to extend the life of hydraulic oil in generator turbines.

3. Management of used materials other than B3 waste
Used materials other than B3 waste are destroyed in accordance with the asset destruction mechanism applicable in the Company.
Solid waste, such as used turbines, pillars and panels, are managed and the ownership transferred as part of non-productive assets to a competent third party using a mechanism that is in line with applicable regulations.
4. During 2015 there were no B3 waste spills that polluted the environment.

PARTISIPASI DALAM KEGIATAN PENGHIJAUAN DAN REHABILITASI LINGKUNGAN

Kami mengikuti seluruh mekanisme penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi sesuai ketentuan undang-undang kehutanan dan peraturan turunannya dalam melaksanakan pembangunan pembangkit (terutama PLTP) dan jalur transmisi PLN yang berada atau melewati kawasan hutan lindung atau kawasan konservasi.

Untuk menjaga biodiversitas sebagai akibat dari kegiatan pembangkitan tenaga listrik maupun sebagai wujud partisipasi dalam menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan, Kami merealisasikan berbagai program, mencakup:

1. Transplantasi terumbu karang;

Terumbu karang termasuk spesies yang dilindungi sesuai ketentuan *International Union for the Conservation of Nature* (IUCN). PLN melakukan upaya untuk melindungi fauna tersebut, di perairan sekitar lokasi pembangunan PLTU Paiton Unit 9. Untuk mengganti kerusakan terumbu karang akibat kegiatan *dredging* pada proses pembangunan dermaga PLTU Paiton Unit 9, PLN telah melakukan transplantasi terumbu karang pada lokasi lain di perairan yang sama yang memiliki kondisi lingkungan yang mendukung kehidupan terumbu karang. Pemantauan hasil transplantasi karang dilakukan setiap minggu selama satu tahun untuk memastikan bahwa terumbu karang dapat hidup dengan baik. Berdasarkan hasil pemantauan, 98,98% dari terumbu karang yang ditanam tumbuh dengan baik.

2. Menyediakan area hijau di daerah sekitar instalasi pembangkit PLN. Tidak ada data luasan area hijau secara detil, namun program penghijauan dilaksanakan secara rutin khususnya pada lokasi catchment area PLTA dan pada area pembangunan pembangkit PLTMH.

3. Penanaman pohon mangrove di sekitar area PLTU skala besar yang berlokasi dekat dengan pantai dan menginisiasi penghijauan kawasan pantai lain untuk mencegah abrasi. Sebagai contoh adalah upaya penyelamatan ekosistem mangrove di pesisir Mangkang Wetan dan Mangunharjo dengan prosesi penanaman 10.000 bibit mangrove jenis *rhizophora*. Kegiatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat diikuti lebih dari 200 peserta.

PARTICIPATION IN REGREENING AND REHABILITATION OF THE ENVIRONMENT

We follow all mechanisms related to land usage in protected forests and conservation areas in accordance with the forestry laws and the associated implementation regulations for the construction of power plants (especially geothermal plants) and transmission lines located in or passing through protected forests or conservation areas.

To safeguard biodiversity as a result of the power generation activities and to participate in maintaining and improving the quality of the environment, we implement various programs, including:

1. Coral Reef Transplantation;

Coral reefs are a protected species according to the International Union for the Conservation of Nature (IUCN). PLN works to protect this fauna in the waters around the Paiton Unit 9 construction site. To repair damage to coral reefs caused by dredging during the Paiton Unit 9 power plant pier construction process, PLN has transplanted corals in another location in the same waters with environmental conditions that are more favorable for coral reef life. The transplanted corals were monitored every week for a year to ensure that they thrive. Based on the monitoring results, 98.98% of the coral planted has grown well.

2. Providing a green area in the vicinity of power plant installations. There is no detailed data for the extent of these green areas, but the reforestation program is regularly carried out, especially in hydropower plant catchment areas and in the construction areas around micro-hydro power plants.

3. Planting mangrove trees in areas around large-scale power plants located near beaches, as well as initiating reforestation in other coastal areas to prevent abrasion. An example is the efforts to save the coastal mangrove ecosystems in Mangkang Wetan and Mangunharjo by planting 10,000 *rhizophora* mangrove seedlings. These activities involved various community groups and saw participation by more than 200 people.

OPERASIONAL RAMAH LINGKUNGAN

Kami turut berpartisipasi untuk mencegah perubahan iklim dan pemanasan global melalui pengelolaan operasional yang berwawasan lingkungan. Komitmen dan tekad ini merupakan perwujudan dari visi PLN, yakni "Menjalankan Kegiatan Usaha yang Berwawasan Lingkungan". Berbagai inisiatif yang telah dilakukan untuk meningkatkan pengoperasian pembangkit yang semakin ramah lingkungan, mencakup:

1. Menggunakan teknologi rendah karbon

Dalam rencana penyediaan tenaga listrik jangka panjang tahun 2015-2024 (RUPTL) PLN menyatakan bahwa rencana pembangunan PLTU di Pulau Jawa hanya akan menggunakan teknologi *supercritical* dan *ultra supercritical*. Teknologi ini dapat menghasilkan energi listrik yang lebih besar, sementara jumlah bahan bakar yang digunakan sama, sehingga emisi CO₂ per kWh daya listrik yang dihasilkan semakin turun. Teknologi rendah karbon lainnya yang dapat diadopsi di Indonesia adalah *Integrated Gasification Combined Cycle* (IGCC).

2. Meningkatkan porsi gas sebagai bahan bakar PLTG

Seperti ditunjukkan pada tabel perhitungan emisi, terlihat bahwa gas mengeluarkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan dua jenis bahan bakar fosil lainnya, sementara efisiensi energi yang dikeluarkan dalam proses pembakaran lebih baik. Indonesia diketahui memiliki cadangan gas alam yang cukup berlimpah. Oleh karenanya dalam rencana pembangunan pembangkit listrik Program 35.000 MW, Kami meningkatkan pembangunan pembangkit berbahan bakar gas.

Beberapa pembangkit yang kini beroperasi juga telah dimodifikasi dengan menggunakan bahan bakar gas sebagai sumber energi. Kami juga telah mulai mengintensifkan penggunaan teknologi *Compressed Natural Gas* (CNG) sebagai bahan bakar bagi pembangkit listrik peaker yaitu menggantikan peran PLTD, dalam memasok kebutuhan listrik pada saat beban puncak. Selain lebih ekonomis, penggunaan teknologi CNG untuk pembangkit peaker juga lebih ramah lingkungan mengingat emisi CO₂ yang jauh lebih rendah.

Guna menjamin ketersediaan gas sebagai sumber energi PLTG, Pemerintah kini mengupayakan serangkaian aturan yang bertujuan mengalokasikan sebagian produksi gas dari sumur-sumur produksi skala besar yang dikelola dalam skema KSO yang telah berjalan maupun masih dalam tahap pengembangan.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY OPERATIONS

We participate in the efforts to prevent climate change and global warming through environmentally sound operational management. This commitment and determination is a manifestation of PLN's vision, namely, "Conducting Environmentally Friendly Business Activities". Various initiatives have been undertaken to improve power plant operations and make them more environmentally friendly, including:

1. Using low-carbon technologies

In the 2015-2024 long-term plan to supply electricity (RUPTL), PLN states that planned power plant construction in Java will only utilize supercritical and ultra supercritical technology. This technology produces a greater amount of electricity, while the amount of fuel used remains the same, thus the CO₂ emissions per kWh of electricity generated continue to fall. Another low-carbon technology that can be adopted in Indonesia is the Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC).

2. Increasing the portion of gas used to fuel power plants

As shown in the emissions calculation table, it can be seen that gas emits less greenhouse gas than the two other fossil fuels, while the energy efficiency released in the combustion process is better. Indonesia is known to have relatively abundant reserves of natural gas. Therefore, in The 35,000 MW Power Plant Development Program, we are promoting the development of gas-fired power plants.

Some of the plants now operating have also been modified to use gas as an energy source. We have also started to intensify the use of Compressed Natural Gas (CNG) technology as a fuel for peaker electricity generation, replacing the role of diesel-fired power plants in supplying the demand for electricity during peak loads. Besides being more economical, the use of CNG technology for peaker plants is also more environmentally friendly given that the CO₂ emissions are much lower.

To ensure the availability of gas as an energy source for power plants, the government is now working on a set of rules that aims to allocate a portion of gas production from large-scale wells managed under the KSO scheme that has started running, even though it is still in the development stage.



3. Memanfaatkan potensi sumber energi terbarukan

Ada lima teknologi pembangkitan yang umum digunakan yakni potensi panas bumi, potensi air (air terjun), tenaga nuklir dan potensi tenaga sinar matahari dan tenaga angin. Sumber energi terbarukan yang dapat digunakan dalam skala besar secara ekonomis adalah energi nuklir (PLTN), panas bumi (PLTP) dan tenaga air (PLTA). Di Indonesia, pembangunan PLTN masih dalam tahap penelitian dan persiapan menghadapi tantangan.

Pembangunan PLTA kembali diintensifkan dengan skema pembangunan multiguna (*multipurposed*) antara fungsi bendungan untuk konservasi air, pengendalian banjir, irigasi air baku dengan fungsi PLTA. Sesuai dengan rencana yang telah mulai dijalankan, portofolio inisiasi awal rencana *multipurposed project* di atas pada tahun 2014-2019 adalah sebanyak 65 bendungan dengan potensi PLTN sebanyak 464 MW. Pada tahun 2015, telah dimulai inisiasi proyek *multipurposed* di Waduk Jatigede, Sumedang yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan kapasitas PLTA sebesar 110 MW yang dibangun oleh PT PLN Persero.

Untuk panas bumi, Indonesia merupakan negara dengan jumlah gunung berapi aktif maupun tidak aktif terbanyak di seluruh dunia, dan oleh karenanya memiliki potensi sumber energi panas bumi yang paling besar. Studi para ahli menunjukkan total potensi panas bumi di Indonesia yang dapat dimanfaatkan adalah setara 27.000 MW, atau setara dengan sekitar 40% potensi panas bumi dunia.

3. Exploiting potential renewable energy sources

There are five generation technologies commonly used, namely geothermal potential, water potential (waterfalls), nuclear power, solar energy and wind power. The renewable energy sources that can be used on a large scale economically are nuclear energy (PLTN), geothermal energy (PLTP) and hydropower (PLTA). In Indonesia, construction of nuclear power plants is still in the research and preparation stage that encounter challenges.

The construction of hydropower plants has been re-intensified in mixed development schemes, which combine the functions of dams for water conservation and flood control with the function of hydropower generation. In accordance with plans that have already been initiated, the portfolio of the initiation of the above multipurpose project in 2014-2019 involved 65 dams with a nuclear power plant potential of 464 MW. In 2015, the multipurpose project was initiated in Jatigede Dam, Sumedang, being built by the Ministry of Labor and Public Housing, with a hydropower plant capacity of 110 MW, being built by PT PLN Persero.

For geothermal energy, Indonesia has the most active and dormant volcanoes in the world and therefore has the greatest potential for geothermal energy generation. Studies by experts have identified total useable geothermal potential in Indonesia equivalent to 27,000 MW, or the equivalent of approximately 40% of the world's potential geothermal energy.

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW - for Sustainable Development

Hingga akhir tahun 2015, total potensi panas bumi yang telah dimanfaatkan melalui pembangunan dan pengoperasian instalasi pembangkit panas bumi di Indonesia adalah 1.400 MW, atau baru 5% dari total potensi daya yang tersedia. Dari angka tersebut, instalasi pembangkit PLN berkontribusi sebesar 570 MW yang saat ini telah beroperasi dan memasok daya listrik ke sistem kelistrikan nasional.

Sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional 2025, PLN bersama dengan Pemerintah menargetkan energi listrik dari pemanfaatan panas bumi akan mencapai 7,3 % dari total 23% energi terbarukan di tahun 2025.

Selain itu, Kami juga semakin mengintensifkan pemanfaatan angin sebagai sumber energi bagi pembangkitan listrik melalui pembangunan PLTB (Pusat Listrik Tenaga Bayu) di area tertentu yang memiliki karakteristik pergerakan udara yang cukup intens.

4. Pemanfaatan *renewable alternative fuel*

Dalam rangka mengurangi besaran subsidi akibat penggunaan bahan bakar minyak pada pembangkit PLTD, maka diterapkan substitusi BBM dengan biodiesel, yaitu suatu *renewable alternative fuel* yang diformulasikan khusus untuk mesin diesel dan terbuat dari tumbuhan (kelapa sawit), sebagai contoh PLTD Pangkalan Bun di Kalimantan Tengah.

Dengan tingkat harga saat ini, penggunaan biodiesel akan mampu mengurang Biaya Pokok Penyediaan (BPP) hingga sebesar 20%. Secara nasional, PLN juga telah merintis kerjasama bagi pemasokan biodiesel dengan kalangan produsen minyak kelapa sawit. Implementasi rencana tersebut akan dilakukan secara bertahap.

5. Pemanfaatan biomassa dan biogas

Potensi biomassa di Indonesia tercatat sebesar 32.654 MW dan baru sebesar 116,5 MW yang telah dikembangkan. Mempertimbangkan potensi tersebut, maka Kami terus berupaya memanfaatkan potensi biomassa dan biogas untuk mengurangi pemanfaatan energi fosil khususnya bahan bakar minyak (BBM) pada daerah-daerah dan kepulauan yang memiliki ketergantungan terhadap BBM serta masih memiliki rasio elektrifikasi rendah. Pembangkit berbasis bioenergi ini juga turut membantu pengelolaan sampah dan limbah dengan memanfaatkan sampah kota, limbah kehutanan, limbah pertanian, industri kelapa sawit, industri kertas, industri tapioka dan lain sebagainya sebagai sumber energi.

By the end of 2015, the total amount of geothermal potential that had been exploited through the construction and operation of geothermal power plants in Indonesia was 1,400 MW, or just 5% of the total available potential power. From these figures, PLN power plants accounted for only 570 MW currently operating and supplying electricity to the national power grid.

In accordance with the 2025 National Energy Policy, PLN and the Government will target electrical energy sourced from geothermal power reaching 7.3% of the total 23% of renewable energy by 2025.

In addition, we are also intensifying the use of wind as an energy source for electricity generation through the construction of wind farms in certain areas which have sufficiently intense air movement.

4. Utilization of *renewable alternative fuels*

In order to reduce the amount of the subsidy derived from the use of petroleum in diesel-fired power plants, we are substituting biodiesel for diesel, which is a renewable alternative fuel that is specially formulated for diesel engines and made from plants (oil palms), for example at Pangkalan Bun Power Plant in Central Kalimantan.

With the current price level, the use of biodiesel will be able to reduce the cost of production by up to 20%. Nationally, PLN also has pioneered cooperation between suppliers of biodiesel and palm oil producers. Implementation of this plan will be carried out in stages.

5. Utilization of biomass and biogas

Biomass potential in Indonesia stood at 32,654 MW while only 116.5 MW has been developed. Considering this potential, We continue to work toward exploiting the potential of biomass and biogas to reduce the use of fossil fuel energy, especially fuel oil (BBM) in the regions and islands that are dependent on fuel and still have a low electrification ratio. Bioenergy-based power generation also helps with waste management by utilizing urban waste, forestry waste, agricultural waste and the waste generated in the palm oil industry, the paper industry, tapioca industry and other industries as a source of energy.

6. Sampah sebagai sumber energi

Kami juga memiliki rencana lain dalam mengatasi kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat Indonesia, yakni mengembangkan penggunaan energi baru yang berasal dari olahan sampah.

7. Peningkatan efisiensi kegiatan transmisi/distribusi dan kegiatan pendukung operasional

Kami juga menerapkan beberapa inovasi dalam proses transmisi dan distribusi dengan mengaplikasikan hasil perkembangan teknologi pada perlengkapan instalasi transmisi dan distribusi, sehingga kinerjanya semakin efisien. Perbaikan kualitas transmisi dan distribusi akan menurunkan susut jaringan, sehingga listrik yang disalurkan ke pengguna meningkat yang pada gilirannya juga membuat emisi CO₂ per kWh listrik yang disalurkan menurun.

Kami berupaya menerapkan kegiatan pendukung operasional yang semakin ramah lingkungan, dengan menerapkan ide-ide inovatif dari hasil penyelenggaraan lomba inovasi. Beberapa dari inovasi yang diterapkan tersebut mengaplikasikan perkembangan teknologi informasi untuk mendukung percepatan proses pencatatan dan monitoring logistik untuk keperluan pemeliharaan, sehingga unjuk kerja sistem distribusi senantiasa terjaga. Aplikasi lainnya ditujukan untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi pencatatan data administratif, sehingga kegiatan pendukung operasional dapat berlangsung lebih efektif, efisien dan hemat energi.

Seperti telah disinggung sebelumnya, prakarsa untuk menekan penggunaan energi tak langsung untuk keperluan penerangan dan pengaturan batas suhu pendingin gedung kantor turut berdampak pada berkurangnya jumlah emisi gas rumah kaca. Demikian juga penerapan konsep kantor dengan sedikit kertas (*paperless working process*) dapat mengurangi jumlah limbah dari kegiatan administratif.

6. Waste as an energy source

We also have other plans to address the Indonesian public's demand for electricity by developing a new energy from processed garbage.

7. Efficiency Improvement in transmission / distribution and operational support activities

We have also implemented several innovations in the transmission and distribution process by applying the results of technological developments on transmission and distribution network equipment, so performance is more efficient. Improvements to the quality of transmission and distribution reduce loss, so the amount of electricity supplied to users increases, which in turn also results in declining figures for CO₂ emissions per kWh of electricity distributed.

We are striving to implement operational support activities that are more environmentally friendly by implementing innovative ideas resulting from innovation competitions. Several of the innovations that have been applied support the development of information technology that encourages accelerated logistics recording and monitoring for maintenance requirements, thus the distribution system performance is always maintained. Other applications are intended to speed up and improve the accuracy of administrative data recording, so that operational support activities can take place more effectively, efficiently and save energy.

As was mentioned earlier, initiatives to suppress indirect energy use for lighting purposes and by setting limits on office building cooling temperatures have over time reduced greenhouse gas emissions. Likewise, the application of a minimal paper office (*paperless working process*) concept can reduce the amount of waste from administrative activities.

LIMBAH SAWIT UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK OIL PALM WASTE TO GENERATE ELECTRICITY

Mempertimbangkan luasnya area perkebunan sawit di Indonesia, Kami merintis pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Sawit (PLTBS). PLTBS adalah PLTU yang berbahan bakar biomassa sawit. Limbah kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkitan. Kemudian listrik yang dihasilkan dapat dibeli oleh PLN. Pembelian energi listrik oleh PLN dari pembangkit swasta dilakukan dengan dua skema, yaitu pembelian energi *Independent Power Producer* (IPP) dan *Excess Power*.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memanfaatkan sumber biomassa sawit di kawasan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi sumber daya energi terbarukan, salah satunya berasal dari limbah perkebunan sawit. Berdasarkan data Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, luas areal perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah lebih dari 200 ribu hektar yang terdiri dari lahan milik swasta dan rakyat.

Dalam rangka menginisiasi pemanfaatan potensi biomassa kelapa sawit di Bangka Belitung, Kami menggelar seminar "Investasi energi dari biogas dan biomassa perkebunan sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui skema IPP dan Excess Power".

Melalui seminar tersebut diharapkan tumbuhnya pemahaman kepada pemilik, pemegang keputusan dan pengusaha perkebunan sawit yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang hal-hal yang diatur dalam Permen No.27 Tahun 2014 dan prosedur jual beli tenaga listrik dari PLTBg dan PLTBm. Dengan demikian diharapkan kerja sama bisnis energi antara PLN Wilayah Bangka Belitung dengan pemilik/pengusaha perkebunan sawit dapat berjalan baik dan lancar. Bentuk nyatanya diharapkan terjadi Power Purchase Agreement (PPA).

BABAK BARU TENAGA BAYU

Melalui program "35.000 MW untuk Indonesia", PLN dan Pemerintah berkomitmen menciptakan kemandirian energi Indonesia dengan pemanfaatan secara optimal potensi energi baru dan terbarukan. Salah satunya adalah rencana pembangunan PLTB Samas. PLTB ini akan menjadi salah satu tonggak sejarah kelistrikan Indonesia, karena menjadi PLTB pertama di Indonesia dengan kapasitas besar (50 MW).

PLTB Samas dikembangkan oleh PT UPC Yogyakarta Bayu Energi, perusahaan joint venture antara PT Binatek Energi Terbarukan dan UPC Renewables dengan skema penunjukan langsung, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2006 jo No. 04 tahun 2007. PLTB ini akan dibangun di Desa Srigading dan Desa Gadingsari, Kecamatan Sanden, serta Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pembangunan PLTB Samas membutuhkan biaya investasi sebesar USD 134 juta dengan porsi pinjaman luar negeri sebesar 75%. *Financial closing* diharapkan tercapai pada bulan Mei 2016 dan segera dilanjutkan dengan tahapan konstruksi fisik di lapangan.

PLTB Samas dijadwalkan beroperasi komersial pada kuartal II tahun 2018 pada sistem kelistrikan Jawa Bali. Dengan faktor ketersediaan 27,4%, PLTB Samas diharapkan dapat membangkitkan energi listrik sebesar 120 GWh per tahun, dengan perkiraan nilai transaksi sebesar USD 16,6 juta per tahun.

Rencananya, PLTB Samas akan membangun 33 tower kincir angin yang tingginya mencapai 120 meter. Setiap tower akan mampu menghasilkan daya sebesar 2 juta watt yang jumlahnya merupakan yang terbesar di Indonesia, sedangkan kapasitas keseluruhannya ditargetkan oleh pemerintah dapat mencapai 50 MW.

Considering the vast expanse of oil palm plantations in Indonesia, we have initiated Oil Palm Biomass Power Plants (PLTBS), which are powered by oil palm biomass. Oil palm waste can be utilized as a fuel in power generation. The electricity that is generated can be purchased by PLN. PLN purchases electrical energy from private generation through two schemes, namely Independent Power Producers (IPP) and Excess Power.

One of the efforts made to utilize oil palm biomass takes place in the Bangka Belitung region. Bangka Belitung Islands have potential renewable energy resources, one of which is from oil palm plantation waste. Based on data from the Department of Agriculture, Plantations and Livestock, Bangka Belitung province has more than 200 thousand hectares of oil palm plantations, owned privately and by the local communities.

To initiate utilization of oil palm biomass potential in Bangka Belitung, we held a seminar titled "Energy Investment from biogas and oil palm plantation biomass in Bangka Belitung province through the IPP and Excess Power schemes".

We hope that this seminar will develop understanding among the owners, decision makers and oil palm plantation entrepreneurs in Bangka Belitung Islands province on matters regulated in Government Regulation No. 27 of 2014 and on procedures for the sale and purchase of electrical power from PLTBg and PLTBm. We expect that this way, energy business cooperation between PLN Bangka Belitung and the owners / entrepreneurs of oil palm plantations will run smoothly. Actual manifestation of this is expected through Power Purchase Agreements (PPA).

A NEW CHAPTER IN WIND POWER

Through the "35,000 MW for Indonesia" program, PLN and the Government are committed to creating energy independence for Indonesia with optimal utilization of new and renewable energy potential. One part of this plan is the development plan for a power plant in Samas powered by wind (PLTB). This PLTB will be a historical milestone for Indonesia's electricity industry as it will be the first large capacity (50 MW) wind powered plant in Indonesia.

PLTB Samas will be developed by PT UPC Yogyakarta Bayu Energi, a joint venture between PT Binatek Energi Terbarukan and UPC Renewables through a direct appointment scheme based on Energy and Mineral Resources Ministerial Decree No. 01 of 2006 jo No. 04 in 2007. This PLTB will be built in Srigading village and Gadingsari village, Sanden district, and Poncosari Village, Srandakan district, Bantul regency, Yogyakarta.

PLTB Samas construction requires an investment of USD 134 million, 75% funded by foreign loans. Financial closing is expected in May 2016 and will be immediately followed up by the physical construction phase in the field.

PLTB Samas is scheduled for commercial operation in the second quarter of 2018 in the Java-Bali grid. With an availability factor of 27.4%, PLTB Samas is expected to generate 120 GWh electricity per year with an estimated transaction value of USD 16.6 million per year.

Thirty-three wind turbines are planned for PLTB Samas, each with a height reaching 120 meters. Each wind turbine will be able to generate 2 million watts, the largest amount in Indonesia, while the government is targeting overall capacity of up to 50 MW.



BIAYA UNTUK PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN (G4-EN31)

PLN telah mengalokasikan dana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Biaya pengelolaan dan pemantauan ini dimasukkan ke dalam komponen biaya operasional pembangkit dari masing-masing unit bisnis. Total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan lingkungan hidup selama tahun 2015 adalah sebesar Rp116,3 miliar, mencakup kegiatan pembuatan dokumen lingkungan, realisasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, relisasi penelitian di bidang lingkungan serta realisasi kegiatan penghijauan di sekitar area operasi pembangkitan maupun area pendukung lainnya.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CONSERVATION EXPENSES (G4-EN31)

PLN has allocated funds for environmental management and monitoring. The cost of this management and monitoring is incorporated into the plant operating cost component for each business unit. Total costs incurred for environmental activities during 2015 amounted to Rp116.3 billion, covering preparation of environmental documentation, environmental management and monitoring activities, environmental research and reforestation in areas surrounding power generation operations and support areas.

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW – for Sustainable Development



MENGEMBANGKAN DAN MENGELOLA KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

DEVELOPING AND MANAGING HUMAN
RESOURCE COMPETENCY

halaman page **156 - 175**



Kami memandang sumber daya manusia (SDM) adalah aset utama yang menentukan keberhasilan realisasi rencana pengembangan usaha. Oleh karenanya seluruh biaya pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM dipandang sebagai investasi masa depan. Terlebih lagi saat tengah menjalankan Program 35.000 MW, Kami meningkatkan intensitas pengembangan kompetensi dengan menjalankan program pelatihan terpadu, termasuk mengenalkan pola *Knowledge Management* serta menempatkan SDM sebagai *Human Capital*.

We view our human resources (HR) as a prime asset in determining the successful realization of business development plans. For this reason, we view all costs related to HR competency management and development as an investment in the future. Further, in the midst of implementing the 35,000 MW Program, We are increasing the intensity of competency development by implementing integrated training programs, including the introduction of Knowledge Management and viewing all HR as Human Capital.

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW – for Sustainable Development

Sumber daya manusia (SDM) bagi PLN adalah mitra sekaligus aset yang akan mendukung jalannya operasional perusahaan secara berkelanjutan guna mewujudkan visi dan misi Perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karenanya pengembangan kompetensi SDM menjadi isu strategis seiring dengan meningkatnya permintaan listrik, pertumbuhan usaha, dan luasnya cakupan operasional perusahaan.

Terlebih lagi dengan hadirnya Program 35.000 MW yang sudah tentu memerlukan kesiapan seluruh jajaran SDM PLN yang kini tersedia maupun yang kelak akan ditambah, seiring dengan perkembangan realisasi pembangunan proyek-proyek pembangkit berikut sarana transmisi dan distribusinya.

Perkembangan terakhir di bidang ketenagalistrikan nasional menunjukkan Pemerintah mulai menjalankan rencana pemilahan kategori ‘masyarakat mampu’ dan ‘tidak mampu/miskin’ bersamaan dengan rencana pengubahan skema subsidi. Suatu perkembangan yang akan membuat Kami harus bekerja lebih keras dan lebih cerdas untuk menunjukkan peningkatan kinerja saat skema tersebut direalisasikan. Hal ini mengingat pencabutan subsidi juga mengisyaratkan semakin cepatnya realisasi pembangunan Program 35.000 MW dan semakin meningkatnya tuntutan peningkatan kualitas layanan dan keandalan sistem ketenagalistrikan.

Kami meyakini bahwa salah satu elemen strategis dalam menjawab tantangan usaha di masa mendatang, termasuk dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan berdedikasi. Oleh karenanya Kami telah menyusun rencana strategis pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia.

RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN SDM

Kami telah merancang dan menerapkan strategi pengembangan kompetensi dengan fokus kepada: (i) memenuhi kualitas SDM sesuai kebutuhan organisasi (ii) mengelola pegawai yang berkinerja rendah, (iii) outsourcing/kebijakan kemitraan bisnis dan metodologinya, (iv) menciptakan kemitraan dengan institusi pendidikan dan (v) membangun sistem perekruit pegawai yang kompetitif bagi *fresh graduate*.

Sebagai organisasi yang terus berkembang, PLN membutuhkan tambahan pegawai yang signifikan, selaras dengan penambahan pembangkit baru, perluasan jaringan, dan penambahan jumlah pelanggan. Kami menerapkan dua

Human resources (HR) to PLN are both partners and assets that continually support the company's operations for the long-term achievement of its vision and mission. Therefore, HR competency development is a strategic issue that runs in synchronicity with increasing demand for electricity, business growth and expansion of the company's operating reach.

This is even more important now with the 35,000 MW Program, which of course requires the readiness of PLN's human resources, both current and those to be recruited. HR readiness is also required for the growing number of power plants being constructed and their transmission and distribution facilities.

The latest developments in national electrification demonstrate that the Government has started to implement plans to separate society into capable and marginalized / poor categories, along with plans to change the subsidy scheme. This is a development that results in the Company having to work harder and smarter to demonstrate improved performance as these schemes are realized. The removal of the electricity subsidy also signals the accelerated realization of the 35,000 MW Program and increased demand for improved service quality and reliability in the electrical power system.

We believe that one of the strategic elements to answer these future business challenges, including improving operational efficiency and effectiveness, is the availability of competent and dedicated human resources. Therefore, We have prepared a strategic human resource development and management plan.

STRATEGIC PLAN FOR HR MANAGEMENT

We have designed and implemented a competency development strategy that is focused on: (i) meeting the need for high quality HR in accordance with organization requirements, (ii) managing employees with poor performance, (iii) outsourcing / business partner policy and its methodology, (iv) establishing partnerships with educational institutions, and (v) establishing a competitive employee recruitment system for fresh graduates.

As a continually evolving organization, PLN requires significant numbers of new employees in line with the addition of new power plants, the expansion of the network and increasing numbers of customers. We apply two main

pendekatan utama dalam memenuhi kebutuhan pegawai, yakni: (1) memastikan bahwa tenaga kerja yang ada telah dioptimalkan atau memastikan bahwa setiap orang bekerja secara efektif dan efisien dengan produktivitas yang setara dengan perusahaan yang mempraktikkan standar terbaik di dunia. (2) melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja sesuai kebutuhan organisasi.

Penambahan pegawai ini akan meningkat pesat seiring dengan direalisasikannya secara resmi Program 35.000 MW di tahun 2015 yang terus berlanjut hingga tahun 2019. Dalam kaitan ini Kami telah mengidentifikasi kecukupan SDM untuk fungsi-fungsi strategis utama dan mempersiapkan skenario peningkatan kompetensi maupun penambahan tenaga kerja. Kami juga telah menyiapkan program untuk menjamin lahirnya generasi pemimpin perusahaan masa depan melalui berbagai program pengelolaan SDM dengan tujuan meningkatkan kompetensi pekerja, memberi kompensasi sesuai kompetensi, menciptakan suasana kerja yang kondusif dan menjamin kesejahteraan pekerja pada masa bakti maupun purna bakti.

ROAD MAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kami telah menyusun Road Map SDM sebagai acuan dalam melakukan review dan pembaruan rencana pengelolaan yang dilakukan secara berkala. Penyusunan Road Map dilakukan dengan memperhatikan kondisi perusahaan terkini dan rencana strategis perusahaan dalam beberapa tahun kedepan.

Dalam implementasinya, setiap pelaksanaan item program selalu mempertimbangkan dan memperhatikan kebijakan umum pengelolaan SDM, yaitu : "Pengembangan sumber daya manusia PLN selalu mengikuti kondisi perusahaan terutama mengingat lokasi operasional yang tersebar luas di wilayah Indonesia. Pelaksanaan penambahan pegawai maupun peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai disesuaikan dengan kebutuhan PLN baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang".

Adapun Road Map Pengembangan SDM PLN adalah sebagai berikut:

approaches to meet our demand for employees, namely: (1) ensuring that current manpower is optimized to ensure that every person works effectively and efficiently with productivity that is commensurate to a company practicing global best standards, (2) improving the quality and quantity of employees based on organization requirements.

The number of additional employees will rise very rapidly in line with the official realization of the 35,000 MW Program in 2015, which will be ongoing until 2019. Related to this, We have identified the amount of HR we require for the key strategic functions and have prepared a scenario to improve competency and increase the workforce. We have also prepared a program to ensure the birth of a new generation of future company leaders through HR management programs designed to improve employee competency, provide compensation in accordance with competency, create a positive work environment and ensure employee welfare both while working and in retirement.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ROAD MAP

We have compiled an HR Road Map to serve as reference for the periodic review and renewal of the management plan. This road map has been prepared taking into account the current condition of the company and strategic plans for several years to come.

In its implementation, the execution of each program item will also consider and take into account general HR management policy, namely: "The development of PLN Human Resources always follows conditions in the company, in particular bearing in mind that operational locations are spread across Indonesia. Adding to the number of employees and improving employee quality and quantity will be in accordance with PLN requirements for the mid to long term."

The PLN Human Resource Development Road Map is as follows:

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW – for Sustainable Development

ROADMAP SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES ROADMAP 2015-2019

Pilar SDM
HR Pillars

2015

2016

2017

2018

2019

Kinerja
Performance

HR Audit dan Survei
Strategis
HR Audit and
Service Strategy

Pengembangan Performa Manajemen secara Sistematis
Developing Performance Management Systematically

Siklus Tahunan Perusahaan
Annual Corporate Cycle

Manajemen Integrasi Produktifitas
Integrated Productivity Management

Penguatan dan Penyesuaian
Strengthening Alignment

Penghargaan
Award

Remunerasi Pegawai Berbasis Bobot Jabatan
Employee Remuneration Based on Job
Weighting

Evaluasi dan Penyempurnaan Remunerasi Berdasarkan Kinerja
Evaluation and Improvement to the Performance-Based Remuneration

Hubungan
Industrial
Industrial
Relations

Pengembangan
Materi Pelatihan
Hubungan Industrial
Developing Industrial
Relations Training
Material

Pelatihan Hubungan Industrial
Industrial Relations Training

Pengembangan Data Base Hubungan Industrial
Industrial Relations Database Development

Perundingan
Perjanjian Kerja
Bersama
Collective Bargaining
Agreement Meeting

HR Audit dan Survei
Strategis
HR Audit and
Service Strategy

▶

Perundingan
Perjanjian Kerja
Bersama
Collective Bargaining
Agreement Meeting

▶

HR Audit dan Survei
Strategis
HR Audit and
Service Strategy

▶

▶

▶

Kompetensi
Competence

Evaluasi serta Penyempurnaan Sistem Pengembangan Kompetensi dan Manajemen Suksesi Jabatan
Evaluating as well as improving Competency-based Development System and Job Succession Management

Pengembangan Sistem Pengelolaan Karir
untuk Technical Expert dan Specialist
Developing Career Management System for
Technical Experts and Specialists

▶

▶

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SYSTEM (HCMS)

Sebagai alat untuk menjalankan program pengembangan SDM agar menjadi insan-insan profesional, berkompeten dan berintegritas tinggi guna mendukung strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Perseroan dengan internalisasi tata nilai dan budaya perusahaan, Kami menerapkan pendekatan *Human Capital Management System* (HCMS) yang bercirikan kompetitif, adil dan transparan.

Penyusunan dan implementasi HCMS sebagai acuan dalam menerapkan Road Map Pengembangan SDM tersebut sangat menjunjung tinggi kesetaraan kesempatan bagi seluruh pegawai untuk berkembang sesuai dengan kompetensinya, serta sesuai dengan butir-butir Kebijakan Pengelolaan SDM PLN.

HCMS memiliki 4 pilar utama, yakni: i) Sistem Manajemen Kinerja, ii) Sistem Penghargaan/Remunerasi, iii) Sistem Hubungan Industrial, iv) Sistem Kompetensi.

1. Manajemen Kinerja

PLN telah menerapkan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai dengan tujuan: i) mewujudkan penilaian kinerja yang dapat membangun dan membina budaya pembelajar dan berprestasi serta memotivasi pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan kontribusi bagi Perseroan, ii) sebagai pedoman untuk mengevaluasi kinerja pegawai secara lebih transparan, terukur, dan obyektif sehingga Perseroan dapat memberikan kompensasi dan atau penghargaan yang berkeadilan dan sepadan dengan Kinerja Pegawai selama bekerja dalam kurun waktu 1 (satu) semester.

Selain itu, PLN menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) sebagai indikator keberhasilan dari sebuah organisasi/unit kerja/pejabat pimpinan Unit dan individu yang ada dalam Perusahaan. Target KPI adalah target kinerja yang menyatakan standar dan kesepakatan hasil yang diharapkan dan keselarasannya dengan *job description* jabatan adalah yang utama untuk memastikan setiap pegawai memiliki pekerjaan yang sesuai dan selaras dengan tujuan utama dibentuknya jabatan tersebut. Kami mengembangkan KPI melalui *value drivers* yang terkait dengan sasaran strategis.

2. Sistem Remunerasi

Kami menetapkan besaran remunerasi Pegawai dengan mengacu kepada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 007.K/DIR/2008 tentang Sistem Remunerasi Pegawai beserta peraturan perubahannya yang terakhir yaitu SK Direksi No.0035.K/DIR/2014, yakni setiap pegawai berhak atas kompensasi berdasarkan:

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SYSTEM (HCMS)

As a tool to implement the human resource development program so that all employees are professional, competent and of high integrity to support the Company's short, mid and long-term strategies, as well as internalizing the Company's corporate values and culture, We use the Human Capital Management System (HCMS) approach, which highlights competitiveness, fairness and transparency.

The formulation and implementation of the HCMS as a reference for the HR Development Road Map strongly upholds the right of every employee to equal opportunity to develop in accordance with their competence, as well as in accordance with points in the PLN HR Management Policy.

HCMS has four main pillars, namely: i) Performance Management System, ii) Remuneration / Award System, iii) Industrial Relations System, iv) Competency System.

1. Performance Management

PLN implements its Employee Performance Management System with the aim of: i) establishing performance assessment that can build and foster a culture of leaning and achievement, while motivating employees to improve their competency and contribution to the Company, ii) as a guideline to assess employee performance more transparently, in a measured manner and objectively, so that the Company can provide compensation and/or awards that are fair and appropriate to the Employee's Performance during the period of 1 (one) semester.

Further, PLN had established Key Performance Indicators (KPI) as indicators of the success of an organization / work unit / unit leader and individuals within the Company. KPI targets are performance targets that state standards and agreed results that are expected and appropriate for the job description and are the main tool to ensure that every employee has a job that is appropriate and in line with the main objective of that role. We have developed the KPIs through value drivers related to strategic targets.

2. Remuneration System

We determine the amount of employee remuneration by referring to PT PLN (Persero) Board of Directors' Decision Num. 007.K/DIR/2008 concerning the Employee Remuneration System and regulatory amendments, the most recent of which was Board of Directors' Decision Num. 0035.K/DIR/2014, in which each employee has the right to compensation based on:

- a. *Pay for person* (P1), merupakan kompensasi dalam bentuk uang setiap bulan untuk menghargai kompetensi, pengalaman kerja dan masa kerja yang besarannya ditentukan berdasarkan level grade dan skala grade;
- b. *Pay for position* (P2), diberikan sebagai Kompensasi atas bobot jabatan yang dibebankan kepada Pegawai yang menggambarkan *know how, problem solving, accountability*. Rumusan umum penetapan P2 adalah = indeks daerah x koefisien posisi x tarif posisi.
- c. *Pay for performance* (P3), diberikan sebagai kompensasi atas prestasi kerja Pegawai berdasarkan hasil kinerja yang dicapai baik secara individu atau secara kelompok yang merupakan kontribusi nyata dan terukur.

Selain remunerasi tersebut, Kami memberikan paket jaminan sosial pegawai, meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua; Jaminan Pensiu; Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; dan Bantuan Ganti Rugi.

Untuk jaminan Pensiu, maka bentuk pengelolaannya melalui dua skema, yakni Dana Pensiu Iuran Pasti dan Dana Pensiu Manfaat Pasti.

3. Hubungan Industrial

PLN berupaya membangun hubungan ketenagakerjaan yang sehat, melalui pembahasan dan penyusunan kerangka kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB disusun bersama-sama perwakilan pekerja dalam Serikat Pekerja, yang akan ditinjau secara berkala tiap 2 (dua) tahun sekali. Penjelasan lebih lanjut mengenai Hubungan Industrial ini dapat dijumpai dalam uraian "Kebijakan Pengelolaan SDM".

4. Sistem Pengembangan Kompetensi dan Karir

PLN melaksanakan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi secara konsisten dengan menerapkan ketentuan bahwa pengembangan eksekutif dilakukan melalui peningkatan kompetensi SDM sesuai persyaratan yang ditentukan untuk setiap level, dan pengelolaan calon pemimpin masa depan dilakukan melalui penyempurnaan sistem talent management.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KARIR

Program Pengembangan Kompetensi dan Karir dilakukan dalam beberapa tahapan, dengan penjelasan ringkas sebagai berikut.

- a. *Pay for person* (P1), monthly financial compensation that respects competency, work experience and period of employment, the amount of which is determined based on grade level and scale;
- b. *Pay for position* (P2), given as compensation for position scale paid to Employees who demonstrate know how, problem solving, accountability. The general calculation for P2 = regional index x position coefficient x position tariff.
- c. *Pay for performance* (P3), provided as compensation for employee work achievement based on individual or group performance results that provide a real and measureable contribution to the Company.

In addition to the above remuneration, we provide our employees with a social welfare package that includes: workplace accident insurance, life insurance, pension fund contribution, pension, medical insurance and indemnity insurance.

The pension program is managed with two schemes, Defined Contribution Pension Fund and Defined Benefit Pension Fund.

3. Industrial Relations

PLN strives to build healthy industrial relations through discussion and the compilation of a cooperative framework that is contained in the Collective Labor Agreement (CLA). The CLA was prepared with employee representatives from the Labor Union and is reviewed once every 2 (two) years. Further explanation of Industrial Relations can be found in the description of "HR Management Policy".

4. Competency and Career Development System

PLN consistently implements an HR management system based on competency and applies provisions that executive development is carried out based on HR competency improvement in accordance with predetermined conditions at every level, and the management of potential future leaders is undertaken by refining the talent management system.

COMPETENCY AND CAREER DEVELOPMENT PROGRAM

The Competency and Career Development Program is executed in several stages, as explained below.

1. Program Rekrutmen

Proses rekrutmen dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan tenaga kerja jangka panjang dengan melibatkan pihak ketiga dan dilakukan melalui pemenuhan aspek administrasi, aptitude test, psikotes, tes kesehatan, dan wawancara. Kebijakan umum yang diterapkan adalah proses penerimaan pegawai berawal dari kebutuhan unit bisnis (user) dan pada tahap akhir (wawancara) melibatkan user, serta menekankan persamaan kesempatan kepada seluruh pihak untuk dapat berkompetisi dan mengikuti proses penyaringan calon pegawai PLN dengan baik.

Beberapa program yang dilakukan untuk menjaring calon pegawai dengan kompetensi dasar yang lebih baik adalah:

1. Kerjasama rekrutmen terbuka tingkat S1/D4/D3 melalui even acara Job Fair dan career expo diantaranya di Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan Politeknik Negeri Bandung;
2. Rekrutmen terbuka tingkat S1/D4/D3 di beberapa kota besar di Indonesia meliputi kota Medan, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Makassar dan Manado;
3. Rekrutmen khusus bekerjasama dengan beberapa universitas seperti UI, UGM, ITB, Politeknik Negeri Bandung, Undip, Politeknik Negeri Semarang, ITS, Politeknik Negeri Malang;
4. Rekrutmen tingkat SMA/SMK yang dilaksanakan oleh unit PLN di seluruh Indonesia;
5. Program D3 kerjasama dengan lima perguruan tinggi yaitu Universitas Diponegoro, Politeknik Negeri Semarang, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Politeknik Negeri Malang dan Politeknik Negeri Ujung Pandang.

Melalui program tersebut, telah berhasil merekrut 4.603 orang calon pegawai, terdiri dari 2.267 orang untuk tingkat S1/D4/D3 dan 2.336 orang untuk tingkat SMA/SMK.

Berikut ini adalah tabel realisasi pencapaian rekrutmen tahun 2015. [G4-LA1]

Pagu Ceiling					Realisasi Realization					Pencapaian Achievement	
S2	S1	D3	SMA	TOTAL	S2	S1	D3	SMA	TOTAL	%	
4	949	1.241	2.203	4.397	7	1.024	1.243	2.336	4.603	105%	

1. Recruitment Program

The recruitment process involves third parties and is based on long-term workforce requirement plans. It is implemented with administrative aspects, aptitude tests, psychometric testing, health checkups and interviews. The general policy applied sees the recruitment process start from the needs of the business unit (user) with the final stage (the interview) involving the user, as well as prioritizing equal opportunities for all parties to compete and take part in the PLN potential employee filtering process.

Several programs are implemented to better filter potential employees with appropriate competency, such as:

1. Open recruitment cooperation for S1/D4/D3 (diploma and undergraduate level) through Job Fairs and career expos, including those at Gadjah Mada University, University of Indonesia, Ten November Technology Institute and Bandung State Polytechnic;
2. Open recruitment for S1/D4/D3 level in several large cities in Indonesia, including Medan, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Makassar and Manado;
3. Special recruitment in cooperation with several institutes of higher learning, such as UI, UGM, ITB, Bandung State Polytechnic, Undip, Semarang State Polytechnic, ITS, Malang State Polytechnic;
4. High school level recruitment implemented by PLN units across Indonesia;
5. D3 (three-year diploma) Program in cooperation with five institutes of higher learning: Diponegoro University, Semarang State Polytechnic, Ten November Technology Institute, Malang State Polytechnic and Ujung Pandang State Polytechnic.

Through these programs, We have recruited 4,603 potential employees, comprising 2,267 at S1/D4/D3 level and 2,336 at high school level.

Following is a table detailing recruitment achievements for 2015. [G4-LA1]

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW - for Sustainable Development

2. Program Pendidikan dan Pelatihan [G4-LA9]

Kami mengembangkan sistem pembelajaran berjenjang sesuai kebutuhan organisasi, dimana jenis pelatihan terbagi atas beberapa jenjang mulai dari pelatihan khusus operasional hingga pelatihan manajerial. Adapun jenis pendidikan dan pelatihan meliputi :

Diklat Seleksi Pegawai Baru

Diklat yang dilaksanakan untuk memberikan pembekalan kepada calon pegawai. Diklat ini dilakukan oleh PT PLN (Persero) Pusdiklat dengan mekanisme diklat yang dibagi berdasarkan tingkat pendidikan dan bidang profesi.

Diklat Profesi

Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi bidang yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

Diklat Penunjang

Diklat yang dilaksanakan untuk menambah kompetensi yang dipersyaratkan dalam kebutuhan kompetensi jabatan, sehingga nantinya pegawai dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan jabatan.

Diklat Penjenjangan

Diklat yang dilakukan dalam rangka memenuhi Kebutuhan Kompetensi Jabatan bagi pegawai struktural yang dilaksanakan dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dengan PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Corporate University) sebagai pelaksana utama. Diklat ini terdiri dari 5 jenis pelatihan, yakni: Supervisory Dasar, Supervisory Atas, Manajemen Dasar, Manajemen Menengah dan Manajemen Atas.

Diklat Pembekalan Masa Purna Bakti

Diklat ini diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa purna bakti, bertujuan agar pegawai lebih siap dalam menghadapi pensiun serta mempunyai kegiatan yang positif untuk mengisi masa pensiun.

3. Program Pengembangan Eksekutif;

Setiap tahun Perusahaan menyelenggarakan pelatihan khusus dalam rangka promosi untuk mengisi jabatan tertentu dan sebagai bagian dari proses kaderisasi pegawai. Selain Optimasi Pegawai, Kami juga diperlukan juga percepatan pembentukan kader-kader pemimpin masa depan. Program yang dijalankan meliputi : Talent Management dan Perancangan Diklat Penjenjangan bagi golongan pegawai kategori tertentu.

2. Education and Training Program [G4-LA9]

We have developed a tiered learning system in line with organization requirements, in which types of training are divided into several levels, started from special operational training to managerial training. The types of education and training available are:

New Employee Selection Education and Training

This education and training is designed to prepare potential employees and is carried out by PT PLN (Persero) Education and Training Center using a teaching mechanism based on educational level and profession.

Professional Education and Training

This education and training is provided to achieve required competency in certain fields in accordance with the structural and functional requirements of certain positions.

Supporting Education and Training

This education and training is provided for additional competencies required for certain roles, so that an employee will be able to do their job in accordance with its demands.

Hierarchical Education and Training

This education and training is provided to fulfill Position Competency Requirements for structural employees and is provided primarily by PT PLN (Persero) Education and Training Center (Corporate University). It comprises 5 types of training, namely: Basic Supervision, Higher Supervision, Basic Management, Middle Management and Higher Management.

Retirement Preparation Education and Training

This education and training is provided to employees approaching retirement and is aimed at ensuring employees are prepared to enter retirement and have positive activities to fill their time.

3. Executive Development Program;

Every year, the Company holds special training for promotions to fill certain positions and as part of the employee regeneration process. In addition to optimizing employees, We also need to accelerate the process of creating leaders for the future. The program we run involves Talent Management and Hierarchical Education and Training Design for employees in certain categories.

Peserta Pelatihan

Untuk tahun 2015, PLN Pusdiklat telah melaksanakan berbagai program pelatihan kepada 115.495 peserta. Peserta baik yang berasal dari PLN, anak perusahaan, maupun pihak eksternal, angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 21,60% dibanding tahun 2014 yang berjumlah 94.981 peserta. Total investasi pendidikan dan latihan di tahun 2015 adalah sebesar Rp741 miliar, yaitu 61,05% lebih besar dibanding tahun 2014 yang mencapai Rp460,1 miliar.

[G4-LA9]

PENGEMBANGAN KNOWLEDGE MANAGEMENT

Kami meyakini bahwa keberhasilan suatu korporasi untuk menjadi perusahaan yang unggul dan berkualitas kelas dunia pada dasarnya bukan disebabkan oleh banyaknya *tangible asset* yang dimiliki perusahaan tersebut, namun lebih dikarenakan oleh tingkat pengetahuan (*intangible asset*) yang dimiliki oleh organisasi tersebut. *Intangible asset* adalah aset yang bertumpu pada potensi insani atau karyawan perusahaan.

Oleh karena pentingnya pengelolaan pengetahuan tersebut, sejak beberapa tahun terakhir PLN mulai membangun suatu *Knowledge Management* beserta *road map*-nya sebagai basis dari Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) yang merupakan prasyarat untuk dapat diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang. Dengan adanya budaya pembelajar, maka aliran pengetahuan akan makin lancar dan terbarukan, sehingga memungkinkan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya bibit-bibit inovatif diantara insan pekerja PLN.

Training Participation

In 2015, PLN's Education and Training Center ran various training programs for 115,495 employees. Participants were from PLN, subsidiaries and external parties. This figure represents an increase of 21.60% compared to 2014 and a total of 94,981 participants. Total investment in education and training in 2015 amounted to Rp741 billion, or 61.05% higher than in 2014, which reached Rp460.1 billion. [G4-LA9]

KNOWLEDGE MANAGEMENT DEVELOPMENT

We believe that the success of a corporation in becoming a company that excels and is of world-class quality is not based on the number of tangible assets the company owns but on the level of knowledge (*intangible asset*) owned by the company. Intangible assets are those that focus on the potential of the company's employees.

Due to the importance of knowledge management, for the last few years, PLN has been developing its Knowledge Management along with a road map to form a basis for the Learning Organization, which is a pre-requisite to acknowledgement as a flourishing world-class company. Through a culture of learning, the flow of knowledge will become smoother and renewable, thus allowing the creation of an environment that is conducive to innovative growth among PLN's employees.

PLN CORPORATE UNIVERSITY
PLN CORPORATE UNIVERSITY

Kami memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan di bidang pembelajaran untuk mendukung implementasi kebijakan dan strategi korporat dalam bentuk Corporate University. Ini merupakan wadah yang strategis dimana PLN mengintegrasikan seluruh sumber daya pembelajaran, proses dan sumber daya manusia yang telah dimiliki, sehingga setiap insan PLN mampu memberikan kinerja terbaik dengan terus menerus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku orang dalam lingkungan ekosistem bisnis yang selaras dengan kebutuhan pengembangan perusahaan saat ini dan di masa yang akan datang.

We have an Education and Training Center engaged in teaching that supports the implementation of corporate policies and strategies, which is our Corporate University. This is a strategic forum in which PLN can integrate all its teaching resources, processes and human resources, so that every PLN employee is able to give their best performance and continually improve their knowledge, skills and behavior within the business ecosystem, in line with current and future company development requirements.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA**Hubungan Industrial**

Dalam interaksi dengan setiap pegawai, landasan utama Kami adalah perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terakhir, yakni Addendum PKB 2010-2012 yang telah ditandatangi dan didaftarkan pada Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan JAMSOSTEK, yang ditinjau secara periodik. [G4-11]

Sebagai salah satu upaya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, Kami tengah menjalankan rangkaian perundingan dalam rangka penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Untuk maksud tersebut telah disusun Bahan Perundingan PKB dan dilakukan pembekalan kepada Tim Negosiasi PKB, baik dari unsur manajemen maupun unsur Serikat Pekerja. Tim Perunding PKB dari Perseroan dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0088.K/DIR/2015 tanggal 15 April 2015 kemudian diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0139.K/DIR/2015 tanggal 24 Juni 2015.

Sementara PKB yang baru masih dalam tahap penyusunan dan perundingan, maka yang saat ini diberlakukan adalah Addendum PKB 2010 - 2012 yang ditandatangani pada

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT POLICY**Industrial Relations**

Our main foundation for interaction with every employee is the employment law and the most recent Collective Labor Agreement (CLA), namely Addendum PKB 2010-2012, which was signed and registered with the Directorate General for Industrial Relations and JAMSOSTEK, and which is periodically reviewed. [G4-11]

As one of our efforts to create a positive work environment, We are in the midst of a series of discussions to compile the new Collective Labor Agreement (CLA). To this end, we have prepared CLA Discussion Material and prepared a CLA Negotiation Team comprising management and the Labor Union. The Company's CLA Negotiation Team was formed based on PT PLN (Persero) Board of Directors' Decision Num. 0088.K/DIR/2015 dated 15 April 2015, amended by PT PLN (Persero) Board of Directors' Decision Num. 0139.K/DIR/2015 dated 24 June 2015.

In the meantime, while the new CLA is still being prepared and discussed the CLA in effect at this time is Addendum

tanggal 11 Oktober 2013 untuk menjamin terjalannya Hubungan Industrial yang harmonis.

Pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) memuat mengenai hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja secara seimbang, dengan maksud untuk:

1. Memberi kepastian hak dan kewajiban Perusahaan dan Pekerja yang meliputi: hubungan industrial, syarat-syarat kerja, serta Tata Tertib Perusahaan;
2. Memperteguh dan meningkatkan kerjasama antara Perusahaan dan Pekerja;
3. Mengatur cara penyelesaian perbedaan pendapat secara adil sehingga tidak mengarah pada perselisihan, dan setiap perbedaan akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Butir-butir kesepakatan yang tertuang dalam Addendum PKB 2010 – 2012 berisi perjanjian kolektif antara pegawai dengan pihak Perseroan, sehingga seluruh pegawai PLN (100%) telah terlindungi dan terwakili hak-haknya dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

PKB 2010 – 2012, which was signed on 11 October 2013 to ensure harmonious Industrial Relations.

The Collective Labor Agreement (CLA) contains the balanced rights and obligations of the company and its employees, with the aim of:

1. Providing certainty as to the rights and obligations of the Company and its Employees, covering: industrial relations, work conditions, and the Company Code of Conduct;
2. Strengthening and improving cooperation between the Company and its Employees;
3. Regulating methods of settling differences of opinion equitably to prevent disputes; all differences of opinion shall be settled by deliberation and consensus.

The points of agreement contained in Addendum PKB 2010 – 2012 are the collective agreement between the company and its employees so that the rights of all (100%) PLN employees are protected and represented in the Collective Labor Agreement (CLA).

KEBIJAKAN DASAR PENGELOLAAN SDM PLN [G4-56] BASIC PLN POLICY FOR HR MANAGEMENT [G4-56]

1. Membina hubungan baik dengan pegawai berlandaskan kerja sama timbal balik yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama dan ditinjau secara berkala.
2. Mematuhi seluruh peraturan-peraturan dan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
3. Memberlakukan sistem pengupahan berdasarkan kinerja yang diterapkan dengan adil, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan
4. Menjunjung tinggi hak-hak asasi pegawai dan memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan Serikat Pegawai.
5. Menyiapkan berbagai program peningkatan dan pelatihan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kinerja individu, kelompok dan akhirnya korporasi.
6. Menerapkan kesetaraan dalam jejang karir
7. Menerapkan kesetaraan gender dalam hal remunerasi.

1. Fostering good relations with employees based on mutual cooperation as outlined in the Collective Labor Agreement, which is periodically reviewed.
2. Complying with all employment laws and regulations.
3. Implementing a performance-based remuneration system that is equitable, transparent and accountable.
4. Upholding employee rights and fully support the formation of a Labor Union.
5. Preparing various employee competency training programs to improve individual, group and, ultimately, corporate performance.
6. Implementing career path equality.
7. Implementing gender equality in remuneration

Penghargaan pada Hak Asasi Manusia (HAM)

Kami berkomitmen untuk senantiasa memperhatikan aspek pengakuan dan penegakkan HAM dalam setiap kegiatan operasional. Kebijakan kebebasan berserikat, berpolitik dan menyalurkan aspirasi politik secara bebas maupun memberikan sumbang saran bagi kemajuan perusahaan (melalui Serikat Pegawai maupun saluran yang disediakan untuk maksud tersebut) adalah salah satu wujud penghargaan terhadap HAM.

Pelatihan dan Sosialisasi HAM [G4-HR3]

Kami telah memiliki Prosedur Tetap (PROTAP) Keamanan dan Ketertiban PT PLN (Persero) Kantor Pusat yang meliputi tindakan-tindakan di bidang keamanan seperti sabotase, teror, unjuk rasa, juga dalam hal ketertiban seperti keluar masuk barang/material, penerimaan tamu dan lain-lain yang telah memasukkan aspek penghormatan pada hak asasi manusia (HAM).

Perseroan juga melaksanakan pelatihan untuk menunjang kompetensi bagi Satuan Pengamanan, dimana pelatihan disesuaikan dengan kurikulum yang disusun oleh POLRI sekaligus berisi pembekalan pengetahuan mengenai HAM.

Keberagaman dan Inklusifitas [G4-HR3]

Kami selalu menjunjung tinggi prinsip kesamaan gender, usia, suku, agama, dan ras, pada proses rekrutmen dan jenjang karir bagi insan PLN. Kami menjamin seluruh insan PLN memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan karirnya.

Keberagaman yang dimiliki merupakan aset yang berharga dalam memberikan pelayanan yang prima bagi konsumen Kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, kami juga selalu berusaha untuk merangkul masyarakat sekitar dengan membuka kesempatan berkerja bagi mereka demi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dengan cara ini, PLN dapat memahami akan budaya setempat dan kebutuhan dari para pelanggan dimana pun Kami beroperasi.

PLN menjamin persamaan kesempatan bagi seluruh pegawai dalam mengembangkan karir sesuai dengan kompetensi dan perkembangan perusahaan. Penerapan yang konsisten atas dasar kesetaraan ini menyebabkan tidak terjadinya kasus diskriminasi yang berkaitan dengan suku, ras, agama dan gender pada semua level jabatan di PLN.

Human Rights Awards

We are committed to always acknowledging and upholding Human Rights in all operational activities. Policies supporting freedom of association, freedom to be involved in politics and to channel political aspirations freely and to provide input and advice for the betterment of the company (through the Employee Union and through channels provided for this purpose) are all part of the company's respect for human rights.

Human Rights Training and Promotion [G4-HR3]

We have Fixed Procedures (PROTAP) for the Safety and Security of PT PLN (Persero) Head Office that cover actions related to security, such as sabotage, terror, demonstrations, as well as those related to the flow of goods / materials, receiving guests and other aspects that involve the upholding of respect for human rights.

The Company also provides training to support the competence of its Security Unit (Satpam), the training for which is in alignment with the curriculum designed by the National Police Force and that contains an understanding of Human Rights.

Diversity and Inclusivity [G4-HR3]

We always uphold the principle of equality with regard to gender, age, ethnicity, religion and race in the recruitment process and developing career paths for PLN employees. We ensure that all PLN employees have the same opportunity to develop their careers.

Diversity is a valuable asset in providing the best service to our customers, who are spread across the whole of Indonesia. In addition, we are also always striving to involve local communities and provide employment opportunities to improve their quality of life. In this way, PLN can understand local cultures and customer demands in every area in which it operates.

PLN ensures equal opportunity for all its employees to develop their careers in accordance with their competence and the company's development. The consistent implementation of this principle of equality has resulted in there being no cases of discrimination related to ethnicity, race, religion or gender at any level of PLN.

Lingkungan Kerja dan Tingkat Perputaran Pegawai

[G4-LA1]

Kami senantiasa berusaha untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi para pegawai. Hal ini ditunjukkan dengan relatif rendahnya rasio *turn over* karyawan. Selama periode laporan tahun 2015, tercatat hanya ada 2.254 pegawai PLN yang berhenti, atau 4,74% dari total pegawai PLN tahun 2015 yang mencapai 47.594 pegawai.

Dari total pegawai yang berhenti tersebut, 1.897 orang karena faktor alami (pensiun), 160 orang karena meninggal dunia dan 167 orang karena permintaan sendiri dan pensiun dini. [G4-LA1]

PAKET KESEJAHTERAAN

Sebagai bentuk apresiasi untuk pelaksanaan tugas pekerjaan/ jabatan, PLN memberikan penghasilan kepada pegawai setiap bulan sebagai imbalan, yang terdiri atas gaji, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap dan tunjangan lainnya. PLN juga memberikan tunjangan lain kepada karyawan dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR), asuransi kesehatan, uang pensiun, jaminan layanan kesehatan dan hak cuti yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, di luar remunerasi.

Remunerasi

Sistem remunerasi pegawai terdiri atas komponen gaji tetap, uang cuti, penghargaan masa kerja, insentif kinerja, bonus dan tunjangan lainnya. Mengacu pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 007.K/DIR/2008 tentang Sistem Remunerasi Pegawai beserta peraturan perubahannya, besaran upah minimum yang diterima seorang pegawai baru Perseroan golongan terendah dipastikan lebih besar dibandingkan upah minimum regional (UMR) atau provinsi (UMP) di mana lokasi utama Perseroan berada.

Berdasarkan SK Dir No. 115.K/DIR/2009 tentang Tarif Grade (*Pay for Person*) dan SK Dir No.090.K/DIR/2009 tentang Tunjangan Posisi (*Pay for Position*) telah lebih tinggi dari UMR di masing-masing daerah utama (Ibukota Provinsi). Berikut ini adalah tabel perbandingan gaji pegawai PLN terendah yang baru diangkat dibandingkan dan contoh UMP pada beberapa propinsi. [G4-EC5]

Work Environment and Employee Turnover Levels

[G4-LA1]

We are always working to create a positive environment for our employees. This is aimed at establishing a relatively low employee turnover level. During the 2015 reporting period, only 2,254 PLN employees ended their employment, or 4.74% of all PLN's employees, which in 2015 totaled 47,594 people.

Of these employees whose employment ended, 1,897 retired, 160 died and 167 resigned or took early retirement.

[G4-LA1]

WELFARE PACKAGE

In appreciation for doing their respective job tasks/duties, PLN provides monthly remuneration to its employees consisting of salary, fixed and adjustable benefits and other allowances. PLN also provides other benefits, besides remuneration, to its employees, including religious holiday entitlement (THR), health insurance, pension fund contribution, health insurance and leave entitlements, all of which are determined in accordance with regulations.

Remuneration

The employee remuneration system comprises a fixed salary component, leave allowance, term of employment benefit, performance incentive, bonus and other allowances. Based on PT PLN (Persero) Board of Directors' Decision Num. 007.K/DIR/2008 on the Employee Remuneration System and regulation amendments, the amount of the minimum wage allocated to a new employee of the lowest level is greater than the regional or provincial minimum wage set by the government in the location where the Company is based.

Based on Board of Directors' Circular Num. 115.K/DIR/2009 on Grade tariff (*Pay for Person*) and Board of Directors' Circular Num. 090.K/DIR/2009 on Position Allowance (*Pay for Position*), this is greater than the regional minimum wage in each provincial capital. Following is a table comparing the salary of the lowest level new PLN employee and sample provincial minimum wages for several provinces. [G4-EC5]

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW - for Sustainable Development

Propinsi Province	Gaji Pegawai Baru Terendah di PLN Lowest Salary of a New PLN Employee	Upah Minimum Propinsi Minimum Wage by Province
Aceh	4.622.000	1.750.000
Riau	4.380.000	1.700.000
Bangka Belitung	4.244.000	1.640.000
Lampung	4.196.000	1.399.037
Distribusi Jakarta	4.428.000	2.441.301
Distribusi Jawa Barat	4.196.000	1.000.000
Distribusi Jawa Tengah	4.196.000	910.000
Kalimantan Selatan-Tengah	4.380.000	1.620.000
Sulawesi Utara-Tenggara	4.244.000	1.400.000
Papua	5.030.000	1.900.000

Pengaturan Pekerja Shift

Dalam memberikan pelayanan yang baik bagi para pelanggan, Perusahaan berkomitmen untuk memberikan pelayanan 24 jam. Oleh karenanya, Kami melengkapi sistem pergantian jam (*shift*) pada beberapa bagian operasionalnya, yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan yaitu 2 hingga 3 *shift* dalam sehari. Jika diperlukan untuk bekerja melewati batas waktu shift kerja, maka pada pegawai diberikan kompensasi yang diperhitungkan dalam imbal jasa pekerjaan yang telah diketahui dan disepakati bersama.

Kompensasi kerja *shift* dan lembur yang diberikan Perusahaan berupa Tambahan Tunjangan Posisi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. SK Dir No. 090.K/DIR/2009 tentang Tunjangan Posisi (*Pay for Position*), sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang berkesinambungan dan dilaksanakan secara bergilir (*shift*) dengan siklus tidak tetap di luar jam kerja (*shift* sore sampai dengan malam atau malam sampai dengan pagi), diantaranya: Operasi Pembangkit, Operasi Transmisi dan Operasi Distribusi;
2. Pekerjaan di luar jam kerja (piket di luar jam kerja), diantaranya: piket pemeliharaan, piket gangguan dan pekerjaan di lokasi Proyek Konstruksi yang tidak dalam status Perjalanan Dinas;
3. Pekerjaan dengan risiko keselamatan kerja yang tinggi,diantaranya: Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB);
4. Tambahan Tunjangan Posisi sebesar maksimum 100% *Pay for Position* juga diberikan untuk jabatan fungsional dan struktural (*supervisor*) yang bertanggung jawab secara langsung di lapangan.

Shift Worker Arrangements

In providing the best service to our customers, the Company is committed to providing a 24-hour service. Therefore, we implement a shift system for various parts of operations, which are adjusted to two or three shifts each day based on conditions in the field. When employees are required to work past the shift deadline, they are compensated calculated on a mutually known and agreed amount.

The shift work and overtime compensation provided by the Company are the form of Additional Position Allowance, as noted in Board of Directors' Decision Num. 090.K/DIR/2009 on Position Allowance (*Pay for Position*), as follows:

1. Continuous work carried out on a shift basis with irregular cycles beyond normal working hours (afternoon to evening shift or evening to morning shift), including: Power Plant Operations, Transmission Operations and Distribution Operations;
2. Work outside normal business or working hours, including: maintenance work, repair work and work at a Construction Project location not under Official Travel status.
3. High-risk work, including high-energy and high-voltage electrical work (PDKB).
4. Additional Position Allowance of a maximum of 100% *Pay for Position* is also given to functional and structural (*supervisor*) positions with direct responsibility in the field.

Total biaya kepegawaian yang dibayarkan kepada para pegawai PLN pada tahun 2015 adalah sebesar Rp20,3triliun angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 22,3% dibandingkan dengan tahun 2014, yaitu sebesar Rp16,6 triliun. [G4-EC3]

Total employment costs paid to PLN employees in 2015 amounted to Rp20.3 trillion, this figure demonstrates a rise of 22.3% compared to 2014, which amounted to Rp16.6 trillion.[G4-EC3]

Program Pensiun

PLN menyelenggarakan program pensiun bekerja sama dengan perusahaan yang kompeten di bidang ini. Pegawai Perseroan mendapatkan hak pensiun pada saat berakhirnya masa kerja sesuai yang telah disepakati. Perseroan menyelenggarakan dua program pensiun, yakni program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti.

Pension Program

PLN organizes a pension program in cooperation with companies that are competent in this field. The Company's employees have the right to receive a pension on retirement based on agreed conditions. The Company runs two pension programs, namely defined benefits and defined contribution pension plans.

PROGRAM PENSIUN PLN [G4-EC3] PLN'S PENSION PROGRAM [G4-EC3]

Sumber utama dana pensiun adalah iuran dari karyawan dan sumbangan Perseroan. Besaran dana pensiun untuk program pensiun manfaat pasti didasarkan atas masa kerja, tingkat gaji pada saat pensiun dan dapat dialihkan kepada tanggungan jika pegawai bersangkutan meninggal dunia.

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

Pada program ini pegawai mempunyai pilihan kepesertaan pada beberapa yayasan pengelola dana pensiun yang diakui dan direkomendasikan dalam program ini. Program pensiun iuran pasti dilaksanakan untuk para pegawai yang direkrut dan diangkat pada atau setelah bulan Juli 2009.

Iuran Pensiun diberikan dari dua sumber yaitu:

1. Iuran Pemberi Kerja (IPK) sebesar 10 -11% dari PhDP Pegawai
2. Iuran Pegawai sebesar 6% dari PhDP Pegawai

The main source of pension funds is a contribution made by the company and by the employee. The amount of funds in the defined benefit pension program is based on the period of employment, salary level at time of retirement and can be transferred to a dependent if the employee dies.

DEFINED CONTRIBUTION PENSION PROGRAM

In this program, the employee has the choice of participation in several recognized pension management plans that are recommended for this program. The Defined Contribution Pension Program is implemented for employees who were recruited or appointed on or after July 2009.

The pension funds are derived from two sources:

1. Employer Contribution of 10 -11% of Employee PhDP
2. Employee Contribution of 6% of Employee PhDP

Kami telah membentuk Dana Pensiun PLN, suatu badan hukum yang terpisah dari Pendirinya dan bertugas mengelola dana yang dihimpun dari iuran pensiun untuk

We have established the PLN Pension Fund, a legal body that is separate from its Founder, which is assigned to manage the funds collected from pension contributions to

menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan setelah berhenti bekerja bagi Peserta dan Pihak Yang Berhak (Janda/Duda/Anak).

Tujuan pendirian Dana Pensiun PLN adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi pegawai PT PLN (Persero) beserta anak perusahaannya yang menjadi Mitra Pendiri, yaitu PT Indonesia Power, PT Pembangkit Jawa Bali, PT PLN Batam dan PT Indonesia Comnets Plus.

Koperasi

Sebagai bagian dari upaya memberikan kesejahteraan kepada pegawai, Kami mendukung pendirian Koperasi Pegawai Perusahaan Kantor Pusat (KP PLN). Adapun jenis usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi Karyawan Perusahaan antara lain:

1. Menerima simpanan dari anggota.
2. Melakukan perdagangan barang dan jasa.
3. Melakukan usaha simpan pinjam.
4. Menyediakan barang-barang kebutuhan anggota.
5. Melakukan usaha lainnya, seperti penyediaan alat tulis kantor dan alat-alat yang berhubungan dengan Perusahaan.
6. Menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian.

Program Penghargaan Pegawai

Perseroan menyelenggarakan program pemberian penghargaan kepada pegawai sebagai salah satu bentuk pembinaan terhadap pegawai, yang terdiri dari:

- **Penghargaan Prestasi**

Penghargaan yang diberikan kepada pegawai atau sekelompok pegawai yang dipandang telah memberikan prestasi yang luar biasa seperti menemukan formula-formula kerja baru yang ternyata sangat efisien dan bermanfaat secara signifikan bagi Perusahaan.

- **Penghargaan Pengabdian**

Penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas dasar lamanya masa kerja secara terus-menerus selama 16, 24, 32 dan 40 tahun.

- **Penghargaan Purnakarya**

Penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang telah memasuki masa usia pensiun normal.

PROFIL DAN DISTRIBUSI INSAN PLN

[G4-10]

Dalam menjalin hubungan timbal balik dengan seluruh pegawai, kami telah mengidentifikasi profil dari insan PLN, untuk membantu menyusun program pengembangan dan kesejahteraan karyawan dengan pendekatan yang terbaik.

ensure and maintain an income after employment has ended for Participants and Entitled Parties (Surviving Spouse, Children).

The purpose of establishing the PLN Pension Fund was to run a Defined Benefit Pension Program for PT PLN (Persero) employees and those of the company's subsidiaries that are Founding Partners, i.e. PT Indonesia Power, PT Pembangkit Jawa Bali, PT PLN Batam and PT Indonesia Comnets Plus.

Cooperative

As part of our efforts to look after our employees' welfare, We support the establishment of the Company Head Office Employees' Cooperative (KP PLN). The types of business conducted by the Company Employees' Cooperative include:

1. Receiving savings from members.
2. Trading in goods and services.
3. Savings and loans.
4. Providing goods needed by members.
5. Other business, such as the provision of office stationery and equipment related to the Company.
6. Increasing member knowledge of cooperatives.

Employee Award Program

The company runs an employee award program as a way of guiding employees, comprising:

- **Achievement Awards**

These awards are given to employees or groups of employees who are considered to have made an extraordinary achievement, such as identifying a new work formula that is significantly more efficient and useful to the Company.

- **Long Service Awards**

These awards are bestowed on employees based on their period of continual service, for 16, 24, 32 and 40 years.

- **Retirement Awards**

These awards are given to employees who achieve normal retirement age.

PLN WORKFORCE PROFILE AND DISTRIBUTION [G44-10]

In a mutually beneficial relationship with all our employees, we have identified the profile of the PLN employees to support the compilation of employee development and welfare programs that use the best approach.

Pada tahun 2015, jumlah insan PLN yang merupakan pegawai tetap Perseroan berjumlah 47.594 orang yang terdiri dari 40.450 Pegawai Perusahaan Induk PLN dan 7.144 pegawai anak perusahaan. Dibandingkan dengan jumlah pegawai tetap tahun 2014, terdapat penurunan sebesar 1,0% dimana jumlah rekrutmen baru sepanjang tahun 2015 berjumlah 4.603 pegawai.

Sementara jika dilihat Status Kepegawaian-nya, maka hanya terdapat 2 orang pegawai dengan status kerja kontrak, sisanya berstatus sebagai pegawai tetap PLN.

Adapun demografi pegawai PLN pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut.

In 2015, PLN employed 47,594 permanent employees, comprising 40,450 employees of PLN Holding Company and 7,144 employees in subsidiaries. Compared to the number of permanent employees in 2014, there has been a 1.0% reduction, with recruitment of new employees during 2015 totaling 4,603 people.

Meanwhile, considering the Employment Status, there are only 2 employees on contract status while the remainder is directly employed by PLN.

The demographic of PLN employees in 2014-2015 is as follows.

Demografi Pegawai PLN Menurut Jenjang Pendidikan, 2014-2015

PLN Employee Demographic Based on Education, 2014-2015

Pendidikan	2014	2015	Perubahan Change	Komposisi 2015 2015 Composition	Education
≤D1	23.692	21.855	(7,8%)	45,9%	≤D1
D3	6.875	7.359	7,0%	15,5%	Diploma
S1	9.459	10.185	7,7%	21,4%	Bachelor
S2	969	1.045	7,8%	2,2%	Master
S3	5	6	20,0%	0,0%	PhD
Anak Usaha	7.068	7.144	1,1%	15,0%	Subsidiary
Total	48.068	47.594	(1,0%)	100,0%	Total

Demografi Pegawai PLN Menurut Jenis Kelamin, 2014-2015

PLN Employee Demographic Based on Gender, 2014-2015

Jenis Kelamin	2014	2015	Perubahan Change	Komposisi 2015 2015 Composition	Gender
Laki-Laki	34.554	33.841	(2,06%)	83,66%	Male
Perempuan	6.446	6.609	(2,53%)	16,34%	Female
Total *)	41.000	40.450	(1,34%)	100%	Total

*) Hanya Pegawai PLN, Tanpa Pegawai Entitas Anak

*) Only PLN Employees, without Subsidiary Employee

Demografi Pegawai PLN Menurut Level Management

PLN Employee Demographic Based on Management Level

Level Manajemen	2014	2015	Perubahan Change	Komposisi 2015 2015 Composition	Management Level
Manajamen Atas	84	83	(1,2%)	0,2%	Senior Management
Manajemen Menengah	358	362	1,1%	0,8%	Middle Management
Manajamen Dasar	1.110	1.154	4,0%	2,4%	Base Management
Supervisor Atas	2.698	2.808	4,1%	5,9%	Senior Supervisory
Supervisor Dasar	4.711	5.807	23,3%	12,2%	Base Supervisory
Fungsional	32.039	30.236	(5,6%)	63,5%	Functional
Anak Perusahaan	7.068	7.144	1,1%	15,0%	Subsidiary
Total	48.068	47.594	(1,0)	100.0%	Total

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW – for Sustainable Development

Demografi Pegawai PLN Menurut Level Organisasi

PLN Employee Demographic Based on Organization Level

Level Organisasi	2014	2015	Perubahan Change	Organization Level
Unit Bisnis PLN	39.644	39.085	(1,4%)	PLN Business Units
PLN Kantor Pusat	1.356	1.365	0,7%	PLN Head Office
Jumlah	41.000	40.450	(1,3%)	Total
Anak Perusahaan	7.068	7.144	1,1%	Subsidiary
Jumlah	48.068	47.594	(1,0%)	Total

Demografi Pegawai PLN Menurut Lokasi Geografis

PLN Employee Demographic Based on Geographic Location

Area Geografis	2014	2015	Perubahan Change	Komposisi 2015 2015 Composition	Geographic Area
Indonesia Bagian Barat	12.150	12.074	(0,63%)	29,8%	West Indonesia
Indonesia Bagian Timur	10.185	10.224	(0,38%)	25,3%	East Indonesia
Jawa Bali	18.665	18.152	(2,75%)	44,9%	Java Bali
Total *)	41.000	40.450	(1,34%)	100%	Total *)

*) Hanya Pegawai PLN, Tanpa Pegawai Entitas Anak

*) Only PLN Employees, without Subsidiary Employee

Kami menyadari bahwa PLN memiliki jumlah pegawai berusia diatas atau sama dengan 50 tahun cukup besar, yaitu 27,2% dari total pegawai, oleh karenanya kini mulai merealisasikan program rekrutmen yang mendukung proses transisi dengan generasi muda.

Kami pun terus berupaya untuk memberikan kesempatan dan sumber daya bagi pelajar, pengajar, dan tenaga kerja berpengalaman untuk menjadi sukses. Untuk itu, kami menjalin kerjasama yang harmonis dengan komunitas setempat dalam mendukung proses transisi ini.

We realize that PLN has a large number of employees aged 50 years old and over, namely 27.2% of total employees, and for this reason, we have started to realize new recruitment programs that support the transition process to a younger generation.

We are also striving to provide opportunities and resources to students, teachers and experienced employees to become successful. To achieve this, we have harmonious cooperation with local communities to support this transition.

Kelompok Usia	Tahun Year		Perubahan Change	Komposisi 2015 2015 Composition	Age Group
	2014	2015			
≤ 25	8.220	7.855	(4,4%)	19,4%	≤ 25
26 - 30	7.354	8.234	12,0%	20,4%	26 - 30
31 - 35	2.936	3.599	22,6%	8,9%	31 - 35
36 - 40	1.199	1.158	(3,4%)	2,9%	36 - 40
41 - 45	4.175	3.553	(14,9%)	8,8%	41 - 45
46 - 50	5.934	5.064	(14,7%)	12,5%	46 - 50
> 50	11.182	10.987	(1,7%)	27,2%	> 50
Anak Usaha	7.068	7.144	1,1%		Subsidiary
Jumlah	48.068	47.594		100%	Total

*) Hanya Pegawai PLN, Tanpa Pegawai Entitas Anak

*) Only PLN Employees, without Subsidiary Employee



PENINGKATAN BUDAYA UNGGUL

Pembentukan dan peningkatan Budaya Unggul merupakan bagian dari upaya memotivasi pegawai agar senantiasa berkinerja dan memberikan kontribusi terbaik bagi perseroan. Dimensi Budaya Kinerja Tinggi/Unggul memiliki inisiatif untuk menciptakan pegawai PLN yang kompeten, produktif, memiliki tata nilai & etika kerja tinggi, berjiwa intrapreneur, dan cost-benefit conscious. Kami membangun budaya organisasi unggul dicapai melalui 3 (tiga) pilar utama sebagai berikut:

1. High Performance Culture (HPC)

Business Concern : PLN menjadi *Emerging Industry Leader* pada tahun 2017 dengan nilai sebagai berikut :

- Customer Focus;
- Performance Minded;
- Managing Quality.

2. Synergizing in Business and Values (SBV)

Business Concern : Membangun PLN menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2017 dengan nilai sebagai berikut :

- Integrity and Business Ethic;
- Human Capital Management;
- Knowledge Capturing;
- Change Management, Strategy Alignment.

3. Business Acumen (BAC)

Business Concern : Membangunkan jiwa *intrapreneurship* dan *business survival* pada tiap insan PLN dengan nilai sebagai berikut :

- Cost and Benefit Minded;
- Intrapreneurship & Entrepreneurship.

IMPROVING A CULTURE OF EXCELLENCE

Forming and improving a Culture of Excellence is part of our efforts to motivate our employees to always perform and provide their best contribution to the company. The Excellent Performance Culture Dimensions have been established for the initiative to create PLN employees who are competent, productive, with strong values and work ethic, with the soul of an intrapreneur and who are cost-benefit conscious. We have built a culture of excellence through 3 (three) main pillars:

1. High Performance Culture (HPC)

Business Concern: PLN to become an Emerging Industry Leader in 2017 with the following values:

- Customer Focus;
- Performance Minded;
- Managing Quality.

2. Synergizing in Business and Values (SBV)

Business Concern: Building PLN into a Corruption-Free Area in 2017 with the following values:

- Integrity and Business Ethics;
- Human Capital Management;
- Knowledge Capturing;
- Change Management, Strategy Alignment.

3. Business Acumen (BAC)

Business Concern: Building souls of intrapreneurship and business survival in all PLN employees, with the following values:

- Cost and Benefit Minded;
- Intrapreneurship & Entrepreneurship.



KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

halaman page **176 - 185**



Capaian Nihil-Insiden Kecelakaan Kerja dan Naiknya Indeks Kesehatan berpengaruh positif terhadap efisiensi kegiatan operasional, produktivitas kerja dan pada akhirnya menjamin keberlangsungan usaha. Oleh karenanya, Kami berupaya meningkatkan kinerja aspek K3 melalui evaluasi berkala terhadap aspek terkait K3 dan menumbuh kembangkan budaya sadar K-3 di seluruh unit bisnis dan aspek operasional Perseroan.

Zero Achievement of Incidents in Workplace Accidents and an Improved Health Index have a positive impact on operational efficiency, work productivity and finally ensure business continuity. Furthermore, we strive to improve our OHS performance through periodic assessment of OHS and the growth of an OHS-aware culture in all the company's business units and operational aspects.

Kami menempatkan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi hal yang utama dengan berupaya membangun budaya keselamatan kerja dalam rangka mencapai target jangka panjang zero-accident pada setiap pelaksanaan jenjang kegiatan operasional Perusahaan yang meliputi operasional pembangkitan, transmisi, distribusi dan gardu induk. Kami meyakini pencapaian target zero-accident akan membuat seluruh kegiatan operasional berjalan dengan semakin efisien, meningkatkan produktivitas kerja, membaiknya kondisi keuangan perusahaan yang pada akhirnya lebih menjamin keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, Kami berupaya meningkatkan kinerja aspek K3 dengan melakukan evaluasi berkala terhadap praktik operasional terkait K-3 dan menyusun program-program implementasi kegiatan operasional yang memenuhi aspek K-3 sesuai dengan standar yang berlaku secara internasional.

KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Kebijakan PLN dalam pengelolaan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tercantum dalam SK Direksi PT PLN (Persero) No.134.K/DIR/2007 tentang Kebijakan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3). Definisi kebijakan K-3 PLN sebagai berikut:

1. Mencegah pencemaran lingkungan dan degradasi keanekaragaman hayati; serta melindungi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di sekitar wilayah kerja perusahaan.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain serta mengendalikan aspek dan dampak penting lingkungan setiap kegiatan, proses dan produk dari berbagai unit kerja dan anak perusahaan.
3. Mendokumentasikan, mengimplementasikan, memelihara dan mengkaji ulang secara periodik Kebijakan Lingkungan sehingga senantiasa relevan, sesuai dan menjadi pedoman dasar bagi manajemen lingkungan yang diterapkan secara spesifik di setiap unit kerja dan anak perusahaan.
4. Menjadikan kebijakan ini sebagai landasan untuk penetapan dan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja.
5. Mendorong setiap unit kerja dan anak perusahaan terus-menerus melakukan perbaikan kinerja sistem manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja.
6. Menyediakan dan memfasilitasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan dan memelihara Kebijakan Lingkungan, sehingga setiap unit kerja, anak perusahaan dan para mitra kerja dapat menerapkan kebijakan ini secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi lingkungan setempat.

We believe that occupational health and safety is the key in our efforts to establish a culture of workplace safety and the achievement of the long-term zero accident target for every type of operational activity within the Company, from operating power plants, to transmission, distribution and substations. We believe that the achievement of the zero accident target will make all operational activities run more efficiently, improve productivity, improve the company's financial condition and ultimately ensure the company's continuity. For this reason, We are striving to improve all OHS performance through periodic assessments of operational practices as relevant to OHS and compiling operational implementation programs to fulfill OHS in accordance with international standards.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY POLICIES

PLN's policies to manage occupational health and safety (OHS) are noted in PT PLN (Persero) Board of Directors' Decision Num. 134.K/DIR/2007 on Occupational Environment, Health and Safety (SHE). The definition of PLN's SHE policy is as follows:

1. Preventing environmental pollution and degradation of biodiversity; as well as protect the occupational health and safety of employees in the Company's operational areas.
2. Complying with regulations and other provisions, as well as control the significant environmental aspects and impacts of each activity, process and product from the various work units and subsidiaries.
3. Documenting, implementing, maintaining and periodically review the Environment Policy to keep it relevant, appropriate and serving as the basic guidelines for environmental management as applied specifically in each unit and subsidiary.
4. Implementing this policy as the basis for the determination and evaluation of the achievement of goals and objectives with respect to the management of the environment and occupational health and safety.
5. Encouraging each unit and subsidiary to continuously improve their environmental and occupational health and safety management system performance.
6. Providing and facilitating the resources required to implement and maintain the Environment Policy so that each unit, subsidiary and business partner can gradually implement this policy taking into account the Company's ability and local environmental conditions.

7. Menjadikan pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai sikap dan perilaku setiap lini manajemen dan individu karyawan perusahaan.
8. Mendorong pengembangan masyarakat di sekitar unit-unit kerja dan anak perusahaan sebagai upaya menjadikan perusahaan sebagai bagian integral dengan masyarakat di sekitarnya.
9. Berpartisipasi dalam program Pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
10. Menjamin kebijakan ini senantiasa tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pihak pendana (*lender*) dan masyarakat luas.

KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA [G4-LA5]

Untuk mengawal implementasi K3 dalam setiap kegiatan operasional di seluruh unit bisnis dan anak perusahaan, Kami membentuk Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja guna mengkoordinasikan kegiatan dan program terkait K3. Komite ini dibentuk melalui SK Direksi No. 570.K/ DIR/2010, yang kemudian diperbarui melalui SK Direksi No. 017.K/ DIR/2011 dan mengubah nama menjadi Komite Keselamatan Ketenagalistrikan. Ketentuan mengenai fungsi dan kedudukan Komite Keselamatan Ketenagalistrikan serta tugas yang menjadi tanggung jawabnya, ditegaskan pula dalam pasal Perjanjian Kerja Bersama.

Komite Keselamatan Ketenagalistrikan terdiri atas Direktur Human Capital Management, Kepala Divisi Umum serta 7 anggota pelaksana. Komite ini dipimpin oleh Kepala Divisi K3L.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah:

1. Membahas/mendiskusikan setiap permasalahan keselamatan ketenagalistrikan meliputi kegiatan perlindungan, pencegahan dan penyelesaian terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan dan atau penyakit yang timbul akibat hubungan kerja, agar dapat dicapai tingkat keselamatan ketenagalistrikan yang tinggi pada setiap pelaksanaan pekerjaan. Hasil dari pembahasan/diskusi disampaikan kepada pimpinan unit PLN sebagai bahan pengambilan keputusan dalam kegiatan keselamatan ketenagalistrikan;
2. Mengadakan investigasi kasus keselamatan ketenagalistrikan yang meliputi keselamatan instalasi, keselamatan kerja dan keselamatan masyarakat umum.
3. Memberikan penilaian kinerja, keselamatan ketenagalistrikan yang meliputi standardisasi, sertifikasi, keselamatan instalasi, keselamatan kerja dan keselamatan masyarakat umum.

7. Making environmental management and occupational health and safety protection part of the attitude and behavior of the Company's management and employees.
8. Encouraging the development of communities around the operational units and subsidiaries in an effort to make the Company an integral part of the community.
9. Participating in the Government's program to reduce greenhouse gas emissions.
10. Ensuring that this policy is always available to all interested parties, such as lenders and the public.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMITTEE [G4-LA5]

To lead OHS implementation for all operational activities in every business unit and subsidiary, We formed the Occupational Health and Safety Committee to coordinate activities and programs related to OHS. The committee was formed based on Board of Directors' Circular Num. 570.K/ DIR/2010, later amended based on Board of Directors' Circular Num. 017.K/ DIR/2011 and with a change of name to Electricity Safety Committee. Provisions regarding the function and placement of the Electricity Safety Committee, as well as its duties and responsibilities, are laid out in an article of the Collective Labor Agreement.

The Electricity Safety Committee comprises the Human Capital Management Director, General Affairs Division Head and 7 members. The committee is led by the SHE Division Head.

The duties and responsibilities of the Occupational Health and Safety Committee are as follows:

1. Discussing electrical safety issues, including protection, prevention and settlement of any possible work-related accidents or illnesses that may occur to achieve a high level of electrical safety for all work performed. The results are then submitted to the PLN unit head as part of the electrical safety decision making process;
2. Conducting electrical safety investigations covering installations, occupational safety and public safety;
3. Providing performance assessment on electrical safety, including standardization, certification, installation safety, occupational safety and public safety;

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW - for Sustainable Development

4. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan keselamatan ketenagalistrikan yang meliputi keselamatan instalasi, keselamatan kerja dan keselamatan masyarakat umum di unit-unit PLN.
5. Membuat laporan pelaksanaan investigasi keselamatan ketenagalistrikan yang meliputi keselamatan instalasi, keselamatan kerja dan keselamatan masyarakat umum di unit-unit PN.

PLN senantiasa berkoordinasi dengan mitra kerja/kontraktor pembangunan atau perawatan pembangkit/gardu induk dengan mengadakan pertemuan safety committee secara rutin. Hal ini diterapkan dengan tujuan untuk mengingatkan semua pihak agar tetap melaksanakan segala ketentuan yang berkaitan dengan keselamatan ketenagalistrikan.

PENERAPAN KEBIJAKAN K3 [G4-LA8]

Target pelaksanaan kegiatan K3 adalah pencapaian zero-accident di setiap unit bisnis PLN. Sekalipun hingga tahun pelaporan 2015 target zero-accident masih belum tercapai, namun perbaikan-perbaikan untuk mengurangi angka kecelakaan kerja terus dilaksanakan dengan satu pemahaman bahwa menciptakan budaya sadar K-3 di organisasi sebesar PLN memang membutuhkan waktu. Terlebih lagi instalasi dan kegiatan operasional PLN tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan bersinggungan secara intens dengan kegiatan masyarakat di ruang-ruang publik.

Kami menerapkan kebijakan pengelolaan K3 melalui implementasi Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja (SMK3), sesuai dengan PP No. 50 tahun 2012, yang dilengkapi dengan sertifikasi OHSAS 18001 serta Penerapan ISO 14001. Implementasi SMK3 ini juga diikuti dengan program sosialisasi, workshop dan diklat. Proses evaluasi penerapan SMK3 didukung dengan Surat Edaran Direksi tentang Penilaian Kinerja Keselamatan Ketenagalistrikan yang di dalamnya termasuk penilaian K3.

Adalah komitmen PLN untuk selalu memperhatikan keselamatan dan kesehatan bagi setiap insan yang terlibat dalam kegiatan usaha Kami, termasuk di dalamnya kontraktor dan subkontraktor. Kebijakan dan standar terkait K3 yang serupa juga dipersyaratkan kepada seluruh kontraktor dan subkontraktor pelaksana pekerjaan konstruksi maupun pemeliharaan pembangkit, jaringan transmisi maupun distribusi PLN. [G4-LA14]

Kami juga mempersiapkan insan PLN dalam menghadapi berbagai kondisi operasional yang tidak terduga, seperti kebakaran instalasi, selain itu Kami telah mengembangkan SOP keadaan darurat serta melakukan sosialisasi bagi seluruh pegawai.

4. Evaluating electrical safety implementation at PLN units, including installations, occupational safety and public safety;
5. Creating reports on electrical safety implementation at PLN units, including installations, occupational safety and public safety.

PLN continually coordinates with business partners / contractors for the construction or maintenance of power plants / substations by conducting regular safety committee meetings. The purpose of these meetings is to encourage all parties to continue implementing electrical safety provisions.

OHS POLICY IMPLEMENTATION [G4-LA8]

OHS implementation targets zero accidents in each PLN business unit. However, as of the 2015 reporting period, we had not achieved the zero target. We will continually make improvements to reduce the workplace accident figure with the sole understanding that creating an OHS-aware culture in an organization as large as PLN requires time. Furthermore, PLN's installations and operational activities are spread throughout Indonesia and are in very close proximity to public activities in public spaces.

PLN implements OHS management policies through the Occupational Health and Safety Management System (SMK3), in accordance with Government Regulation Num. 50 of 2012, supported by OHSAS 18001 certification and ISO 14001 implementation. The SMK3 implementation also consists of information dissemination programs, workshops and training. The evaluation process for its implementation is supported by the Board of Directors' Circular on Electrical Safety Assessment, which includes the assessment of OHS.

PLN is committed to always paying attention to the health and safety of all its employees whenever they are involved in our business activities; this includes our contractors and subcontractors. OHS-related policies and standards are also valid for contractors and subcontractors performing construction, plant maintenance, as well as maintenance of PLN's transmission and distribution network. [G4-LA14]

We also prepare our workforce to respond to unexpected operational conditions, such as installation fire. We have also developed Emergency SOPs and disseminate these to all employees.

Perseroan melakukan simulasi bahaya kebakaran setiap tahun.

Program K-3 Tahun 2015

Sepanjang tahun 2015, telah dilakukan beberapa kegiatan yang menunjang tercapainya target zero-accident, antara lain:

1. Menerapkan SMK3 sesuai PP 50 Tahun 2012
2. Melaksanakan Sosialisasi, Workshop, diklat terhadap pelaksana/pengawas/manajerial tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3. Pembuatan Edaran Direksi tentang Penilaian kinerja Keselamatan Ketenagalistrikan yang didalamnya termasuk K3
4. Melaksanakan bulan K3 untuk menggalakkan kegiatan K3 di seluruh unit PLN

Kami juga melaksanakan kegiatan konseling dengan lebih banyak melibatkan karyawan dan masyarakat umum sebagai audience, tujuannya adalah agar karyawan dan masyarakat mengetahui dan lebih peduli dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, karena topik yang disampaikan lebih kepada pengenalan dan pencegahan bahaya ketenagalistrikan pada pekerjaan dan instalasi terutama bahaya pada instalasi perumahan, contoh : pemasangan stop kontak yang tumpang tindih dan lain-lain.

KINERJA KESELAMATAN KERJA

Segala upaya kami telah lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Namun demikian di tahun 2015 terjadi 43 insiden kecelakaan kerja dengan total jumlah korban 28 orang, dimana 8 orang diantaranya meninggal dunia. Setiap insiden kecelakaan telah dilaporkan dan dianalisa lebih dalam untuk mencegah terjadinya insiden yang sama. [G4-LA6]

Data kejadian kecelakaan kerja pada tahun 2015, sebagai berikut: [G4-LA6]

The Company performs fire drills every year.

2015 OHS Program

Throughout 2015, several activities have been carried out that support the achievement of the zero accident target, among others:

1. Implementing SMK3 in accordance with Government Regulation Num. 50 of 2012
2. Disseminating information, holding workshops, training executives / supervisors / managers in Occupational Health and Safety
3. Creating Board of Directors' Circulars on Electrical Safety performance, which includes OHS
4. Organizing an OHS month to promote OHS in all PLN work units.

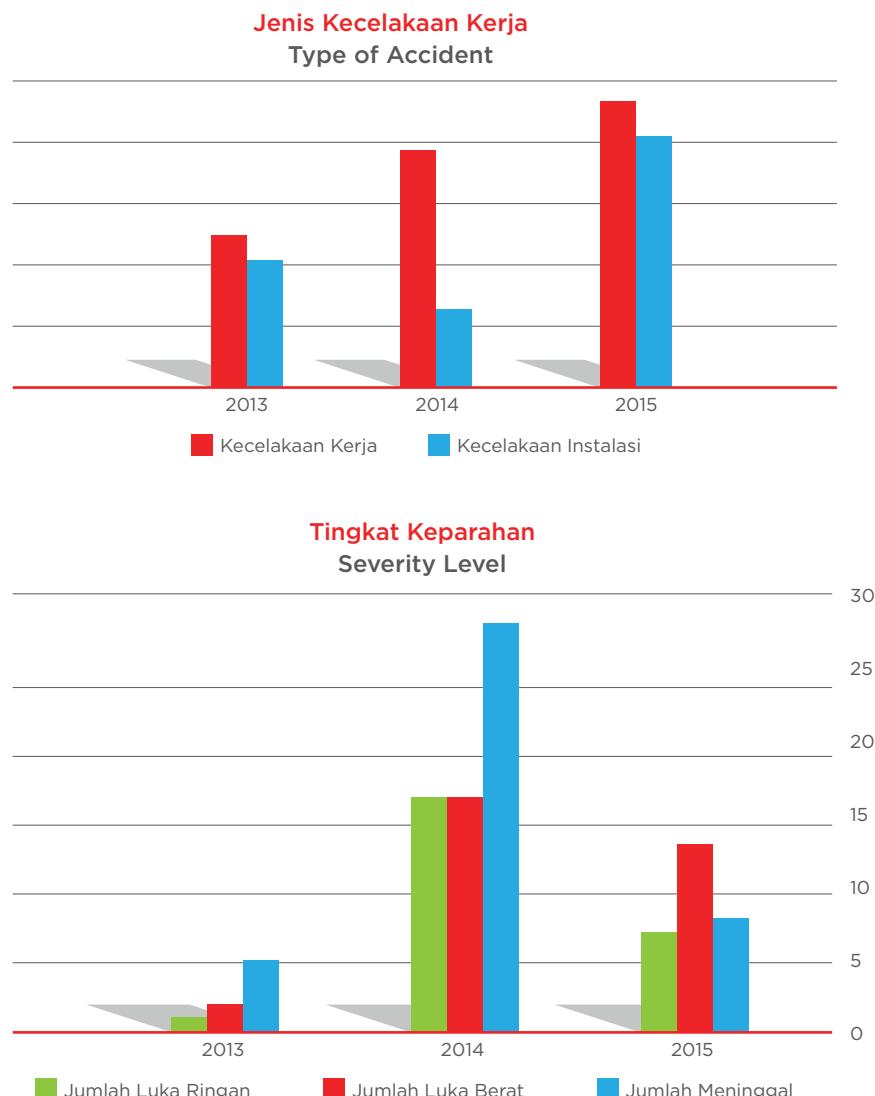
We also carry out counseling activities with greater involvement of employees and the general public as an audience, the aim of which is for employees and the public to be more aware and concerned with Occupational Health and Safety as the topics delivered were aimed more at the recognition and prevention of the dangers of electricity at work and electrical installations, in particular hazards in residential installations, for example: placing too many plugs in electrical sockets and other matters.

OCCUPATIONAL SAFETY PERFORMANCE

We have made every effort to prevent workplace accidents. However, in 2015, there were 43 workplace accidents with a total of 28 victims, of which 8 died. Every incident was reported and assessed in depth to prevent future incidents of the same manner. [G4-LA6]

Workplace accident data for 2015 is as follows: [G4-LA6]

Jenis Insiden	2014	2015	Incident Type
Kecelakaan Kerja	19	23	Workplace Accident
Kecelakaan Instalasi	6	20	Installation Accident
Total Kecelakaan	25	43	Total Accidents
Sudah Investigasi	25	43	Already Investigated
Belum Investigasi	0	0	To Be Investigated
Jenis Luka	Type of Injury		
Jumlah Luka Ringan	16	7	Total Minor Injuries
Jumlah Luka Berat	16	13	Total Serious Injuries
Jumlah Meninggal Dunia	28	8	Total Deaths



Kami percaya bahwa target nihil-kecelakaan akan tercapai dengan dilakukannya investigasi yang menyeluruh, pemahaman mengenai penyebab kecelakaan yang terjadi dan berlanjutnya upaya menanamkan budaya sadar akan risiko kecelakaan kerja kepada seluruh jajaran petugas di lapangan. Kami selalu belajar dari pengalaman dan melakukan perbaikan pada sistem dan proses untuk dapat mendeteksi terjadinya kesalahan yang sama, serta mengembangkan prosedur untuk menghindari terulangnya situasi tersebut untuk mencegah terjadinya insiden kecelakaan yang mengakibatkan adanya korban ringan, luka serius, maupun akibat yang lebih fatal.

Selain itu, kami melakukan sosialisasi di setiap unit bisnis terkait pentingnya praktik K3, serta melakukan pembinaan terhadap unit-unit bisnis melalui nilai pengurang bobot kinerja (KPI) K2 dan K3 apabila tidak memenuhi target.

We believe that the zero accident target can be achieved with thorough investigations, understanding of the cause of accidents that occur and continuing efforts to imbue a culture that is aware of the risk of workplace accidents in every person working in the field. We always learn from experience and improve the system and processes to detect occurrences that are the same as those that have resulted in previous accidents, as well as developing procedures to prevent the repeat of such situations to prevent accidents that cause injury, whether it is minor, severe or fatal.

In addition, we disseminate information to all business units on the importance of OHS practices, as well as providing guidance to business units by reducing their performance score (KPI) for occupational health and safety if they do not meet targets.

BUDAYAKAN ZERO-ACCIDENT ZERO ACCIDENT CULTURE

Pengetahuan dalam Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lingkungan PLN sangat penting dan wajib adanya agar menjadi budaya, guna menciptakan tujuan utama yaitu Zero Accident.

Risiko kecelakaan bisa terjadi kapan dan dimana saja termasuk di lingkungan kerja. Kendati risiko kecelakaan itu tidak dapat dihilangkan, namun hanya nilai kemungkinannya (probability) yang dapat dikurangi dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan bekerja.Umumnya, faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja dikarenakan kurangnya kesadaran pekerja dan kualitas serta keterampilan pekerja yang kurang memadai. Yang paling mendasar dari seluruh penyebab insiden kecelakaan kerja adalah - Rasa Malas Untuk Mengikuti Prosedur Kerja Yang Telah Memenuhi Kaidah Pencegahan Risiko Kecelakaan Kerja -.

Guna terhindar dari risiko kecelakaan kerja, tiga komponen utama pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, yakni: pelaksana pekerjaan, pengawas pekerjaan, dan pengawas K3 harus taat azas. Ketiga komponen tersebut harus menjalankan pekerjaan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SOP) yang mengacu pada UU No.1 Tahun 1970 Tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UU No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, serta PP No.50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen K3.

Oleh karenanya sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya risiko insiden kecelakaan kerja, Kami bertekad menumbuh kembangkan Budaya Zero Accident. Salah satu program utama yang dilakukan adalah pelaksanaan sidak kepatuhan terhadap implementasi prosedur dan persyaratan dasar terkait K-3 di seluruh unit-unit bisnis PLN di seluruh wilayah operasional.

Understanding and Implementing Occupational Health and Safety (OHS) in the PLN environment is essential and mandatory in order to establish a culture that creates an overriding goal of Zero Accidents.

The risk of accidents can occur at anytime and anywhere, including in the workplace. Despite the risk of accidents being impossible to eliminate, the probability can be reduced with due regard for occupational health and safety. Generally, the underlying cause of workplace accidents is a lack of awareness in workers, as well as inadequate worker quality and skill. The most fundamental reason for all workplace accidents is - A Lack of Interest In Following Workplace Procedures and Rules That Meet The Requirement To Prevent Workplace Accidents.

To avoid the risk of workplace accidents, three main components must be in place for operations in the field, namely: workers, work supervisors and OHS supervisors who obey the rules. All three components must carry out their work in accordance with Standard Operating Procedures (SOP) that refer to Law Num. 1 of 1970 on Occupational Health and Safety, Law Num. 13 of 2003 on Labor, Law Num. 30 of 2009 on Electricity, and Government Regulation Num. 50 of 2012 on OHS Management Systems.

Therefore, as part of our efforts to prevent the risk of workplace accidents, we are determined to cultivate a Zero Accident Culture. One of the main programs for this is the implementation of compliance inspections for the implementation of procedures and basic requirements related to OHS in all PLN business units in all operational areas.

KESEHATAN KERJA

Kami juga memperhatikan kesehatan para pegawai maupun keluarga pegawai, yaitu melalui program pemeriksaan rutin bagi para pekerja yang bekerja pada lingkungan dan kondisi tertentu, misalnya terhadap para operator pada mesin pembangkit yang kesehariannya bekerja dengan kondisi kebisingan yang melewati ambang batas. Kami juga melakukan upaya pemantauan lingkungan di unit bisnis yang dimaksudkan untuk menjaga kondisi lingkungan agar terhindar dari limbah pembuangan yang dapat mencemarkan lingkungan. Dalam kaitan pemantauan kondisi lingkungan ini, PLN menetapkan SE Direksi No. 109 - tahun 2014 yang didalamnya termasuk mewajibkan pemeriksaan berkala bagi tenaga kerja yang ada. [G4-LA7]

Sementara untuk menjaga kesehatan keluarga pegawai, Kami memberikan pendidikan, pelatihan, konseling, pencegahan dan pengontrolan terhadap risiko terjangkitnya berbagai penyakit serius maupun penyakit menular, seperti demam berdarah, malaria dan sebagainya, selain menyediakan fasilitas cek kesehatan rutin serta memberikan biaya penggantian pengobatan sesuai ketentuan yang berlaku.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI K3

Sebagai bagian dari upaya menumbuh kembangkan budaya sadar K3 di seluruh unit bisnis PLN, Kami memberikan penghargaan / Sertifikasi terhadap usaha/kinerja yang dilakukan manajemen unit bisnis dalam mengelola dan meningkatkan kinerja kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungannya berupa penghargaan Sertifikasi Implementasi SMK3.

OCCUPATIONAL HEALTH

PLN also pays attention on the wellbeing of its workforce as well as their families by providing routine checkups for employees working in certain environments and conditions, for example power plant machinery operators who work on a daily basis in a noisy environment that exceeds threshold levels. We also strive to monitor the environment in certain business units to safeguard environmental conditions and prevent discarded waste from polluting the environment. In relation to monitoring these environmental conditions, PLN has issued Board of Directors' Circular Num. 109 of 2014, which contains a requirement for periodic checkups on employees. [G4-LA7]

Meanwhile, to maintain the health of our employees' families, we provide education, training, counseling, prevention and control of the risk of various serious and contagious diseases, such as dengue and malaria, as well as providing facilities for routine health checkups, as well as paying for medical treatment in accordance with applicable regulations.

OHS AWARDS AND CERTIFICATION

As part of our efforts to imbue a culture of OHS awareness in all PLN business units, awards / certificates are conferred for effort / performance taken by business unit management to manage and improve occupational health and safety performance in the form of OHS Management System Implementation Certification.

Unit bisnis yang berhasil mendapatkan Sertifikasi Implementasi K3 pada tahun 2015 antara lain:

Business units that received OHS Implementation Certification in 2015 were:

Unit Bisnis Business Unit

PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat West Sumatra Region

PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara North Sumatra Region

PT PLN (Persero) Wilayah S2JB S2JB Region

PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung Bangka Belitung Region

PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat West Kalimantan Region

PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Utara North Kalimantan Region

PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah South Kalimantan and Central Kalimantan Region

PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara Region

PT PLN (Persero) Distribusi Bali Bali Distribution

PT PLN (Persero) Distribusi Banten Banten Distribution

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat West Java Distribution

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur East Java Distribution

PT PLN (Persero) Distribusi Lampung Lampung Distribution

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I Parent Unit Development I

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan IV Parent Unit Development IV

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V Parent Unit Development V

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII Parent Unit Development VIII

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XI Parent Unit Development XI

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XII Parent Unit Development XII

PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan South Sumatra Power Generation

PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara North Sumatra Power Generation

PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B Tanjung Jati B Power Generation

PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban (P3B) Sumatera Sumatera Distribution and Load Regulation Center (P3B)

PT PLN (Persero) Pusat Jasa Manajemen Konstruksi Construction Management Services Center

PT PLN (Persero) Pusat Jasa Sertifikasi Certification Service Center

PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Center

PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Research and Development Center

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW – for Sustainable Development



TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

SUSTAINABLE GOVERNANCE

halaman page 186 - 205



Kami menjalankan amanat perbaikan pengelolaan perusahaan untuk memastikan keberhasilan Program 35.000 MW dengan jalan berupaya meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan yang baik melalui realisasi peninjauan ulang dan perbaikan soft structure pengelolaan perusahaan, perubahan struktur organisasi, penguatan program pengawasan dan pencegahan tindakan penyimpangan agar pelaksanaan program pembangunan ketenagalistrikan skala besar tersebut memberi manfaat optimal berkelanjutan, baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional maupun dalam memenuhi harapan para pemangku kepentingan.

We carry out the mandate of improving Company management to ensure the success of the 35,000 MW Program by way of striving to improve the quality of good corporate governance through the review and improvement of the company's soft structure management, changing the organization structure, strengthening surveillance programs and preventing irregularities so that this large-scale electrical power development program can provide sustainable optimum benefit both to support national economic growth and to fulfill the expectations of our stakeholders.

Kami terus menunjukkan komitmen meningkatkan kualitas penerapan *best practice* Tata Kelola Perusahaan yang Baik melalui realisasi beragam program perbaikan pengelolaan operasional guna menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Seluruh upaya tersebut dilandasi oleh keyakinan seluruh jajaran manajemen puncak maupun jajaran pelaksana, bahwa penerapan *best practices* GCG akan meningkatkan kepercayaan sekaligus nilai perusahaan secara berkelanjutan.

Terdapat 5 (lima) tujuan utama dari penerapan *best practices* GCG yang dilaksanakan, yakni:

1. Memaksimalkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan berkualitas, peningkatan efisiensi operasional serta peningkatan layanan kepada pemangku kepentingan.
2. Meningkatnya nilai perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalkan risiko keputusan investasi yang mengandung benturan kepentingan.
3. Meningkatnya kepercayaan pemegang saham serta kepuasan pemangku kepentingan karena meningkatnya nilai perusahaan.
4. Meningkatkan kontribusi PLN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatnya kualitas iklim investasi ketenagalistrikan nasional.

We continue to demonstrate our commitment to improving the quality of best practice Good Corporate Governance implementation through the realization of several programs to improve operational management and support the achievement of the company's objectives. All these efforts have been based on the belief of all the top management and supervisors that the application of GCG best practices improves trust and the company's value on an ongoing basis.

There are 5 (five) main goals from the application of GCG best practice, namely:

1. Maximizing company performance by creating a better, high quality decision making process, improving operational efficiencies and improving service to our stakeholders.
2. Increasing the company's value by improving financial performance and minimizing the risk of investment decisions that bear a conflict of interest.
3. Improving shareholder trust and stakeholder satisfaction due to increased company value.
4. Increasing PLN's contribution to the national economy.
5. Improving the quality of the national electrical power investment climate.

PRINSIP DASAR GCG - PLN BASIC GCG PRINCIPLES IN PLN

Seluruh jajaran PLN bertekad kuat untuk menerapkan lima prinsip dasar GCG dengan sebaik-baiknya yakni:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Responsibilitas (Pertanggung Jawaban)
4. Independensi (Kemandirian)
5. Fairness (Kewajaran)

Every person in PLN strongly upholds, to their best ability, the application of the five basic GCG principles namely:

1. Transparency
2. Accountability
3. Responsibility
4. Independence
5. Fairness

Kami juga menambahkan satu elemen penting dalam penerapan lima prinsip dasar GCG, yakni, integritas yang dikembangkan melalui PITA (Partisipasi, Integritas, Transparansi dan Akuntabilitas). PITA merupakan salah satu dasar penting dalam meningkatkan integritas seluruh jajaran PLN dengan tujuan utama mencegah dan meminimalisir peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*fraud*) dan tindakan tidak terpuji, yaitu korupsi. PITA merupakan

We also add one important element to the application of the five basic GCG principles, namely integrity, which is developed through PITA (Participation, Integrity, Transparency and Accountability). PITA is an important basis that can serve to improve the integrity of every person in PLN, with the primary aim of preventing and minimizing the opportunity for misuse of authority (*fraud*)

salah satu jalan yang ditempuh untuk membangun budaya perusahaan yang anti penyalahgunaan kewenangan dan tindak korupsi.

Pilar budaya antikorupsi- PITA, Kami elaborasikan sebagai berikut. [G4-SO4]

1. Pilar Pertama: Partisipasi

Partisipasi meliputi deklarasi komitmen integritas pegawai PLN di seluruh lapisan unit dan wilayah kerja PLN, mulai pegawai hingga seluruh jajaran stakeholders. Partisipasi ini juga aktif melibatkan pihak-pihak yang terlibat kerjasama dengan PLN melalui deklarasi *Collective Action*, yang merupakan komitmen bersama (antara PLN, Vendor dan Publik) untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Secara lebih dalam, PLN dan mitra kerja saling mendukung melalui sarana komunikasi, evaluasi kualitas, akuntabilitas dan integritas dalam pengadaan barang/jasa dan pelayanan pelanggan.

2. Pilar Kedua: Integritas

Integritas pegawai dalam bekerja melayani masyarakat sangat penting artinya untuk membangun budaya PLN Bersih. Integritas menjadikan pegawai PLN patuh terhadap *Code of Ethic* (CoE) dan *Code of Conduct* (CoC) yang berlaku di perusahaan. Sebagai contoh pegawai PLN dilarang berinteraksi dengan vendor yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of Interest*) dan timbulnya gratifikasi melalui berbagai media. Integritas ini pun berlaku pada proses pelayanan pelanggan, yakni melalui perbaikan indeks integritas layanan publik (ILP). Salah satu penerapan yang telah dilakukan, antara lain kemudahan proses pasang baru (PB), tambah daya (TD), dan layanan gangguan (LG) sehingga berperan dalam menciptakan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat yang bebas korupsi dan suap. [G4-56]

3. Pilar Ketiga : Transparansi.

Keterbukaan informasi dan sikap responsif terhadap permintaan informasi publik sangat menentukan dan penting dalam pembangunan budaya PLN. Dengan mengedepankan transparansi, maka peluang korupsi, suap, dan lainnya dapat ditekan seminimal mungkin. Penerapan prinsip transparansi ini sejalan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 Tahun 2008 yang telah diakomodir oleh PLN melalui Keputusan Direksi No. 501 Tahun 2012. Keputusan ini mengatur tentang prosedur keterbukaan dan permintaan informasi oleh publik, baik melalui media seperti internet maupun media konvensional, seperti buku panduan, brosur, leaflet, dan lainnya.

and non-praiseworthy acts, i.e. corruption. PITA is one way of establishing a corporate culture that is against the misuse of authority and corrupt acts.

Following is a description of the pillars of anti-corruption / PITA: [G4-SO4]

1. The First Pillar: Participation

Participation includes the integrity commitment declaration by all PLN employees across all units and regions within PLN, from the lowest employees up to the level of stakeholders. This participation also actively applies to parties that are involved in cooperation with PLN through a Collective Action declaration that forms a joint commitment (between PLN, vendors and the public) to prevent corruption in the procurement of goods and services. In more detail, this means that PLN and these business partners need to support each other by proper use of communications, quality evaluation, accountability and integrity in the procurement of goods and services and customer service.

2. The Second Pillar: Integrity

Employee integrity when delivering services to the public is crucial for building a Clean PLN culture. Integrity encourages all PLN employees to obey the Code of Ethics (CoE) and Code of Conduct (CoC) that is applied in the Company. An example of this implementation is that PLN employees are prohibited from interacting with vendors to avoid potential conflicts of interest and bribery in any form. Integrity also applies to the customer service process, namely through the improvement of the Public Service Integrity Index. One application of this, among other things, is PLN making the process for new installations (PB), additional power (TD) and repair services (LG) much easier for its customers, thus playing a role in creating services for public welfare that are free from corruption and bribery. [G4-56]

3. The Third Pillar: Transparency.

Information disclosure and a responsive attitude to public information requests are very decisive and important to develop PLN's culture. By prioritizing transparency, the opportunity for corruption, bribery and other such acts to take place will be minimized. Implementing the transparency principle is in line with Public Information Disclosure Law Num. 14 of 2008 that has been accommodated by PLN through the Board of Directors' Decision Num. 501 of 2012. This regulates procedures for transparency, information disclosure and requests by the public, be it through the internet or conventional media, such as handbooks, brochures, leaflets, etc.

4. Pilar Keempat : Akuntabilitas

Mendorong pegawai PLN untuk selalu bersikap responsif terhadap setiap keluhan pelanggan, dan memberi kesempatan pengaduan terkait pelayanan pelanggan dan pengadaan barang/jasa. Contact center 123 dan website PLN saat ini merupakan wujud dari ketersediaan akuntabilitas. Selain itu juga mendukung implementasi *whistleblower system* dan program pengendalian gratifikasi untuk melindungi kerahasiaan pelapor.

4. The Fourth Pillar: Accountability

PLN employees are encouraged to always be responsive to all customer complaints and to provide the opportunity for complains about customer service and the procurement of goods and services. PLN's Contact Center 123 and website serve as forums for the provision of the accountability principle. Furthermore, PLN supports and implements a whistleblower system that protects the confidentiality of whistleblowers, as well as a gratification control program.

PITA - PILAR BUDAYA ANTI KORUPSI
PITA - A PILLAR OF THE ANTI-CORRUPTION CULTURE



Sebagai bagian dari upaya meningkatkan integritas, sejak tahun 2012 Manajemen mendeklarasikan "PLN Anti Suap", yaitu deklarasi untuk memotivasi seluruh jajaran Perusahaan untuk menjunjung tinggi integritas sebagai wujud praktik terbaik tata kelola pada saat melaksanakan tugas sehari-hari, melaksanakan kegiatan operasional maupun saat merealisasikan proyek-proyek pengembangan.

Masih dalam rangkaian peningkatan integritas, maka dideklarasikan gerakan "PLN Bersih - No Suap" sebagai tagline gerakan "PLN Anti Suap" tersebut.

As part of our efforts to improve integrity, since 2012, the Management has declared "PLN Against Bribery", a declaration to motivate every level of PLN employee to uphold integrity as realization of governance best practice in carrying out their day to day duties, carrying out operational activities and bringing development projects to fruition.

Still on the subject of improving integrity, PLN has adopted the declaration "PLN is Clean - No Bribery" as the tagline of its "PLN Against Bribery" movement.

DEKLARASI PLN ANTI SUAP PLN: [G4-SO4]
PLN ANTI BRIBERY DECLARATION: [G4-SO4]

1. Tidak akan melakukan segala tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi menurut UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pelayanan publik yang dilaksanakan PLN. Tindakan tersebut meliputi korupsi, nepotisme, gratifikasi, *mark up*, pemberian hadiah, konflik kepentingan, dan pemerasan.
2. Menjalankan proses pengadaan barang dan jasa dengan berpegangan pada prinsip transparansi dan efisiensi dalam penggunaan aset negara.
3. Menjalankan proses pengadaan barang dan jasa dengan mengikuti proses legal formal juga menekankan pada prinsip efisiensi dan transparansi
1. Avoid all acts that may be categorized as corruption according to Law Num. 20 of 2001 on Corruption, in every process related to the procurement of goods and public services implemented by PLN. These actions include corruption, nepotism, graft, mark ups, gifts, conflicts of interest and extortion.
2. Uphold the principle of transparency in the procurement of goods and services, as well as efficient use of state assets.
3. Follow formal legal processes in the procurement of goods and services and uphold the principles of efficiency and transparency.

Oleh karena pentingnya penerapan praktik-terbaik GCG bagi keberlanjutan usaha dalam jangka panjang, Kami senantiasa berupaya memastikan adanya perbaikan kualitas penerapan prinsip-prinsip dasar GCG, termasuk implementasi integritas secara berkesinambungan, baik dari sisi perangkat lunak GCG (yakni pedoman, aturan-aturan dan sistem kerja) maupun sisi perangkat keras (yakni pembentukan lembaga pelaksana unit kerja).

Untuk mendapatkan umpan balik bagi perbaikan praktik GCG di masa depan, Kami melaksanakan penilaian secara berkala mengenai kualitas penerapan prinsip dasar GCG dan perbaikan perangkat GCG tersebut.

ASESMEN KUALITAS PENERAPAN GCG

[G4-14] [G4-15] [G4-SO4]

Dalam rangka mendapatkan umpan balik bagi perbaikan kualitas penerapan praktik terbaik GCG, maka dilakukan asesmen kualitas penerapan GCG secara berkala sejak tahun 2002. Melalui asesmen berkala tersebut, Kami mempertimbangkan dengan seksama rekomendasi yang dikemukakan assessor untuk memperbaiki kualitas penerapan praktik terbaik GCG pada periode selanjutnya.

Kami telah melakukan penilaian GCG sejak tahun 2002. Assessment dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Kementerian BUMN mengenai praktik GCG di lingkungan BUMN.

Due to the importance of GCG best practice application for the long term continuity of business, We always strive to ensure that the quality of the basic principles of GCG are improved, including continual use of integrity both from the soft aspects of GCG (guidelines, rules and work systems) and the hard aspects (establishing work unit implementing agencies).

To obtain feedback on improvements in GCG practices in the future, We periodically implement assessment on the quality of basic GCG principle implementation and make improvements to GCG tools.

GCG IMPLEMENTATION QUALITY ASSESSMENT [G4-14] [G4-15] [G4-SO4]

To obtain feedback on improvements to the implementation of GCG best practices, periodic assessments have been conducted since 2002. Through these periodic assessments, We can carefully consider recommendations made by the assessor regarding improvements to the quality of GCG best practice implementation in the following period.

We have assessed our GCG since 2002 and these assessments have been carried out with consideration of SOE Ministerial provisions regarding GCG practices in an SOE environment. For each assessment period, We strive

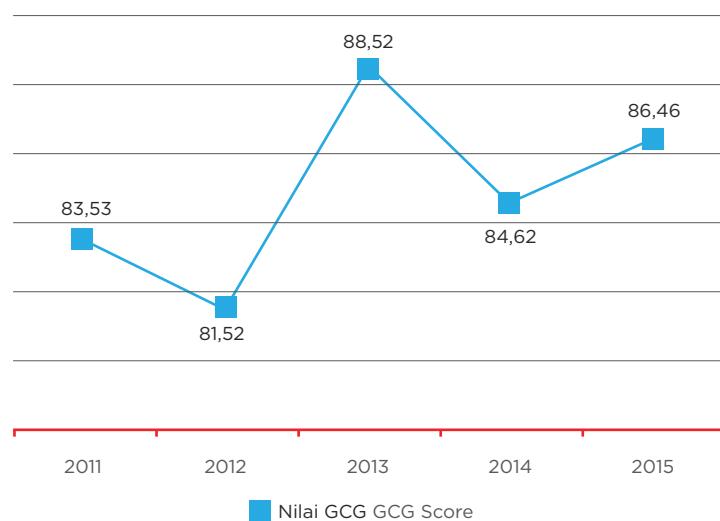
Pada setiap periode penilaian, Kami berupaya melakukan perbaikan beberapa kebijakan, mekanisme kerja maupun pembentukan infrastruktur tata kelola baru sesuai rekomendasi penilai, setelah itu dilakukan kembali asesmen penerapan praktek GCG pada periode dimaksud, dengan memperhatikan skor penilaian dan berupaya melakukan perbaikan sesuai rekomendasi assessor.

Trend skor penilaian kualitas penerapan praktek GCG dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut.

to make improvements to policies, work mechanisms and to establish new corporate governance infrastructure in accordance with the assessor's recommendations. Afterwards, a further assessment of GCG practice implementation for that period is made taking into account the score and efforts to make the improvements recommended by the assessor.

The score trend for GCG implementation quality over the last 5 years is as follows:

Grafik Skor Penilaian Kualitas Penerapan GCG Periode Tahun 2011-2015
GCG Implementation Quality Score Graph 2011-2015



* Terhitung tahun 2012 penilaian menggunakan parameter sesuai Surat Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tentang indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Coporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan untuk tahun 2011 dan sebelumnya menggunakan Surat Edaran Kementerian Negara BUMN No. S-168/MBU/2008 tentang Penerapan Praktik GCG di BUMN.

* Since 2012, the assessment has made use of parameters according to Circular of the Secretary to the SOE Ministry Num. SK-16/S.MBU/2012 on Indicators/Parameters to Assess and Evaluate the Application of Good Corporate Governance in State Owned Enterprises. Meanwhile, for 2011 and previous years, Circular of the SOE Minister Num. S-168/MBU/2008 on the Application of GCG Practices in SOEs was used.

Kami kemudian melakukan berbagai perbaikan sesuai rekomendasi yang menyertai pelaksanaan penilaian kualitas implementasi GCG dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Prioritas perbaikan dilaksanakan pada fungsi pencegahan dan pengawasan terhadap bagian-bagian yang rawan tindakan penyelewengan, fraud maupun korupsi.

In accordance with recommendations made along with the GCG implementation quality assessment, We then make various adjustments that are in line with the conditions we face. The priority improvements are to preventative functions and surveillance of divisions prone to misappropriation, fraud and corruption.

Selain pencegahan dari sisi operasional yang telah dilakukan melalui pengurangan interaksi personal dalam bentuk implementasi sistem aplikasi dengan dukungan teknologi informasi (AP2T, P2APST, Call Center 123 dan sejenisnya), PLN menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga yang kompeten dan kredibel dalam mencegah dan mengawasi tindakan yang terindikasi korupsi, seperti BPK, KPK dan Transparency International Indonesia (TII).

Kami meyakini, perbaikan kualitas implementasi GCG telah memberi andil terhadap upaya pemenuhan harapan seluruh pemangku kepentingan secara efektif, efisien dan transparan, sehingga PLN berhasil meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari. Oleh sebab itu, Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dan mewujudkan diri menjadi institusi yang bersih, bebas dari tindakan suap maupun korupsi.

PEDOMAN, STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA [G4-34]

Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi GCG, Kami telah melengkapi seluruh pranata dasar yang diperlukan, meliputi:

1. Pedoman Perilaku, yang berisi pedoman perilaku kebiasaan baik dan tata pergaulan profesional di lingkungan Perseroan.
2. Pedoman GCG, sebagai pegangan pelaksanaan tata kelola di perusahaan berikut kebijakan-kebijakan pengelolaan operasional perusahaan.
3. Board Manual, yang berisi Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten sehingga menjadi acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perseroan.

Kami melengkapi keseluruhan pedoman pelaksanaan GCG dengan struktur tata kelola yang melibatkan interaksi tiga organ perusahaan utama, yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi serta organ pendukung yang meliputi Komite ditingkat Dewan Komisaris dan Direksi, dengan bagan struktur interaksi ringkas sebagai berikut.

In addition to prevention on the operational side, which is undertaken to reduce personal interaction by implementing information technology-based application systems (AP2T, P2APST, Call Center 123 and such like), PLN cooperates with several competent and credible institutions to prevent and oversee actions that could indicate corruption, such as the Supreme Audit Agency (BPK), Corruption Eradication Commission (KPK) and Transparency International Indonesia (TII).

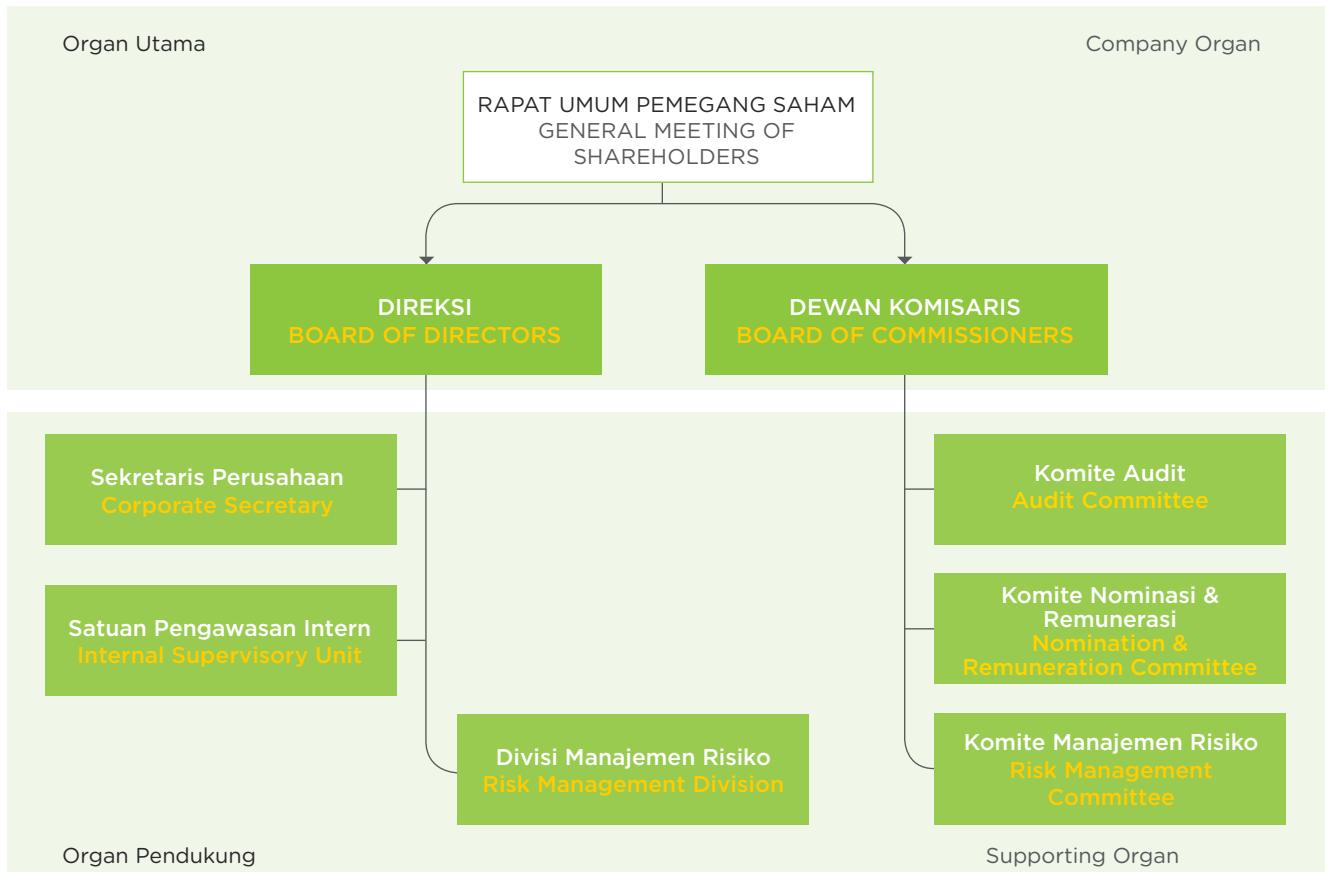
We believe that improvements to the quality of GCG implementation have contributed to efforts to effectively, efficiently and transparently fulfill stakeholder expectations, such that PLN has successfully improved accountability in its day to day operations. For this reason, We will continue our efforts to improve the quality of GCG implementation and turn ourselves into a clean institution that is free from bribery and corruption.

GOVERNANCE GUIDELINES, STRUCTURE AND MECHANISM [G4-34]

In the interest of improving the quality of GCG implementation, We have established all the necessary basic structures, including:

1. Code of Conduct, which contains a guideline to good norms of behavior and ways of communicating professionally within the Company environment.
2. GCG Guidelines, as a basis for governance within the company and the company's operational governance policies.
3. Board Manual, which contains Guidelines for the Board of Directors and Board of Commissioners to carry out their activities in a structured, systematic, easily understandable and consistent manner and serves as a reference for Directors and Commissioners in carrying out their individual duties to achieve the Company's vision and mission.

All of our GCG implementation guidelines are backed up with a governance structure that involves the three main corporate bodies, namely the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as the supporting bodies, which are the Committees appointed by the Board of Commissioners or Board of Directors. A flowchart overview of the interaction structure follows:



Kami merancang struktur tata kelola perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami meyakini melalui penerapan struktur yang mampu menggambarkan masing-masing fungsi peran dan tugas organ perusahaan utama tersebut, PLN mampu mencapai target jangka panjang yang berkualitas dan berkelanjutan berkat dukungan budaya perusahaan yang tepat disertai penerapan nilai-nilai dan perilaku yang menjunjung tinggi integritas baik di level manajemen atas maupun di seluruh jenjang organisasi.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM [G4-34]

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan lembaga tertinggi, yakni forum pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dan didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan. RUPS terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

We have designed the corporate governance structure to provide added value to all our stakeholders. We believe that by applying this structure, which illustrates each function, role and duty of the Company's main bodies, PLN is able to achieve long term targets that are of high quality and sustainable thanks to the support of the right corporate culture and the application of values and behaviors that uphold integrity at the management level and throughout the organization.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

[G4-34]

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest decision making institution, namely a forum in which the stakeholders are able to make important decisions related to and based on the interests of the Company's business. There are two types of GMS: the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).

Melalui RUPST maupun RUPSLB, pemegang saham dapat menggunakan haknya dalam :

1. mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris maupun Direksi sekaligus memberikan pendapat dan suaranya untuk mengambil keputusan penting secara independen dan seimbang antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan perusahaan serta dalam posisi yang setara antara pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas.
2. mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris dan dewan direksi.
3. menentukan besaran remunerasi dan kompensasi bagi dewan komisaris dan dewan direksi.
4. melakukan evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dengan melihat capaian *Key Performance Indicators (KPI)* Perseroan dan manajemen puncak yang telah ditetapkan sebelumnya. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas kinerja Perseroan baik kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan sosial, termasuk dalam mengelola risiko dan memanfaatkan peluang usaha.

Ukuran kinerja KPI terdiri atas KPI Direksi dan KPI Komisaris, yang ditinjau setiap periode operasional dan dilaporkan dalam RUPS. Dalam KPI Kami menetapkan dengan tegas dan jelas target kinerja Perusahaan di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, serta keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk parameter lain mencakup pelayanan kepada pelanggan, persepsi terhadap perseroan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan sebagainya.

DEWAN KOMISARIS

Sesuai Anggaran Dasar, tugas Dewan Komisaris sebagai organ Perusahaan adalah bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurus Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan tugas pengawasan ketaatan terhadap seluruh peraturan perundangan yang berlaku di seluruh bidang kegiatan operasional.

Dewan Komisaris berkewajiban melakukan pengawasan dan memberikan nasihat untuk memastikan bahwa tujuan Perseroan serta keputusan RUPS dapat dilaksanakan dan dicapai. Untuk itu, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Dewan Komisaris sedangkan Direksi dibantu oleh unit kerja yang terkait dengan mekanisme tata kelola tersebut. Sementara pelaksanaan atas setiap keputusan RUPS dan pengelolaan perusahaan sehari-hari dilakukan oleh

Through the AGMS and the EGMS, the shareholders can use their rights to:

1. Assess the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors, provide opinions and vote on important decisions independently by balancing the interests of the shareholders and the Company, where each shareholder has an equal footing with other shareholders, be they majority or minority shareholders.
2. Appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
3. Determine the amount of remuneration and compensation paid to the Board of Commissioners and Board of Directors.
4. Assess the performance of the Board of Directors and the Board of Commissioners based on the Key Performance Indicators (KPI) achievements of the Company and the top management. The Board of Commissioners and Board of Directors are responsible for the Company's performance in the economic, environmental and social fields, as well as in risk management and taking advantage of business opportunities.

KPI performance measures consist of KPIs for the Board of Directors and for the Board of Commissioners, which are reviewed each operational period and reported in the GMS. In the KPIs, we strongly and clearly determine the Company's targets in the economic, social and environmental fields, as well as occupational health and safety and other parameters such as customer service, perception of the company, compliance with legislation and regulations, etc.

BOARD OF COMMISSIONERS

In accordance with the Articles of Association, the duties of the Board of Commissioners as a Company body, are responsibility for overseeing the implementation of the Company's policies as carried out by the Board of Directors, as well as advising the Board of Directors with regard to the Company's development plans, the company's work and budget plan, the implementation of provisions in the Articles of Association and Decisions made in the General Meetings of Shareholders. In addition, the Board of Commissioners also oversees compliance with all applicable legislation in all fields of operation.

The Board of Commissioners is responsible for supervising and providing advice to ensure that the Company's objectives and the decisions of the GMS are implemented and achieved. For this reason, the Board of Commissioners is assisted by Board of Commissioners Committees, while the Board of Directors is assisted by work units related to the governance mechanism. Meanwhile, implementation of every decision made by the GMS and day to day

Direksi. Oleh karena masing-masing fungsinya yang harus independen, maka pada susunan kepengurusan Perseroan maupun anak usahanya, tidak ada anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai Direksi.

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), sedangkan untuk pedoman kerja internal dewan komisaris mengacu pada manual Dewan Komisaris.

Adapun komposisi Dewan Komisaris PLN adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama Name	Position
Plt. Komisaris Utama	Hasan Bisri	Act. President Commissioner
Komisaris Independen	Oegroseno	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Darmono	Independent Commissioner
Komisaris	Harry Susetyo Nugroho	Commissioner
Komisaris	Jarman	Commissioner
Komisaris	Andin Hadiyanto	Commissioner
Komisaris	Budiman	Commissioner
Komisaris	Hasan Bisri	Commissioner
Komisaris	Aloysius K. Ro	Commissioner

DIREKSI

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan UU Perseroan, Direksi Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial sekalipun dapat bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

Dalam menjalankan peran dan fungsi pengelolaan perusahaan serta mengelola hubungan dengan Dewan Komisaris, Direksi mengacu pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing

management of the company is in the hands of the Board of Directors. For this reason, the functions of each board must remain independent, thus in the management composition of the Company and its subsidiaries, no member of the Board of Commissioners concurrently serves as a Director.

In carrying out its oversight and advisory duties over the Board of Directors, the Board of Commissioners refers to the Board Manual, which is applicable to both the Board of Commissioners and Board of Directors, while for internal work guidelines, the Board of Commissioners refers to the Board of Commissioners' Manual.

The Composition of the PLN Board of Commissioners was as follows:

BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the Company's Articles of Association and provisions in legislation, the Board of Directors is authorized and fully responsible for the Company's management in the interests of the Company as stated in its purpose and objectives, and to represent the Company within and outside courts of law. The Board of Directors is a collective collegial body with regard to its duties and responsibilities, and may act upon and make decisions in accordance with the distribution of its members' duties and responsibilities.

In carrying out the role and functions of the company management, as well as managing its relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors refers to the Board Manual for the Board of Commissioners and Board of Directors, which contains instructions on the work of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as explaining the phases of activity in a structured, systematic, easy to understand and consistently applicable manner and can serve as a reference for the Board of Commissioners and the Board of Directors in carrying out their respective duties to achieve the Company's Vision and Mission.

untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Pada akhir tahun pelaporan, Direksi PLN terdiri atas 11 orang anggota Direktur, termasuk Direktur Utama, dengan susunan personalia sebagai berikut.

The Board of Directors is appointed and dismissed by the GMS.

At the end of the reporting year, the PLN Board of Directors consisted of 11 members, including the President Director, with the following composition.

Jabatan	Nama Name	Position
Direktur Utama	Sofyan Basir	President Director
Direktur Keuangan	Sarwono Sudarto	Director of Finance
Direktur Perencanaan Korporat	Nicke Widyawati	Director of Corporate Planning
Direktur Pengadaan	Supangkat Iwan Santoso	Director of Procurement
Direktur Bisnis Regional Sumatera	Amir Rosidin	Director of Regional Business - Sumatera
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat	Murtaqi Syamsudin	Director of Regional Business - West Java
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah	Nasri Sebayang	Director of Regional Business - Central Java
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur dan Bali	Amin Subekti	Director of Regional Business - East Java and Bali
Direktur Human Capital Management	Muhamad Ali	Director of Human Capital Management
Direktur Bisnis Regional Kalimantan	Djoko R. Abu Manan	Director of Regional Business - Kalimantan
Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara	Machnizon	Director of Regional Business - Sulawesi and Nusa Tenggara
Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua	Haryanto W.S	Director of Regional Business - Maluku and Papua

KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite fungsional, yakni Komite Audit (KA), Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Komite Nominasi & Remunerasi (KNR). Komite tersebut bersifat independen dengan kriteria mencakup diantaranya:

1. Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua dengan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris;
2. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PLN dan bukan merupakan Direksi atau karyawan PLN dan atau anak perusahaan PLN sekurangnya dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat sebagai Komite Audit maupun Komite Manajemen Risiko.

Dalam kegiatan operasional sehari-hari, Dewan Komisaris juga dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan beberapa tenaga ahli.

BOARD OF COMMISSIONERS' COMMITTEES

In carrying out its supervisory duties, the Board of Commissioners is assisted by 3 (three) functional committees, namely the Audit Committee, the Risk Management Committee and the Nomination and Remuneration Committee. These committees are independent in nature and include the following criteria:

1. Have no familial relations through marriage or descent to the second degree with fellow members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners
2. Have no direct or indirect business relationships related to PLN's business and do not serve as a Director or employee of PLN and/or any of its subsidiaries for a period of at least one year since appointment to the Audit Committee or Risk Management Committee.

In its day to day operations, the Board of Commissioners is also assisted by the Secretary to the Board of Commissioners and various expert staff.

KOMITE DIREKSI

Untuk mendukung efektifitas pengelolaan perusahaan, Direksi membentuk beberapa komite yang langsung bertanggungjawab kepada Direksi. Komite ini dibentuk untuk tugas-tugas khusus yang memerlukan perhatian lebih dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha.

Saat ini, terdapat 8 (delapan) komite di bawah Direksi dengan uraian ringkas tugas utama sebagai berikut.

BOARD OF DIRECTORS' COMMITTEES

To provide effective support in the management of the company, the Board of Directors has formed several committees that are directly answerable to the Board of Directors. These committees are formed for specific tasks that require extra attention to safeguard business continuity.

At this time, there are 8 (eight) committees under the Board of Directors with a brief overview of their main duties as follows.

No	Komite Direktur Board Of Directors' Committees	Ruang Tugas / Bahasan Scope / Topic
1.	Komite IPP dan Kerjasama Kemitraan IPP and Partner Cooperation Committee	Pembelian Tenaga Listrik dari IPP, Excess Power, Kemitraan dan Kerjasama Komersial lainnya Purchase of Electrical Power from IPPs, Excess Power, other Commercial Partnerships and Cooperation
2.	Komite Energi Primer Primary Energy Committee	Pengadaan Gas, Batubara, BBM, Uap Panas Bumi dan Air. Provision of Gas, Coal, Petroleum, Geothermal Energy and Water
3.	Komite Investsai dan Pendanaan Investment and Financing Committee	Proyek Pembangkit Baru, Pembangkit Existing, Repowering, Refurbishment dan Konversi. New Power Plants, Existing Power Plants, Repowering, Refurbishment and Conversion Projects.
4.	Komite Niaga Trade Committee	Mekanisme dan Aspek Komersial Transaksi Tenaga Listrik Khusus, Tarif Tenaga Listrik, Subsidi serta Aspek Komersial Lainnya Commercial Transaction Mechanisms and Aspects for Special Electrical Power, Electricity Tariffs, Subsidies and Other Commercial Aspects
5.	Komite SDM & Organisasi HR & Organization Committee	Sistem SDM, Remunerasi, Suksesi Manajerial Unit Bisnis dan AP/Afiliasi, Perubahan Organisasi, Pengembangan/Penyederhanaan Organisasi HR System, Remuneration, Management Succession Business Unit and AP / Affiliates, Organizational Change, Organizational Development / Streamlining
6.	Komite Anak Perusahaan dan Afiliasi Subsidiary and Affiliate Committee	Pembentukan AP, Akuisisi Perusahaan menjadi AP, Penyertaan atau Pelepasan Modal pada AP/Afiliasi, Penggabungan, Pemisahan, Peleburan dan Pembubarannya AP/Afiliasi, Pembentukan Yayasan, Pembebanan Biaya Perseroan yang bersifat tetap untuk Yayasan/Organisasi Perkumpulan Company Acquisition to become AP, Capital Investment or Divestment in AP / Affiliates, Mergers, Separation, Dissolution and Liquidation of AP / Affiliates, Foundation Establishment, Allocation of Fixed Company Expenses to Foundations / Group Organizations
7.	Komite Penghapusan dan Pelepasan Aset Asset Elimination and Disposal Committee	Penghapusan ATTB, PRR, Piutang Macet, Persediaan atau Material, Pelepasan dan Penghapusan Aktiva Tetap (kecuali Aktiva Beroperasi) dengan Umur Ekonomis s/d 5 tahun ATTB Elimination, PRR, Bad Debts, Inventory or Materials, Disposal and Elimination of Fixed Assets (except for Operating Assets) with an Economic Age of up to 5 years
8.	Komite Operasional Operational Committee	Sewa Pembangkit, Transmisi, Distribusi, Sistem Grid Code dan Sistem Operasional Tenaga Listrik Lainnya. Leasing Power Plants, Transmission, Distribution, Grid Code Systems and Other Electrical Power Operational Systems



MEKANISME PENYAMPAIAN PENDAPAT KEPADA DIREKSI

Kami percaya akan pentingnya keterlibatan pegawai dalam proses perencanaan pengembangan, pengambilan keputusan dan keberhasilan perencanaan pengembangan. Oleh sebab itu Kami menciptakan satu mekanisme yang memungkinkan pegawai dapat mengajukan usulan perbaikan, pendapat, maupun kritik membangun untuk perbaikan pola operasional maupun kesejahteraan kepada manajemen puncak melalui (i) Serikat Pekerja - PT PLN (Persero), (ii) acara bincang dengan Direksi, (iii) melalui email, (iv) online chat dengan Direksi.

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN POKOK TATA KELOLA PLN

Berikut adalah beberapa aturan kebijakan (soft-structure) yang telah selesai disusun, dikaji secara berkala dan diimplementasikan untuk menunjang tercapainya praktik terbaik penerapan tata kelola Perusahaan di PLN.

Pengelolaan Risiko [G4-14]

Sebagai bagian dari sistem pengawasan dan pengendalian internal, telah disusun dan ditetapkan kebijakan manajemen risiko dengan tujuan akhir meminimalisasi potensi kerugian yang mungkin terjadi. Untuk menjalankan pengelolaan risiko yang berkualitas Kami telah membentuk Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, sebagai upaya meningkatkan pengelolaan risiko secara terus-menerus, tepat dan komprehensif, disertai upaya mitigasi risiko yang telah diidentifikasi.

MECHANISM TO SUBMIT AN OPINION TO THE BOARD OF DIRECTORS

We believe in the importance of employee involvement in the process of development planning, decision making and the success of development plans. Therefore, We have created a mechanism that allows employees to propose improvements, submit opinions, make constructive criticism to improve operational patterns and welfare directly to the top management by (i) the PT PLN (Persero) Labor Union, (ii) meet the Directors meetings, (iii) by email, and (iv) online chat with the Directors.

PLN's GOVERNANCE POLICIES

Following are several policy regulations (soft structure) that have been completed, studied periodically and implemented to support the achievement of best practices in the implementation of good corporate governance in PLN.

Risk Management [G4-14]

As part of the supervisory and internal audit system, risk management policies have been prepared and established with the ultimate objective of minimizing the potential for loss. For high quality risk management, We formed a Risk Management and Compliance Division in our efforts to continually improve risk management in an accurate and comprehensive manner, as well as mitigating risks that had already been identified.

Kami juga telah merintis pelaksanaan audit berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas implementasi pengelolaan risiko, mendeteksi risiko, merancang mitigasi dan yang lebih penting membuka peluang pengembangan usaha dari upaya mitigasi risiko yang dijalankan

Sistem Pelaporan Pelanggaran)[G4-SO4]

Kami memiliki, mengembangkan dan menerapkan kebijakan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblower system*) sebagai bentuk komitmen PLN pada transparansi, akuntabilitas dan demi membangun kepercayaan bisnis dengan para mitra usaha dan pemangku kepentingan. Mekanisme ini juga merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi, suap dan praktik kecurangan lainnya guna meningkatkan kualitas penerapan *good corporate governance* di lingkungan PLN.

Kami berupaya melakukan perbaikan pada mekanisme sistem pelaporan pelanggaran secara berkesinambungan untuk memperkuat sistem deteksi dini dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Tujuan dari implementasi sistem pelaporan pelanggaran antara lain:

1. Menciptakan iklim kerja yang kondusif,
2. Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan tender,
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan,
4. Pencegahan terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial yang dapat merusak citra PLN.

Pelaporan pelanggaran dapat dilakukan melalui hot line, email, kotak pos khusus. Untuk selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Kami akan melakukan analisa jenis pelanggaran yang terjadi, dan mengambil tindakan sesuai tingkat pelanggaran dan bukti lanjutan yang diperoleh, termasuk mengajukan pelanggar yang terbukti untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dalam rangka mendorong keberanian pelapor untuk bertindak sebagai saksi, maka Kami menetapkan prosedur yang mampu menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan petugas investigasinya.

Pengawasan dan Pengendalian Internal

Kami selalu berupaya untuk memastikan agar PLN senantiasa menjalankan usahanya dengan menjunjung tinggi dan dilakukan berdasarkan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Untuk itu, Kami membentuk unit khusus yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal.

We have also initiated implementation of a risk-based audit to improve the quality of risk management implementation, risk detection, mitigation planning and, more importantly, provide an opportunity for business development in risk mitigation efforts undertaken.

Whistleblower System [G4-SO4]

We have developed and applied a whistleblower system as part of PLN's commitment to transparency, accountability and to develop the trust of our business partners and stakeholders in our business. This mechanism is part of our efforts to fight corruption, bribery and other fraudulent activities to improve the quality of good corporate governance implementation in PLN.

We strive to improve this whistleblower system mechanism continually to strengthen early detection and prevent the occurrence of acts of corruption, collusion and nepotism. The purpose of this whistleblower system includes:

1. Creating a positive work environment,
2. Transparency in conducting tenders,
3. Improving the quality of financial management,
4. Preventing occurrences that could cause financial or non-financial loss and damage PLN's reputation.

Reports of violations can be made by hotline, email, special mail box. Once a report has been submitted, We analyze the type of violation that has occurred and take action in accordance with the level of offense and further evidence obtained, including sending proven offenders for applicable due legal process.

To encourage people to have the courage to make such reports and act as witnesses, We have determined a procedure that enables the whistleblower's identify to remain anonymous, as well as that of the investigator.

Internal Oversight and Control

We always strive to ensure that PLN is conducting business by upholding and working based on the principles of accountability and transparency. To this end, We have formed a special unit that has the duty of internal oversight and control.

MARI LEBIH SERIUS BERANTAS KORUPSI LET'S BE MORE SERIOUS ABOUT FIGHTING CORRUPTION.

Cukup menarik menyimak sebuah siaran pers bertajuk "Corruption Perceptions Index 2014 Perhatian: Indonesia Harus Lebih Serius Memberantas Korupsi" yang diluncurkan dalam laman elektronik Transparency International Indonesia (TII) (tanggal 3/12 '2015). Dalam artikel tersebut, digarisbawahi bahwa Indonesia patut memberi porsi perhatian lebih besar pada usaha pemberantasan korupsi.

Korupsi adalah masalah terbesar bagi semua negara, sehingga penting artinya bagi masyarakat dunia untuk bertindak bersama-sama menghentikan korupsi agar kesejahteraan warga dunia tercapai dan perekonomian tumbuh merata bagi semua warga dunia. Untuk itulah setiap tahunnya Transparency International (TI) meluncurkan Corruption Perception Index (CPI). Sejak diluncurkan pada 1995, CPI digunakan oleh banyak negara sebagai referensi tentang situasi korupsi.

Dalam siaran pers tersebut disinyalir bahwa sepanjang 2014 lalu, secara global terdapat lima (5) negara yang memiliki skor CPI tertinggi. Negara-negara tersebut adalah Denmark (92), Selandia Baru (91), Finlandia (89), Swedia (87) dan Swiss (86). Sedangkan lima (5) negara yang memiliki skor terendah adalah Somalia (8), Korea Utara (8), Sudan (11), Afghanistan (12) dan Sudan Selatan (15).

DIMANA POSISI INDONESIA ..?

Berdasarkan hasil kajian yang disajikan pada tabel berikut, maka Indonesia patut sedikit bernafas lega, meski masih jauh dari prestasi membanggakan. Yang mungkin cukup menghibur, adalah adanya peningkatan skor sebanyak 2 poin, yaitu dari 32 pada 2013 menjadi 34 pada 2014. Selain itu, peringkat 107 ini pun telah terdongkrak 7 tingkat ketimbang setahun sebelumnya. Kenaikan skor dan peringkat CPI 2014 ini patut diapresiasi sebagai kerja bersama antara pemerintah, masyarakat sipil dan pebisnis dalam upayanya mencegah dan memberantas korupsi.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari gerak langkah Pemerintah, Kami sejatinya telah memberikan kontribusi tersendiri terkait upaya pengentasan korupsi di Tanah Air. Sejak beberapa tahun lalu, melalui Program PLN Bersih, Kami berupaya serius memangkas potensi terjadinya korupsi di perusahaan setrum ini. Terlebih, langkah positif PLN secara bertahap mulai diimplementasikan secara disiplin oleh anak-anak perusahaan.

Berbagai langkah nyata yang dilakukan di PLN Grup secara pasti telah membuka lembaran baru kinerja bisnis ketenagalistrikan Indonesia yang lebih bersih, transparan dan akuntabel. Melalui ragam upaya, Kami terus bekerja menerangi Indonesia dengan cara yang terang benderang (baca : transparan), sekaligus menghapus potensi korupsi yang saat ini masih menjadi momok yang menakutkan. Hal ini patut terus dilestarikan dan dikembangkan agar bertumbuh berkelanjutan. Ini tugas kita bersama.

It is quite interesting to read the press release entitled "Corruption Perception Index 2014. Attention: Indonesia Must Be More Serious About Combating Corruption", which was presented on the electronic pages of Transparency International Indonesia (TII) (dated 3 December 2015). In that article, it underlined that Indonesia should give greater consideration to efforts to eradicate corruption.

Corruption is the biggest problem for every country, so it is important for the global community to act together to end corruption so that welfare for the world's citizens is achieved and economic growth is equitable for all citizens of the world. For this reason, Transparency International (TI) annually presents its Corruption Perception Index (CPI). Since its launch in 1995, the CPI has been used by many countries as a reference for the state of corruption.

In this press release it signaled that during 2014, the five (5) countries with the highest CPI score were Denmark (92), New Zealand (91), Finland (89), Sweden (87) and Switzerland (86). Meanwhile, the five (5) countries with the lowest score were Somalia (8), North Korea (8), Sudan (11), Afghanistan (12) and South Sudan (15).

WHERE WAS INDONESIA PLACED..?

Based on the results of the study, which are presented in the following table, Indonesia can take a small sigh of relief, although it is still far from a proud achievement. What may be quite encouraging is an increase in its score of 2 points, from 32 in 2013 to 34 in 2014. In addition, the ranking of 107 is also 7 levels higher than in the previous year. The increase in the 2014 CPI score and rank should be appreciated as being due to the work that has taken place jointly between governments, civil society and businesses in an effort to prevent and combat corruption.

As an integral part of the government, we have actually made our own contribution related to the reduction of corruption in the country. For the last few years, through the Clean PLN Program, we have been making serious efforts to remove the potential for corruption in the company's environment. Moreover, PLN's positive steps have gradually begun to be implemented in a disciplined manner by its subsidiaries.

Various concrete steps taken with certainty in the PLN Group have opened a new chapter in Indonesia's electricity business for a cleaner, more transparent and accountable performance. Through a variety of ways, we continue to work to illuminate Indonesia brightly (read: transparently), as well as removing the potential for corruption, which is still a frightening specter. This movement should continue to be conserved and developed for sustainable growth. This is our joint duty.

Melalui unit Satuan Pengawasan Intern (SPI), manajemen PLN memberikan jaminan atas efektifitas dan efisiensi operasi, ketataan terhadap aturan dan perundang-undangan serta ketepatan dan keandalan pelaporan keuangan. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Satuan Pengawasan Intern mengikuti Pedoman Pengawasan Intern sesuai Keputusan Direksi PLN No.030.K/ DIR/2005 tanggal 2 Februari 2005. Di tahun 2015, SPI PLN didukung oleh lebih dari 227 personil auditor internal dan tenaga ahli.

Personil auditor internal PLN senantiasa meningkatkan kompetensi dan kualitas pelaksanaan auditnya melalui keikutsertaan pada berbagai program pendidikan baik pendidikan sertifikasi profesi auditor internal seperti QIA (Qualified Internal Auditor), PIA (Professional Internal Auditor) dan CIA (Certified Internal Auditor) maupun pendidikan non-sertifikasi. Selain itu, Kami juga menyediakan program pendidikan dan latihan bidang operasional sesuai perkembangan usaha saat ini yang sangat memperhatikan pencegahan tindakan-tindakan yang tergolong perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai komitmen dalam memerangi korupsi, seluruh auditor SPI PLN secara khusus telah dibekali dengan pendidikan khusus mengenai tindakan korupsi dan upaya pencegahannya. Selain personalia SPI, hampir seluruh personalia pegawai di bidang keuangan telah Kami bekali pendidikan mengenai pencegahan korupsi, sehingga setidaknya sekitar 0,001% pegawai PLN telah mendapatkan pelatihan pencegahan tindak korupsi, fraud dan pelanggaran sejenis lain.

Pada tahun 2015, SPI telah melaksanakan Pemeriksaan Operasional terhadap 48 Unit induk, 112 unit Pelaksana, 2 Kantor Pusat dan 2 Anak perusahaan dengan jumlah temuan sebanyak 1.030, dimana 666 diantaranya telah ditindak lanjuti dan diselesaikan.

Kami menerapkan sanksi tegas berupa pemberhentian dari status pegawai disertai proses hukum atas setiap tindakan dari temuan audit tersebut yang terindikasi kuat berupa perbuatan korupsi. [G4-SO3]

Mencegah Benturan Kepentingan [G4-14]

Kami menetapkan aturan tegas, yakni seluruh pihak internal maupun eksternal yang memiliki peluang tersangkut dalam suatu transaksi dengan potensi terjadi benturan kepentingan, dilarang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang terkait dengan transaksi tersebut. Kami menerapkan aturan tersebut semata-mata untuk menghindarkan terjadinya subjektifitas dalam pengambilan keputusan yang pada akhirnya akan merugikan Perseroan.

Through the Internal Oversight Unit, the PLN management can ensure effective and efficient operations, compliance with regulations and legislation, as well as compliance and reliability in financial reporting. To carry out its responsibilities, the Internal Oversight Unit follows the Internal Oversight Guidelines in accordance with PLN Board of Directors' Decision Num.030.K/ DIR/2005 dated 2 February 2005. In 2015, PLN's Internal Oversight Unit was supported by 227 internal auditors and experts.

PLN's internal auditors are continually improving their competency and the quality of their audits by participating in various education programs, both for professional internal auditor certification, such as QIA (Qualified Internal Auditor), PIA (Professional Internal Auditor) and CIA (Certified Internal Auditor), as well as non-certified training. In addition, We also provide education and training in operations according to current business developments, which pay great attention to preventing acts that can be classified as corruption, collusion and nepotism.

As a commitment to fighting corruption, all PLN's auditors undertake special training in corruption and how to prevent it. In addition to the Internal Oversight personnel, almost all employees involved in finance also undertake education in preventing corruption, thus no less than approximately 0.001% of PLN's employees have taken special education in preventing acts of corruption, fraud and other similar offenses.

In 2015, the Internal Oversight Unit conducted Operational Examinations of 48 main units, 112 implementation units, 2 head offices and 2 subsidiaries, with a total of 1,030 findings, of which 666 have been followed up and completed.

We implemented strict sanctions in the form of dismissal from employment alongside legal process for actions that had strong indications of corruption uncovered in the audits. [G4-SO3]

Preventing Conflict of Interest [G4-14]

We set strict rules, including that all internal and external parties with the opportunity to become involved in a transaction with the potential for conflict of interest are prohibited from being involved in the decision-making process for that transaction. We apply this rule solely to prevent subjectivity in decision making that will ultimately harm the Company.

Kami melaporkan bahwa sepanjang tahun 2015 tidak ditemukan indikasi adanya benturan kepentingan pada seluruh transaksi material maupun non-material yang dilaksanakan.

Larangan Pemberian Dan Penerimaan Hadiah, Donasi Dan Keterlibatan Politik

Larangan pemberian maupun penerimaan hadiah dan donasi baik oleh pihak dalam maupun luar lingkungan Perusahaan diberlakukan dengan tujuan untuk menegakkan independensi pengambilan keputusan maupun menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan dan atau turunnya kepercayaan publik terhadap integritas kami. Kami juga melarang pemberian donasi untuk partai politik termasuk diantaranya penggunaan dana atau aset Perseroan untuk kepentingan partai politik atau calon dari partai politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Negara BUMN.

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

[G4-14], [G4-EN32][G4-LA14][G4-HR10]

Dalam hal pengadaan barang/jasa di PLN, Kami menerapkan kebijakan pengadaan yang transparan dan akuntabel, memenuhi prinsip-prinsip efektif dan efisien, terbuka, bersaing adil dan tidak diskriminatif. Proses pengadaan barang dan jasa diupayakan selalu melalui persaingan yang sehat sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya korupsi, fraud maupun tindakan penyalah gunaan kewenangan lainnya.

Selain prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut, dalam proses seleksi supplier, Kami turut menilai komitmen setiap calon supplier terhadap pemenuhan aturan sesuai dengan kriteria ketenagakerjaan, hak asasi manusia, kinerja lingkungan serta kesehatan dan keselamatan kerja. Setiap supplier diharuskan mematuhi kriteria ini.

Kami juga melakukan penilaian atas kinerja pemasok terkait pemberian dukungan kepada PLN dalam mencapai visi dan misinya. Melalui proses penilaian kinerja tersebut, diharapkan terjalinnya hubungan kerja sama PLN dengan para pemasok yang lebih baik, berkelanjutan dan membawa benefit optimal bagi Perseroan.

MENDUKUNG ASOSIASI INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN [G4-16]

PLN adalah penyelenggara usaha ketenagalistrikan yang beroperasi dalam skala luas, dan oleh karenanya tidak tergabung dalam satu asosiasi industri sejenis. Meskipun demikian, Kami turut aktif dalam menjalin komunikasi aktif dua arah dengan berbagai asosiasi industri pendukung pembangunan ketenagalistrikan seperti AKLI, AKLINA, AKLINDO, AKKLINDO, AKLINAS, PPILN, dan KONSUIL.

We can report that during 2015, no indication of conflict of interest was found in any material or non-material transaction that took place.

Prohibition of Giving and Receiving Gifts, Donations and Political Involvement

The prohibition of giving and receiving gifts and donations by parties within and outside the PLN environment is enforced with the objective of upholding the independence of the decision making process and avoiding potential conflict of interest and/or losing public trust in our integrity. We also prohibit donations to political parties, including direct or indirect funding or use of PLN's assets for the interests of political parties or candidates of political parties. This is in line with the regulations of the Minister of State Owned Enterprises.

Goods / Services Procurement Policy

[G4-14], [G4-EN32][G4-LA14][G4-HR10]

We apply the principles of transparency and accountability for the procurement of goods and services at PLN, fulfilling effective, efficient, open, fair, competitive and nondiscriminatory principles. We always strive to procure goods and services through healthy competition in accordance with all relevant laws and regulations. We hope that this minimizes the potential for corruption, fraud and other misuses of authority.

Further to the principles of transparency and accountability, in the supplier selection process, we assess the commitment of each potential supplier to fulfilling regulations related to employment, human rights, environmental performance and occupational health and safety. All our suppliers must comply with these criteria.

We also assess the performance of our suppliers in relation to the support given to PLN in achieving its vision and mission. Through this performance assessment, we hope to have a better working relationship between PLN and its suppliers that is sustainable and brings the optimum benefit to the Company.

SUPPORTING ELECTRICAL POWER INDUSTRY ASSOCIATIONS [G4-16]

PLN is the only electricity company that operates on a large scale, and therefore we do not belong to any similar industry associations. Nevertheless, we are actively involved in two-way communication with various industry associations supporting the development of electricity, such as AKLI, AKLINA, AKLINDO, AKKLINDO, AKLINAS, PPILN and KONSUIL.

Kami senantiasa berupaya menghadiri berbagai pertemuan rutin dengan asosiasi tersebut untuk membahas berbagai hal, termasuk sinergi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pelaksanaan kegiatan usaha ketenagalistrikan, batas dan wewenang PLN dan asosiasi serta kerjasama di masing-masing wilayah kerja.

Melalui komunikasi aktif ini, Kami berharap dapat menjalin sinergi positif antara PLN dengan asosiasi kelistrikan di seluruh Indonesia untuk bersama-sama memberikan pelayanan prima kepada seluruh pelanggan.

KODE ETIK BERPERILAKU [G4-56]

Pada bulan Oktober 2005, PLN menerbitkan *Code of Conduct* sebagai bentuk implementasi peningkatan dan penyempurnaan penerapan GCG serta kode etik yang dianut oleh seluruh pegawai di lingkungan Perseroan.

Code of Conduct berisi kebiasaan baik dan tata pergaulan profesional di lingkungan PLN, serta mengatur mengenai aspek kepemimpinan PLN, keanggotaan yang bertanggung jawab, hubungan profesional antar anggota dan hubungan dengan pihak eksternal.

Secara paralel, Buku Pedoman Perilaku PLN secara terus-menerus akan disempurnakan mengikuti perkembangan dan perubahan lingkungan bisnis Perseroan. Implementasi berkesinambungan dari Pedoman Perilaku ini adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG.

BUDAYA PERUSAHAAN [G4-56]

Rumusan Budaya Perusahaan PT PLN (Persero) diresmikan pada tanggal 27 Oktober 2002 bertepatan dengan Hari Listrik Nasional yang ke-57. Warga PLN meyakini bahwa perwujudan Falsafah, Visi dan Misi Perusahaan, harus dilakukan secara bersama-sama dengan berlandaskan Budaya Perusahaan yang mengandung nilai-nilai Saling Percaya, Integritas, Peduli, Pembelajar.

Implementasi Budaya Perusahaan di seluruh jajaran Perusahaan dilaksanakan melalui sosialisasi ke seluruh Unit PLN oleh Tim Sosialisasi PLN Kantor Pusat. Pelaksanaan sosialisasi Budaya Perusahaan dilakukan dengan cara presentasi, diskusi tanya-jawab dan diskusi kelompok. Penanaman nilai-nilai Budaya Perusahaan juga diberikan kepada pegawai baru yang masih berada dalam masa orientasi. Hal ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas penerapan GCG dari sisi terciptanya integritas seluruh warga PLN.

We are constantly working to attend regular meetings with these associations to discuss various matters, including the synergies of Good Corporate Governance (GCG) in the implementation of the electricity business, the limits and authority of PLN and associations and cooperation in their respective working areas.

Through this active communication, we hope to establish positive synergies between PLN and electricity associations throughout Indonesia to jointly provide excellent service to all customers.

CODE OF ETHICAL BEHAVIOR [G4-56]

In October 2005, PLN issued its *Code of Conduct* as part of its efforts to improve and refine implementation of GCG and the ethical code upheld by all employees within the Company's environment.

The *Code of Conduct* contains references on good habits and professional conduct within PLN, as well as regulating aspects of PLN leadership, responsible membership, professional relations between members and relations with external parties.

In parallel, the PLN *Code of Behavior* is continually improved and refined to keep up with developments and changes in the company's business environment. Ongoing implementation of this *Code of Behavior* is one of our efforts to improve the quality of GCG implementation.

CORPORATE CULTURE [G4-56]

The PT PLN (Persero) Corporate Culture formula was inaugurated on 27 October 2002, to fall exactly on the 57th National Electricity Day. PLN's personnel believe that the embodiment of the Company's Philosophy, Vision and Mission must be carried out concurrently with the Corporate Culture based on the values of Mutual Trust, Integrity, Care and Learning.

Implementing Corporate Culture across the entire Company is done by the dissemination of the Corporate Culture to all PLN units by a designated team from PLN headquarters. Dissemination has been carried out through presentations, Q&A discussions and group discussions. New employees are also imbued with the Corporate Culture during their orientation period. This is part of efforts to improve the quality of GCG implementation in PLN by creating integrity in all PLN personnel.

AGAR “LURUS” TERUS STAYING ON TRACK

Sebagai bagian dari upaya menegakkan aturan dan menjaga seluruh jajaran pelaksana PLN meningkatkan kualitas kerjasama dengan para penegak hukum, salah satunya dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Melalui kesepakatan kerja sama ini, seluruh kebijakan PLN akan dikonsultasikan dan disupervisi oleh Kejaksaan Agung agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

PLN merupakan satu-satunya BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang ditugasi Pemerintah untuk menyediakan tenaga listrik bagi masyarakat di seluruh Indonesia secara terus menerus dengan jumlah yang cukup serta mutu dan keandalan yang baik.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik tersebut, PLN mengemban amanah yang sangat besar dari Pemerintah berupa program pembangunan ketenagalistrikan sebesar 35.000 MW untuk periode tahun 2015 – 2019. Satu tugas besar yang harus didukung oleh segenap elemen bangsa.

Agar realisasi pembangunan seluruh pembangkit dalam skema 35.000 MW itu berjalan lancar dan berada dalam koridor hukum, PLN menandatangani MOU Kerjasama pendampingan pemberian pertimbangan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan kewenangan Kejaksaan Agung yang memiliki kapasitas untuk memberikan bantuan dan pertimbangan dalam bidang hukum, tata usaha dan perdata.

Melalui kerjasama tersebut, seluruh jajaran pelaksana meyakini, PLN akan dapat terus berjalan “Lurus” dalam merealisasikan seluruh program pembangunan ketenagalistrikan di tanah air.



Part of the efforts to enforce the rules and ensure all managers at PLN improve the quality of cooperation with law enforcement officials, one of which is the Attorney General of the Republic of Indonesia. Through this cooperation agreement, the Attorney General is consulted and supervises all PLN's policies in order for the company to remain within applicable laws.

PLN is the only state-owned limited liability company that is assigned by the Government to provide sufficient electrical power of high standard and reliability to the whole of Indonesian society on an ongoing basis.

To meet the demand for electrical power, PLN has undertaken an immense duty from the Government in the form of the 35,000 MW electricity development program for the period 2015-2019. This is a major task that must be supported by every element in the nation.

In order for the construction of all the power plants in the 35,000 MW scheme to be achieved smoothly and within the law, PLN has signed a Cooperation MOU for legal advisory assistance regarding the problems it faces. This is in accordance with the authority of the Attorney General, who has the capacity to provide assistance and consideration on legal, administrative and civil matters.

Through this cooperation, all of PLN's management believe that PLN can stay on track to bring this whole electrical power development program to fruition in Indonesia.

REFERENSI INDEKS GRI G4 CORE & INDEKS EUSS [G4-32]

GRI G4 REFERENCE INDEX CORE & EUSS INDEX [G4-32]

Aspek Material Material Aspects	Indeks yang Dilaporkan Reported Index	Keterangan Description	Halaman Page
------------------------------------	--	------------------------	--------------

PENGUNGKAPAN STANDAR UMUM GENERAL STANDARD DISCLOSURE

Strategi dan Analisis Strategy and Analysis	G4-1	Sambutan Direktur Utama The Board of Director Report	34-35
	G4-2	Dampak, Risiko dan Peluang Pengembangan Usaha	34-35
Profil Organisasi Organizational Profile	G4-3	Nama Organisasi Organization Name	66
	G4-4	Merek, Produk dan Jasa Utama Primary Brands, Products and Services	66
	G4-5	Kantor Pusat Organisasi Organization Headquarters	66
	G4-6	Wilayah Operasional Operational Regions	76
	G4-7	Kepemilikan dan Badan Hukum Ownership and Legal Form	66
	G4-8	Pasar yang dilayani, Sektor yang dilayani, Jenis Konsumen Markets Served, Sectors Served, Customer Types	66
	G4-9	Skala Organisasi Organization Scale	66
	G4-10	Profil Para Pegawai Profile of Employees	172
	G4-11	Perjanjian Kerja Sama Collective Bargaining Agreements	166
	G4-12	Rantai Pemasok Supply Chain	104
	G4-13	Perubahan Selama Periode Pelaporan Changes During The Reporting Period	66
	G4-14	Prinsip Kehati-hatian dan Manajemen Risiko Precautionary Approached and Risk Management	191, 199, 202, 203
	G4-15	Daftar Piagam Eksternal yang didukung dan ditujukan List of External Chartered Supported and Addressed	20, 140, 191
	G4-16	Keanggotaan dalam Asosiasi Memberships in Associations	203
Identifikasi Aspek Material dan Batasan Material Aspect Identification and Boundary	G4-17	Daftar Seluruh Badan Organisasi dan Skala Pelaporan List of all Organizational Entities and Reporting Scope	49, 81
	G4-18	Isi Laporan yang terdefinisi dan Aspek Batasan Defining Report Content and Boundary Aspect	48, 49, 50, 51, 61
	G4-19	Daftar Aspek Material yang Teridentifikasi List of Material Aspect Identified	51, 63
	G4-20	Batasan Aspek Internal untuk Setiap Aspek Material Internal Aspect Boundary for Each Material Aspects	51
	G4-21	Batasan Aspek Eksternal untuk Setiap Aspek Material External Aspect Boundary for Each Material Aspects	50, 51
	G4-22	Pernyataan Ulang dari Laporan Tahun Sebelumnya Restatement from Previous Reports	48
	G4-23	Perubahan yang Signifikan dari Laporan Tahun Sebelumnya Significant Changed from Previous Reporting	48

Aspek Material Material Aspects	Indeks yang Dilaporkan Reported Index	Keterangan Description	Halaman Page
Keterlibatan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement	G4-24	Daftar Kelompok Pemangku Kepentingan List of Stakeholder Groups	54, 58
	G4-25	Dasar yang digunakan dalam mengidentifikasi dan memilih Pemangku Kepentingan Basis for Identification and Selection of Stakeholder	54, 58
	G4-26	Pendekatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement Approach	54, 58
	G4-27	Perhatian Pemangku Kepentingan Atau Topik Utama Stakeholder Concern or Key Topics	54, 58
Profil Laporan Report Profile	G4-28	Periode Pelaporan Reporting Period	48, 49
	G4-29	Tanggal dari Laporan Tahun Sebelumnya Yang Paling Baru Date of Most Recent Previous Report	48
	G4-30	Siklus Pelaporan Reporting Cycle	48
	G4-31	Alamat Kontak Terkait Isi Laporan Contact Point Regarding Report Content	51
	G4-32	Indeks Inti GRI GRI Core Index	48, 206
	G4-33	Eksternal Assurance External Assurance	49
Tata Kelola Governance	G4-34	Struktur Tata Kelola Organisasi Governance Structure of the Organization	193, 194
Etika dan Integritas Ethics and Integrity	G4-56	Norma Perilaku, Standar, Prinsip dan Nilai-Nilai Organisasi Organization's Values, Principles, Standard, Norms of Behavior	207
EKONOMI ECONOMIC			
Kinerja Perekonomian Economic Performance	G4-DMA	Pengungkapan Pendekatan Manajemen untuk Dampak Ekonomi Langsung Disclosure of management approach for direct economic impact	90-92
	G4-EC1	Perolehan dan Distribusi Nilai Ekonomi Langsung Direct economic value generated and distributed	91
	G4-EC3	Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti Coverage of the organization's defined benefit plan obligations	171
Kehadiran Pasar Market Presence	G4-EC5	Rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum setempat Ratios of standard entry level wage compared to local minimum wage	169
Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Impact	G4-DMA	Pengungkapan Pendekatan Manajemen untuk Dampak Ekonomi Tidak Langsung Disclosure of management approach for indirect economic impact	124-127
	G4-EC7	Pembangunan dan Dampak dari Investasi Infrastruktur serta Jasa yang Didukung Development and impact of infrastructure investment and service supported	126
	G4-EC8	Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect economic impact	126

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW – for Sustainable Development

Aspek Material Material Aspects	Indeks yang Dilaporkan Reported Index	Keterangan Description	Halaman Page
LINGKUNGAN ENVIRONMENT			
Energi Energy	G4-DMA	Pengungkapan Pendekatan Manajemen untuk Pengelolaan Energi Disclosure of management approach for energy management	136-142
	G4-EN3	Pemakaian Energi di dalam Organisasi Energy consumption within the organization	143
	G4-EN6	Pengurangan konsumsi energi	143
Emisi Emissions	G4-DMA	Pengungkapan Pendekatan Manajemen untuk Pengelolaan Energi Disclosure of management approach for energy management	136-145
	G4-EN15	Emisi Gas Rumah Kaca Langsung Direct green house gas emission	145
	G4-EN16	Emisi GRK tidak langsung	145
	G4-EN17	Emisi GRK tak langsung lainnya	145
Keseluruhan Overall	G4-DMA	Pengungkapan Pendekatan Manajemen untuk Pengelolaan Energi Disclosure of management approach for energy management	150-155
	G4-EN31	Jumlah Pengeluaran untuk Proteksi dan Investasi Lingkungan Total environmental protection expenditures or investment	155
Penilaian Lingkungan Pemasok Supplier Environmental Assessment	G4-DMA	Pengungkapan Pendekatan Manajemen untuk Pengelolaan Energi Disclosure of management approach for energy management	203
	G4-EN32	Pemasok yang disaring dengan kriteria lingkungan Suppliers that were screened with environmental criteria	203
PRAKTEK TENAGA KERJA DAN PEKERJAAN YANG LAYAK LABOR PRACTICE AND DECENT WORK			
Ketenagakerjaan Employment	G4-DMA	Pengungkapan Pendekatan Manajemen untuk Pengelolaan Energi Disclosure of management approach for energy management	154-163
	G4-LA1	Jumlah dan tingkat perputaran karyawan yang dipekerjakan Total number and rates of new employee hires and employee turnover	163
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Health & Safety	G4-DMA	Pengungkapan Pendekatan Manajemen untuk Pengelolaan Energi Disclosure of management approach for energy management	178-179
	G4-LA5	Panitia Resmi Kesehatan dan Keselamatan Antara Manajemen dan Pekerja Formal joint management-worker health and safety committees	179
	G4-LA6	Jenis dan tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang dan ketidakhadiran dan jumlah kematian karena pekerjaan Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days and absenteeism and total number of work related fatalities	181
	G4-LA7	Karyawan dengan risiko tinggi akan penyakit terkait dengan pekerjaannya Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation	184
	G4-LA8	Aspek Kesehatan dan Keselamatan yang tercakup dalam perjanjian dengan serikat karyawan Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions	180

Aspek Material Material Aspects	Indeks yang Dilaporkan Reported Index	Keterangan Description	Halaman Page
Pelatihan & Pendidikan Training & Education	G4-DMA	Pengungkapan Pendekatan Manajemen untuk Pengelolaan Energi Disclosure of management approach for energy management	154-163
	G4-LA9	Rata-rata Jam Pelatihan Tiap Tahun Tiap Karyawan Average hours of training per year per employee	164, 165
Penilaian Praktek Kerja Pemasok Supplier Labor Practice Assessment	G4-DMA	Pengungkapan Pendekatan Manajemen untuk Pengelolaan Energi Disclosure of management approach for energy management	179-180
	G4-LA14	Pemasok Baru Disaring Dengan Kriteria Praktek Kerja New Suppliers Screened Using Labor Practice Criteria	180, 203
HAK ASASI MANUSIA HUMAN RIGHTS			
Diskriminasi Discrimination	G4-DMA	Pengungkapan Pendekatan Manajemen untuk Pengelolaan Energi Disclosure of management approach for energy management	167-168
	G4-HR3	Jumlah Kasus Diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken	168
Penilaian Hak Asasi Pemasok Supplier Human Rights Assessment	G4-DMA	Pengungkapan Pendekatan Manajemen untuk Pengelolaan Energi Disclosure of management approach for energy management	202-203
	G4-HR10	Pemasok baru disaring dengan kriteria hak asasi manusia New suppliers screened using human rights criteria	203
TANGGUNG JAWAB PRODUK PRODUCT RESPONSIBILITY			
Kesehatan & Keselamatan Pelanggan Customer Health and Safety	G4-DMA	Pengungkapan Pendekatan Manajemen untuk Pengelolaan Energi Disclosure of management approach for energy management	107
	G4-PR1	Kategori Produk dan Jasa yang Signifikan terhadap Dampak Kesehatan dan Keselamatan yang dinilai untuk peningkatan Significant product and service categories for which health and safety impacts are assessed for improvement	107
Produk & Label Product & Service Labeling	G4-DMA	Pengungkapan Pendekatan Manajemen untuk Pengelolaan Energi Disclosure of management approach for energy management	114
	G4-PR5	Pengukuran Kepuasan Pelanggan dan Survei Customer Satisfaction Measurement and Survey	114-115
MASYARAKAT SOCIETY			
Masyarakat Lokal Local Community	G4-DMA	Pengungkapan Pendekatan Manajemen untuk Masyarakat Lokal Disclosure of management approach for local community	121-126
	G4-SO1	Persentase Kegiatan Keterlibatan Masyarakat Lokal, Penilaian Dampak, dan Program Pengembangan Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and development programs.	126

35.000 MW UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

35.000 MW – for Sustainable Development

Aspek Material Material Aspects	Indeks yang Dilaporkan Reported Index	Keterangan Description	Halaman Page
	G4-DMA	Pengungkapan Pendekatan Manajemen untuk Masyarakat Lokal Disclosure of management approach for local community	200-202
Anti Korupsi Anti-Corruption	G4-SO3	Penilaian terhadap Risiko Korupsi dan Risiko Lain dalam Organisasi Assessment Toward Risk of Corruption and Other Identified Risk in the Organization	202
	G4-SO4	Penyuluhan dan Pelatihan dalam Prosedur dan Kebijakan Anti Korupsi Communication and Training on Anti-Corruption Policies and Procedures	189, 191, 200
INDIKATOR SPESIFIK SEKTOR PENGGUNAAN LISTRIK ELECTRICAL UTILITIES SECTOR SPECIFIC INDICATOR			
Profil Organisasi Spesifik Sektor Utilitas Listrik Electric Utility Sector-Specific Organizational Profile	EU1	Kapasitas Terpasang, diuraikan menurut sumber energi Installed capacity, broken down by primary energy source	104
	EU3	Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, Industri, Lembaga dan Kawasan Komersial Number of residential, industrial, institutional and commercial customer accounts	107
	EU4	Panjang Jaringan Transmisi dan distribusi diatas dan dibawah tanah Length of above and underground transmission and distribution lines	104
Ketersediaan dan Keandalan Availability and Reliability	EU6	Pendekatan Manajemen untuk memastikan ketersediaan dan keandalan listrik dalam jangka pendek maupun panjang Management approach to ensure short and long-term electricity availability and reliability	102, 103, 104, 107
	EU10	Rencana Pembangunan berdasarkan Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik Dalam Jangka Panjang Planned capacity against projected electricity demand over the long term	143
Manajemen Demand-Side Demand-Side Management	EU7	Program demand-side manajemen termasuk program pelaksanaan pemasangan listrik untuk area perumahan, komersial, lembaga dan kawasan industri Demand-side management programs including residential, commercial, institution and industrial programs	109, 110, 111, 113, 114
	EU8	Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menjamin keandalan penyaluran listrik dan mendukung pembangunan keberlanjutan, melingkupi kegiatan dan biaya Research and development activity and expenditure aimed at providing reliable electricity and promoting sustainable development	118, 121
Rencana Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat Disaster/Emergency Planning and Response	EU21	Ukuran perencanaan wajib, rencana penanggulangan bencana/pengelolaan tanggap darurat, pelatihan dan rencana rehabilitasi/restorasi Contingency planning measures, disaster/emergency management plan and training programs, and recovery/restoration plans	107
Akses Access	EU23	Program-program, termasuk kerjasama dengan Pemerintah untuk meningkatkan atau memelihara akses terhadap listrik dan layanan kepada pelanggan Programs, including those in partnership with government, to improve or maintain access to electricity and customer support service	111, 113, 114, 121
	EU28	Frekuensi Pemadaman Listrik Power outage frequency	108
	EU29	Durasi Rata-Rata Pemadaman Listrik Average power outage duration	108

Lembar Tanggapan atas Laporan Keberlanjutan PLN 2015

Response Sheet on PLN Sustainability Report 2015

Laporan Keberlanjutan PLN 2015

Terimakasih telah membaca Laporan Keberlanjutan PLN 2015. Bagi kami penyempurnaan tanpa henti adalah keharusan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi pemangku kepentingan PLN. Untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan PLN secara keseluruhan kami mengharapkan kritik dan saran atas Laporan ini.

PLN Sustainability Report 2015

Thank you for reading PLN Sustainability Report 2015. For PLN, continuous improvement is essential to be able to give the best to our stakeholders. To improve the overall sustainability performance of PLN we expect criticism and suggestions on this report.

No	Area	Penilaian Anda Your Comment
1.	Informasi yang disajikan dalam Laporan ini telah sesuai dengan harapan Anda. The information presented in the report meets your expectations.	
2.	Data yang disajikan telah transparan, dapat dipercaya, dan berimbang. The data presented is transparent, trustworthy and fair.	
3.	Laporan ini dapat dibaca dengan nyaman, gaya bahasa yang sesuai serta jelas. The report can be read comfortably, with appropriate language style and clear.	
4.	Layout, tata warna, tampilan, dan gambar dalam laporan ini menarik. Layout, color scheme, appearance and pictures in the report are attractive.	
5.	Informasi yang anda inginkan untuk diperdalam adalah. The information that you would like to be discussed more deeply is.	
6.	Saran lain yang anda ingin sampaikan terhadap Laporan Keberlanjutan PLN. Other suggestions that you would like to convey for the improvement of BNI's Sustainability Report	

Profil Pembaca Reader's Profile

Jenis Kelamin Gender	Umur Age	Pendidikan terakhir Highest Education	Pekerjaan Occupation
----------------------	----------	---------------------------------------	----------------------

Nama Institusi Name of Institution	Bidang Usaha/Organisasi Field of Work/ Organization	Anda ingin mendapat Laporan mendatang? Do you want to receive next year's report?	Medium yang dipilih Preferred medium
---------------------------------------	---	--	---

SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY
PT PLN (Persero)
Tel. +62 21 725 1234 ext 4000
Fax. +62 21 722 2328
Email: pln123@pln.co.id
Jl. Trunojoyo Blok M-I / 135
Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia



PT PLN (Persero)
Electricity for a Better Life

2015

LAPORAN KEBERLANJUTAN

Sustainability Report

PT PLN (PERSERO)

Jl. Trunojoyo Blok M I No.135

Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia

Tel. (62 21) 7251234, 7250550, 7261122

Fax. (62 21) 7221330

Website: www.pln.co.id